Kementerian PPN/
Bappenas

2019

PEMBANGUNAN DAERAH
DALAM ANGKA

MALUKU

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

(B A P P E N A S)

KATA PENGANTAR

Buku Profil Pembangunan Daerah Dalam Angka (PDDA) 2019 merupakan salah satu materi publikasi yang disusun oleh Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Deputi Bidang Pengembangan Regional. Penyusunan Buku PDDA ini ditujukan untuk memberikan gambaran kondisi dan perkembangan hasil pembangunan antardaerah dalam unit provinsi serta keberbandingannya secara nasional dan per wilayah/ pulau. Lingkup wilayah/ pulau tersebut meliputi Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Buku PDDA 2019 ini menyajikan data dan informasi kondisi terakhir dan perkembangannya dalam periode 5 tahun terakhir dari Indikator-indikator pembangunan yang meliputi: (i) 5 (lima) Indikator Utama Pembangunan yang meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Rasio, (ii) Kependudukan dan Ketenagakerjaan, (iii) Ekonomi Wilayah dan Keuangan Daerah, (iv) Infrastruktur Wilayah, serta (v) Pengembangan Wilayah. Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, keberbandingan dari 5 Indikator Utama Pembangunan disajikan pada lingkup nasional, sedangkan untuk indikator pembangunan lainnya yang memberikan gambaran lebih terperinci disajikan pada lingkup per wilayah/pulau.

Uraian dari setiap pembahasan dalam publikasi ini lebih menekankan terhadap metode penyajian informasi yang mudah dipahami, sehingga pembaca akan dimudahkan dalam memahami gambaran capaian dari hasil pembangunan setiap provinsi, serta keberbandingannya dengan provinsi lainnya. Gambaran tersebut tentunya menyesuaikan dengan ketersediaan data dan Informasi yang digunakan, yaitu data-data yang bersumber dari Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), dan publikasi dari Kementerian dan lembaga relevan.

Kami mengucapkan terimakasih atas segala dukungan berbagai pihak dalam penyusunan publikasi ini. Kami sangat menghargai kritik dan saran dari berbagai pihak guna menyempurnakan publikasi di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2019

Deputi Bidang Pengembangan Regional

TIM PENYUSUN

PENGARAH:

Ir. Rudy Soeprihadi Prawiradinata, MCRP, Ph.D

Deputi Bidang Pengembangan Regional

PENANGGUNG JAWAB:

Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D

Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan

TIM PENYUSUN :

Ika Retna Wulandary, ST, M.Sc; Yudianto, ST. MT, MPP; Zulfakar, S.Kom, ME;
Supriyadi, S.Si, MT; Moh. Agung Widodo, SP, MIDEC ; Fidelia Silvana, SP. M.Int. Econ& F;
Bimo Fachrizal Arvianto, S.Si, MIT; Nur Fitrianto Adi Suasono, S.Kom

TIM AHLI:

Setya Agung Riyadi; Eka Lesniawati; Nana Mulyana, SP; Gema Alief Utama;
Setya Rusdianto; Tri Supriyana.

TIM PENDUKUNG:

Anna Astuti; Eni Arni; Sapto Mulyono; Samsudin
Donny Yanuar; Toni Hernandi, Sri Wulandari; Yunita Sari; Denny Setiawan.

Komentar, saran dan kritik dapat disampaikan ke:

Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan

Deputi Bidang Pengembangan Regional

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Jl. TamanSuropati No. 2 JakartaPusat 10310

Telp/Fax. (021) 3193 4195

e-mail : dit.pw@bappenas.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

TIM PENYUSUN ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR PUSTAKA x

LAMPIRAN

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL

PEMBANGUNAN DAERAH PULAU MALUKU 1

1.1. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN 1
- 1.1.1. Kependudukan 1
- 1.1.2. Ketenagakerjaan 2
- 1.1.3. Pendidikan 7
- 1.1.4. Kesehatan 9
- 1.1.5. Ekonomi Masyarakat 14

1.2. PERKEMBANGAN EKONOMI WILAYAH 16
- 1.2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 16
- 1.2.2. Investasi PMA dan PMDN 22
- 1.2.3. Ekspor dan Impor 23
- 1.2.4. Perbankan 25
- 1.2.5. Pembangunan Sektor Unggulan 27

1.3. PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH 36

1.4. PERKEMBANGAN PELAYANAN SOSIAL DASAR 39
- 1.4.1. Pendidikan 39
- 1.4.2. Kesehatan 40
- 1.4.3. Perumahan dan Pemukiman 41

1.5. PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH 42
- 1.5.1. Jalan 42
- 1.5.2. Listrik 43

1.6. PENGEMBANGAN WILAYAH 45
- 1.6.1. Kawasan Hutan dan Non Hutan di Wilayah Maluku 45
- 1.6.2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Wilayah Maluku 48
- 1.6.3. Pengembangan Daerah Tertinggal dan Perbatasan 49

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Luas Wilayah dan Kependudukan Antarprovinsi di Wilayah Maluku pada Tahun 2018	1
Tabel 2.	Perkembangan Jumlah dan Kepadatan Penduduk Antarprovinsi di Wilayah Maluku pada Tahun - 2018	2
Tabel 3.	Perkembangan Angkatan Kerja Antarprovinsi di Wilayah Maluku Periode 2014-2018	2
Tabel 4.	Angkatan Kerja menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Maluku (Agustus 2018)	4
Tabel 5.	Perkembangan Jumlah Pengangguran Terbuka dan TPT Menurut Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Maluku pada Tahun 2014-2018	5
Tabel 6.	Perkembangan Jumlah Pengangguran Terbuka dan TPT Menurut Perdesaan dan Perkotaan Antarprovinsi di Wilayah Maluku pada Tahun 2014-2018	6
Tabel 7.	Perkembangan Jumlah dan Persentase Pengangguran Terbuka menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan di Wilayah Maluku pada Tahun 2014 dan 2018	7
Tabel 8.	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Antarprovinsi di Wilayah Maluku Tahun 2014-2018	8
Tabel 9.	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Antarprovinsi di Wilayah Maluku Tahun 2014-2018	9
Tabel 10.	Angka Harapan Hidup (AHH) antarprovinsi di Wilayah Maluku Tahun 2014-2018	10
Tabel 11.	Perkembangan Persentase Balita menurut Status Gizi Indeks BB/U di Wilayah Maluku pada Periode Tahun 2013-2018 (Gizi Buruk)	11
Tabel 12.	Perkembangan Persentase Balita menurut Status Gizi Indeks BB/U di Wilayah Maluku pada Periode Tahun 2013-2018 (Sangat Pendek)	12
Tabel 13.	Perkembangan Persentase Balita menurut Status Gizi dengan Indeks BB/Tinggi Badan (TB) di Wilayah Maluku pada Periode Tahun 2013-2018	12
Tabel 14.	Persentase Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita sebulan di Perdesaan dan Perkotaan menurut Provinsi di Wilayah Maluku pada Tahun 2018	14
Tabel 15.	Sumber Utama Pertumbuhan Ekonomi ADHK Pulau Maluku Tahun 2014-2018	16
Tabel 16.	Pertumbuhan Ekonomi ADHK Tahun 2010 Provinsi di Pulau Maluku Tahun 2014-2018 (dalam persen)	17
Tabel 17.	Sumber Utama Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Maluku Tahun 2014-2018	17
Tabel 18.	Nilai PDRB ADHB dan ADHK Provinsi di Pulau Maluku Tahun 2014-2018 (Rp. Triliun)	18
Tabel 19.	Peran Ekonomi Pulau Maluku terhadap Perekonomian Nasional ADHB Tahun 2014-2018	18
Tabel 20.	Peran Ekonomi Provinsi terhadap Perekonomian Pulau Maluku ADHB Tahun 2014-2018	18

Tabel 21.	Perkembangan Struktur Perekonomian Pulau Maluku ADHB Tahun 2014-2018	18
Tabel 22.	Struktur Perekonomian ADHB menurut Provinsi di Pulau Maluku Tahun 2014-2018 (rata-rata dalam persen)	19
Tabel 23.	Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK (2010) Menurut Provinsi di Pulau Maluku Tahun 2014-2018 (persen)	19
Tabel 24.	Perkembangan PDRB Perkapita ADHB menurut Provinsi di Pulau Maluku Tahun 2014-2017 (Rp. Ribu/Jiwa)	20
Tabel 25.	Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran ADHB (2010) Pulau Maluku Tahun 2015-2018 (persen)	20
Tabel 26.	Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran ADHK (2010) Pulau Maluku Tahun 2015-2018 (persen)	20
Tabel 27.	Pertumbuhan dan Sumber Utama Pertumbuhan dari Sisi Pengeluaran ADHK (Tahun 2010) Menurut Provinsi di Pulau Maluku Tahun 2015-2018 (rata-rata persen)	21
Tabel 28.	Share PDRB menurut Pengeluaran ADHB (Tahun 2010) Pulau Maluku Tahun 2014-2018 (persen)	21
Tabel 29.	Share PDRB menurut Pengeluaran ADHB Pulau Maluku Tahun 2014-2018 (rata-rata persen)	21
Tabel 30.	Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Padi, Jagung, dan Kedelai menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2017	30
Tabel 31.	Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Utama Wilayah Maluku Tahun 2014 dan 2018 (Ribu Ton)	30
Tabel 32.	Penyebaran Produksi Tanaman Perkebunan Utama menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2015	31
Tabel 33.	Populasi Ternak Besar menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2018 (ekor)	31
Tabel 34.	Perkembangan Populasi Ternak Unggas menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2014 dan 2018 (ribu ekor)	32
Tabel 35.	Perkembangan Perikanan Tangkap di Wilayah Maluku Tahun 2012 dan 2016 Berdasarkan Provinsi (ton)	33
Tabel 36.	Perkembangan Perikanan Budidaya di Wilayah Maluku Tahun 2012 dan 2016 Berdasarkan Provinsi (ribu ton)	33
Tabel 37.	Jumlah Tamu Asing pada Hotel Bintang dan Non Bintang menurut Provinsi di Wilayah Maluku, Tahun 2013-2017 (orang)	34
Tabel 38.	Jumlah Tamu Domestik pada Hotel Bintang dan Non Bintang menurut Provinsi di Wilayah Maluku, Tahun 2013-2017 (orang)	34
Tabel 39.	Perkembangan Jumlah Pendapatan dan Tenaga Kerja Industri Mikro-Kecil menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2013 dan 2017	35
Tabel 40.	Perkembangan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Provinsi di Pulau Maluku Tahun 2014 dan 2018	39
Tabel 41.	Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Kabupaten dan Kota per Provinsi di Pulau Maluku Tahun 2018	39

Tabel 42.	Perkembangan Jumlah Fasilitas Pendidikan dan Rasio Murid Per Sekolah di Wilayah Maluku berdasarkan Provinsi Tahun 2016 dan 2018	40
Tabel 43.	Perkembangan Fasilitas Rumah Sakit di Wilayah Maluku Tahun 2014 dan 2018 berdasarkan Provinsi	40
Tabel 44.	Perkembangan Fasilitas Kesehatan lainnya di Wilayah Maluku Tahun 2014 dan 2018 berdasarkan Provinsi	41
Tabel 45.	Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Milik Sendiri, 2013-2017	41
Tabel 46.	Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Sumber Air Minum Layak, 2013-2017	41
Tabel 47.	Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Sumber Penerangan Listrik PLN, 2013-2017	42
Tabel 48.	Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak, 2013-2017	42
Tabel 49.	Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Lantai Terluas bukan Tanah, 2013-2017	42
Tabel 50.	Kualitas Jalan menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2016	43
Tabel 51.	Luas Kawasan Hutan dan Non Hutan di Wilayah Maluku Tahun 2017 (ribu Ha)	46
Tabel 52.	Perkembangan Kawasan Hutan Antarprovinsi di Wilayah Maluku pada Tahun 2014 dan 2017	47
Tabel 53.	Status Terakhir KEK Morotai Menurut Status Lahan, Dukungan Infrastruktur serta Regulasi dan Kelembagaan	48
Tabel 54.	Karakteristik Daerah Tertinggal di Wilayah Maluku Tahun 2017/2018	50
Tabel 55.	Perkembangan Alokasi Dana Desa untuk Daerah Tertinggal di Wilayah Maluku pada Periode 2015-2018	51
Tabel 56.	Kawasan Perbatasan Laut RI-Republik palau	53
Tabel 57.	Kawasan Perbatasan Laut RI-Timor Leste/Australia	54
Tabel 58.	Pulau-Pulau Terluar Prioritas	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kepadatan Penduduk pada Tahun 2010 dan Tahun 2018 Antarprovinsi di Wilayah Maluku (Jiwa/Km²)	1
Gambar 2.	Perkembangan Angkatan Kerja Antarprovinsi di Wilayah Maluku Periode 2014-2018	2
Gambar 3.	Perkembangan Angkatan Kerja di Wilayah Maluku menurut Perdesaan dan Perkotaan, Tahun 2018	3
Gambar 4.	Penyebaran Angkatan Kerja Antarprovinsi menurut Perdesaan dan Perkotaan, Tahun 2018	3
Gambar 5.	Perkembangan Angkatan Kerja di Wilayah Maluku menurut Laki-laki dan Perempuan, Tahun 2018	3
Gambar 6.	Penyebaran Angkatan Kerja Antarprovinsi menurut Laki-laki dan Perempuan, Tahun 2018	3
Gambar 7.	Angkatan Kerja menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Maluku, pada Tahun 2014 dan 2018	4
Gambar 8.	Perkembangan Jumlah Pengangguran Terbuka dan TPT Menurut Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Maluku, pada Tahun 2014-2018	5
Gambar 9.	Perkembangan Jumlah Pengangguran Terbuka Antarprovinsi di Wilayah Maluku, pada Tahun 2014-2018	5
Gambar 10.	Pengangguran Terbuka menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Maluku, pada Tahun 2014 dan 2018	6
Gambar 11.	Pengangguran Terbuka menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Maluku, pada Tahun 2018	7
Gambar 12.	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Antarprovinsi di Wilayah Maluku Tahun 2014 dan 2018	8
Gambar 13.	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Antarprovinsi di Wilayah Maluku pada tahun 2014 dan tahun 2018	8
Gambar 14.	Angka Harapan Hidup (AHH) Antarprovinsi di Wilayah Maluku tahun 2014-2018	9
Gambar 15.	Persentase Balita menurut Status Gizi dengan Indeks Berat Badan (Bb)/Umur (U) di Wilayah Maluku Tahun 2018	10
Gambar 16.	Persentase Balita Usia 0-59 Bulan menurut Status Gizi dengan Indeks Tinggi Badan (BB)/Umur (U) di Wilayah Maluku Tahun 2018	11
Gambar 17.	Persentase Balita Usia 0-59 Bulan menurut Status Gizi dengan Indeks Tinggi Badan (TB)/Tinggi Badan (TB) di Wilayah Maluku Tahun 2018	12
Gambar 18.	Perkembangan Kasus baru HIV dan AIDS pada Tahun 2014-2018 di Wilayah Maluku	13
Gambar 19.	Kasus baru HIV dan AIDS Komulatif Tahun 2014-2018 Antarprovinsi di Wilayah Maluku	13
Gambar 20.	Perkembangan Kasus Baru HIV dan AIDS pada Tahun 2014-2018 di Wilayah Maluku	14

Gambar 21.	Perkembangan Persentase Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan di Perdesaan menurut Provinsi di Wilayah Maluku pada Tahun 2014-2018	15
Gambar 22.	Perkembangan Persentase Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan di Perkotaan menurut Provinsi di Wilayah Maluku pada Tahun 2014-2018	15
Gambar 23.	Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 Pulau Maluku dan Nasional Tahun 2014-2018 (persen)	16
Gambar 24.	Perkembangan Realisasi Investasi PMDN (Rp. miliar) Pulau Maluku Tahun 2014-2018	22
Gambar 25.	Distribusi Nilai Realisasi Investasi PMDN (%) menurut Pulau dan Provinsi Tahun 2014-2018	22
Gambar 26.	Perkembangan Realisasi Investasi PMA (juta US$) Pulau Maluku Tahun 2014-2018)	23
Gambar 27.	Distribusi Nilai Realisasi Investasi PMA (%) menurut Pulau dan Provinsi Tahun 2014-2018	23
Gambar 28.	Perkembangan Perdagangan Migas dan Non Migas Wilayah Pulau Maluku dan Provinsi Tahun 2014-2018 (dalam juta US$)	24
Gambar 29.	Perdagangan Migas dan Non Migas menurut Provinsi Maluku Tahun 2014-2018 (dalam persen)	24
Gambar 30.	Perkembangan Nilai Ekspor-Impor Migas dan Non Migas Pulau Maluku Tahun 2014-2018 (dalam juta US$)	25
Gambar 31.	Perkembangan Neraca Perdagangan (Ekpor-Impor) Pulau Maluku Tahun 2014-2018	25
Gambar 32.	Perkembangan Nilai Pinjaman/Kredit dan Simpanan (Rp. miliar) Masyarakat Rupiah dan Valas Bank Umum dan BPR menurut Tahun 2014-2018	26
Gambar 33.	Posisi Pinjaman/Kredit yang Diberikan Rupiah dann Valas Bank Umum dan BPR menurut Provinsi (Rp. miliar)	26
Gambar 34.	Rasio Pinjaman/Kredit terhadap Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valas Bank Umum dan BPR menurut Provinsi Tahun 20147 dan 2018	27
Gambar 35.	Perkembangan Produksi dan Produktivitas Padi di Wilayah Maluku Tahun 2013-2017	27
Gambar 36.	Distribusi Produksi Padi menurut Pulau dan Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2017	28
Gambar 37.	Perkembangan Produksi dan Produktivitas Jagung di Wilayah Maluku Tahun 2013-2017	28
Gambar 38.	Distribusi Produksi Jagung menurut Pulau dan Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2017	29
Gambar 39.	Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Kedelai di Wilayah Maluku Tahun 2013-2017	29
Gambar 40.	Distribusi Produksi Kedelai menurut Pulau dan Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2017	30
Gambar 41.	Perkembangan Populasi Ternak Besar di Wilayah Maluku Tahun 2014 dan 2018 (dalam ribu ekor)	31

Gambar 42.	Perkembangan Populasi Ternak Unggas Wilayah Maluku Tahun 2014 dan 2018 (dalam ribu ekor)	32
Gambar 43.	Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya berdasarkan wilayah di Indonesia (dalam ton)	33
Gambar 44.	Perkembangan Jumlah Industri Usaha Mikro-Kecil (IMK) Wilayah Maluku Tahun 2013 dan 2017 (dalam unit)	35
Gambar 45.	Komposisi Perkembangan Nilai Tambah Industri Menengah Besar di Indonesia Tahun 2015	35
Gambar 46.	Nilai Tambah Industri Menengah Besar di Wilayah Maluku Berdasarkan Provinsi Tahun 2015	36
Gambar 47.	Jumlah Tenaga Kerja Industri Menengah Besar di Wilayah Maluku Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015	36
Gambar 48.	Perbandingan Nilai Pendapatan Asli Daerah Provinsi di Pulau Maluku Tahun 2015 dan 2018	37
Gambar 49.	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi di Pulau Maluku Tahun 2015 dan 2018	37
Gambar 50.	Perkembangan Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Modal menurut Provinsi di Pulau Maluku Tahun 2015 dan 2018	38
Gambar 51.	Delta Pertumbuhan Sekolah di Wilayah Maluku Tahun 2014 dan 2018 berdasarkan level pendidikan	39
Gambar 52.	Perkembangan Fasilitas Kesehatan di Wilayah Maluku Tahun 2014 dan 2018	40
Gambar 53.	Perkembangan Panjang Jalan menurut Kewenangan di Wilayah Maluku Tahun 2015-2018 (dalam Km)	43
Gambar 54.	Perkembangan Energi yang di Produksi di Wilayah Maluku Tahun 2011-2017 (dalam GWh)	44
Gambar 55.	Komposisi Produksi Energi Listrik menurut Jenis Pembangkit di Wilayah Maluku Tahun 2013 (dalam persen)	44
Gambar 56.	Perkembangan Rasio Elektrifikasi Wilayah Maluku Tahun 2015-2018 (dalam persen)	45
Gambar 57.	Rasio Elektrifikasi menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2018 (dalam persen)	45
Gambar 58.	Kawasan Hutan dan Non Hutan di Wilayah Maluku Tahun 2017	46
Gambar 59.	Kawasan HPK dan APL dengan Tutupan Lahan Hutan di Wilayah Maluku menurut Provinsi Tahun 2017	47
Gambar 60.	Alokasi Dana Desa untuk Daerah Tertinggal di Wilayah Maluku pada periode 2015-2018	51
Gambar 61.	Alokasi Dana Desa untuk Daerah Tertinggal di Wilayah Maluku pada Tahun 2018	52

DAFTAR PUSTAKA

Buku Statistik Indonesia 2018, Badan Pusat Statistik

Buku Keadaan Angkatan Kerja-di Indonesia Agustus 2018, Badan Pusat Statistik

Buku PDRB Lapangan Usaha Provinsi 2010-2018, Badan Pusat Statistik

Buku Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota 2018, Badan Pusat Statistik

Buku Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2014-2018, Badan Pusat Statistik

Buku Statistik Kesejahteraan Rakyat 2018, Badan Pusat Statistik

Buku Profil Kesehatan Ibu dan Anak 2018, Badan Pusat Statistik

Buku Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Indonesia 2018, Badan Pusat Statistik

Buku Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018, Badan Pusat Statistik

Buku Statistik Captive Power 2018, Badan Pusat Statistik

2019

PEMBANGUNAN DAERAH
D A L A M A N G K A

Gambaran Umum
PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ANGKA
Secara Nasional

PERKEMBANGAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN

PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan Ekonomi. Perkembangan ekonomi nasional dalam kurun waktu 2014-2018 cenderung meningkat, walaupun pada tahun 2015 sedikit mengalami perlambatan yaitu dari 5,01 persen pada tahun 2014 menjadi 4,88 persen pada tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi nasional mulai menunjukan perbaikan pada tahun 2015 hingga akhir tahun 2018, pada tahun 2016 tumbuh sebesar 5,02 persen, dan pada akhir tahun 2018 tumbuh sebesar 5,17 persen (**Gambar 1**). Pertumbuhan ekonomi menurut pulau besar, pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi, Jawa-Bali, Maluku, dan Papua dalam kurun 2014-2018 rata-rata berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan dan Sumatera rata-rata di bawah nasional, untuk pertumbuhan ekonomi Pulau Nusa Tenggara menurun cukup signifikan pada tahun 2016 dari tahun 2015 dan cenderung melambat hingga akhir tahun 2108 (**Gambat 1**).

Gambar 1: Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2014-2018

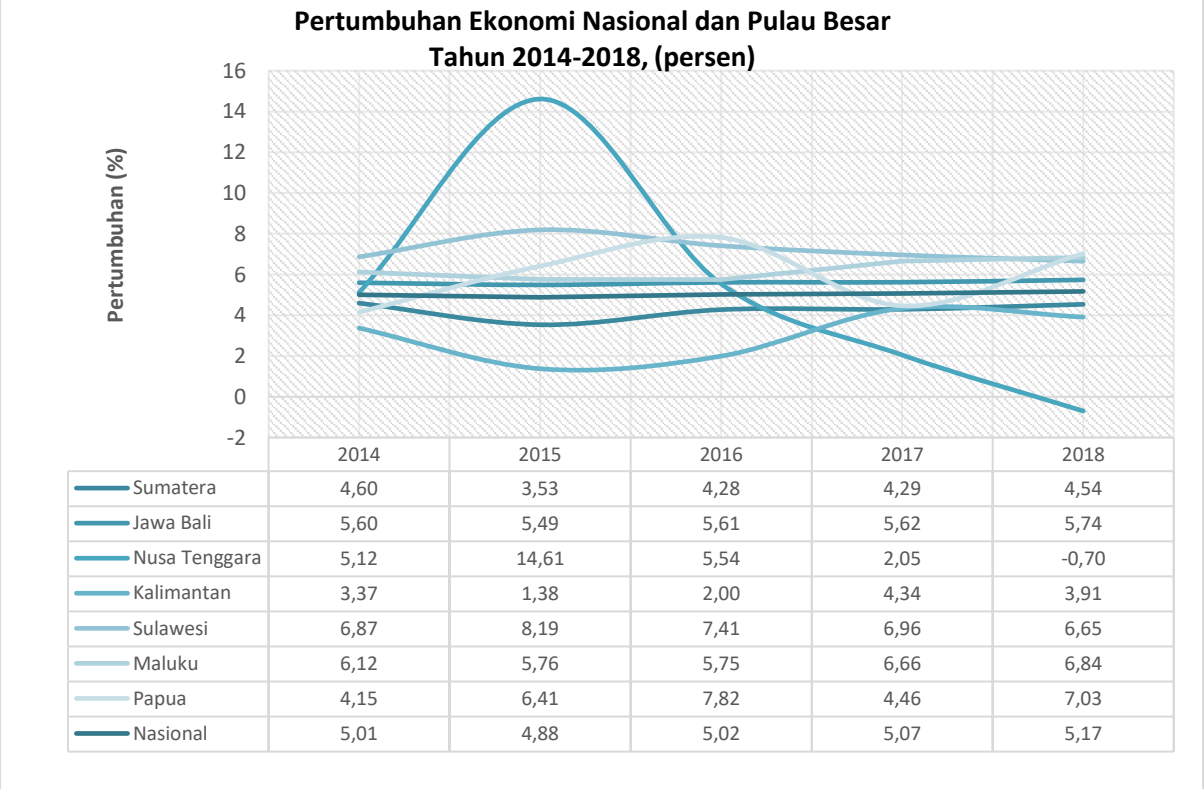

	2014	2015	2016	2017	2018
Sumatera	4,60	3,53	4,28	4,29	4,54
Jawa Bali	5,60	5,49	5,61	5,62	5,74
Nusa Tenggara	5,12	14,61	5,54	2,05	-0,70
Kalimantan	3,37	1,38	2,00	4,34	3,91
Sulawesi	6,87	8,19	7,41	6,96	6,65
Maluku	6,12	5,76	5,75	6,66	6,84
Papua	4,15	6,41	7,82	4,46	7,03
Nasional	5,01	4,88	5,02	5,07	5,17

Sumber: BPS Tahun 2018

Pertumbuhan ekonomi secara spasial pada tahun 2014 menurut provinsi, sebagian besar provinsi berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional (5,01 %), dan sebanyak 7 (tujuh) provinsi dengan pertumbuhan ekonomi di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu provinsi Aceh (1,55%), Riau (2,71%), Sumatera Selatan (4,79%), Kep. Bangka Belitung (4,67%), Kalimantan Selatan (4,84%), Kalimantan Timur (1,71%), dan Papua (3,64%). Pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2014 terdapat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 8,86 persen dan terendah di Provinsi Aceh sebesar 1,55 persen (**Gambar 2**).

Pada tahun 2018, sebanyak 8 (delapan) provinsi dengan pertumbuhan ekonomi di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu Provinsi Aceh (4,61%), Riau (2,34%), Jambi (4,71%), Kep. Bangka Belitung (4,45%), Kep. Riau (4,56%), Nusa Tenggara Barat (-4,56%), Kalimantan Timur (2,67%), dan Bengkulu (4,99%). Pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2018 terdapat di Provinsi Maluku Utara sebesar 7,92 persen dan terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar -4,56 persen (**Gambar 2**).

Gambar 2: Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Nasional Tahun 2014 dan 2018

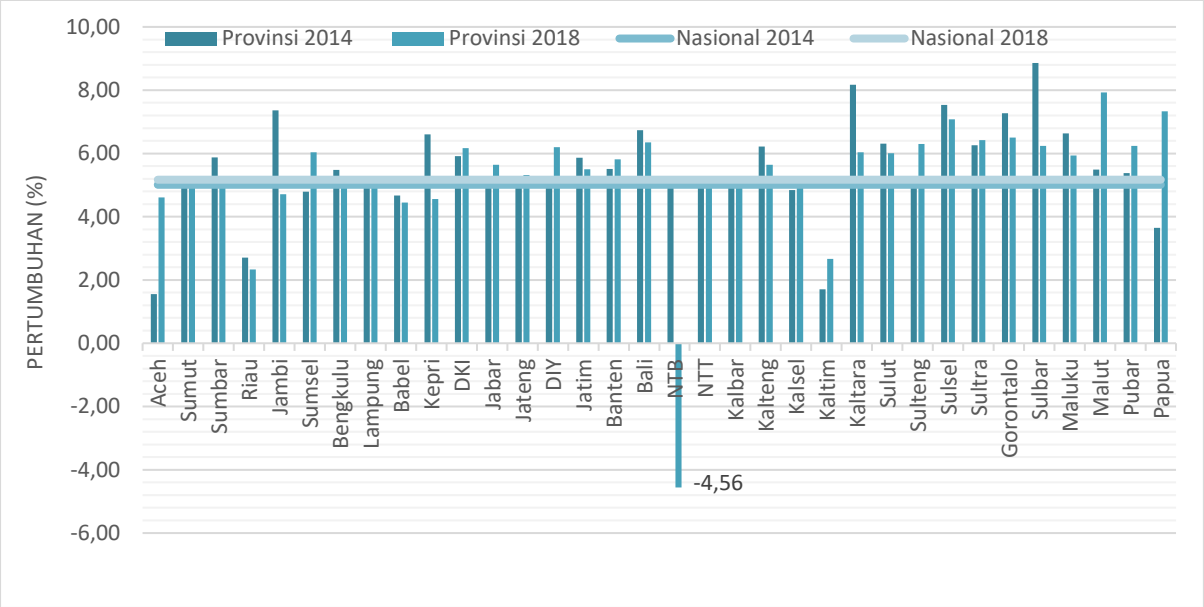

Sumber: BPS Tahun 2018

Peran wilayah dalam pembentukan PDB Nasional. Struktur perekonomian nasional dalam kurun waktu 2014-2018 secara spasial masih menunjukkan adanya kesenjangan antarwilayah, dimana perekonomian nasional masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Selama kurun waktu 2014-2018 kontribusi Pulau Jawa-Bali terhadap PDB rata-rata sebesar 59,74 persen, selanjutnya diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,11 persen, Pulau Kalimantan 8,25 persen, dan Pulau Sulawesi 5,99 persen, Pulau Nusa Tenggara sebesar 1,52 persen, Pulau Papua sebesar 1,87 persen, dan Pulau Maluku sebesar 0,53 persen. Sementara kontribusi ekonomi menurut provinsi, perekonomian nasional masih dipengaruhi oleh empat provinsi penyumbang terbesar terhadap PDB dengan total kontribusi sebesar rata-rata sebesar 53,26 persen. Keempat provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sementara provinsi dengan kontribusi paling rendah adalah Provinsi Maluku, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Maluku Utara (**Gambar 3**).

Tabel 2: Peran Wilayah Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional 2014-2018, (persen).

Wilayah	Share Terhadap PDB (%)					
	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata: 2014-2018
P. Sumatera	23.02	22.18	22.04	21.73	21.58	22.11
P. Jawa-Bali	58.85	59.85	60.03	59.93	60.05	59.74
P. Nusa Tenggara	1.41	1.56	1.59	1.56	1.49	1.52
P. Kalimantan	8.77	8.16	7.88	8.24	8.20	8.25
P. Sulawesi	5.64	5.91	6.04	6.12	6.22	5.99
P. Maluku	0.52	0.52	0.52	0.53	0.53	0.53
P. Papua	1.79	1.83	1.90	1.90	1.94	1.87

Sumber: BPS Tahun 2018

Gambar 3: Rata-rata Peran Provinsi dalam Pembentukan PDB Nasional 2014-2018, (persen).

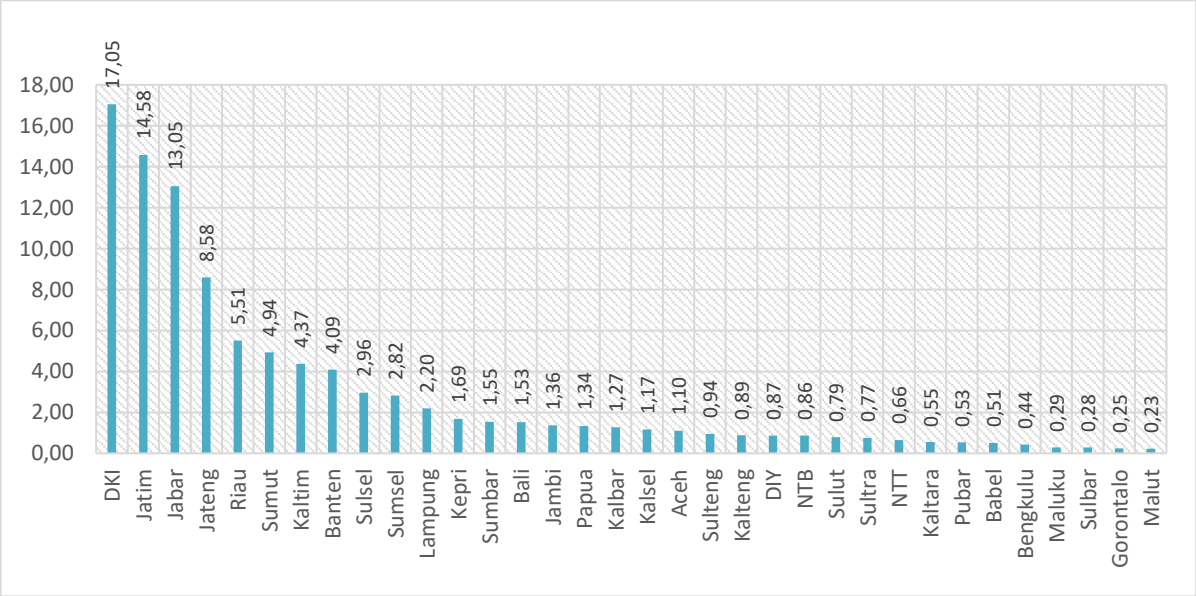

Sumber: BPS Tahun 2018

TINGAT PENGANGGURAN TERBUKA

Pengangguran Terbuka. Perkembangan pengangguran terbuka selama periode 2014-2018 secara nasional menunjukkan tren menurun, walaupun menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2015 sebesar 316 ribu jiwa, namun menurun kembali pada tahun 2016 sebanyak 529 ribu jiwa. Pengangguran Terbuka tersebut sebagian besar berada di wilayah Perkotaan yaitu sebesar 7,31 persen dari Angkatan Kerja, sementara di Perdesaan sebesar 4,93 persen. Fluktuasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2015 tersebut terjadi diwilayah Perdesaan maupun di Perkotaan, dan pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan TPT diwilayah Perkotaan, sementara di Perdesaan menunjukkan penurunan.

Gambar 4: Perkembangan Pengangguran Terbuka Pada Periode 2014-2018

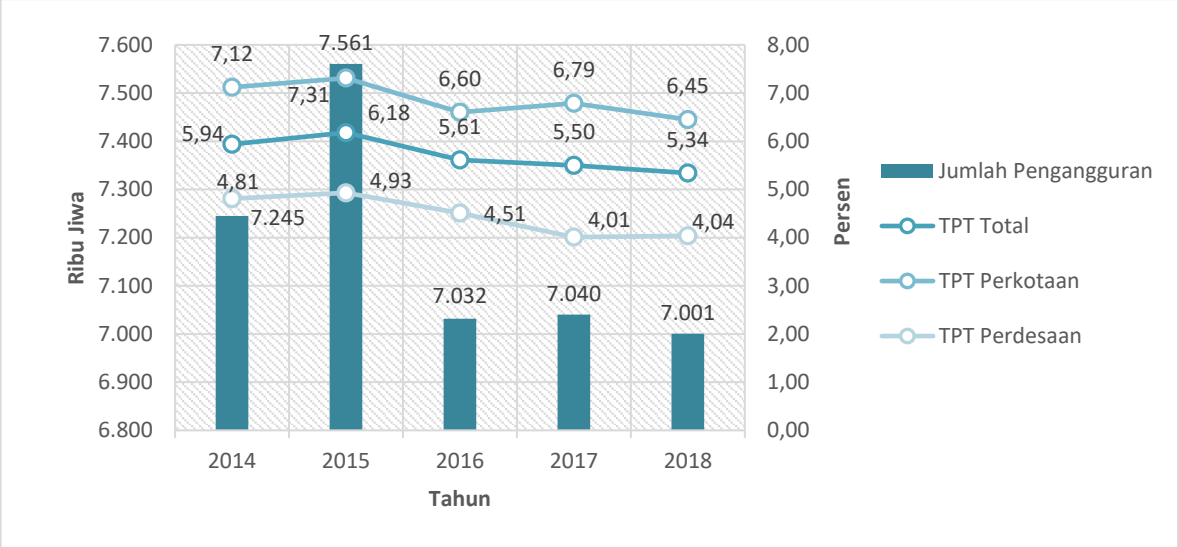

Sumber: Sakernas Agustus 2018, BPS

Pada periode 2014-2018, sebagian besar provinsi menunjukkan penurunan TPT, terutama di Provinsi Aceh, DKI Jakarta, dan Maluku menunjukkan penurunan yang signifikan. Namun pada periode yang sama menunjukkan peningkatan TPT di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, serta Papua Barat.

Gambar 5: Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Pada Periode 2014-2018

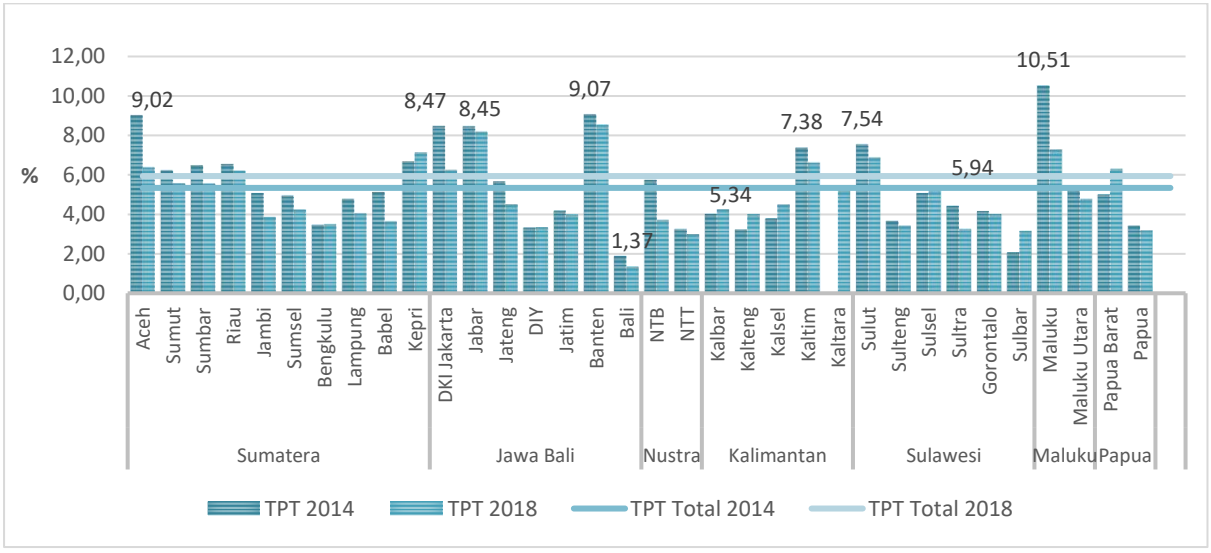

Sumber: Sakernas Agustus 2018, BPS

Berdasarkan TPT antarprovinsi di wilayah perdesaan dan perkotaan, Hampir seluruh provinsi menunjukkan TPT di Perkotaan lebih tinggi dibanding di Perdesaan, kecuali untuk Provinsi Banten dan Kalimantan Utara. TPT di Perkotaan tertinggi berada di Provinsi Papua Barat (10,14%), Maluku (10,07%), dan Riau (8,87%). TPT di Perdesaan tertinggi berada di Provinsi Banten (10,77%) dan Jawa Barat (7,98%).

Gambar 6: TPT Antarprovinsi Menurut Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018

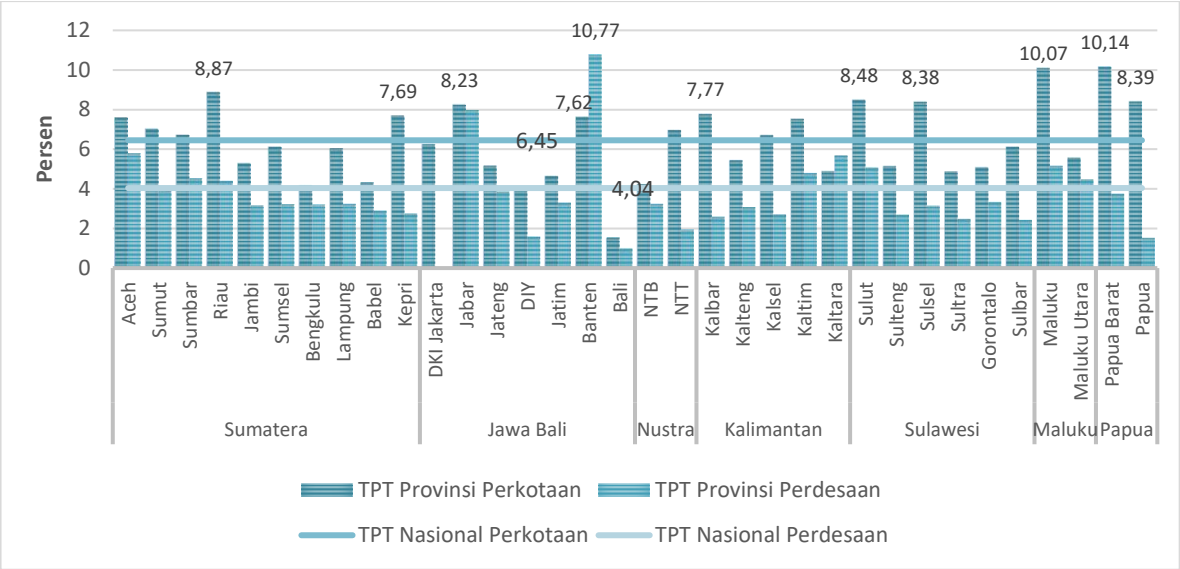

Sumber: Sakernas Agustus 2018, BPS

Setengah Penganggur. Pada kelompok angkatan kerja yang bekerja, terdapat Pekerja Tidak Penuh yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan yang disebut juga Setengah Penganggur**.** Untuk kategori Tingkat Setengah Penganggur (TSP) masih menunjukkan persentase yang tinggi, terutama di wilayah luar jawa, yaitu sebagian besar provinsi di Sumatera kecuali di Provinsi Bangka Belitung (5,96%) dan Kepulauan Riau (3,87%),seluruh provinsi di wilayah Nusa Tenggara (Provinsi NTT dan NTB), wilayah Kalimantan kecuali Provinsi Kalsel (5,95%) dan Kaltim (4,22%), dan seluruh provinsi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua. Setengan Penganggur tertinggi berada di Provinsi NTB sebesar (16,95%).

Gambar 7: Tingkat Pengangguran Terbuka dan Setengah Penganggur Antarprovinsi di Indonesia Tahun 2018.

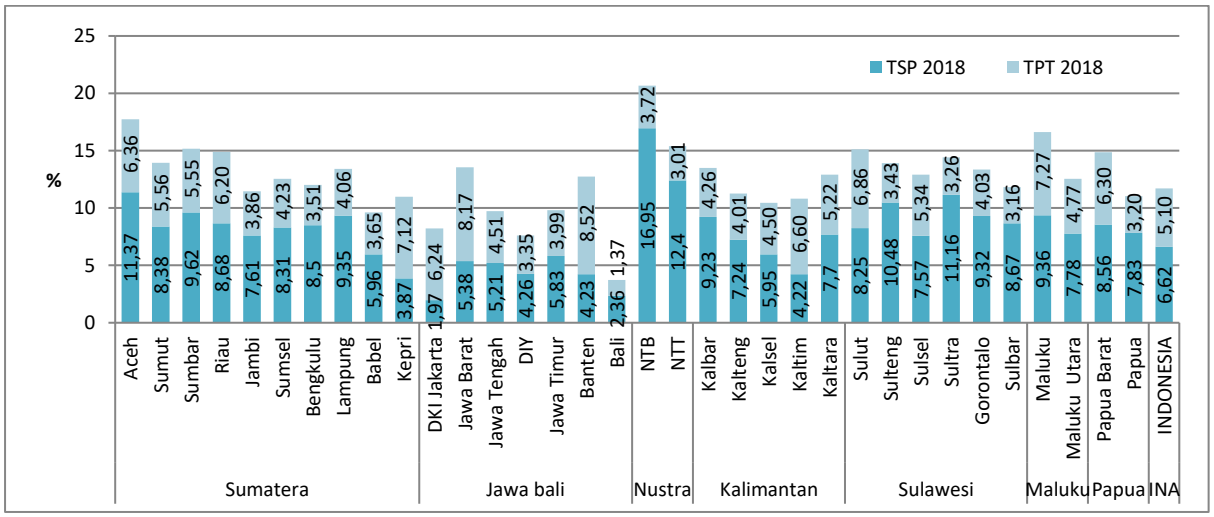

Sumber: Sakernas Agustus 2018, BPS

KEMISKINAN

Kemiskinan. Jumlah penduduk miskin secara Nasional dalam kurun waktu 2014-2018 cenderung menurun, yaitu sebesar 28,28 Juta jiwa atau 11,25 Persen dari penduduk Indonesia pada tahun tahun 2014 berkurang sebesar 2,33 juta jiwa (1,43%) menjadi 25,95 juta jiwa atau 9,82 pada tahun 2018. (**Gambar 8**). Berdasarkan penyebarannya menurut wilayah pulau besar, sebanyak 52,07 persen penduduk miskin di Indonesia berada di di wilayah Jawa Bali kemudian menyusul wilayah Sumatera sebesar 23,04 persen dan Sulawesi sebesar 7,95 persen (**Gambar 9**).

Gambar 8: Perkembangan Penduduk Miskin Indonesia Periode 2014-2018

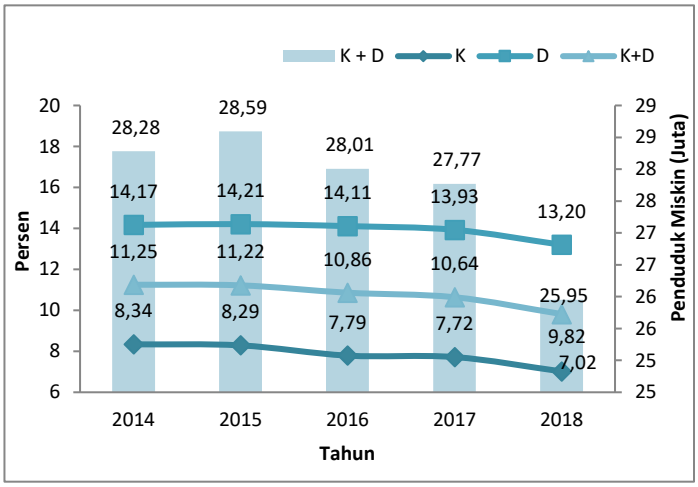

Gambar 9: Distribusi Penduduk Miskin Menurut Wilayah Pulau

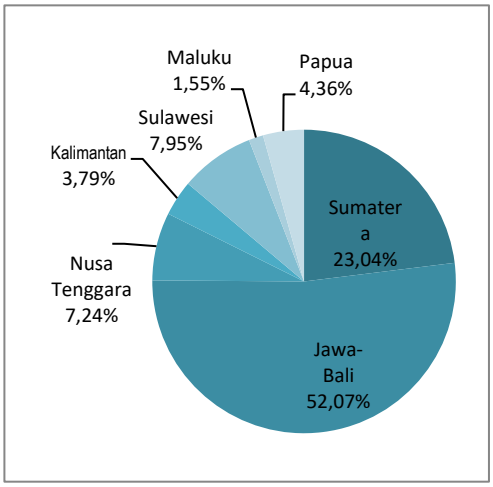

Sumber: BPS Tahun 2018

Penyebaran penduduk miskin menurut provinsi, sebagian besar berada diwilayah Jawa khususnya di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 4,84 juta jiwa, Jawa Timur 4,79 Juta jiwa dan Jawa Barat 4,33 Juta Jiwa. Selama periode 2014-2018, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di 23 provinsi dengan penurunan tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 939 ribu jiwa, sementara peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi di 11 provinsi dengan peningkatan tertinggi terdapat di Provinsi Nusa tenggara Timur sebesar 147,5 ribu jiwa (Gambar 10).

Gambar 10: Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Antarprovinsi pada Periode 2014-2018

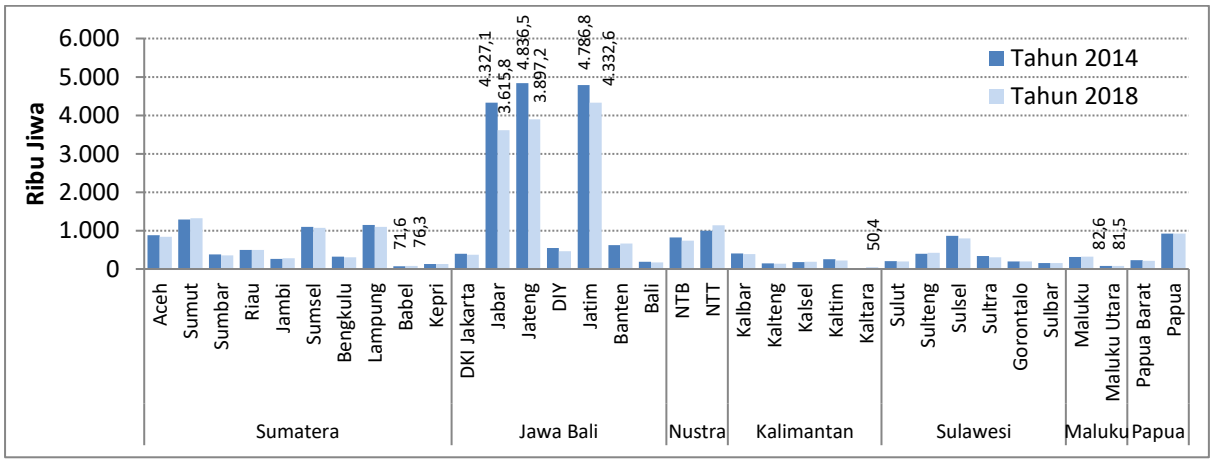

Sumber: BPS Tahun 2018

Berdasarkan persentase penduduk miskin antar provinsi selama periode 2014-2018, tertinggi terdapat di Provinsi Papua sebesar 30,05 persen pada tahun 2004 dan berkurang menjadi 27,74 persen pada tahun 2018. Kemiskinan tertinggi berikutnya terdapat di Provinsi Papua Barat (23,01%), NTT (21,35%), Maluku (18,12%), Aceh (15,97%) dan Bengkulu (15,43%). Pada tahun 2018 masih terdapat 17 provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata Nasinal. Tingkat kemiskinan terendah terdapat di Provinsi DKI jakarta yaitu sebesar 3,92 persen pada tahun 2014 dan berkurang menjadi 3,57 persen pada tahun 2018 (**Gambar 11**).

Gambar 11: Perkembangan Tingkat Kemiskinan Antarprovinsi pada Periode 2014-2018

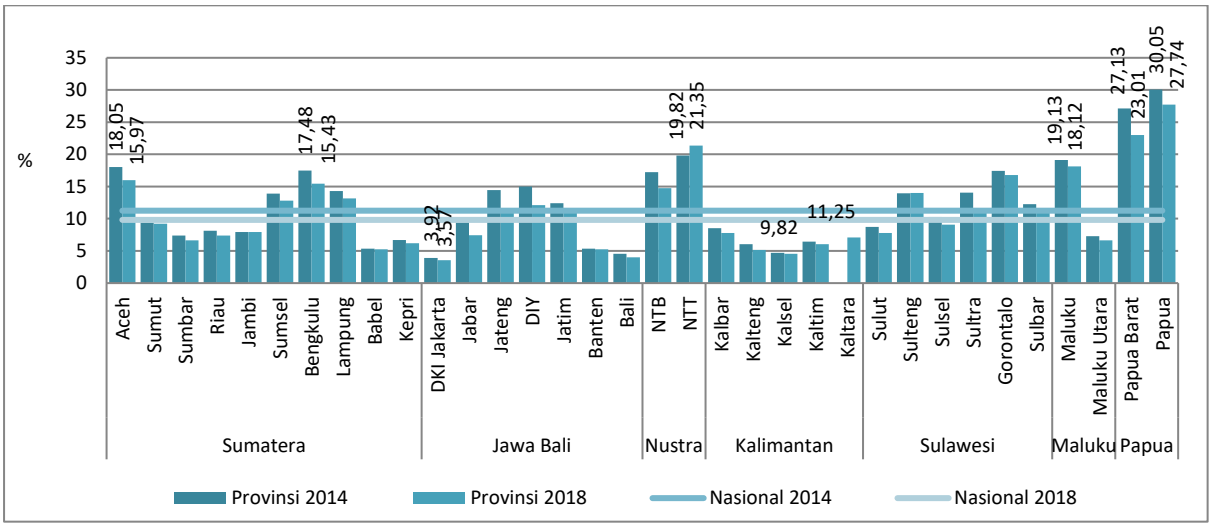

Sumber: BPS Tahun 2018

Berdasarkan distribusi penduduk miskin di wilayah perdesaan dan perkotaan, sebanyak 61 persen penduduk miskin di Indonesia berada di perdesaan (**Gambar 12**). Konsentrasi penduduk miskin di perdesaan (di atas 50%) tersebar di 27 provinsi, tertinggi di Provinsi Papua (96%), Papua Barat (91%), dan NTT (89%). Konsentrasi penduduk miskin di perkotaan terdapat di 7 provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta (100%), Kepulauan Riau (75%), DI Yogyakarta (66%), Jawa Barat 64%), Banten (60%), Bali (55%), Sumatera Utara (52%).

Gambar 12: Distribusi Penduduk Miskin Menurut Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018

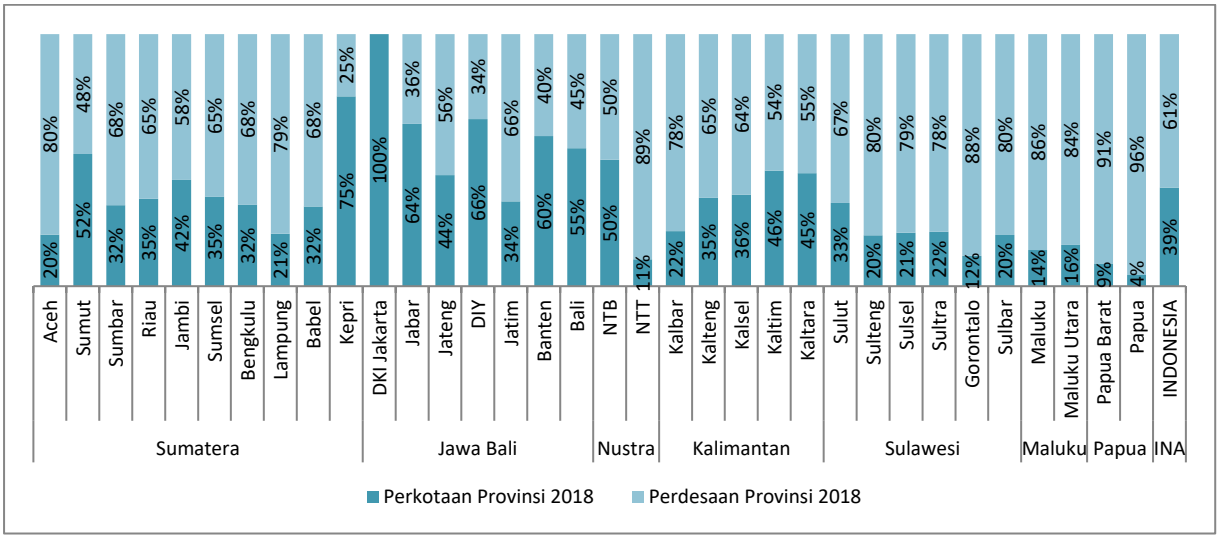

Sumber: BPS Tahun 2018

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

IPM nasional selama periode 2014 – 2018 menunjukkan peningkatan sebesar 2,49 yaitu dari 68,9 pada tahun 2014 meningkat menjadi 71,39 pada tahun 2018. Sementara untuk IPM antar provinsi, Ranking tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 78,39 pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 80,47 pada tahun 2018. Sementara IPM Ranking terendah terdapat di Provinsi Papua yaitu sebesar 56,75 pada tahun 2014 meningkat menjadi 60,06 pada tahun 2018. Pada periode 2014-2018 seluruh provinsi menunjukkan peningkatan IPM, dengan peningkatan tertinggi sebesar 3,31 poin terdapat di Provinsi Papua, dan peningkatan terendah terdapat di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 1,44 poin.

Gambar 13: Perkembangan IPM Nasional Tahun 2014-2018

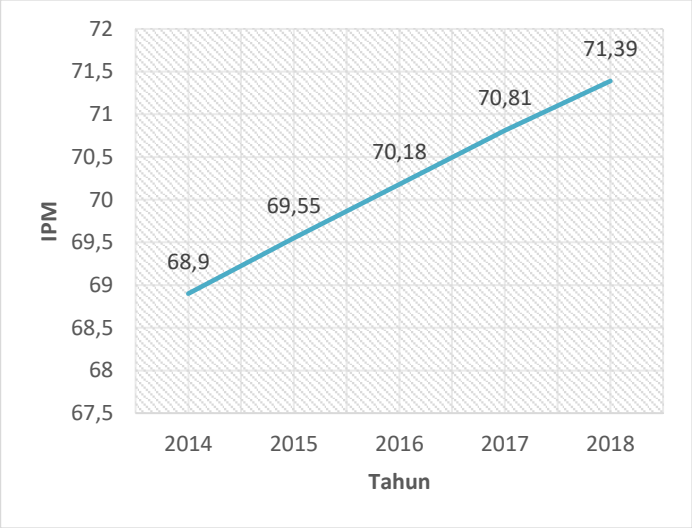

Sumber: BPS 2019

Terdapat 9 provinsi dengan IPM di atas IPM nasional, yaitu di Pulau Jawa Bali meliputi Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, dan Banten, di wilayah Sumatera meliputi Provinsi Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat dan wilayah Kalimantan di Provinsi Kalimantan Timur, dan wilayah Sulawesi di Provinsi Sulawesi Utara.

Gambar 14: Indeks Pembangunan Manusia Antarprovinsi pada Periode 2014-2018

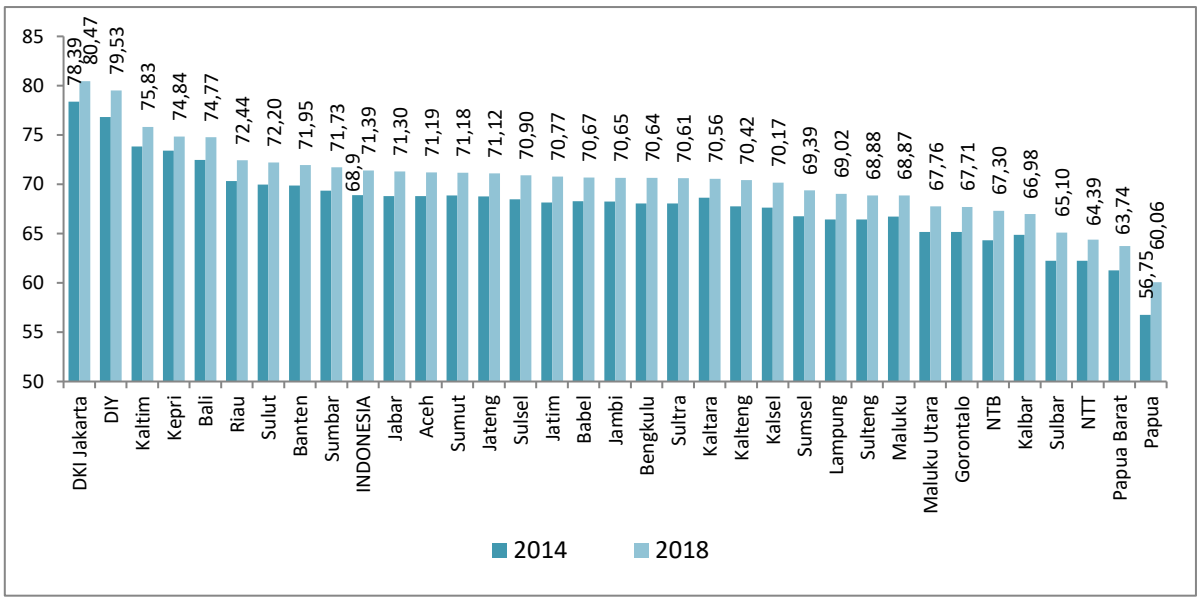

Sumber: BPS, Tahun 2019

Untuk menunjukkan kecepatan perkembangan IPM selama periode 2014-2018 berdasarkan reduksi *short fall* pertahun *(annual reduction in short fall)* yaitu perhitungan secara sederhana untuk menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang harus ditempuh untuk mencapai IPM ideal (IPM =100). Berdasarkan Hasil perhitungan hampir seluruh provinsi memiliki nilai reduksi *Shortfall* per tahun termasuk kategori Mengengah (1,5-1,7), kecuali di provinsi DI. Yogyakarta termasuk kategori Cepat (1,85) dan DKI Jakarta (1,76). Rincian perprovinsi dapat dilihat di Lampiran.

Kategori reduksi *short fall* pertahun
1. Sangat lambat jika : < 1,3
2. Lambat jika : 1,3 – 1,5
3. Menengah : 1,5 – 1,7
4. Cepat jika : > 1,7

GINI RATIO

Gini Ratio atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1, dimana Gino Ratio bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama, dan sebaliknya Gini Ratio bernilai 1 menunjukkan Tidak Merata Sempurna.

Nilai Koefisien (x)	Distribusi pendapatan
X = 0	Merata Sempurna
0 < x < 0,4	Tingkat Ketimpangan Rendah
0,4 < x < 0,5	Tingkat Ketimpangan Sedang
0,5 < x < 1	Tingkat Ketimpangan Tinggi
X = 1	Tidak Merata Sempurna (Dikuasai oleh satu pihak)

Berdasarkan data BPS, perkembangan Gini Ratio secara Nasional pada periode 2014-2018 menunjukkan penurunan, yaitu sebesar 0,406 pada tahun 2014 berkurang menjadi 0,389 pada tahun 2018. Penurunan Gini Ratio tersebut dikontribusi oleh penurunan sebesar 0,027 di Perkotaan yaitu sebesar 0,428 pada tahun 2014 menjadi 0,401 pada tahun 2018. Sementara Gini Ratio di Perdesaan menjunjukkan perkembangan yang fluktuatif, dan terjadi sedikit peningkatan sebesar 0,004 pada periode 2017-2018, dan peningkatan sebesar 0,005 pada periode 2014-2018. Berdasarkan nilai koefisien Gini Ratio, di perkotaan masih berada pada kelompok Tingkat Ketimpangan Sedang, sementara di perdesaan termasuk kelompok Tingkat Ketimpangan Rendah.

Gambar 15: Perkembangan Indeks Gini Nasional Menurut Perkotaan dan Perdesaan Pada Tahun 2014-2018

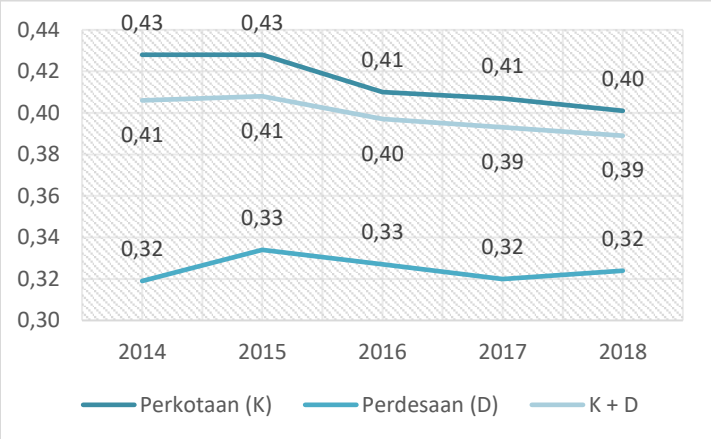

Sumber: BPS, 2019

Berdasarkan perkembangan Gini Ratio antarprovinsi, ketimpangan tertinggi berada di Provinsi DI. Yogyakarta yaitu sebesar 0,419 pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 0,441 pada tahun 2018. Ketimpangan terendah berada di Provinsi Bangka Belitung yaitu sebesar 0,303 pada tahun 2014 berkurang menjadi 0,281 pada tahun 2018. Berdasarkan kinerja dalam penurunan Gini Ratio, terbaik

berada di Provinsi Kepulauan Riau dengan penurunan sebesar 0,072, Kalimantan Barat sebesar 0,052, serta Papua Barat sebesar 0,045.

Gambar 16: Perkembangan Gini Ratio Antar Provinsi pada Periode 2014 – 2018.

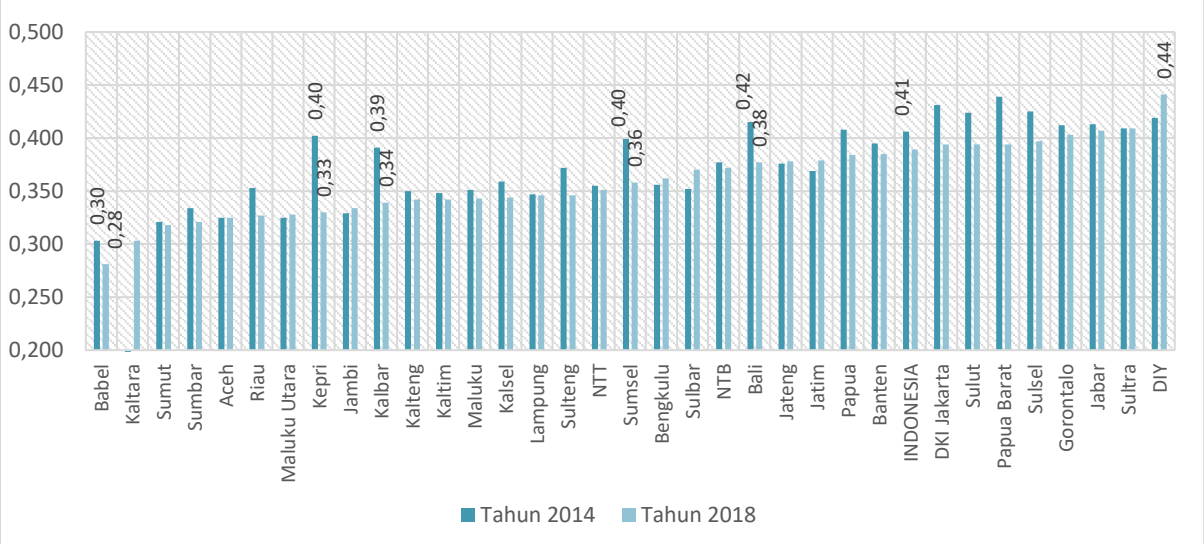

Sumber: BPS Tahun 2018

Ketimpangan di perdesaan dan perkotaan antarprovinsi menurut nilai koefisien Gini Ratio, menunjukkan tren perubahan yang beragam. **Gambar 17**, Pada periode 2014-2018 ketimpangan tertinggi di wilayah perkotaan berada di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,444 pada tahun 2014 menjadi 0,442 pada tahun 2018, berikutnya Provinsi Sulawesi Barat dengan koefisien sebesar 0,329 pada tahun 2014 meningkat menjadi 0,421 pada tahun 2018. Peningkatan ketimpangan tertinggi di perkotaan pada periode 2014-2018 terjadi di provinsi Sulawesi Barat (0,092), Provinsi Jambi (0,040), dan Kalimantan Timur (0,014). Sementara pengurangan ketimpangan terjadi di 28 Provinsi, dengan penurunan tertinggi terjadi di Provinsi Papua Barat (0,106), Kepulauan Riau (0,079), dan Sumatera selatan (0,057).

Gambar 17: Perkembangan Gini Ratio di Perkotaan Antar Provinsi pada Periode 2014 – 2018.

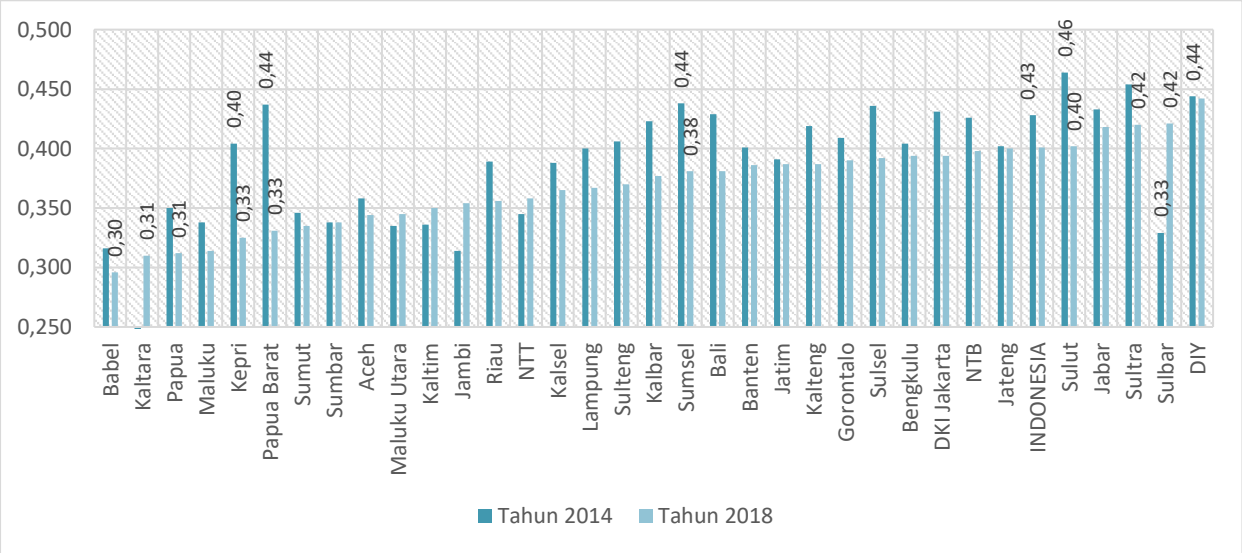

Sumber: BPS Tahun 2018

Gambar 18, Pada periode 2014-2018 ketimpangan tertinggi di wilayah Perdesaan berada di Provinsi DI Papua Barat sebesar 0,391 pada tahun 2014 meningkat menjadi 0,424 pada tahun 2018, berikutnya Provinsi Papua sebesar 0,331 pada tahun 2014 meningkat menjadi 0,384 pada tahun 2018. Peningkatan ketimpangan di perdesaan pada periode 2014-2018 terjadi di 22 provinsi dengan peningkatan tertinggi terjadi di Provinsi Papua (0,053), DI Yogyakarta (0,051), dan Papua Barat (0,033). Sementara penurunan ketimpangan terjadi di 12 Provinsi, dengan penurunan tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Barat (0,040), Bangka Belitung (0,35), dan Maluku (0,19).

Gambar 18: Perkembangan Gini Ratio di Perdesaan Antar Provinsi pada Periode 2014 – 2018.

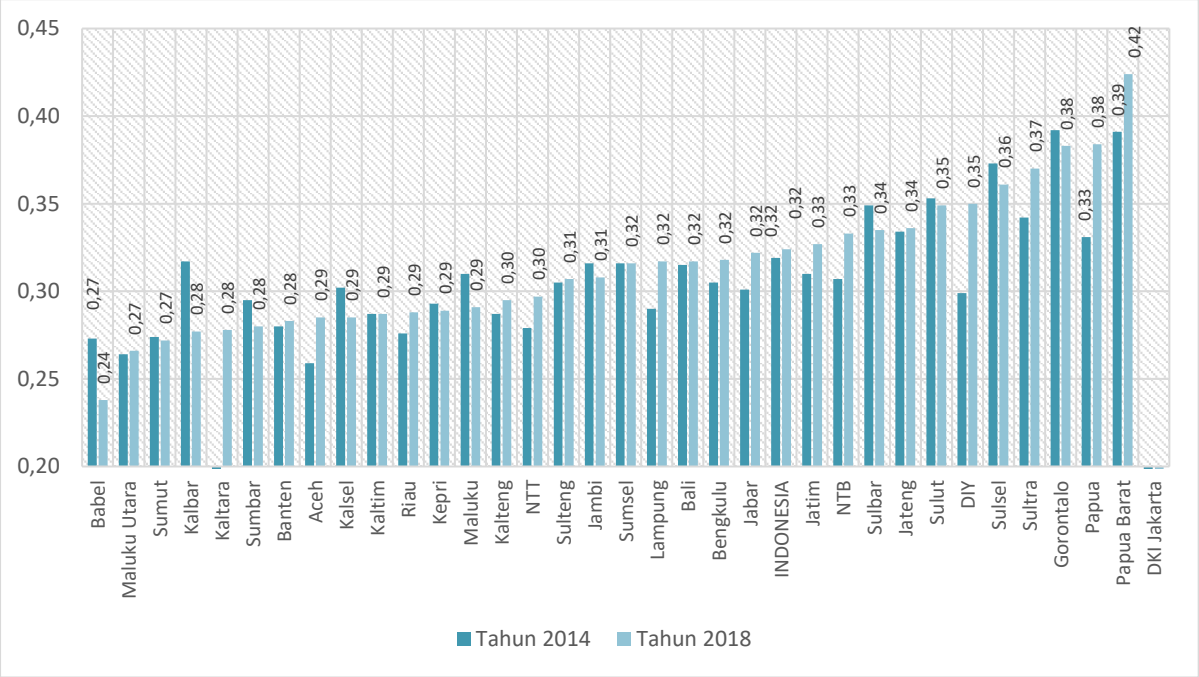

Sumber: BPS Tahun 2018

2019

PEMBANGUNAN DAERAH
D A L A M A N G K A

MALUKU

PEMBANGUNAN DAERAH PULAU MALUKU

1.1 PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

1.1.1 KEPENDUDUKAN

Wilayah Maluku memiliki luasan 78.896,53 Km^2, dan Jumlah penduduk wilayah Maluku pada tahun 2018 sebanyak 3,01 juta jiwa atau 1,13 persen dari total penduduk Indonesia. Sebagian besar penduduk berada di Provinsi Maluku sebanyak 1,77 juta jiwa atau 59,00 persen dari penduduk wilayah Maluku. Berdasarkan Rasio jenis kelamin laki-laki dan perempuan menunjukkan rasio di atas 100 persen, artinya lebih banyak laki-laki dibanding dengan perempuan.

Tabel 1 : Luas Wilayah dan Kependudukan Antarprovinsi di Wilayah Maluku Pada tahun 2018.

Provinsi	Luas Wilayah		Penduduk		Rasio Jenis Kelamin %	Laju Pertumbuhan Penduduk (%) (2010-2018)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km2)
	(Km^2)	%	(Ribu Jiwa)	%			
Maluku	46.914,03	59,46	1.773,80	59,00	100,02	1,77	37,81
Maluku Utara	31.982,50	40,54	1.232,60	41,00	100,04	2,11	38,54
P. MALUKU	**78.896,53**	**100,00**	**3.006,40**	**100,00**	**100,03**	**1,94**	**38,11**

Sumber: Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035 (Pertengahan tahun/Juni)

Pada tahun 2018, tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Maluku Utara (38,54 jiwa/Km^2) lebih tinggi dibanding dengan Provinsi Maluku (37,81 Jiwa/Km^2). Pada tahun 2010 penduduk wilayah Maluku sebanyak 2,57 Juta jiwa meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 1,94 persen menjadi 3,00 juta jiwa di tahun 2018. Berdasarkan perbandingan antarprovinsi, peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Maluku antara tahun 2010-2018 sebesar 240,30 ribu jiwa lebih tinggi dibanding dengan Provinsi Maluku Utara. Namun berdasarkan peningkatan laju pertumbuhan penduduk, peningkatannya di Provinsi Maluku Utara sebesar 2,11 persen lebih tinggi dibanding dengan di Provinsi Maluku (1,77%).

Gambar 1 : Kepadatan Penduduk Pada tahun 2010 dan 2018 Antarprovinsi di Wilayah Maluku (Jiwa/Km^2)

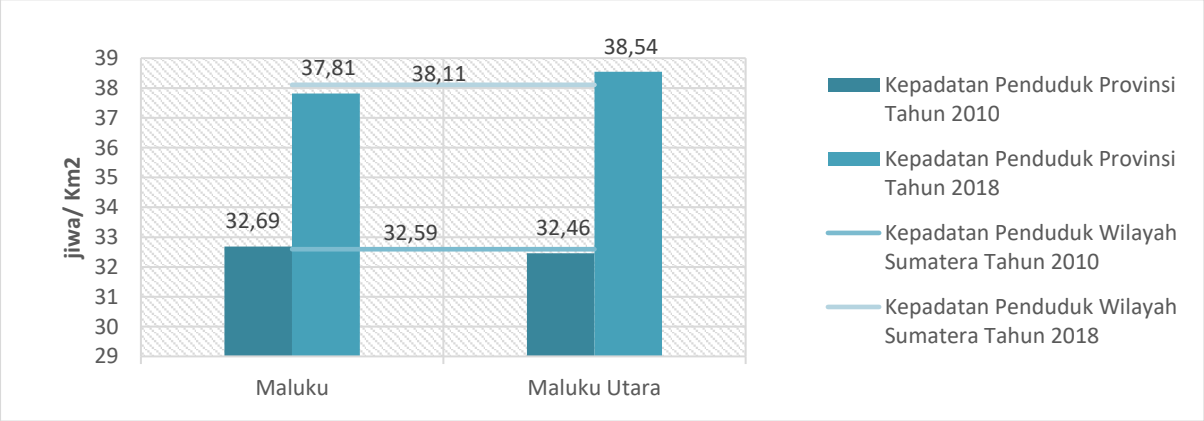

Sumber: Hasil Sensus Penduduk dan proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035 (Pertengahan tahun/Juni)

Berdasarkan perkembangan kepadatan penduduk di wilayah Maluku, pada tahun 2010 sebesar 32,59 jiwa/Km^2 meningkat sebesar 5,51 jiwa/Km^2 menjadi 38,11 jiwa/Km^2 di tahun 2018. Berdasarkan perbandingan antarprovinsi, kepadatan penduduk tertinggi berada di Provinsi Maluku Utara (32,46 jiwa/Km^2) di tahun 2010 meningkat sebesar sebesar 6,08 jiwa/Km^2 menjadi 38,54 jiwa/Km^2 di tahun 2018.

Tabel 2: Perkembangan Jumlah dan Kepadatan Penduduk Antarprovinsi di Wilayah Maluku Pada tahun 2010-2018

Provinsi	Penduduk (ribu jiwa)			Kepadatan Penduduk per km^2		
	2010	2018	Δ (2010-2018)	2010	2018	Δ (2010-2018)
Maluku	1.533,50	1.773,80	240,30	32,69	37,81	5,12
Maluku Utara	1.038,10	1.232,60	194,50	32,46	38,54	6,08
P. MALUKU	**2.571,60**	**3.006,40**	**434,80**	**32,59**	**38,11**	**5,51**

Sumber: Hasil Sensus Penduduk dan proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035 (Pertengahan tahun/Juni)

1.1.2 KETENAGAKERJAAN

Angkatan kerja. Total angkatan kerja di wilayah Maluku pada tahun 2018 sebanyak 1.296.480 orang atau hanya 0,99 persen dari total angkatan kerja di Indonesia. Perkembangan selama periode 2014-2018 seluruh angkatan kerja di setiap provinsi di wilayah Maluku menunjukkan peningkatan , kecuali pada periode 2016-2017 menunjukkan penurunan. Angkatan kerja tertinggi di tahun 2018 berada di Provinsi Maluku (755.034 orang), dan di Maluku Utara sebanyak 541.446 orang.

Gambar 2 : Perkembangan Angkatan Kerja Antarprovinsi di Wilayah Maluku Periode 2014-2018

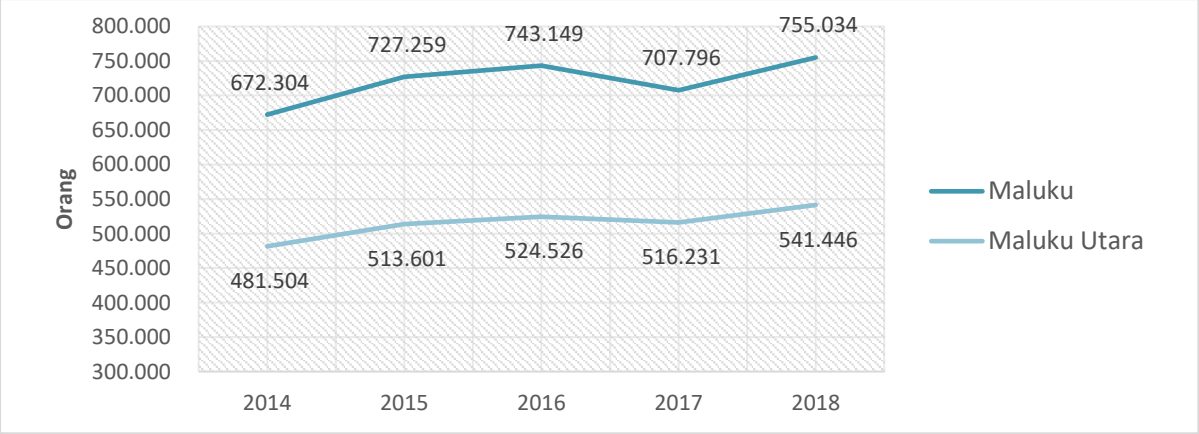

Sumber : Sakernas Agustus 2018, BPS

Tabel 3 : Perkembangan Angkatan Kerja Antarprovinsi di Wilayah Maluku Periode 2014-2018

Provinsi	2014	2015	2016	2017	2018	Δ (2018-2014)
Maluku	672.304	727.259	743.149	707.796	755.034	82.730
Maluku Utara	481.504	513.601	524.526	516.231	541.446	59.942
P. MALUKU	**1.153.808**	**1.240.860**	**1.267.675**	**1.224.027**	**1.296.480**	**142.672**

Sumber : Sakernas Agustus 2018, BPS

Menurut distribusinya sebanyak 3,14 juta orang Angkatan Kerja di wilayah Maluku pada tahun 2018 sebagian besar berada di perdesaan atau 66,43 persen dari total angkatan kerja, dan sisanya berada di perkotaan (33,57%). Angkatan kerja di perdesaan pada periode 2015-2016 menunjukkan peningkatan, namun menurun kembali di tahun 2018. Sementara itu, perkembangan angkatan kerja di perkotaan menunjukan tren peningkatan, walaupun mengalami sedikit penurunan di periode 2016-2017. Dominasi angkatan kerja antarprovinsi, menunjukkan penyebaran di perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan, terutama di Provinsi Maluku Utara yang mencapai 73,39 persen.

Gambar 3 : Perkembangan Angkatan Kerja diwilayah Maluku Menurut Perdesaan dan Perkotaan, Tahun 2018

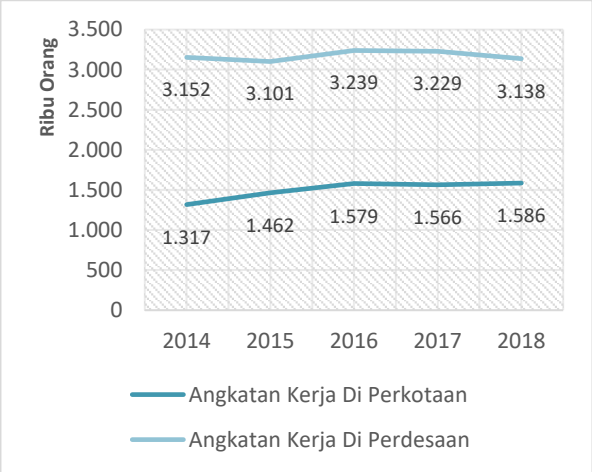

Gambar 4 : Penyebaran Angkatan Kerja Antarprovinsi Menurut Perdesaan dan Perkotaan, Tahun 2018

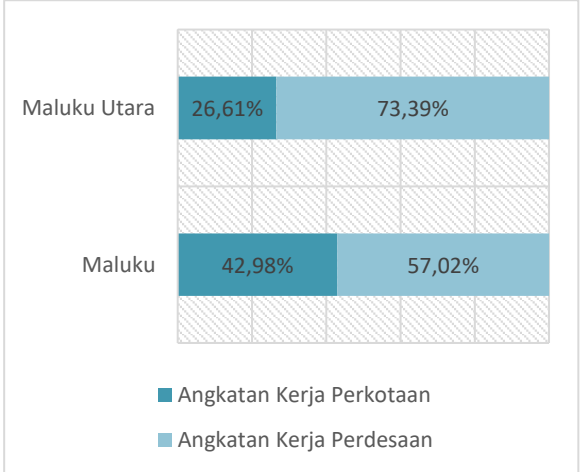

Sumber : Sakernas Agustus 2018, BPS

Berdasarkan gender pada tahun 2018 sebagian besar angkatan kerja adalah laki-laki sebanyak 796,60 ribu orang atau 61,44 persen dari total angkatan kerja. Dominasi angkatan laki-laki tersebut juga terdapat di Provinsi Maluku sebesar 60,63 persen dan Maluku Utara sebesar 62,57 persen. Tren angkatan kerja laki-laki maupun perempuan pada periode 2014-2018 menunjukkan peningkatan secara bertahap, walaupun menunjukkan penurunan di tahun 2017.

Gambar 5 : Perkembangan Angkatan Kerja diwilayah Maluku Menurut Laki-laki dan Perempuan, Tahun 2018

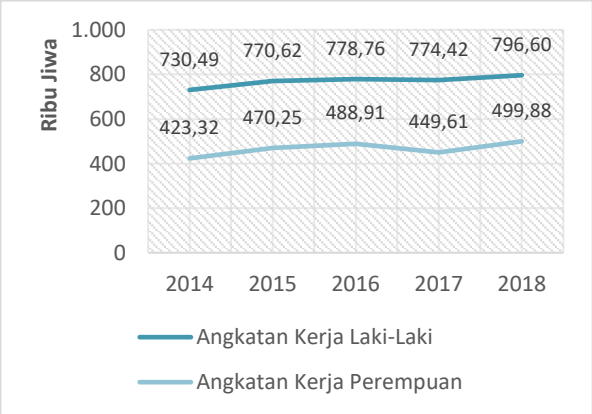

Gambar 6 : Penyebaran Angkatan Kerja Antarprovinsi Menurut Laki-laki dan Perempuan, Tahun 2018

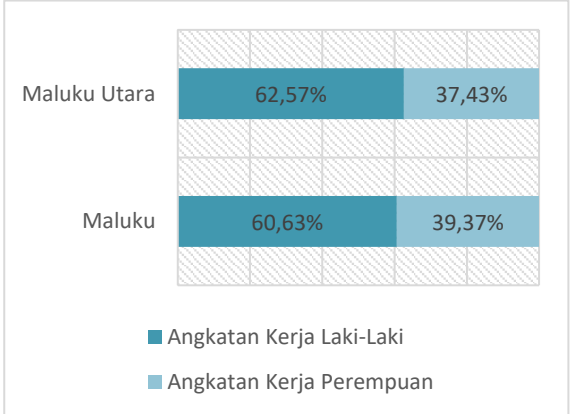

Sumber : Sakernas Agustus 2018, BPS

Angkatan Kerja Menurut Pendidikan. Angkatan Kerja di wilayah Maluku pada tahun 2018 sebagian besar berpendidikan terakhir maksimal SD sebanyak 32,79 persen dari angkatan kerja, kemudian berikutnya berpendidikan SLTA (34,31%), dan Sekolah Menengah Pertama (16,51%). Berdasarkan perkembangan angkatan kerja menurut pendidikan di wilayah Papua pada periode 2014-2018, terjadi penurunan pada angkatan kerja berpendidikan rendah (tidak/belum pernah sekolah hingga tamat SD/SMP), dan terjadi peningkatan untuk angkatan kerja berpendidikan SLTA dan Universitas.

Gambar 7 : Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Maluku, pada Tahun 2014 dan 2018

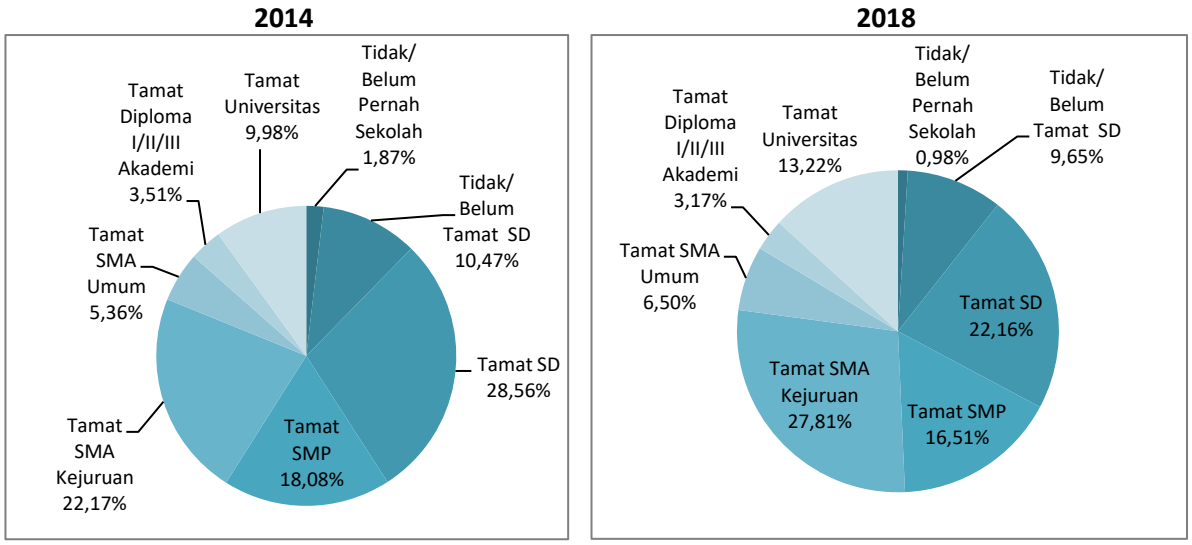

Sumber : Sakernas Agustus 2018, BPS

Dominasi angkatan kerja berpendidikan maksimal SD tertinggi terdapat di Provinsi Maluku Utara (36,93%), kemudian untuk berpendidikan SLTA tertinggi terdapat di Provinsi Maluku (37,34%), dan begitupun untuk berpendidikan Diploma + Universitas tertinggi berada di Provinsi Maluku (16,67%).

Tabel 4 : Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Maluku (Agustus 2018)

Provinsi	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tidak/ Belum Tamat SD	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						Jumlah
			Sekolah Dasar	Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Atas		Diploma I/II/III Akademi	Universitas	
					Umum	Kejuruan			
Maluku	0,86%	8,33%	20,62%	16,16%	30,01%	7,33%	3,50%	13,17%	100,00%
Maluku Utara	1,14%	11,49%	24,30%	17,00%	24,74%	5,34%	2,70%	13,29%	100,00%
P. MALUKU	**0,98%**	**9,65%**	**22,16%**	**16,51%**	**27,81%**	**6,50%**	**3,17%**	**13,22%**	**100,00%**

Sumber : Sakernas Agustus 2018, BPS

Pengangguran Terbuka. Pengangguran Terbuka di wilayah Maluku pada tahun 2018 sebanyak 80.722 orang atau dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,23 persen. TPT tersebut lebih tinggi dibanding TPT Nasional (5,34%). Sebagian besar pengangguran terbuka berada di perkotaan sebanyak 40.689 orang dengan TPT sebesar 8,68 persen. Perkembangan jumlah pengangguran terbuka di wilayah Maluku dalam periode 2014-2018 menunjukkan tren menurun, dengan penurunan sebanyak 15.418 orang atau berdasarkan TPT berkurang sebesar 2,11 persen. Penurunan jumlah pengangguran terbuka selama periode 2014-2018 di Perdesaan sebanyak 12.897 orang (TPT: 2,16%) lebih tinggi dibanding dengan perkotaan sebanyak 2.521 orang (TPT: 2,19%).

Tabel 5 : Perkembangan jumlah Pengangguran Terbuka dan TPT Menurut Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Maluku Pada Tahun 2014-2018.

Wilayah		TAHUN					Δ (2018-2014)
		2014	2015	2016	2017	2018	
Perkotaan	Jumlah	43.210	47.572	36.798	44.849	40.689	-2.521
	TPT	10,88%	11,31%	8,06%	10,15%	8,68%	-2,19%
Perdesaan	Jumlah	52.930	55.682	36.612	48.402	40.033	-12.897
	TPT	7,00%	6,79%	4,51%	6,19%	4,84%	-2,16%
Kota + Desa	**Jumlah**	**96.140**	**103.254**	**73.410**	**93.251**	**80.722**	**-15.418**
	TPT	**8,33%**	**8,32%**	**5,79%**	**7,62%**	**6,23%**	**-2,11%**

Sumber : Sakernas Agustus 2014-2018, BPS

Gambar 8 : Perkembangan jumlah Pengangguran Terbuka dan TPT Menurut Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Maluku Pada Tahun 2014-2018.

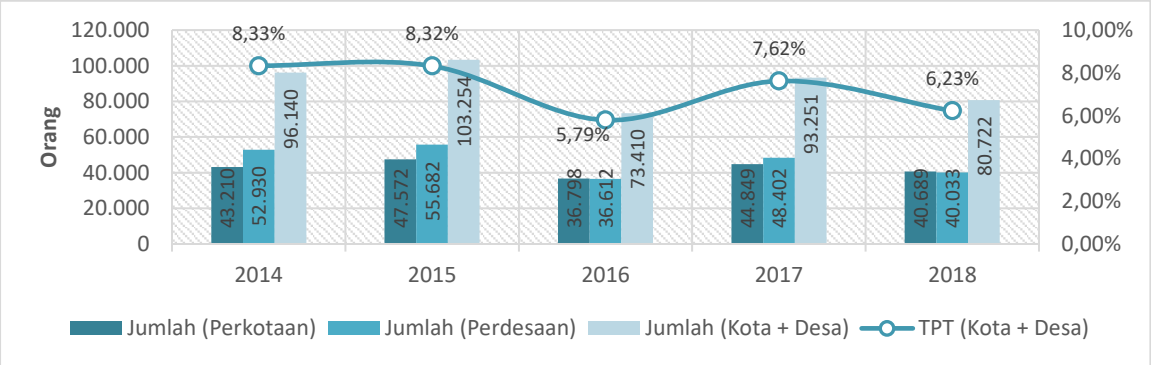

Sumber : Sakernas Agustus 2014-2018, BPS

Pengangguran Terbuka antarprovinsi di wilayah Maluku pada tahun 2018, tertinggi di Provinsi Maluku sebanyak 54.891 orang atau dengan TPT sebesar 7,27 persen. Berdasarkan perkembangannya pada periode 2014-2018, pengangguran terbuka di Provinsi Maluku dan Maluku Utara setiap tahunnya menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, dengan TPT tertinggi terjadi di tahun 2014 di Provinsi Maluku sebanyak 10,51 persen, dan TPT terendah sebesar 7,05 persen di tahun 2016. Sementara itu, di Provinsi Maluku Utara mencapai TPT tertinggi pada tahun 2015 sebesar 6,05 persen, dan terendah di tahun 2016 sebesar 4,01 persen.

Gambar 9 : Perkembangan jumlah Pengangguran Terbuka Antarprovinsi di Wilayah Maluku Pada Tahun 2014-2018.

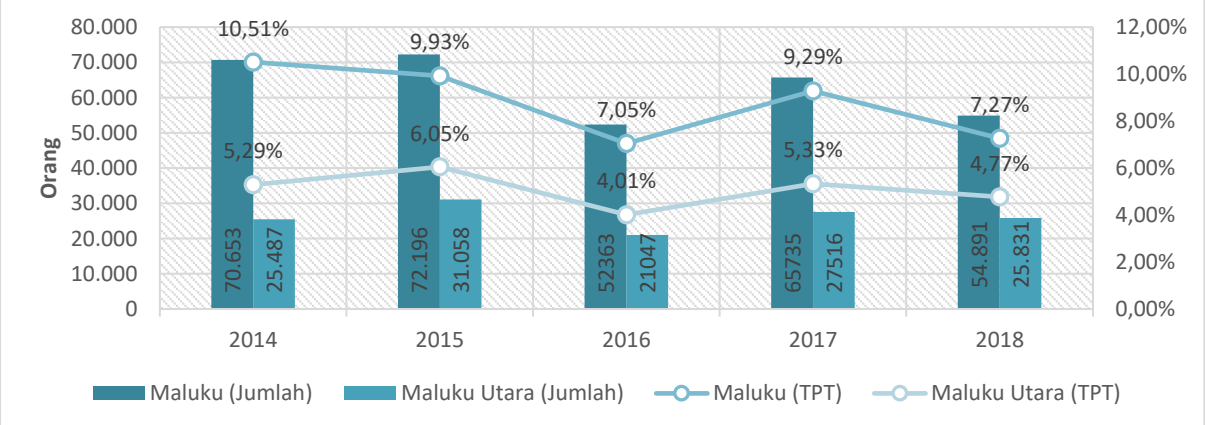

Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku pada tahun 2018 sebagian besar berada di Perkotaan (32.667 orang) atau dengan TPT sebesar 10,07 persen, sedangkan di Provinsi Maluku Utara sebagian besar berada di Perdesaan sebanyak 17.809 orang (TPT: 4,48%), namun TPT di Provinsi Maluku Utara menunjukkan angka lebih tinggi di perkotaan (5,57%). Pada periode 2014-2018, jumlah pengangguran terbuka di perkotaan Provinsi Maluku terjadi peningkatan sebanyak 112 orang, namun menunjukkan penurunan TPT sebesar 2,29 persen. Hal yang berbeda untuk di provinsi Maluku Utara menunjukkan peningkatan untuk jumlah pengangguran terbuka sebanyak 2.977 orang, dan peningkatan TPT sebesar 0,22 persen.

Tabel 6 : Perkembangan jumlah Pengangguran Terbuka dan TPT Menurut Perdesaan dan Perkotaan Antarprovinsi di Wilayah Maluku Pada Tahun 2014-2018.

PROVINSI WILAYAH			TAHUN					Δ (2018-2014)
			2014	2015	2016	2017	2018	
Maluku	PERKOTAAN	Jumlah	32.555	37.747	29.690	34.144	32.667	112
		TPT	12,35%	13,30%	9,89%	11,62%	10,07%	-2,29%
	PERDESAAN	Jumlah	38.098	34.449	22.673	31.591	22.224	-15.874
		TPT	9,32%	7,77%	5,12%	7,63%	5,16%	-4,16%
Maluku Utara	PERKOTAAN	Jumlah	10.655	9.825	7.108	10.705	8.022	-2.633
		TPT	7,97%	7,17%	4,54%	7,22%	5,57%	-2,40%
	PERDESAAN	Jumlah	14.832	21.233	13.939	16.811	17.809	2.977
		TPT	4,26%	5,64%	3,79%	4,57%	4,48%	0,22%

Sumber : Sakernas Agustus 2014-2018, BPS

Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan. Pengangguran terbuka di wilayah Maluku pada tahun 2018 sebagian besar berpendidikan terakhir SMA Umum (51,93%), Universitas (18,11%), SMA Kejuruan (10,81%). Pada kurun waktu 2014-2018, perkembangan pengangguran terbuka dengan tingkat pendidikan SMA umum meningkat sebesar 1,14 persen, SMA Kejuruan meningkat sebesar 3,29 persen, dan pendidikan terakhir universitas meningkat sebesar 1,39 persen.

Gambar 10 : Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Maluku, pada Tahun 2014 dan 2018.

Tahun 2014

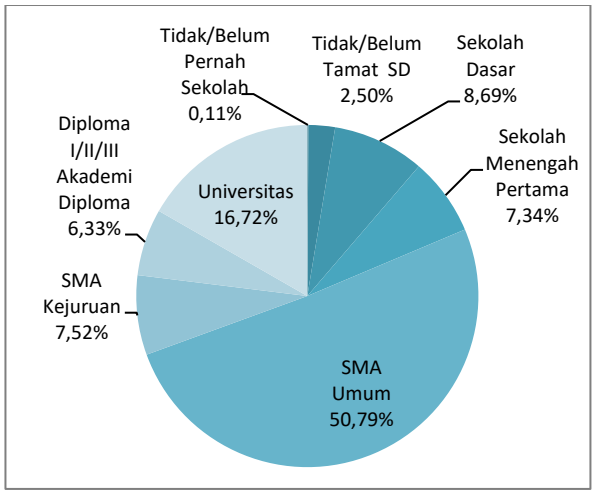

Tahun 2018

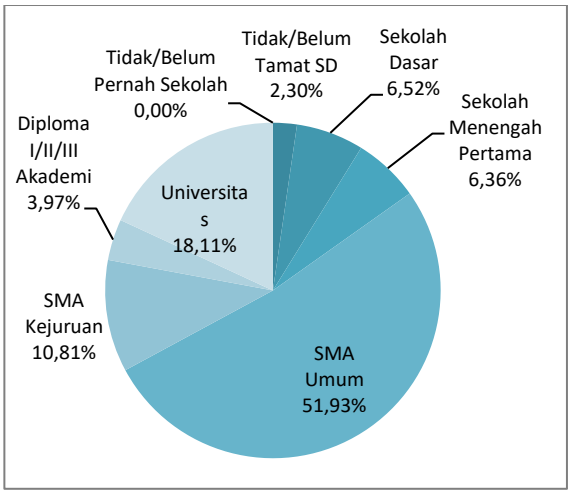

Sumber : Sakernas Agustus 2018, BPS

Tabel 7 : Perkembangan Jumlah dan Persentase Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Maluku pada Tahun 2014 dan 2018.

Provinsi	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tidak/ Belum TamatSD	PendidikanTertinggi yang Ditamatkan						Jumlah
			Sekolah Dasar	Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Atas		Diploma I/II/III Akademi	Universitas	
					Umum	Kejuruan			
JUMLAH 2018	-	1.859	5.263	5.135	41.919	8.724	3.201	14.621	80.722
JUMLAH 2014	103	2.408	8.357	7.058	48.826	7.231	6.084	16.073	96.140
Δ ∑ (2018 – 2014)	**-103**	**-549**	**-3.094**	**-1.923**	**-6.907**	**1.493**	**-2.883**	**-1.452**	**-15.418**
PERSENTASE (2018)	0,00%	2,30%	6,52%	6,36%	51,93%	10,81%	3,97%	18,11%	100,00%
PERSENTASE (2014)	0,11%	2,50%	8,69%	7,34%	50,79%	7,52%	6,33%	16,72%	100,00%
Δ % (2018 – 2014)	**-0,11%**	**-0,20%**	**-2,17%**	**-0,98%**	**1,14%**	**3,29%**	**-2,36%**	**1,39%**	**0%**

Sumber : Sakernas Agustus 2014-2018, BPS

Pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan antar provinsi di wilayah Maluku pada tahun 2018, pengangguran terbuka yang berpendidikan tinggi sebagian besar berada di provinsi Maluku, yaitu lulusan SLTA (SMA Umum/Kejuruan) (66,82%), dan Diploma/ Universitas di (23,06%). Sementara pengangguran terbuka dengan pendidikan rendah sebagian besar berada di provinsi Maluku Utara, yaitu berpendidikan maksimal SD (18,28%) dan SLTP (7,67%).

Gambar 11 : Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Maluku, pada Tahun 2018.

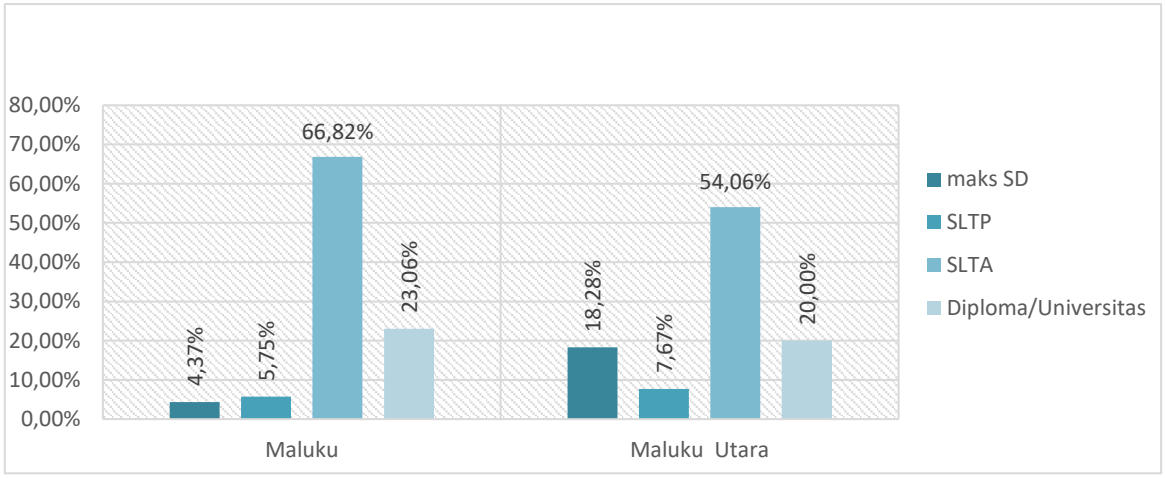

Sumber : Sakernas Agustus 2014-2018, BPS

1.1.3 PENDIDIKAN

Harapan Lama Sekolah (HLS). Berdasarkan Angka Harapan Lama sekolah antarprovinsi di Wilayah Maluku tahun 2014-2018 menunjukkan peningkatan sejalan dengan perkembangan HLS secara nasional yaitu dari 12,39 tahun menjadi 12,91 tahun. Pada tahun 2018, AHH provinsi di wilayah Maluku sudah berada di atas HLS nasional, yaitu sebesar 13,92 tahun di Provinsi Maluku, dan sebesar 13,62 tahun di Provinsi Maluku Utara.

Gambar 12 : Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Antarprovinsi di wilayah Maluku pada tahun 2014 dan 2018.

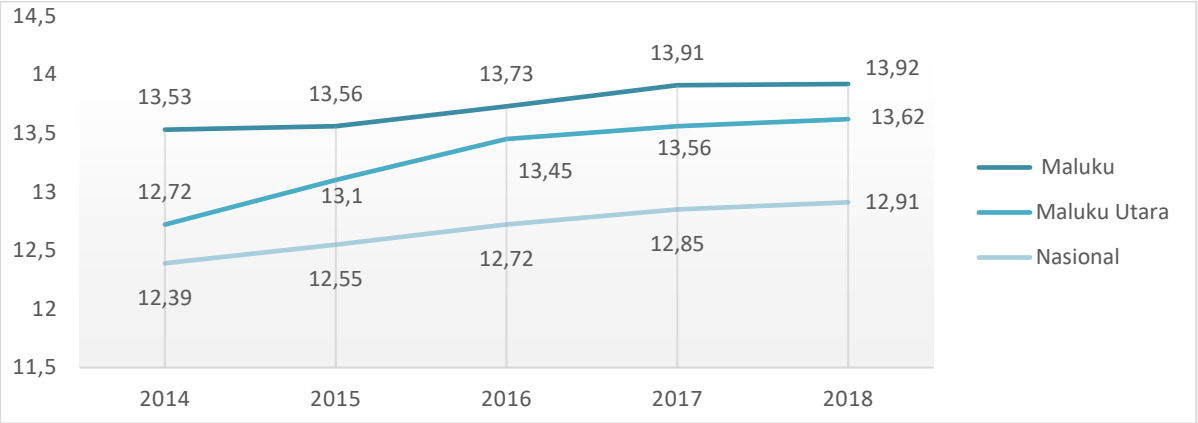

Sumber : BPS,2019

Perkembangan HLS antarprovinsi di wilayah Maluku, seluruh provinsi menunjukkan tren peningkatan dengan peningkatan tertinggi pada periode 2014-2018 adalah di Provinsi Maluku Utara sebesar 0,90 tahun, lebih tinggi dibanding peningkatan HLS Nasional (0,52 tahun).

Tabel 8 : Perkembangan Harapan Lama Sekolah Periode 2014-2018 Antarprovinsi Di Wilayah Maluku

Provinsi	Harapan Lama Sekolah (Tahun)					
	2014	2015	2016	2017	2018	Δ (2014-2018)
Maluku	13,53	13,56	13,73	13,91	13,92	0,39
Maluku Utara	12,72	13,1	13,45	13,56	13,62	0,90
NASIONAL	**12,39**	**12,55**	**12,72**	**12,85**	**12,91**	**0,52**

Sumber : BPS, 2019

Rata-rata Lama sekolah (RLS). Berdasarkan Angka RLS antarprovinsi di Wilayah Maluku tahun 2014-2018 menunjukkan peningkatan sejalan dengan perkembangan RLS secara nasional yaitu dari 7,73 tahun menjadi 8,17 tahun. Selama periode 2014-2018, RLS di Provinsi Maluku dan Maluku Utara sudah berada di atas RLS Nasional, dengan RLS tertinggi pada tahun 2018 berada di Provinsi Maluku sebesar 9,58 tahun.

Gambar 13 : Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Antarprovinsi di wilayah Maluku pada tahun 2014 dan tahun 2018.

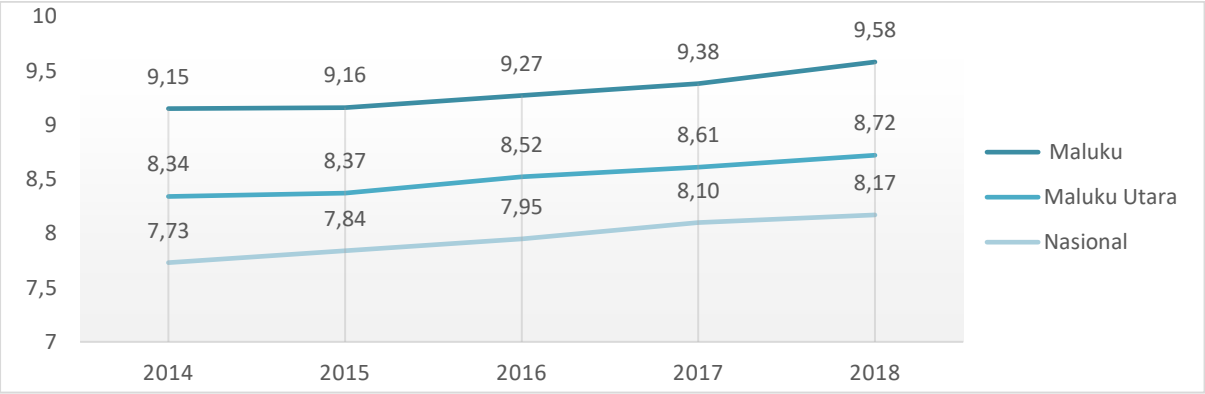

Sumber : BPS, 2019

Perkembangan RLS antarprovinsi di wilayah Maluku, seluruh provinsi menunjukkan tren peningkatan dengan peningkatan tertinggi pada periode 2014-2018 adalah di Provinsi Maluku sebesar 0,43 tahun, dan Maluku Utara sebesar 0,38 tahun.

Tabel 9 : Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Antarprovinsi di wilayah Maluku pada Tahun 2014 - 2018.

Provinsi	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)					
	2014	2015	2016	2017	2018	Δ (2014-2018)
Maluku	9,15	9,16	9,27	9,38	9,58	0,43
Maluku Utara	8,34	8,37	8,52	8,61	8,72	0,38
NASIONAL	**7,73**	**7,84**	**7,95**	**8,10**	**8,17**	**0,44**

Sumber : BPS, 2019

1.1.4 KESEHATAN

Kesehatan. Perkembangan kondisi kesehatan penduduk antarprovinsi di Wilayah Maluku selama periode tahun 2014-2018 menunjukkan kondisi perbaikan yang diindikasikan oleh menurunnya Status Gizi buruk pada balita, dan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH). Sementara untuk prevalensi penyakit menular diindikasikan oleh jumlah kasus HIV dan AIDS yang masih menunjukkan kecenderungan peningkatan sejalan dengan pelaporan kasus di daerah.

Angka Harapan Hidup. Berdasarkan Angka Harapan Hidup (AHH) antarprovinsi di Wilayah Maluku tahun 2014-2018 menunjukkan peningkatan sejalan dengan perkembangan AHH secara nasional yaitu dari 70,59 tahun menjadi 71,20 tahun. AHH di Provinsi Maluku dan Maluku Utara masih berada di bawah AHH Nasional, dengan AHH di Provinsi Maluku pada tahun 2018 sebesar 67,80 tahun lebih tinggi dibanding dengan Provinsi Maluku sebesar 65,59 tahun.

Gambar 14 : Angka Harapan Hidup (AHH) antarprovinsi di Wilayah Maluku tahun 2014-2018

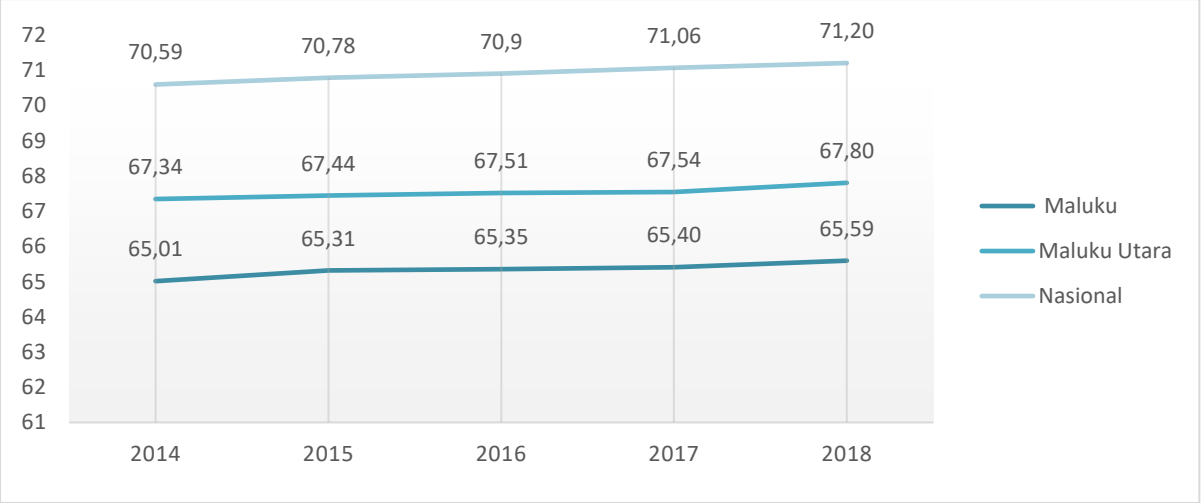

Sumber: Riskesdas 2013, 2018, Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes.

Perkembangan AHH selama periode 2014-2018, terjadi peningkatan secara bertahap dengan peningkatan tertinggi di Provinsi Maluku sebesar 0,58 tahun, sementara peningkatan AHH di Provinsi Maluku Utara sebesar 0,46 tahun, dan peningkatan AHH di kedua provinsi tersebut masih berada di bawah peningkatan Nasional.

Tabel 10 : Angka Harapan Hidup (AHH) antarprovinsi di Wilayah Maluku tahun 2014-2018

Provinsi	Angka Harapan Hidup (tahun)					
	2014	2015	2016	2017	2018	Δ (2014-2018)
Maluku	65,01	65,31	65,35	65,40	65,59	0,58
Maluku Utara	67,34	67,44	67,51	67,54	67,80	0,46
NASIONAL	**70,59**	**70,78**	**70,9**	**71,06**	**71,20**	**0,61**

Sumber : BPS, 2019

Status Gizi Balita

Gizi buruk dapat terjadi pada semua kelompok umur, tetapi yang perlu lebih diperhatikan pada kelompok bayi dan balita. Pada usia 0-2 tahun merupakan masa tumbuh kembang yang optimal *(golden period)* terutama untuk pertumbuhan janin sehingga bila terjadi gangguan pada masa ini tidak dapat dicukupi pada masa berikutnya dan akan berpengaruh negatif pada kualitas generasi penerus.

Status gizi balita dapat diukur dengan indeks berat badan per umur (BB/U), tinggi badan per umur (TB/U) dan berat badan per tinggi badan (BB/TB). Berdasarkan Data Riskesdas 2018, prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang bayi berusia di bawah lima tahun (Balita usia 0-59 bulan) di Wilayah Maluku, angka tertinggi terdapat di Provinsi Maluku sebesar 24,90 persen yang terdiri dari 7,4 persen Gizi Buruk dan 17,5 persen Gizi Kurang. Berdasarkan angka status gizi buruk dan sedang tersebut di Provinsi Maluku dan Maluku Utara memiliki angka lebih tinggi dibanding dengan angka Nasional (17,7%).

Gambar 15 : Persentase Balita Menurut Status Gizi Dengan Indeks Berat Badan (Bb)/ Umur (U) di Wilayah Maluku Tahun 2018

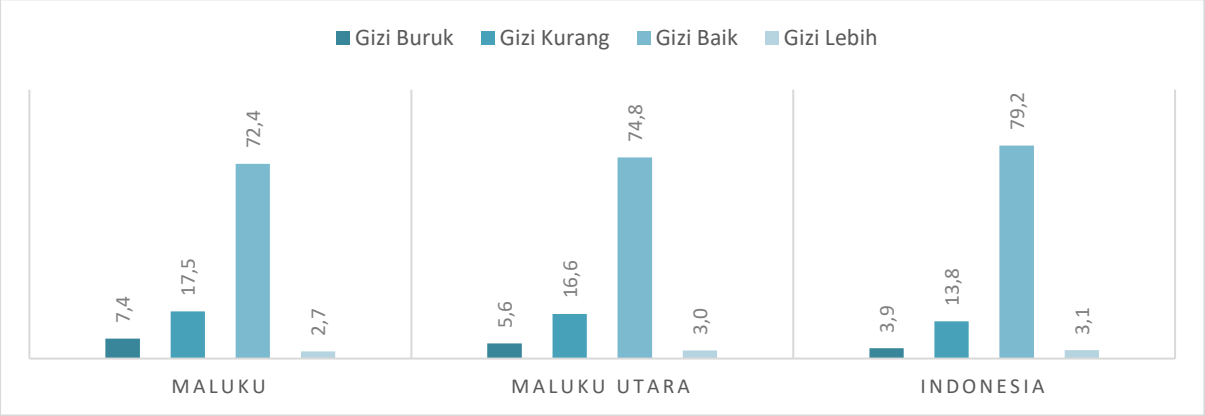

Sumber: Riskesdas 2013, 2018, Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes.

Perkembangan status gizi balita pada periode 2013-2018 hampir seluruh provinsi di wilayah Maluku menunjukkan perkembangan penurunan, dengan penurunan tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara, yaitu gizi buruk menurun sebesar 3,6 persen, dan untuk Gizi Kurang sebesar 0,9 persen. Sementara itu di Provinsi Maluku menunjukkan penurunan untuk balita gizi buruk (3,1%), namun

terjadi peningkatan untuk balita gizi kurang sebesar 0,3 persen. Untuk balita gizi lebih menunjukkan penurunan di kedua provinsi, dengan penurunan tertinggi di provinsi Maluku sebesar 1,8 persen.

Tabel 11 : Perkembangan Persentase Balita Menurut Status Gizi Dengan Indeks BB/U di Wilayah Maluku pada Periode Tahun 2013 – 2018.

Provinsi	Gizi Buruk			Gizi Kurang			Gizi Baik			Gizi Lebih		
	2013	2018	Δ ('13-'18)	2013	2018	Δ ('13-'18)	2013	2018	Δ ('13-'18)	2013	2018	Δ ('13-'18)
Maluku	10,5	7,4	-3,1	17,5	17,8	0,3	67,2	72,4	5,2	4,5	2,7	-1,8
Maluku Utara	9,2	5,6	-3,6	16,6	15,7	-0,9	71,7	74,8	3,1	3,4	3,0	-0,4
INDONESIA	**5,7**	**3,9**	**-1,8**	**13,9**	**13,8**	**-0,1**	**75,9**	**79,2**	**3,3**	**4,5**	**3,1**	**-1,4**

Sumber: Riskesdas 2013, 2018, Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes.

Status Gizi Balita Dengan Indeks Tinggi Badan (TB)/Umur (U) - Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Prevalensi Balita Sangat Pendek dan Pendek di Wilayah Maluku, angka tertinggi terdapat di Provinsi Maluku sebesar 34,0 persen yang terdiri dari 12,5 persen Balita Sangat Pendek dan 21,5 persen Balita Pendek. Angka stunting di Provinsi Maluku dan Maluku Utara (31,4%) masing menunjukkan angka lebih tinggi dibanding angkat stunting nasional (30,8%).

Gambar 16 : Persentase Balita Usia 0-59 Bulan Menurut Status Gizi Dengan Indeks Tinggi Badan (TB)/Umur (U) Di Wilayah Maluku Tahun 2018.

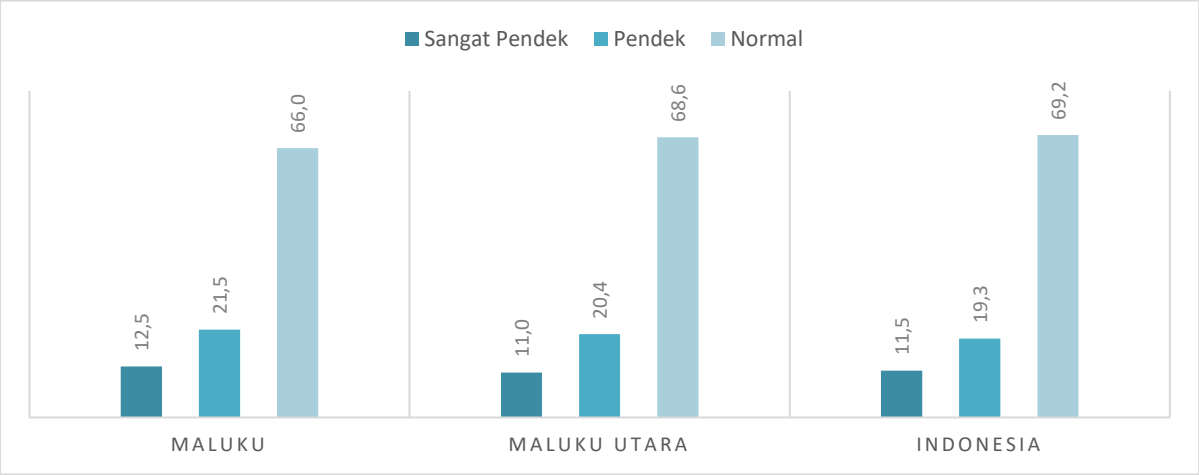

Sumber: Riskesdas 2013, 2018, Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes.

Perkembangan proporsi status gizi balita sangat pendek dan pendek (stunting) antarprovinsi di wilayah Maluku selama periode 2013-2018 menunjukkan penurunan untuk balita sangat pendek, dengan penurunan tertinggi terdapat di Provinsi Maluku sebesar 7,9 persen. Pada periode yang sama, Balita Pendek di Provinsi Maluku Utara berkurang sebesar 2,4 persen, sementara di Provinsi Maluku menunjukkan peningkatan sebesar 1,3 persen.

Tabel 12 : Perkembangan Persentase Balita Menurut Status Gizi Dengan Indeks BB/U di Wilayah Maluku pada Periode Tahun 2013 – 2018.

Provinsi	Sangat Pendek			Pendek			Normal		
	2013	2018	Δ ('13-'18)	2013	2018	Δ ('13-'18)	2013	2018	Δ ('13-'18)
Maluku	20,4	12,5	-7,9	20,2	21,5	1,3	59,4	66,0	6,6
Maluku Utara	18,3	11,0	-7,3	22,8	20,4	-2,4	59,0	68,6	9,6
INDONESIA	**18,0**	**11,5**	**-6,5**	**19,2**	**19,3**	**0,1**	**62,8**	**69,2**	**6,4**

Sumber: Riskesdas 2013, 2018, Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes.

Persentase Balita Menurut Status Gizi Dengan Indeks Berat Badan (BB)/Tinggi Badan (TB)

prevalensi Gizi Balita Sangat Kurus dan Kurus di Wilayah Maluku menunjukkan angka lebih tinggi dibanding dengan angka Nasional (10,2 persen). Persentase Balita Sangat Kurus dan Kurus tertinggi terdapat di Provinsi Maluku sebesar 13,1 persen yang terdiri dari 4,0 persen Balita Sangat Kurus dan 9,1 persen Balita Kurus.

Gambar 17 : Persentase Balita Usia 0-59 Bulan Menurut Status Gizi Dengan Indeks Berat Badan (TB)/Tinggi Badan (TB) Di Wilayah Maluku Tahun 2018.

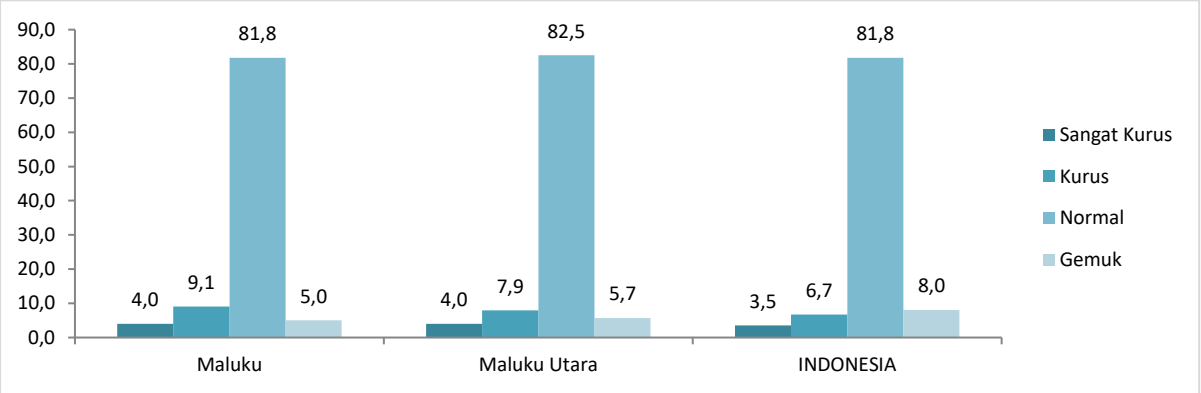

Sumber: Riskesdas 2013, 2018, Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes.

Perkembangan proporsi status gizi balita sangat kurus dan kurus antarprovinsi di wilayah Maluku pada periode 2013-2018 menunjukkan penurunan untuk balita sangat kurus di Provinsi Maluku (2,1%), namun terjadi peningkatan di Provinsi Maluku Utara sebesar 0,1 persen. Sementara itu, untuk balita kurus terjadi penurunan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, dengan penurunan tertinggi di Provinsi Maluku sebesar 1,0 persen. Untuk Balita Gemuk menunjukkan perkembangan penurunan, dengan penurunan tertinggi di Provinsi Maluku Utara sebesar 1,6 persen.

Tabel 13 : Perkembangan Persentase Balita Menurut Status Gizi Dengan Indeks BB/Tinggi Badan (TB) di Wilayah Maluku pada Periode Tahun 2013 – 2018.

Provinsi	Sangat Kurus			Kurus			Normal			Gemuk		
	2013	2018	Δ ('13-'18)	2013	2018	Δ ('13-'18)	2013	2018	Δ ('13-'18)	2013	2018	Δ ('13-'18)
Maluku	6,1	4,0	-2,1	10,1	9,1	-1,0	77,4	81,8	4,4	6,4	5,0	-1,4
Maluku Utara	3,9	4,0	0,1	8,3	7,9	-0,4	80,5	82,5	2,0	7,3	5,7	-1,6
INDONESIA	**5,3**	**3,5**	**-1,8**	**6,8**	**6,7**	**-0,1**	**76,1**	**81,8**	**5,7**	**11,8**	**8,0**	**-3,8**

Sumber: Riskesdas 2013, 2018, Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes.

Penyakit menular HIV/AIDS, merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi *Human Immunodeficiency Virus* yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain.Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dulu dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui layanan konseling dan tes HIV baik secara sukarela (Konseling dan Tes Sukarela/KTS) maupun atas dasar Tes atas Inisiatif Pemberi layanan kesehatan dan Konseling (TIPK). Sedangkan prevalensi HIV pada suatu populasi tertentu dapat diketahui melalui metode sero survey, dan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP).

Jumlah kasus baru HIV dan AIDS yang dilaporkan pada periode 2014-2018 antarprovinsi di Wilayah Maluku menunjukkan tren peningkatan untuk kasus HIV dan menunjukkan penurunan untuk kasus AIDS. Kasus baru HIV tertinggi berada di Provinsi Maluku sebanyak 2.594 orang dan di Maluku Utara sebanyak 573 orang. Hal yang sama untuk kasus baru AIDS, tertinggi berada Provinsi Maluku sebanyak 470 orang dan di Maluku Utara sebanyak 400 orang.

Gambar 18 : Perkembangan Kasus baru HIV dan AIDS pada Tahun 2014-2018 di wilayah Maluku

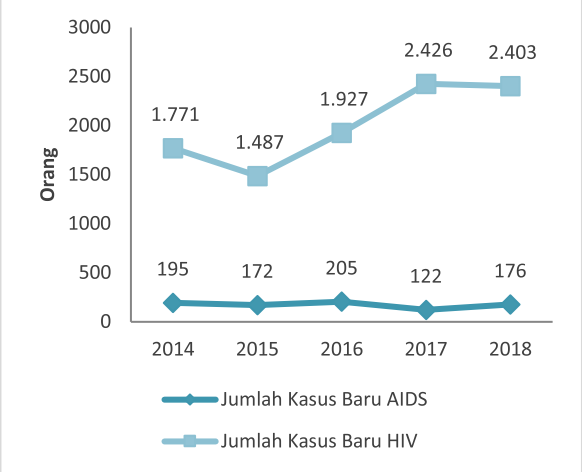

Gambar 19 : Kasus baru HIV dan AIDS Komulatif Tahun 2014-2018 Antar Provinsi di Wilayah Maluku

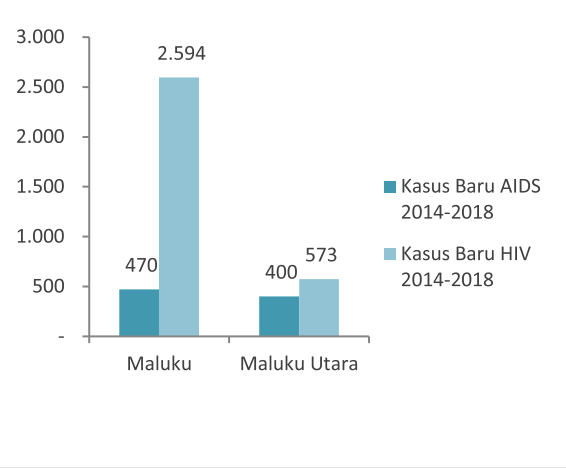

Sumber: Riskesdas 2013, 2018, Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes.

Pada periode 2014-2018, kasus baru HIV dan AIDS setiap tahun menunjukkan angka yang fluktuatif. Namun jika membandingkan jumlah kasus AIDS pada tahun 2014 dan 2018, peningkatan tertinggi terjadi di Provinsi Maluku dengan jumlah kasus tertinggi terjadi di tahun 2016 sebesar 128 orang dan menurun kembali di tahun 2018 menjadi 68 kasus. Sedangkan kasus AIDS di Provinsi Maluku Utara menunjukkan jumlah kasus terendah di tahun 2017 sebesar 34 orang, dan meningkat kembali di tahun 2018 menjadi 108 orang. Untuk kasus HIV lebih dominan di Provinsi Maluku dengan jumlah kasus tertinggi sebanyak 688 orang di tahun 2017, dan menurun kembali menjadi 462 orang di tahun 2018. Sementara itu, jumlah kasus HIV di Maluku Utara menunjukkan tren meningkat mulai sebanyak 45 kasus di tahun 2015 menjadi 200 di tahun 2018.

Gambar 20 : Perkembangan Kasus Baru HIV dan AIDS pada Tahun 2014 – 2018 di Wilayah Maluku

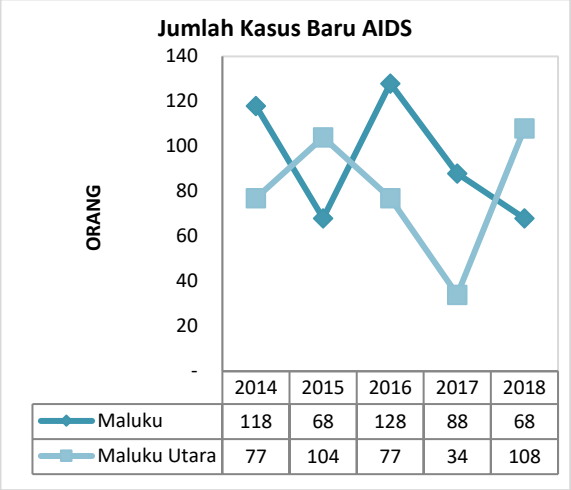

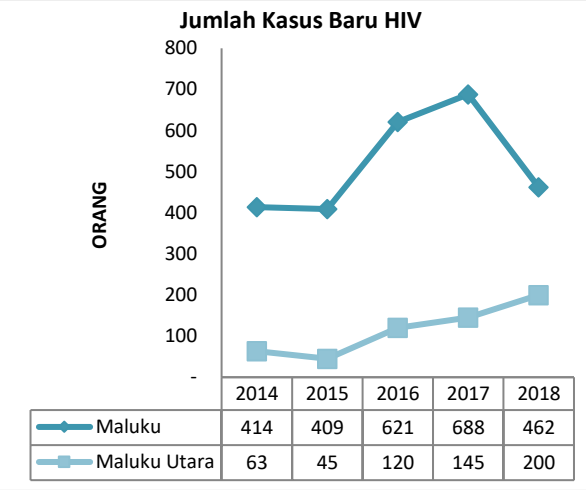

Sumber: Riskesdas 2013, 2018, Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes.

1.1.5 EKONOMI MASYARAKAT

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2018, persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di perdesaan seluruh provinsi di wilayah Maluku sebagian besar untuk makanan, dengan Persentase tertinggi berada di Provinsi Maluku (55,09%) dan terendah di Provinsi Maluku Utara sebesar 54,80 persen. Sedangkan untuk pengeluaran perkapita di perkotaan sebagian besar untuk non makanan, dengan porsi tertinggi berada di Provinsi Maluku Utara sebesar 56,84 persen.

Untuk total nilai pengeluaran untuk makanan dan non makanan di perdesaan maupun di perkotaan tertinggi berada di Provinsi Maluku Utara, yaitu di perdesaan sebesar Rp. 824.167,00, sedangkan di perkotaan sebesar Rp. 1.461.067,00.

Tabel 14 : Persentase Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Di Perdesaan dan Perkotaan menurut Provinsi Di Wilayah Maluku pada Tahun 2018

Provinsi	PERDESAAN			PERKOTAAN		
	Makanan (%)	Non Makanan (%)	Total (Rp)	Makanan (%)	Non Makanan (%)	Total (Rp)
Maluku	55,09	44,91	719 911	47,65	52,35	1 309 112
Maluku Utara	54,80	45,20	824 167	43,16	56,84	1 461 067
INDONESIA	**56,28**	**43,72**	**852 105**	**45,98**	**54,02**	**1 350 524**

Sumber : BPS, 2019

Berdasarkan perkembangan total pengeluaran untuk makanan dan non makanan di perdesaan pada periode 2014-2018 menunjukkan tren peningkatan, dengan total pengeluaran di Provinsi Maluku Utara lebih tinggi dibanding dengan Provinsi Maluku.

Gambar 21 : Perkembangan Persentase Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Di Perdesaan menurut Provinsi Di Wilayah Maluku pada Tahun 2014- 2018.

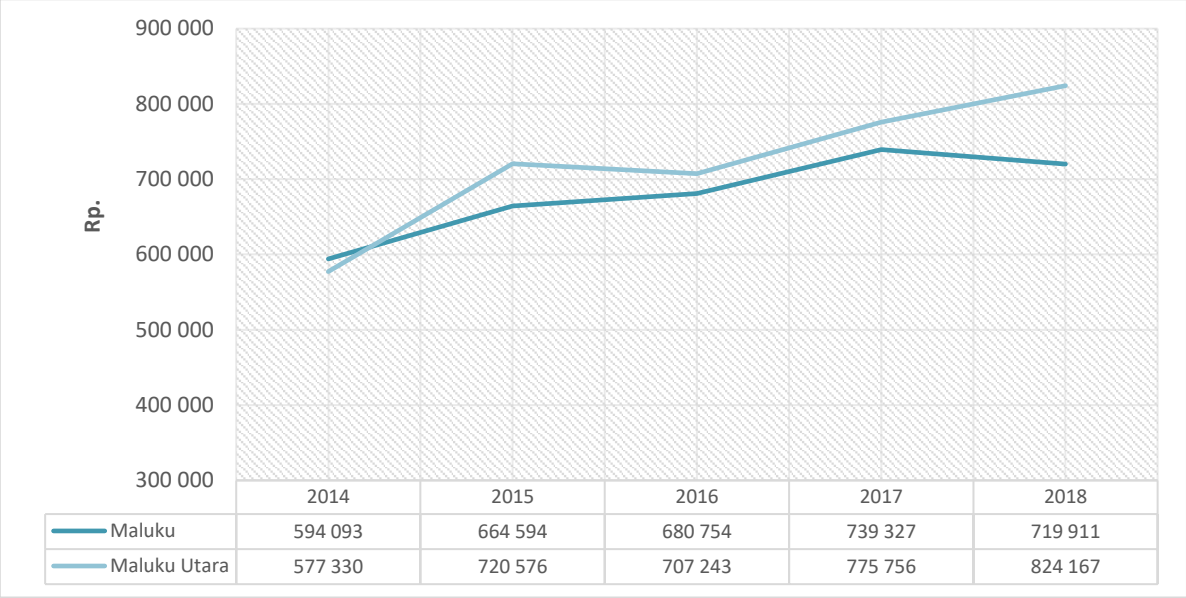

	2014	2015	2016	2017	2018
Maluku	594 093	664 594	680 754	739 327	719 911
Maluku Utara	577 330	720 576	707 243	775 756	824 167

Sumber : BPS, 2019

Sementara untuk perkembangan total pengeluaran untuk makanan dan non makanan di perkotaan pada periode 2014-2018 menunjukkan tren peningkatan, dengan total pengeluaran di Provinsi Maluku Utara pada periode 2017-2018 lebih tinggi dibanding dengan Provinsi Maluku.

Gambar 22 : Perkembangan Persentase Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Di Perkotaan menurut Provinsi Di Wilayah Maluku pada Tahun 2014- 2018.

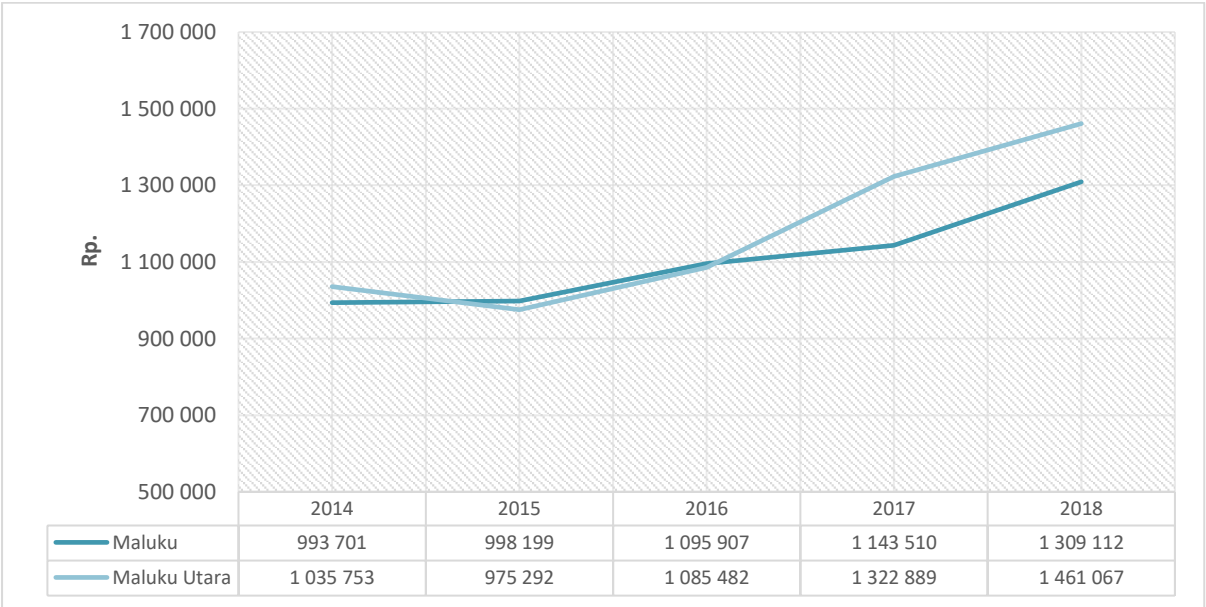

	2014	2015	2016	2017	2018
Maluku	993 701	998 199	1 095 907	1 143 510	1 309 112
Maluku Utara	1 035 753	975 292	1 085 482	1 322 889	1 461 067

Sumber : BPS, 2019

1.2 PERKEMBANGAN EKONOMI WILAYAH

1.2.1 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Pulau Maluku selama periode 2014-2018 mengalami peningkatan dan tumbuh rata-rata di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 6,84 persen meningkatn dari tahun 2017 (6,66 persen). (**Gambar 23**). Sektor yang memiliki andil terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Pulau Maluku tahun 2018 adalah sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 1,08 persen, dikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 1,31 persen, dan sektor administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan social sebesar 1,51 persen (**Tabel 15**).

Gambar 23: Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 Pulau Maluku dan Nasional Tahun 2014-2018, (persen).

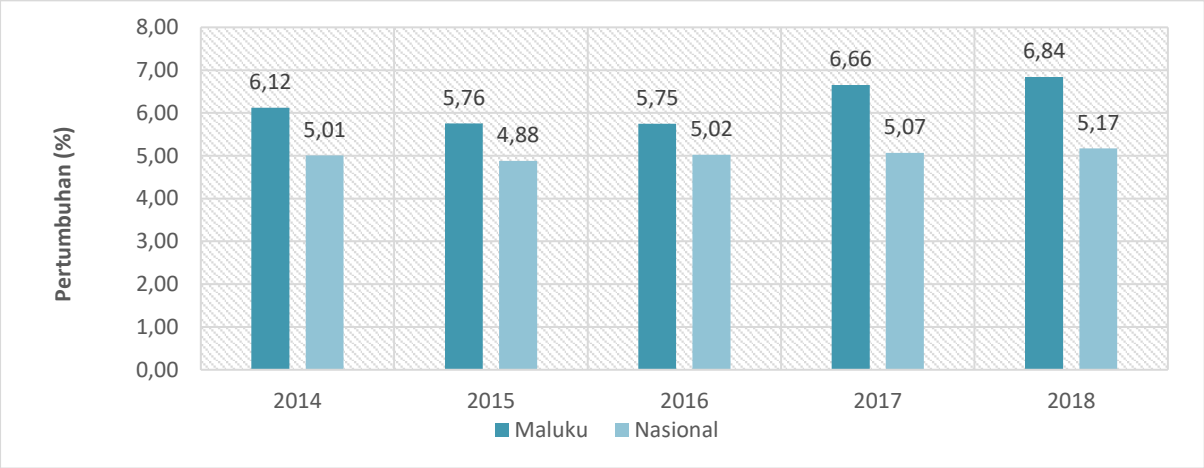

Sumber: PDRB Lapangan Usaha Provinsi 2014-2018, BPS

Tabel 15: Sumber Utama Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 Pulau Maluku Tahun 2014-2018, (persen)

Lapangan Usaha	Andil Lapangan Usaha terhadap Pertumbuhan Ekonomi (%)					
	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.17	0.36	1.06	1.10	1.08	0.95
Pertambangan dan Penggalian	- 0.35	0.27	- 0.00	0.48	0.42	0.16
Industri Pengolahan	0.49	0.21	0.58	0.99	0.87	0.63
Pengadaan Listrik dan Gas	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.02	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01
Konstruksi	0.45	0.50	0.43	0.46	- 0.53	0.26
Perdagangan Besar dan Eceran	1.23	1.22	1.04	1.25	1.31	1.21
Transportasi dan Pergudangan	0.49	0.34	0.35	0.32	0.40	0.38
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.07	0.08	0.02	0.06	0.06	0.06
Informasi dan Komunikasi	0.38	0.36	0.34	0.27	0.26	0.32
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.19	0.28	0.36	0.17	0.24	0.25
Real Estat	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Jasa Perusahaan	0.04	0.03	0.02	0.04	0.04	0.03
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.33	1.55	0.98	1.05	1.51	1.28
Jasa Pendidikan	0.38	0.34	0.33	0.26	0.29	0.32
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.12	0.12	0.13	0.11	0.15	0.13
Jasa lainnya	0.08	0.08	0.09	0.06	0.11	0.08

Sumber: PDRB Lapangan Usaha Provinsi 2014-2018, BPS

Pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Maluku, rata-rata tumbuh positif dan menunjukan peningkatan setiap tahunna, dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata berada di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional (**Tabel 16**). Sumber utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku dan Maluku Utara terbesar dari sektor Sektor-sektor yang memberikan andil terbesar dalam pertumbuhan ekonomi provinsi Maluku terbesar dri sektor pertanian, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan social lainnya, dan sektor perdagangan besar dan eceran. Sementara sumber utama pertumbuhan di Maluku Utara terbesar dari sektor perdagangan besar dan eceran, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan social lainnya, dan sektor kontruksi (**Tabel 17**).

Tabel 16 : Pertumbuhan Ekonomi ADHK Tahun 2010 Provinsi di Pulau Maluku Tahun 2014-2018, (dalam persen)

Propinsi	Pertumbuhan (%)					rata-rata 2014-2018
	2014	2015	2016	2017	2018	
Maluku	6.64	5.48	5.73	5.82	5.94	5.92
Maluku Utara	5.49	6.10	5.77	7.67	7.92	6.59
P. MALUKU	**6.12**	**5.76**	**5.75**	**6.66**	**6.84**	**6.22**
NASIONAL	**5.01**	**4.88**	**5.02**	**5.07**	**5.17**	**5.03**

Sumber: PDRB Lapangan Usaha Provinsi 2014-2018, BPS

Tabel 17: Sumber Utama Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Maluku Tahun 2014-2018, (dalam persen).

Lapangan Usaha	Rata-rata Sumber Utama Pertumbuhan Ekonomi %)	
	Maluku	Maluku Utara
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.09	0.36
Pertambangan dan Penggalian	0.19	0.27
Industri Pengolahan	0.33	0.21
Pengadaan Listrik dan Gas	0.01	0.01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.02	0.00
Konstruksi	0.40	0.50
Perdagangan Besar dan Eceran	0.94	1.22
Transportasi dan Pergudangan	0.29	0.34
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.07	0.08
Informasi dan Komunikasi	0.30	0.36
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.25	0.28
Real Estat	0.01	0.01
Jasa Perusahaan	0.04	0.03
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.37	1.55
Jasa Pendidikan	0.42	0.34
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.10	0.12
Jasa lainnya	0.09	0.08

Sumber: PDRB Lapangan Usaha Provinsi 2014-2018, BPS

Peran dan Struktur Ekonomi Maluku. Nilai PDRB Pulau Maluku tahun 2014 berdasarkan ADHB sebesar Rp. 55,70 triliun meningkat menjadi Rp. 79,56 pada tahu 2018, dan berdasarkan ADHK (2010)

pada tahun 2014 sebesar Rp. 42,78 triliun meningkat menjadi Rp. 54,52 triliun di tahun 2018 (**Tabel 18**). Kontribusi perekonomian Pulau Maluku terhadap nasional (periode 2014-2018) rata-rata sebesar 0,53 persen atau mengalami sedikit peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya (**Tabel 19**). Struktur perekonomian Pulau Maluku masih di dominasi oleh empat sektor utama, yaitu sektor pertanian dengan rata-rata memberikan kontibusi sebesar 18,49 persen, sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 10,88 persen, dan sektor jasa lainnya sebesar 16,83 persen, dan sektor adminitrasi pemerintahan dan pertahanan sebesar 14,75 persen (**Tabel 20**). Hal yang sama untuk struktur perekonomian Provinsi Maluku dan Maluku Utara terbesar disumbang dari sektor pertanan, sektor perdagangan besar dan eceran, dan sektor administrasi pemerintahan dan pertahanan (**Tabel 21**).

Tabel 18: Nilai PDRB ADHB dan ADHK Provinsi di Pulau Maluku Tahun 2014-2018, Rp. Triliun

Propinsi	ADHB (Rp. Triliun)					ADHK (Rp. Triliun)				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Maluku	31.66	34.35	37.05	39.88	43.06	23.57	24.86	26.28	27.81	29.47
Maluku Utara	24.04	26.64	29.15	32.27	36.50	19.21	20.38	21.56	23.21	25.05
P. MALUKU	**55.70**	**60.98**	**66.21**	**72.15**	**79.56**	**42.78**	**45.24**	**47.84**	**51.02**	**54.52**

Sumber: PDRB Lapangan Usaha Provinsi 2014-2018, BPS

Tabel 19: Peran Ekonomi Pulau Maluku terhadap Perekonomian Nasional ADHB Tahun 2014-2018, (dalam persen).

Provinsi	Share % terhadap 34 provinsi					rata-rata 2014-2018
	2014	2015	2016	2017	2018	
Maluku	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
Maluku Utara	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.23
P. MALUKU	**0.52**	**0.52**	**0.52**	**0.53**	**0.53**	**0.53**

Sumber: PDRB Lapangan Usaha Provinsi 2014-2018, BPS

Tabel 20: Peran Ekonomi Provinsi Terhadap Perekonomian Pulau Maluku ADHB Tahun 2014, (dalam persen).

Provinsi	Share % terhadap Pulau					rata-rata 2014-2018
	2014	2015	2016	2017	2018	
Maluku	56.84	56.32	55.97	55.27	54.13	55.15
Maluku Utara	43.16	43.68	44.03	44.73	45.87	44.85

Sumber: PDRB Lapangan Usaha Provinsi 2014-2018, BPS

Tabel 21: Perkembangan Struktur Perekonomian Pulau Maluku ADHB Tahun 2014-2018.

Lapangan Usaha	Peran Lapangan Usaha terhadap Perekonomian (%)					
	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata 2010-2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25.32	24.42	14.03	14.21	14.49	18.49
Pertambangan dan Penggalian	6.32	5.20	2.89	3.41	3.97	4.36
Industri Pengolahan	5.21	5.21	2.52	2.46	2.42	3.56
Pengadaan Listrik dan Gas	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.29	0.28	2.59	2.63	2.71	1.70
Konstruksi	6.89	7.16	9.89	9.85	9.97	8.75
Perdagangan Besar dan Eceran	14.32	14.94	8.32	8.49	8.34	10.88
Transportasi dan Pergudangan	5.59	5.73	2.63	2.54	2.48	3.80
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.21	1.22	2.15	2.13	2.08	1.76
Informasi dan Komunikasi	3.23	3.33	2.57	2.55	2.50	2.83
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.24	3.34	1.76	1.75	1.76	2.37
Real Estat	0.24	0.23	0.26	0.26	0.25	0.25
Jasa Perusahaan	0.72	0.72	6.37	6.28	6.29	4.08

Lapangan Usaha	Peran Lapangan Usaha terhadap Perekonomian (%)					
	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata 2010-2018
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	19.36	19.93	11.65	11.47	11.36	14.75
Jasa Pendidikan	4.59	4.74	3.44	3.38	3.33	3.89
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.14	2.16	1.30	1.27	1.24	1.62
Jasa lainnya	1.29	1.31	27.57	27.25	26.74	16.83

Sumber: PDRB Lapangan Usaha Provinsi 2014-2018, BPS

Tabel 22: Struktur Perekonomian ADHB menurut Provinsi di Pulau Maluku Tahun 2014-2008, (rata-rata dalam persen).

Lapangan Usaha	Peran Lapangan Usaha terhadap Perekonomian (%)	
	Maluku	Maluku Utara
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24.19	24.42
Pertambangan dan Penggalian	2.69	9.28
Industri Pengolahan	5.31	5.92
Pengadaan Listrik dan Gas	0.08	0.08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.43	0.08
Konstruksi	7.54	6.53
Perdagangan Besar dan Eceran	13.11	17.26
Transportasi dan Pergudangan	5.32	6.13
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.77	0.45
Informasi dan Komunikasi	3.01	3.66
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.66	3.04
Real Estat	0.32	0.11
Jasa Perusahaan	1.01	0.32
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	21.97	16.36
Jasa Pendidikan	5.71	3.51
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.18	2.08
Jasa lainnya	1.70	0.77

Sumber: PDRB Lapangan Usaha Provinsi 2014-2018, BPS

PDRB Perkapita, Perkembangan PDRB perkapita Provinsi di Pulau Maluku dalam selama periode 2014-2017 rata-rata mengalami peningkatan. Pertumbuhan PDRB perkapita antarprovinsi di Pulau Maluku pada tahun 2017 tertinggi di Provinsi Maluku Utara (Tabel 20). Perbandingan PDRB perkapita antarprovinsi, PDRB perkapita Maluku Utara sedikit lebih tinggi daripada PDRB perkapita Maluku. PDRB perkapita Maluku Utara tahun 2018 sebesar 29.610 ribu per jiwa, sedangkan Maluku hanya sebesar Rp. 24.278 ribu per jiwa (**Tabel 23**).

Tabel 23: Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK (2010) Menurut Provinsi di Pulau Maluku Tahun 2014-2018, (persen).

Provinsi	Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Maluku	4.77	3.66	3.94	4.05	4.20
Maluku Utara	3.29	3.94	3.67	5.59	5.88

Sumber: PDRB 2017, BPS

Tabel 24: Perkembangan PDRB Perkapita ADHB Menurut Provinsi di Pulau Maluku Tahun 2014-2018, (Rp. ribu/jiwa).

Provinsi	[Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto Harga Berlaku Per Kapita (Ribu Rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Maluku	19,100	20,366	21,599	22,859	24,278
Maluku Utara	21,114	22,918	24,581	26,686	29,610

Sumber: PDRB 2017, BPS

PDRB Pengeluaran, Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Pulau Maluku selama periode 2015-2018 terjadi pada hampir semua komponen tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi dicapai Komponen ekkspor luar dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 49,16 persen, impor luar negeri luar negeri sebesar 24,66 persen, dan net ekspor antar provinsi negeri sebesar 11,51 persen (**Tabel 25**). Sumber utama pertumbuhan ekonomi Pulau Maluku periode 2015-2018 tertinggi berasal dari komponen ekspor luar negeri rata-rata sebesar 3,70 persen, diikuti komponen Konsumsi Rumah Tangga rata-rata sebesar 3,24 persen, dan komponen PMTB sebesar 2,52 persen, komponen lainnya yang memberikan andil cukup besar terhadap pertumbuhan adalah komponen impor dan konsumsi pemerintah (**Tabel 26**). Sumber pertumbuhan utama provinsi di Pulau Maluku, provinsi Maluku terbesar dari komponen konsumsi rumah tangga, PMTB, dan konsumsi pemerintah. Sementara sumber utama pertumbuhan Maluku Utara dari komponen ekspor luar negeri, impor luar negeri, dan PMTB (**Tabel 27**).

Tabel 25: Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran ADHB (Tahun 2010) Pulau Maluku Tahun 2015-2018, (persen).

Komponen Pengeluaran	Pertumbuhan (%)				
	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata
Konsumsi Rumah Tangga	5.85	5.61	5.29	3.87	5.16
Konsumsi LNPRT	4.78	7.36	5.79	8.63	6.64
Konsumsi Pemerintah	7.45	2.02	3.97	4.01	4.37
Perubahan Inventori	-299.20	-367.29	-164.00	-279.31	-277.45
PMTB	6.44	8.84	8.54	9.56	8.34
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	26.52	51.60	-10.30	30.81	24.66
Ekspor Barang dan Jasa	-6.09	10.48	121.51	70.73	49.16
Net Ekspor Antar Provinsi	0.84	-3.43	28.34	20.29	11.51
PDRB	**5.76**	**5.75**	**6.66**	**6.84**	**6.25**

Sumber: PDRB Pengeluaran , BPS 2018

Tabel 26: Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran ADHK (Tahun 2010) Pulau Maluku Tahun 2015-2018, (persen).

Komponen Pengeluaran	Andil Pertumbuhan (%)				
	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata
Konsumsi Rumah Tangga	3.69	3.54	3.33	2.41	3.24
Konsumsi LNPRT	0.09	0.13	0.11	0.16	0.12
Konsumsi Pemerintah	2.68	0.74	1.40	1.38	1.55
Perubahan Inventori	-0.39	0.90	-1.01	1.03	0.13
PMTB	1.89	2.62	2.60	2.97	2.52
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1.60	3.71	-1.06	2.67	1.73
Ekspor Barang dan Jasa	-0.36	0.55	6.62	8.00	3.70
Net Ekspor Antar Provinsi	-0.25	0.99	-7.46	-6.43	-3.29
PDRB	**5.76**	**5.75**	**6.66**	**6.84**	**6.25**

Sumber: PDRB Pengeluaran , BPS 2018

Tabel 27: Pertumbuhan dan Sumber Utama Pertumbuhan dari Sisis Pengeluaran ADHK (Tahun 2010) Menurut Provinsi di Pulau Maluku Tahun 2015-2018, (rata-rata dalam persen).

Komponen Pengeluaran	Pertumbuhan		Andil Pertumbuhan (%)	
	Maluku	Maluku Utara	Maluku	Maluku Utara
Konsumsi Rumah Tangga	5.62	4.54	3.73	2.64
Konsumsi LNPRT	6.14	7.80	0.14	0.10
Konsumsi Pemerintah	4.35	4.41	1.72	1.34
Perubahan Inventori	-7.81	-149.61	-0.10	0.41
PMTB	6.46	10.83	2.00	3.15
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	4.80	159.42	0.47	3.26
Ekspor Barang dan Jasa	0.87	243.75	0.07	8.09
Net Ekspor Antar Provinsi	3.46	41.46	-1.35	-5.61
PDRB	**5.74**	**6.87**	**5.74**	**6.87**

Sumber: PDRB Pengeluaran , BPS 2018

Struktur perekonomian Pulau Maluku dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar dari Komponen pengeluaran Rumah Tangga rata-rata sebesar 64,74 persen, diikuti komponen konsumsi pemerintah, dan komponen PMTB sebesar 32,78 persen (**Tabel 28**). Hal yang sama untuk struktur perekonomian provinsi Maluku dan Maluku Utara disumbang dari komponen konsumsi rumah tangga, komponen konsumsi pemerintah, dan komponen PMTB. Komponen ekspor dan impor memberikan andil cukup besar terhadap pertumbuhan ekspor dan impor luar negeri di Provinsi Maluku (**Tabel 29**).

Tabel 28: Share PDRB Menurut Pengeluaran ADHB (Tahun 2010) Pulau Maluku Tahun 2014-2018, (persen).

Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	64.79	65.84	65.16	63.17	64.74
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.75	1.80	11.20	1.85	4.15
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	37.11	36.44	37.19	36.70	36.86
Perubahan Inventori	(0.33)	0.66	(0.43)	0.74	0.16
PMTB	27.71	29.24	30.42	32.51	29.97
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	6.02	6.21	10.55	13.78	9.14
Ekspor Barang dan Jasa	9.91	12.19	1.82	17.56	10.37
Net Ekspor Antar Provinsi	(27.14)	(27.99)	(33.51)	(38.76)	(31.85)

Sumber: PDRB Pengeluaran , BPS 2018

Tabel 29: Share PDRB Pengeluaran ADHB menurut Provinsi di Pulau Maluku Tahun 2014-2018, (rata-rata persen).

Pengeluaran	Maluku	Maluku Utara
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	70.22	57.18
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4.82	2.24
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	40.13	32.19
Perubahan Inventori	0.61	-0.44
PMTB	30.04	28.61
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	11.98	5.31
Ekspor Barang dan Jasa	10.34	8.54
Net Ekspor Antar Provinsi	-38.05	-21.19

Sumber: PDRB Pengeluaran , BPS 2018

1.2.2 INVESTASI PMA DAN PMDN

Investasi PMDN dan PMA. Perkembangan realisasi investasi PMDN di Pulau Maluku selama periode 2014-2018 menunjukan peningkatan terutama pada dua tahun terakhir. Nilai invesati PMDN tahun 2018 mencapai Rp. 3.289,76 miliar atau tumbuh sebesar 173,49 persen dari tahun 2017 (**Gambar 24**). Secara spasial Investasi PMDN terbesar terdapat di Provinsi Maluku Utara yaitu sekitar 55,7 persen dari total investasi PMDN di Maluku (**Gambar 25**).

Gambar 24: Perkembangan Realisasi Investasi PMDN (Rp. miliar) Pulau Maluku Tahun 2014-2018.

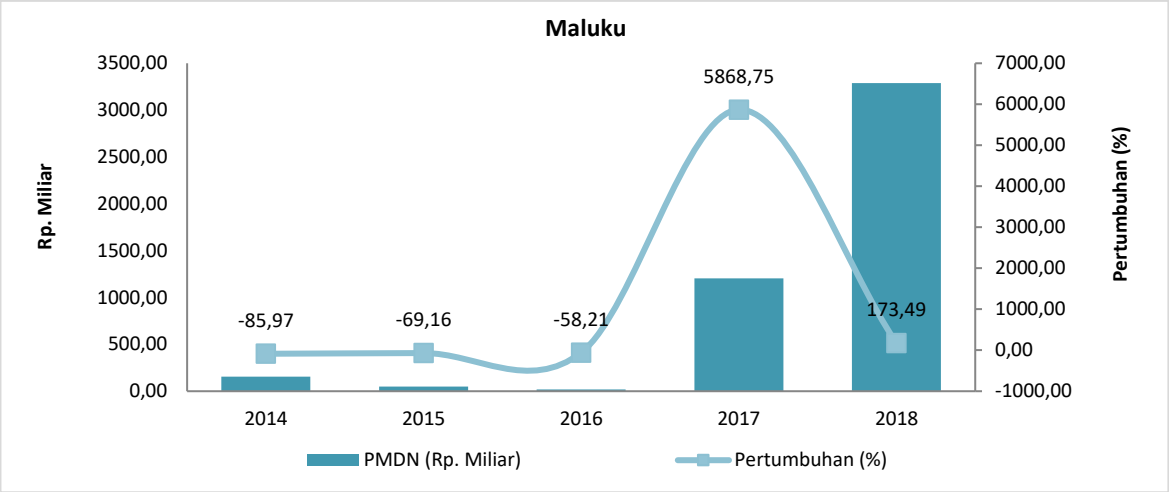

Sumber : BKPM, Tahun 2018

Gambar 25: Distribusi Nilai Realisasi Investasi PMDN (%) menurut Pulau dan Provinsi Tahun 2014-2018.

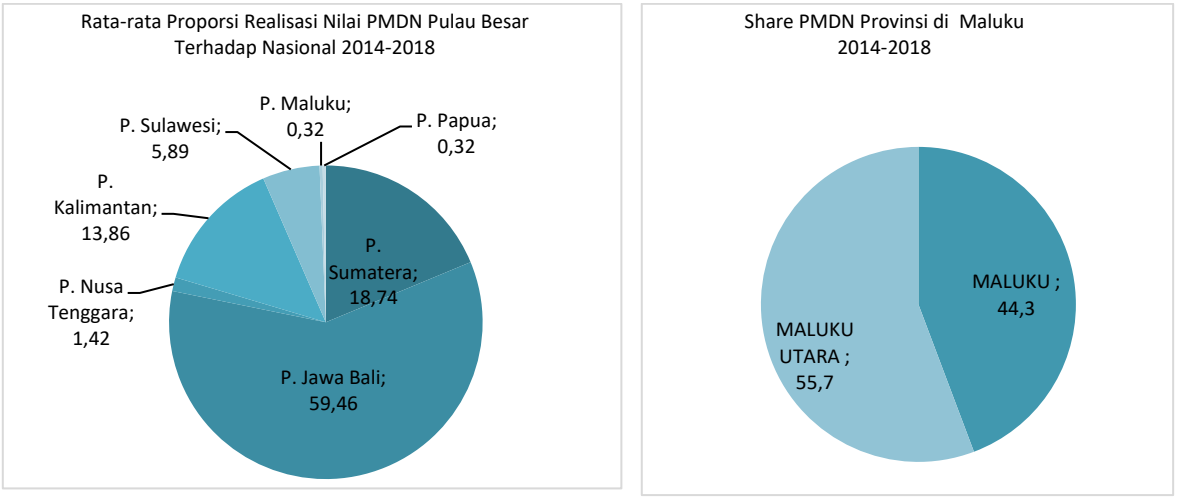

Sumber : BKPM, Tahun 2018

Sebaliknya untuk perkembangan realisasi investasi PMA menurun dari tahun 2016 hinnga 2018. Nilai PMA tahun 2016 sebesar 5.41,54 juta US$ menurun menjadi 370,75 juta US$ (**Gambar 26**), dengan nilai investasi PMA hanya sekitar 1,17 persen dari rata-rata total investasi PMA nasional. Investasai PMA terbesar di Provinsi Maluku Utara yaitu mencapai sebesar 77,3 persen (**Gambar 27**).

Gambar 26: Perkembangan Realisasi Investasi PMA (juta US$) Pulau Maluku Tahun 2014-2018.

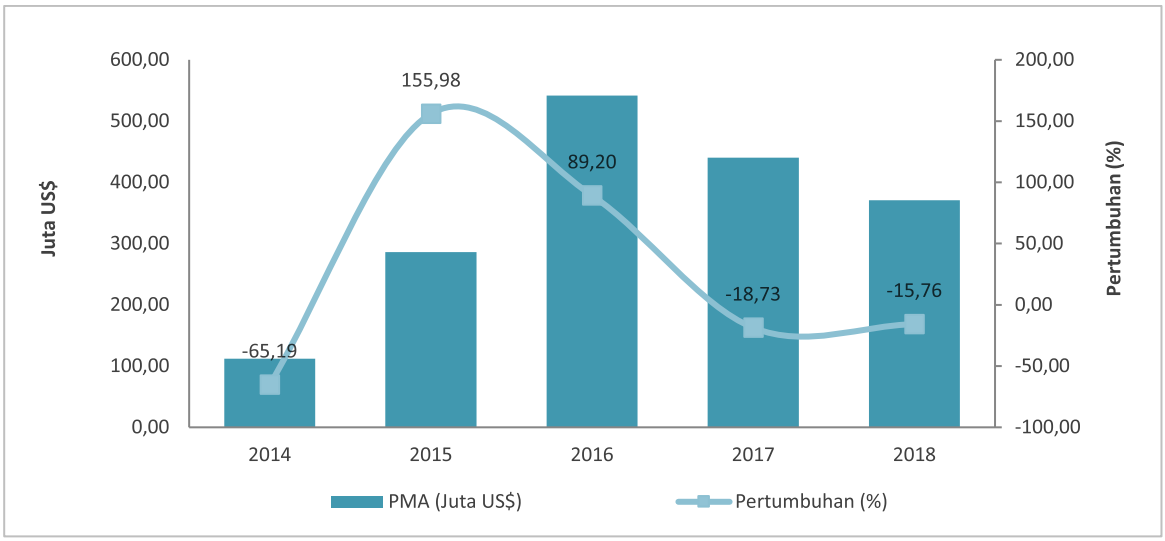

Sumber : BKPM, Tahun 2018

Gambar 27: Distribusi Nilai Realisasi Investasi PMA (%) menurut Pulau dan Provinsi Tahun 2014-2018**.**

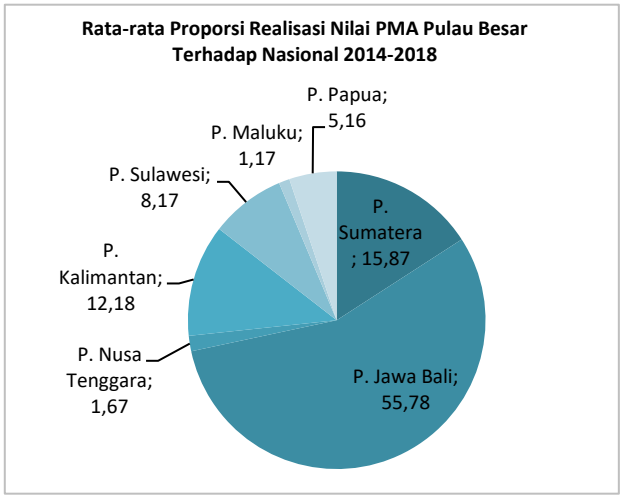

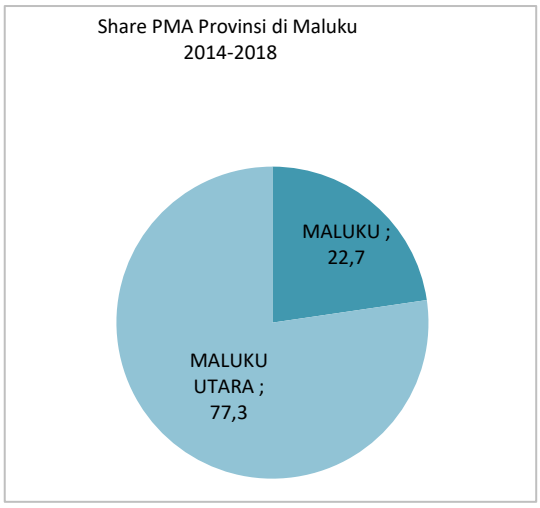

Sumber : BKPM, Tahun 2018

1.2.3 EKSPOR DAN IMPOR

Perdagangan Ekspor-Impor. Perkembangan perdagangan migas dan non migas Pulau Maluku selama periode 2014-2018 menunjukan peningkatan. Nilai perdagangan tahun 2015 tercatat sebesar 384,95 juta US$ meningkat menjadi 646,23 juta US$ pada tahun 2017, dan hingga akhir tahun 2018 meningjat menjadi 1.571,44 juta US$ (**Gambar 28**). Perdagangan Pulau Maluku sebagian besar didominasi non-migas, yaitu mencapai 1.050,91 juta US$ pada tahun 2018 dan untuk migas sebesar 520,53 US$. Secara spasial perdagangan terbesar berasal dari Maluku Utara sekitar 64,73 persen (**Gambar 28**). Untuk perdagangan migas terbesar Maluku berasal dari Provinsi Maluku yaitu mencapai 99 persen, dan untuk perdagangan non migas terbesar didominasi oleh Provinsi Maluku Utara yaitu mencapai 67,02 persen (**Gambar 29**).

Gambar 28: Perkembangan Perdagangan Migas dan Non Migas Wilayah Pulau Maluku dan Provinsi Tahun 2014-2018. (dalam juta US$).

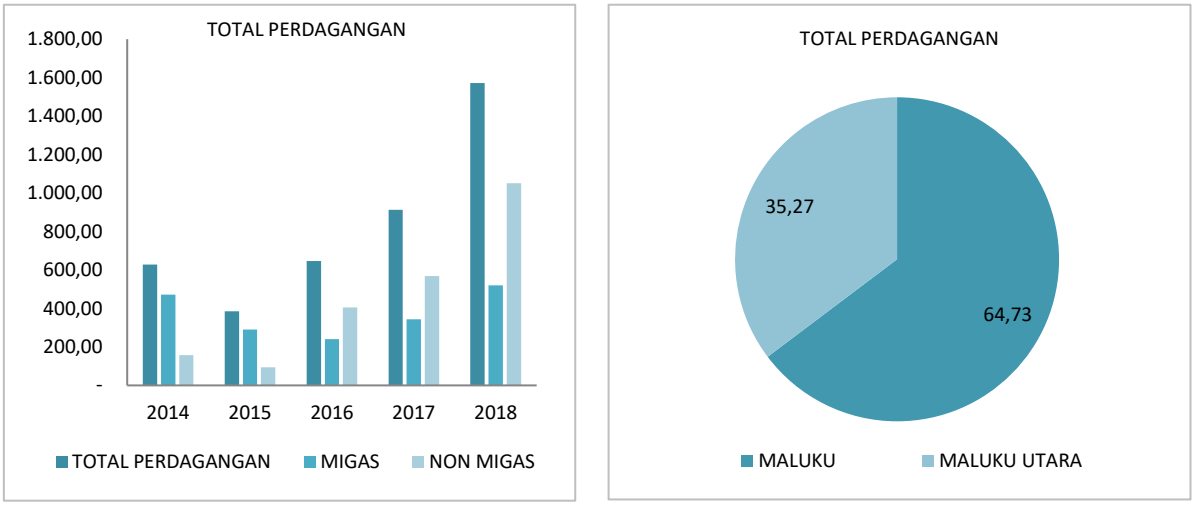

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan 2018

Gambar 29: Perdagangan Migas dan Non Migas menurut Provinsi di Pulau Maluku Tahun 2014-2018, (dalam persen).

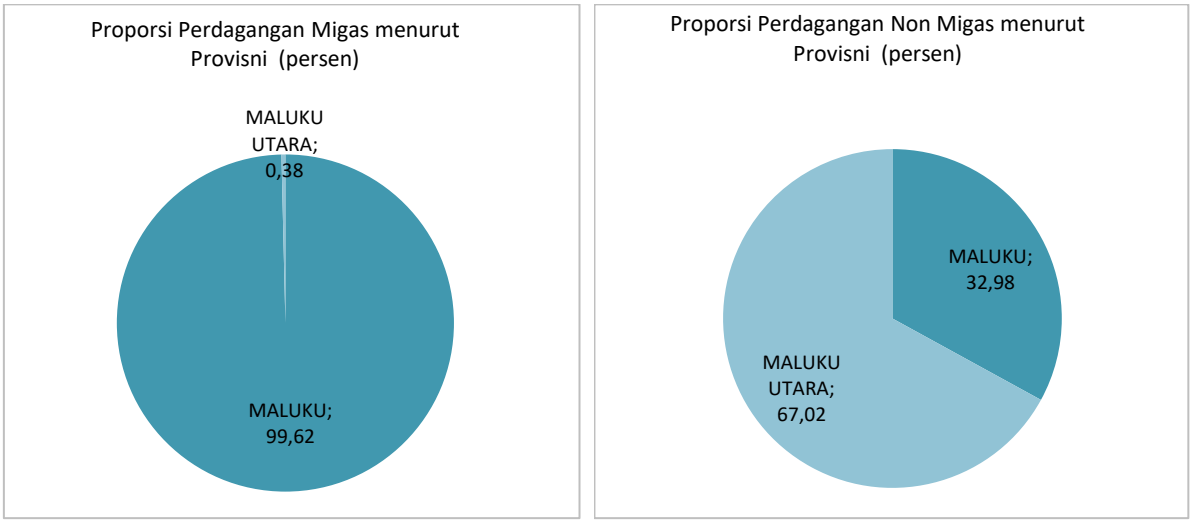

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangantahun 2018

Nilai ekspor Pulau Maluku 2018 mencapai 58,06 juta US$ meningkat dari tahun-tahun sebelumya. Nilai ekpsor terbesar Pulau Maluku tahun 2018 berasal dari non-migas 717,36 juta US$ yang didominasi oleh perdagangan non migas persen (**Gambar 30**). Hal yang sama untuk nilai impor juga mengalami peningkatan dari tahun 2015-2018, nilai impor tahun 2018 sebesar 813,38 juta US$ yang didominasi oleh perdagangan migas. Sementara dilihat dari perkembangan neraca perdagangan selama periode 2014-2018, perdagangan Maluku mengalami surplus perdagangan, dan menunjukan peningkatan dakam setiap tahunnya (**Gambar 31**).

Gambar 30: Perkembangan Nilai Ekspor-Impor Migas dan Non Migas Pulau Maluku Tahun 2014-2018, (dalam juta US$).

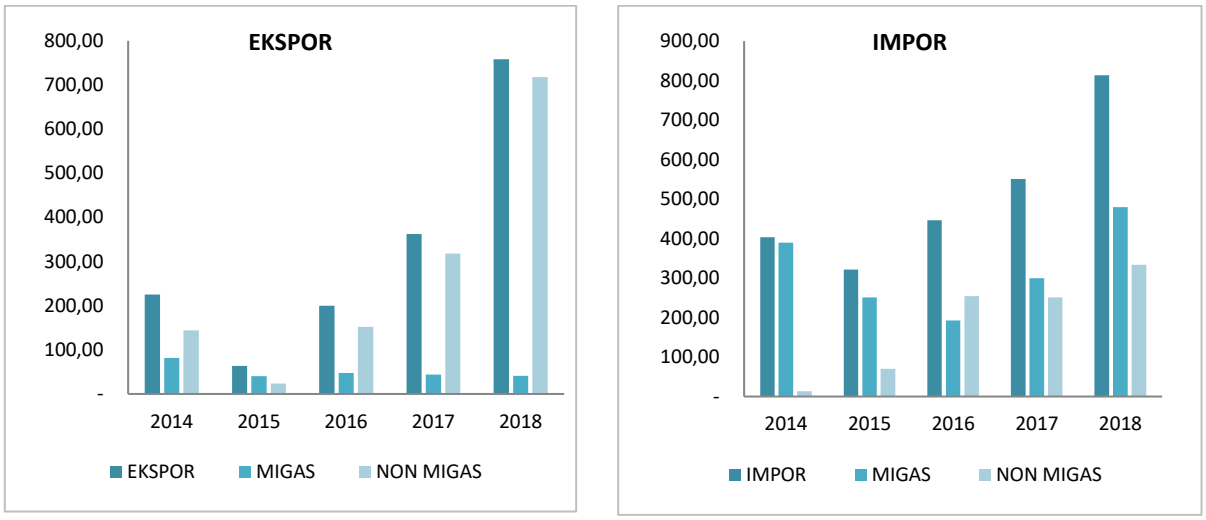

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan Tahun 2018

Gambar 31: Perkembangan Neracar Perdagangan (Ekpor-Impor) Pulau Maluku Tahun 2014-2018

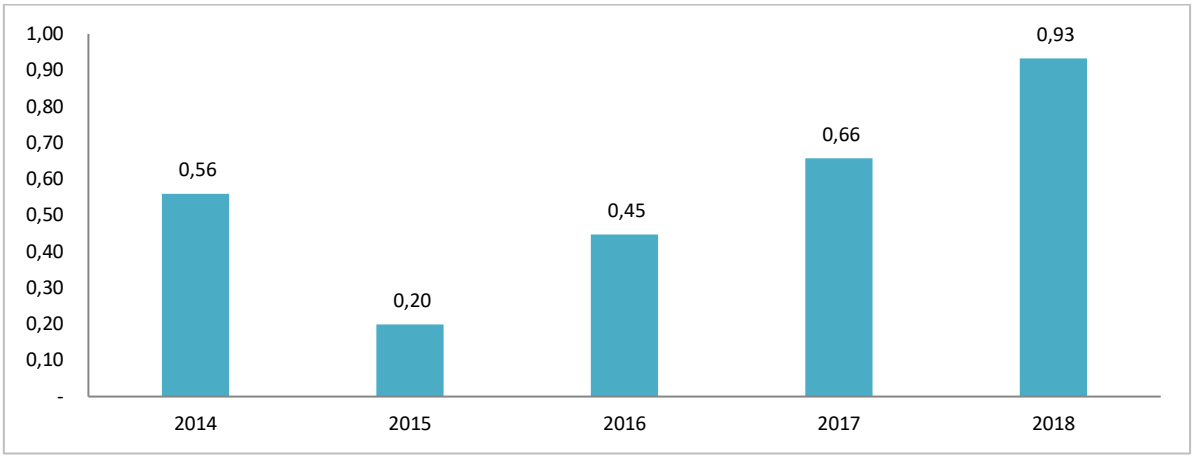

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan Tahun 2018

1.2.4 PERBANKAN

Sektor perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, dimana peranan penting perbankan yaitu dalam menggerakkan roda perekonomian wilayah. Selama periode 2014-2018, jumlah tabungan dan simpanan masyarakat menurut rupiah dan valas Bank Umum dan BPR di Pulau Nusa Tenggara mengalami peningkatan. Nilai tabungan masyarakat tahun 2014 tercatat sebesar Rp. 16.073 miliar dan meningkat menjadi Rp 20.742 miliar pada tahun 2018. Hal yang sama untuk nilai pinjaman/kredit tahun 2014 tercatat sebesar Rp. 14.515 miliar meningkat menjadi Rp. 28.458 miliar (**Gambar 32**). Secara spasial distribusi nilai tabungan dan pinjaman tahun 2018 terbesar di Provinsi Maluku dengan nilai pinjaman mencapai mencapai sebesar Rp. 13.945 miliar dan nilai pinjaman sebesar 39.405 miliar (**Gambar 33**).

Gambar 32: Perkembangan nilai Pinjaman/Kredit dan Simpanan (Rp. Miliar) Masyarakat Rupiah dan Valas Bank Umum dan BPR Menurut Tahun 2014-2018

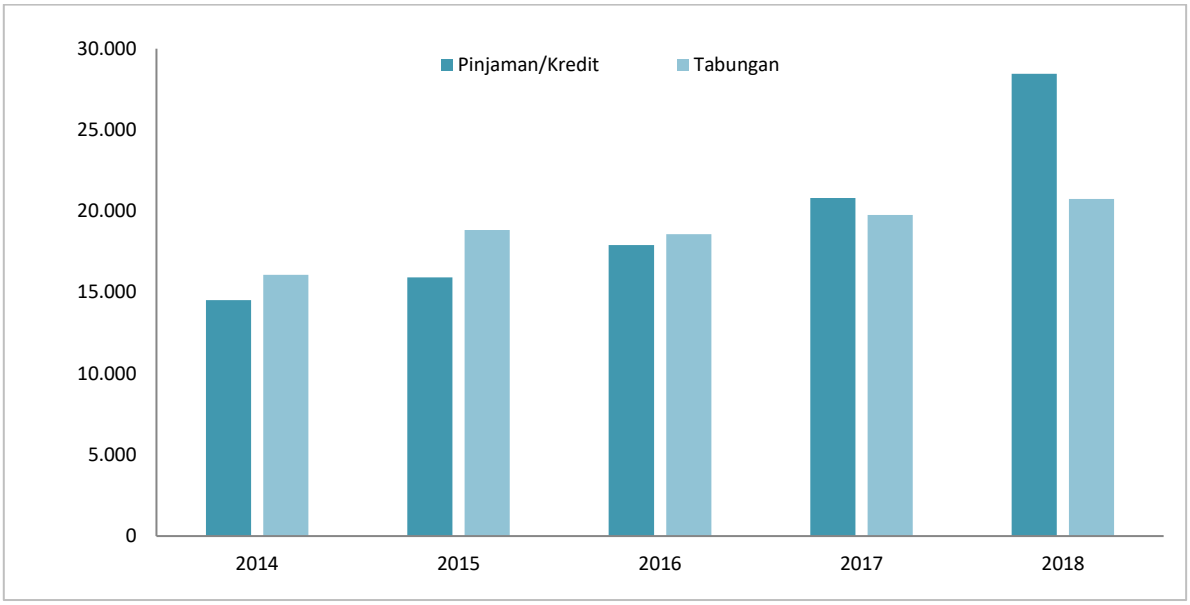

Sumber: Bank Indonesia, Tahun 2018

Gambar 33: Posisi Pinjaman/Kredit yang Diberikan Rupiah dan Valas Bank Umum dan BPR menurut Provinsi (Rp. Miliar)

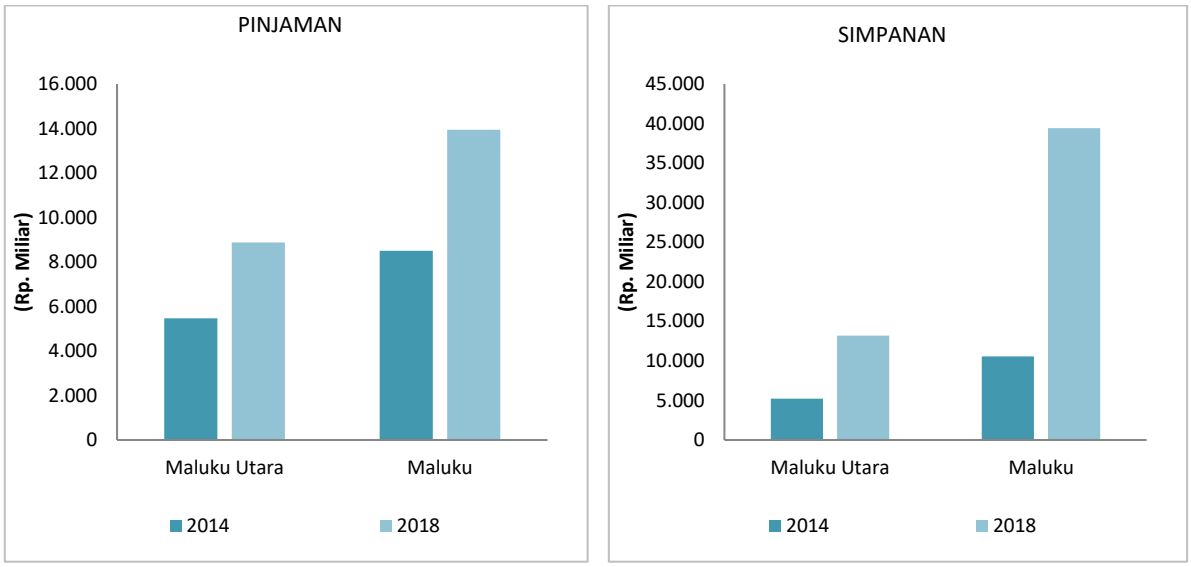

Sumber: Bank Indonesia, Tahun 2018

Sementara berdasarkan rasio pinjaman terhadap simpanan masyarakat Rupian dan Valas pada Bank Umum dan BPR di Provinsi Maluku dan Maluku Utara mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, tercatat rasio pinjaman terhadap simpanan di Povinsi Maluku Utara sebesar 1,03 meningkat menjadi 1,90, dan Provinsi Maluku sebesar 0,80 meningkat menjadi 1,08 (**Gambar 34**).

Gambar 34: Rasio Pinjaman/Kredit terhadap Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valas Bank Umumdan BPR menurut Provinsi Tahun 2014 dan 2018.

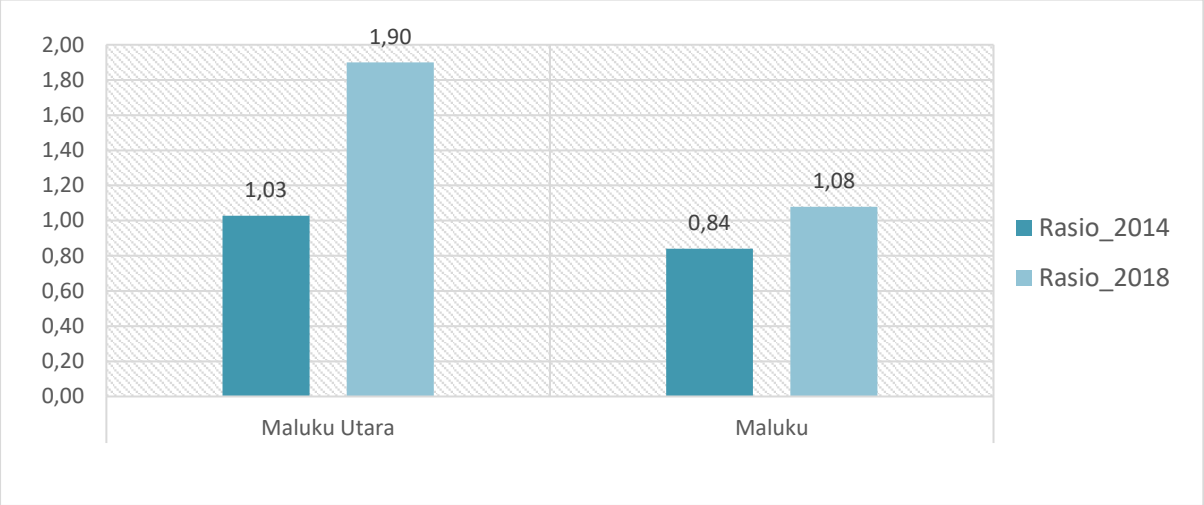

Sumber: Bank Indonesia, Tahun 2018

1.2.5 PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Pengembangan Sektor Pangan dan Perkebunan

Tanaman Pangan. Produksi padi tahun 2017 mencapai 200,54 ribu ton atau 0,25 persen dari total produksi padi Nasional, dengan produktivitas 3,77 ton/ha lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas padi nasional (5,18 ton/ha). Perkembangan produksi padi selama 2014-2017 meningkat rata-rata 6.563,25 ton per tahun atau 3,81 persen per tahun, dengan peningkatan luas panen rata-rata 2.383,50 ha per tahun atau 5,27 persen per tahun. Produksi padi terbesar berada di Provinsi Maluku mencapai 116.848 ton atau 58,27 persen dari produksi padi Wilayah Maluku (**Gambar 35**).

Gambar 35: Perkembangan Produksi dan Produktivitas Padi di Wilayah Maluku Tahun 2013-2017.

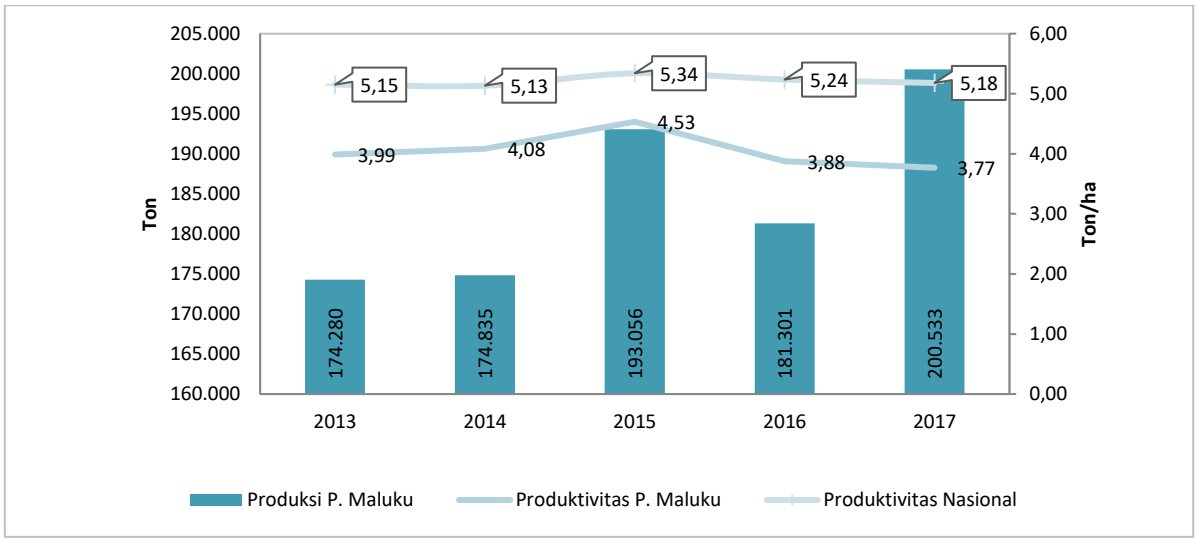

Sumber: BPS, Tahun 2019

Gambar 36: Distribusi Produksi Padi menurut Pulau dan Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2017.

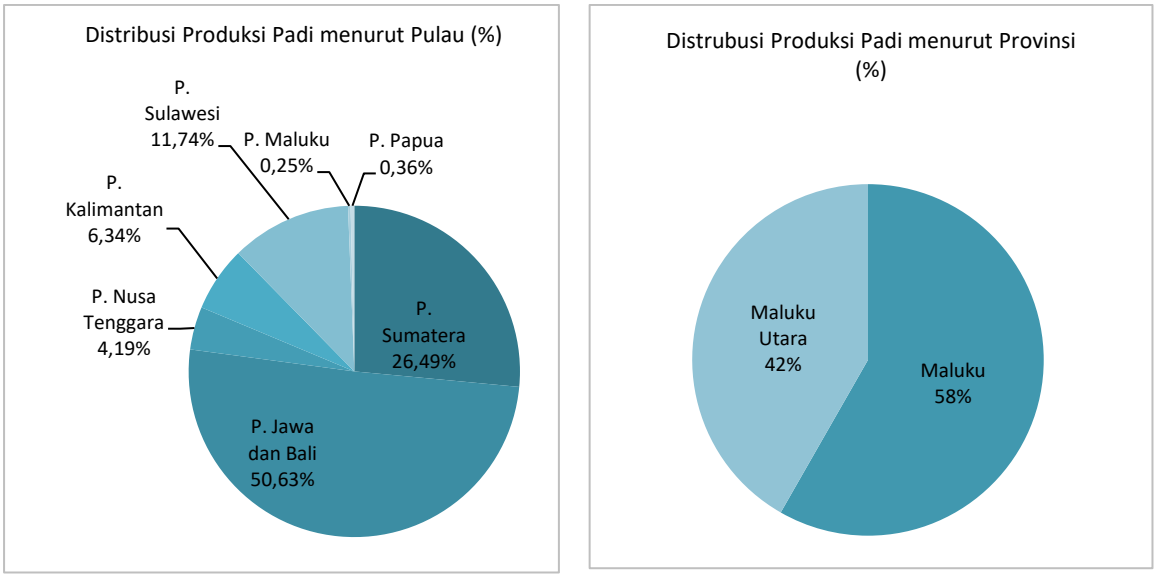

Sumber: BPS, Tahun 2019

Produksi Jagung tahun 2017 mencapai 32,20 ribu ton atau sekitar 0,12 persen dari total produksi jagung nasional, dengan produktivitas sebesar 1,81 ton/ha lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas jagung nasional (5,05 ton/ha) . Produksi jagung selama periode 2014-2017 rata-rata turun sebesar 2.291,25 ton per tahun atau 3,51 persen per tahun. Untuk luas panen juga terjadi peningkatan luas panen rata-rata sebesar 1.052,25 ha per tahun atau 21,97 persen per tahun. Produksi jagung terbesar terdapat di Provinsi Maluku Utara, yaitu mencapai 17.579 ton atau 54,60 persen dari produksi jagung Wilayah Maluku.

Gambar 37: Perkembangan Produksi dan Produktivitas Jagung di Wilayah Maluku Tahun 2013-2017.

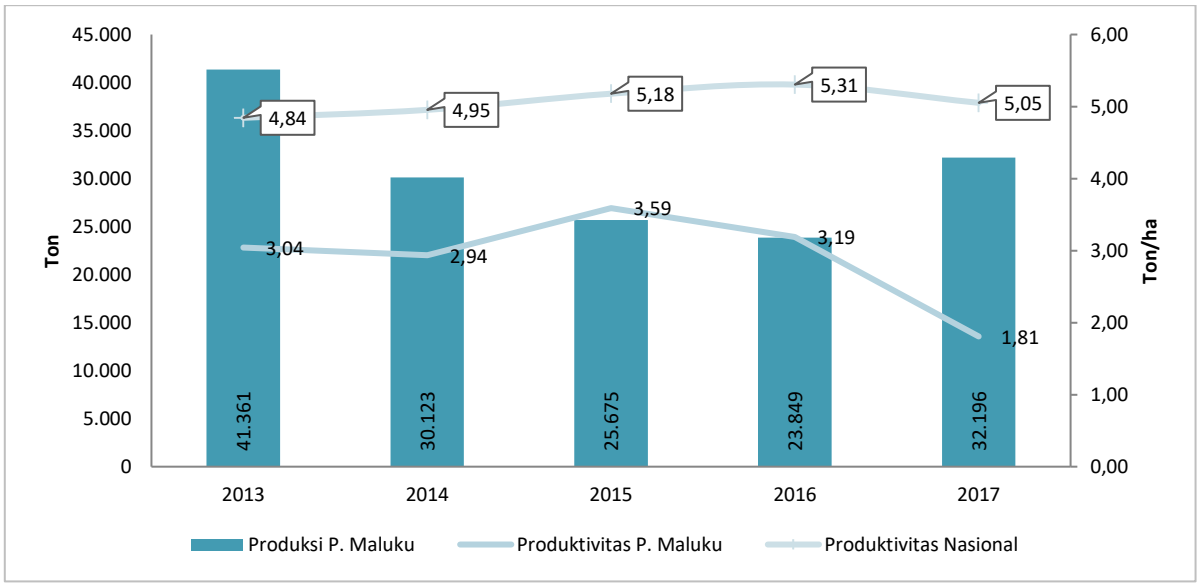

Sumber: BPS, Tahun 2019

Gambar 38: Distribusi Produksi Jagung menurut Pulau dan Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2017.

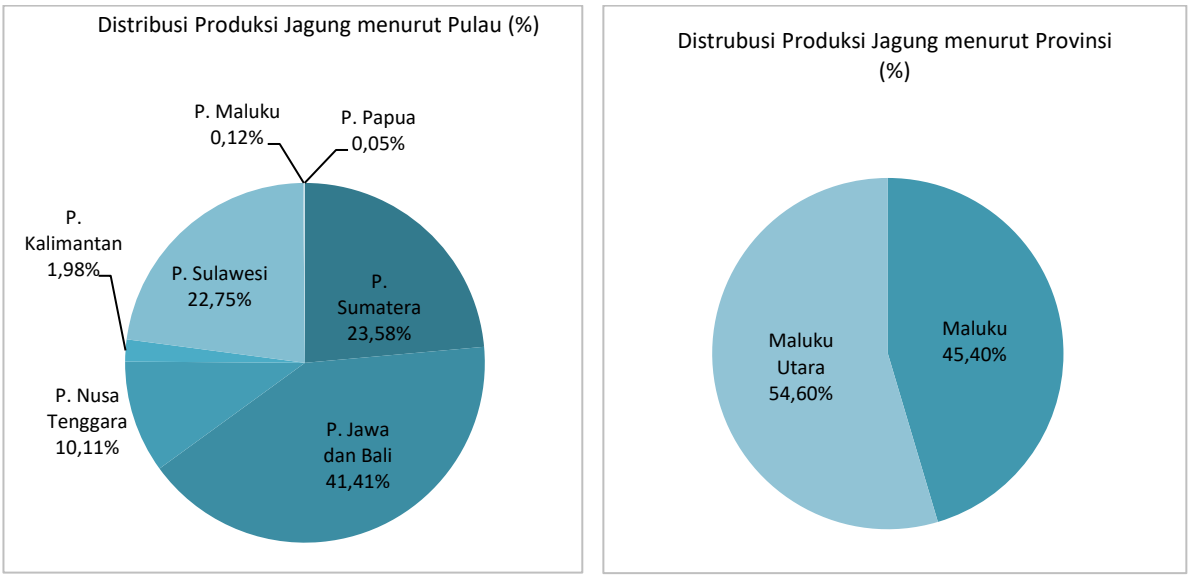

Sumber: BPS, Tahun 2019

Produksi kedelai tahun 2017 mencapai 2,240 ribu ton atau sekitar 0,41 persen dari total produksi kedelai nasional, dengan produktivitas sebesar 1,35 ton/ha atau lebih rendah dibandingkan produktivitas kedelai nasional (1,52 ton/ha). Produksi kedelai selama periode 2014-2017 mengalami peningkatan, dengan rata-rata kenaikan sebesar 189,75 ton per tahun atau 13,67 persen per tahun. Sama halnya untuk luas panen mengalami peningkatan rata-rata 113,75 ha per tahun atau 11,55 persen per tahun. Produksi kedelai terbesar tahun 2017 terdapat di Provinsi Maluku dengan tonase sebesar 1.461 ton (65,22 persen) dari produksi kedelai Wilayah Maluku.

Gambar 39: Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Kedelai di Wilayah Maluku Tahun 2013-2017.

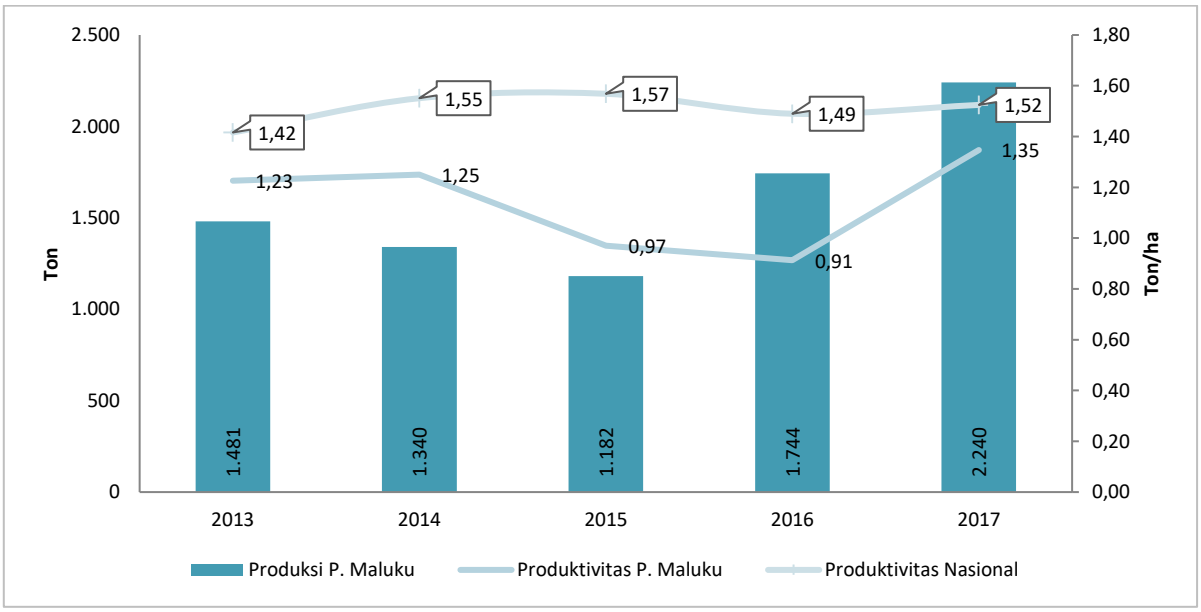

Sumber: Badan Pusat Statistik 2019

Gambar 40: Distribusi Produksi Kedelai menurut Pulau dan Provinsi di Wilayah MalukuTahun 2017.

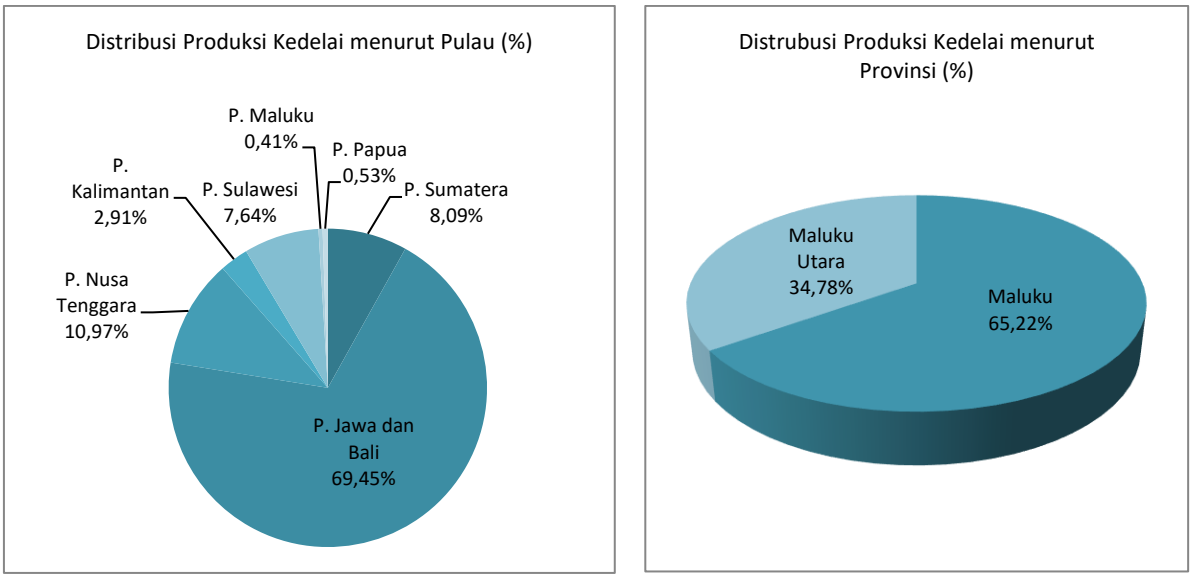

Sumber: BPS, Tahun 2019

Tabel 30: Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Padi, Jagung, dan Kedelai menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2017.

Provinsi	Padi			Jagung			Kedelai		
	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
Maluku	25,736	116,848	4.54	5,152	14,617	2.84	1,093	1,461	1.34
Maluku Utara	27,478	83,685	3.05	12,655	17,579	1.39	570	779	1.37
P. MALUKU	53,214	200,533	3.77	17,807	32,196	1.81	1,663	2,240	1.35

Sumber: BPS, Tahun 2019

Tanaman Perkebunan.

Wilayah Maluku unggul dengan komoditas kelapa, kakao dan kelapa sawit (**Tabel 31**). Produksi kelapa wilayah Maluku tahun 2018 sebesar 339,6 ribu ton atau 11,7 persen dari produksi kelapa nasional naik dibandingkan produksi tahun 2014. Selain kelapa, komoditas lainnya adalah kakao dengan produksi mencapai 17,4 ribu ton atau sekitar 2,9 persen dari total produksi kopi nasional. Sementara kelapa sawit menghasilkan produksi sebesar 14,8 ribu ton atau 0,04 persen dari produksi kelapa sawit nasional.

Tabel 31: Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Utama Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2014 dan 2018 (Ribu Ton).

Komoditas	P. MALUKU		NASIONAL		Share P. MALUKU	
	2014	2018	2014	2018	2014	2018
Kelapa Sawit	-	14.8	29,278.2	40,567.2	-	0.04
Kelapa	334.5	339.6	3,005.9	2,899.7	11.1	11.7
Karet	0.8	1.3	3,153.2	3,630.3	0.0	0.0
Kopi	0.8	0.5	643.9	722.5	0.1	0.1
Kakao	20.1	17.4	728.4	593.8	2.8	2.9
Tebu	-	-	2,579.2	2,174.4	-	-
Teh	-	-	154.4	141.3	-	-
Tembakau	-	-	198.3	181.1	-	-

Sumber: BPS, Tahun 2019

Produksi kelapa terbesar terdapat di Provinsi Maluku Utara dengan produksi 236,9 ribu ton atau 69,75 persen dari total produksi kelapa di Maluku. Sedangkan produksi kakao terbesar di Provinsi Maluku Utara dengan produksi sebesar 8,8 ribu ton atau 50,57 persen dari total produksi kokoa di Maluku. Sementara produksi kelapa sawit terbesar ada di Provinsi Maluku dengan produksi sebesar 10,40 ribu ton atau 100 persen dari total produksi kelapa sawit di wilayah Maluku (**Tabel 23**).

Tabel 32: Penyebaran Produksi Tanaman Perkebunan Utama menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2018.

Provinsi	Kelapa Sawit		Kelapa		Karet		Kopi		Kakao	
	2018	%	2018	%	2018	%	2018	%	2018	%
Maluku	14.80	100.00	102.70	30.24	1.30	100.00	0.40	80.00	8.60	49.43
Maluku Utara	-	-	236.90	69.76	-	-	0.10	20.00	8.80	50.57
P. MALUKU	**14.80**	**100.00**	**339.60**	**100.00**	**1.30**	**100.00**	**0.50**	**100.00**	**17.40**	**100.00**

Sumber: BPS, Tahun 2019

Peternakan. Populasi ternak besar paling banyak diusahakan meliputi jenis Sapi Potong, Babi dan Kambing. Populasi ternak sapi potong tahun 2018 mencapai 200 ribu ekor, Babi sebanyak 154 ribu ekor dan kambing sebanyak 250 ribu ekor. Penyebaran populasi ternak sapi potong dan babi terbesar terdapat di Provinsi Maluku, dan populasi kambing terbesar ada di provinsi Maluku Utara (**Tabel 33**).

Gambar 41: Perkembangan Populasi Ternak Besar di Wilayah Maluku Tahun 2014 dan 2018, (dalam ribu ekor).

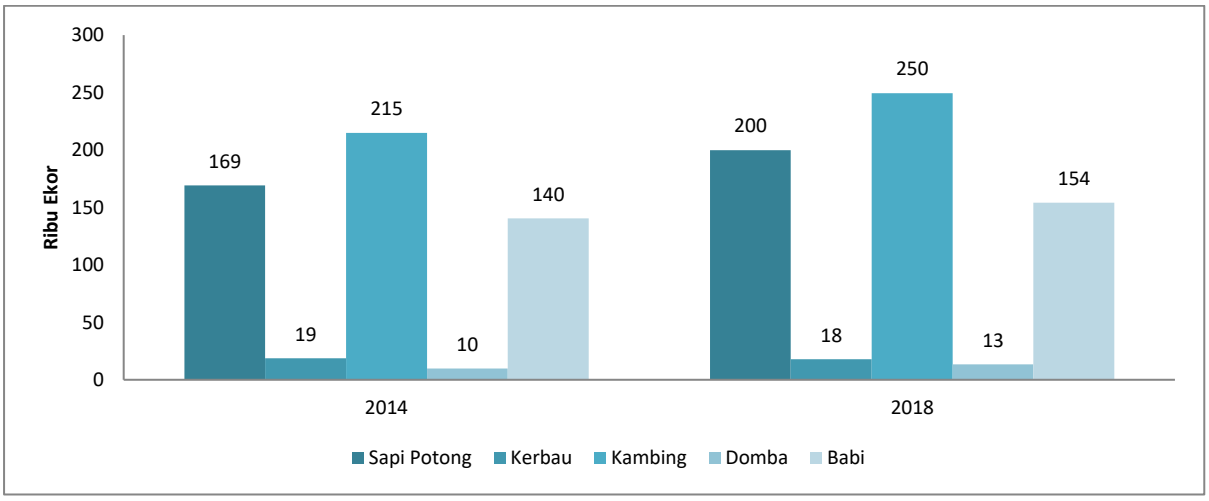

Sumber: BPS, Tahun 2019

Tabel 33: Populasi Ternak Besar menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2018. (ekor).

Provinsi	Sapi Potong	Kerbau	Kambing	Domba	Babi
	2018	2018	2018	2018	2018
Maluku	105,186	16,650	110,253	13,434	81,509
Maluku Utara	94,724	1,215	139,301	-	72,549

Sumber: BPS, Tahun 2019

Populasi ternak unggas terbesar meliputi jenis ayam buras, ras pedaging, dan Itik/itik manila, dengan populasi pada tahun 2018 sebesar 2,8 juta ekor ayam buras, 510 ribu ekor ayam ras pedaging dan 518 ribu ekor Itik/itik manila. Jika diperhatikan pada G**ambar 42**, tahun 2014 populasi unggas di wilayah Maluku terjadi penurunan yang signifikan di tahun 2018. Populasi ayam buras dan itik/itik manila terbesar terdapat di Maluku, dan populasi untuk ayam ras pedaging terbesar ada di provinsi Maluku Utara (**Tabel 34**).

Gambar 42: Perkembangan Populasi Ternak Unggas Wilayah Maluku Tahun 2014 dan 2018, (dalam ribu ekor).

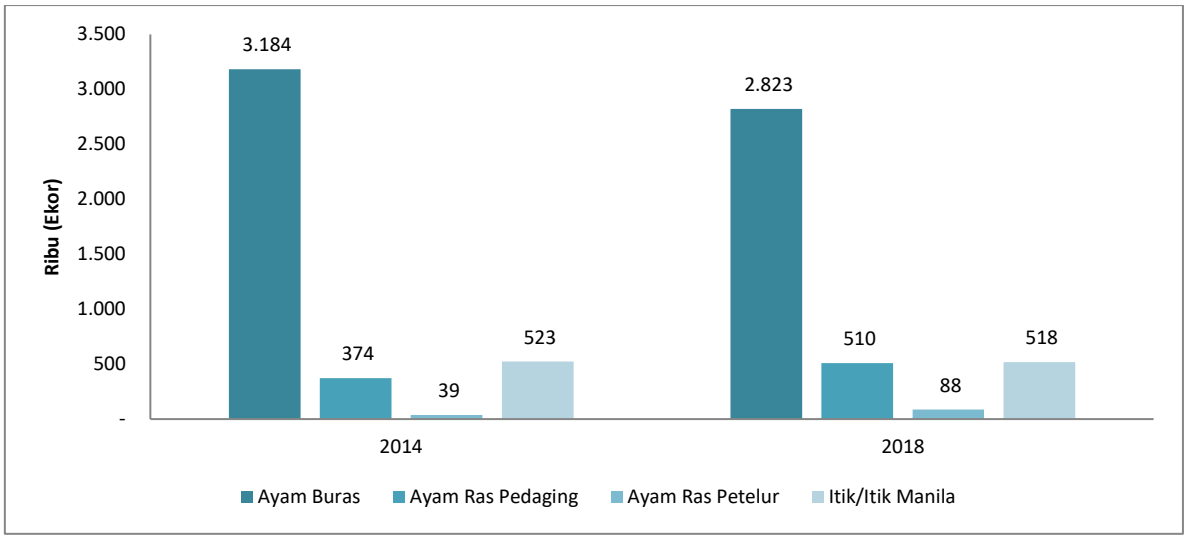

Sumber: BPS, Tahun 2019

Tabel 34: Perkembangan Populasi Ternak Unggas menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2014 dan 2018, (ribu ekor).

Provinsi	Ayam Buras		Ayam Ras Pedaging		Ayam Ras Petelur		Itik/Itik Manila	
	2014	2018	2014	2018	2014	2018	2014	2018
Maluku	2,552	2,134	12	78	21	30	475	422
Maluku Utara	631	689	361	432	18	58	48	97

Sumber: BPS, Tahun 2019

Pengembangan Sektor Kemaritiman dan Kelautan.

Perikanan dan Kelautan. Produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2012. Produksi perikanan tangkap 2016 mencapai 838,50 ribu ton atau sekitar 12,74 persen dari produksi perikanan tangkap nasional, sedangkan produksi perikanan budidaya sebesar 850,74 ribu ton atau sekitar 5,32 persen dari produksi perikanan budidaya nasional. Jika di lihat dari jenis perikanan tangkap, produksi perikanan tangkap tahun 2016 didominasi oleh perikanan laut sebesar 838,5 ribu ton atau sekitar 100 persen dari total perikanan tangkap di wilayah Maluku. Daerah dengan produksi perikanan tangkap terbesar berada di Provinsi Maluku. Sedangkan untuk perikanan budidaya, produksi tahun 2016 didominasi oleh budidaya laut dan tambak sebesar 843,38 ribu ton dan 5,6 ribu ton atau sekitar 99,80 persen dari total produksi perikanan budidaya di wilayah Maluku. Provinsi dengan produksi perikanan budidaya terbesar berada pada provinsi Maluku yang kemudian diikuti oleh Provinsi Maluku Utara.

Gambar 43: Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya berdasarkan wilayah di Indonesia, (dalam ton).

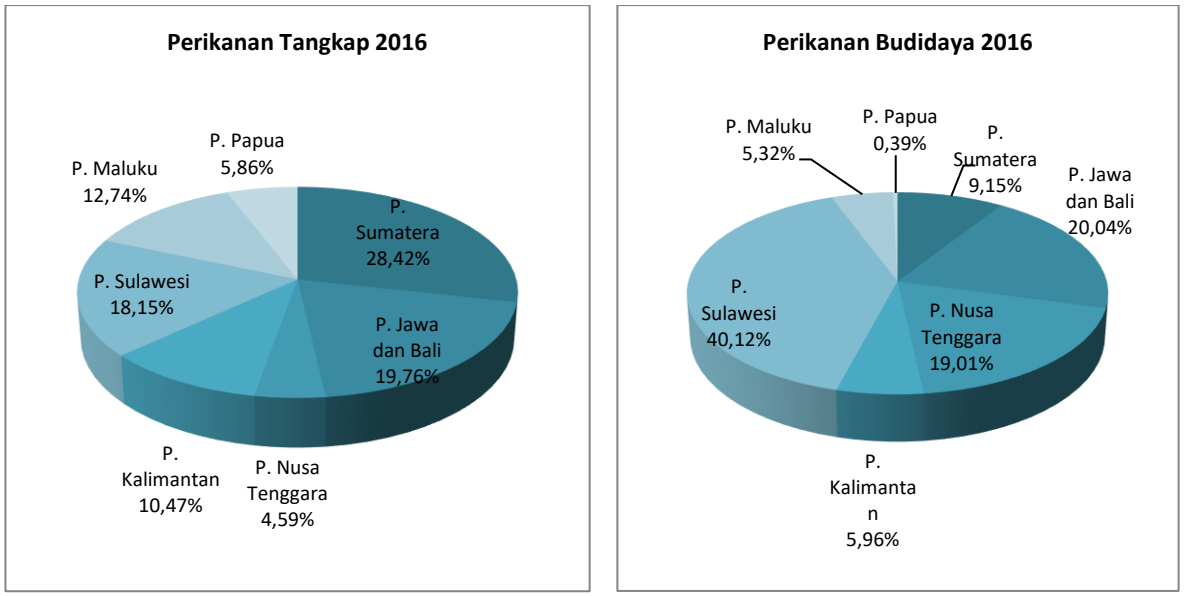

Sumber: BPS, Tahun 2019

Tabel 35: Perkembangan Perikanan Tangkap di Wilayah Maluku tahun 2012 dan 2016 Berdasarkan Provinsi (Ton).

Provinsi	Perikanan Laut		Perairan Umum		Jumlah	
	2012	2016	2012	2016	2012	2016
Maluku	537.262	583.639	9	-	537.271	583.639
Maluku Utara	150.970	254.856	-	-	150.970	254.856
P. MALUKU	**688.232**	**838.495**	**9**	**0**	**688.241**	**838.495**

Sumber: BPS, Tahun 2019

Tabel 36: Perkembangan Perikanan Budidaya di Wilayah Maluku tahun 2012 dan 2016 Berdasarkan Provinsi (Ribu Ton).

Provinsi	Budidaya Laut		Tambak		Kolam		Jaring Apung	
	2012	2016	2012	2016	2012	2016	2012	2016
Maluku	476.18	599.35	1.20	5.24	0.10	0.20	-	-
Maluku Utara	121.14	244.03	0.30	0.41	1.21	1.44	0.25	0.08
P. MALUKU	**597.31**	**843.38**	**1.50**	**5.65**	**1.32**	**1.64**	**0.25**	**0.08**

Sumber: BPS, Tahun 2019

Pengembangan Sektor Pariwisata dan Industri.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang merupakan motor penggerak perekonomian di Indonesia. Kekayaan alam Indonesia yang tersebar luas menjadikan wilayah Indonesia unggul dalam sektor pariwisata. Keberadaan destinasi-destinasi potensial seperti wisata budaya, wisata alam, agro wisata, desa wisata dan wisata-wisata tematik lainnya. Pulau Jawa cukup terkenal dengan wisata alam dan budaya serta rekreasi yang cukup banyak.

Salah satu indikator kinerja sektor pariwisata dapat ditunjukan dengan perkembangan jumlah wisatawan baik yang berasal dari mancanegara maupun domestik. Perkembangan jumlah tamu asing dan domestik dari tahun 2013-2017 meningkat. Jumlah kunjungan tamu asing di wilayah Maluku mencapai 11,43 ribu orang dengan pertumbuhan rata-rata pertahunnya sebesar 91,20 persen. per tahun dengan share 0,07 persen dari total Indonesia. Apabila dilihat perkembangannya per provinsi di Wilayah Maluku, maka provinsi dengan jumlah tamu asing terbesar adalah Maluku yang kemudian diikuti oleh provinsi Maluku Utara (**Tabel 37**)

Sementara untuk perkembangan jumlah tamu domestik tahun 2017 mencapai 809 ribu orang dengan pertumbuhan rata-rata 5,54 persen per tahun. jumlah tamu domestik terbesar menurut provinsi ada di Provinsi Maluku Utara (**Tabel 38**).

Tabel 37: Jumlah Tamu Asing pada Hotel Bintang dan Non Bintang menurut Provinsi di Wilayah Maluku, Tahun 2013-2017, (orang).

Provinsi	Tamu Asing Hotel Berbintang dan Non Bintang					Rata-Rata Pertumbuhan
	2013	2014	2015	2016	2017	
Maluku	6,260	19,084	87,595	8,684	10,109	122.54
Maluku Utara	3,532	747	686	2,226	1,320	24.18
P. MALUKU	**9,792**	**19,831**	**88,281**	**10,910**	**11,429**	**91.20**
INDONESIA	**11,985,457**	**12,704,109**	**11,936,138**	**14,011,814**	**15,276,184**	**6.59**
SHARE (%)	**0.08**	**0.16**	**0.74**	**0.08**	**0.07**	

Sumber: BPS, Tahun 2019

Tabel 38: Jumlah Tamu Domestik pada Hotel Bintang dan Non Bintang menurut Provinsi di Wilayah Maluku, Tahun 2013-2017, (orang).

Provinsi	Tamu Domestik Hotel Berbintang dan Non Berbintang					Rata-Rata Pertumbuhan
	2013	2014	2015	2016	2017	
Maluku	387,990	690,613	745,223	298,936	356,846	11.35
Maluku Utara	321,036	275,087	172,303	418,840	452,308	24.85
P. MALUKU	**709,027**	**965,700**	**917,525**	**717,776**	**809,153**	**5.54**
INDONESIA	**79,342,459**	**87,718,801**	**68,908,048**	**118,392,155**	**128,376,800**	
SHARE (%)	**0.89**	**1.10**	**1.33**	**0.61**	**0.63**	

Sumber: BPS, Tahun 2019

Industri Mikro Kecil (IMK). Pengembangan usaha Industri Mikro dan Kecil (IMK) merupakan kekuatan strategis dan penting untuk mempercepat pembangunan daerah. Sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja. Usaha IMK umumnya merupakan usaha pada level rumah tangga dan masyarakat menengah-kecil dimana dalam pengembangannya masih memerlukan pembinaan terutama dalam aspek pemasaran, permodalan dan pengelolaan. Perkembangan IMK kedepan merupakan salah satu tombak pengentasan kemiskinan pada masyarakat dengan pendapatan bawah.

Perkembangan jumlah IMK di Wilayah Maluku dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan secara umum. Peningkatan jumlah IMK tahun 2017 sebanyak 29,47 ribu unit IMK meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 44,31 ribu unit pada tahun 2013. Jumlah IMK terbanyak terdapat di Provinsi Maluku dengan jumlah IMK sebanyak 41.867 unit pada tahun 2017, kemudian diikuti oleh Provinsi Maluku Utara dengan jumlah IMK sebanyak 31.908 unit. (**Gambar 59**).

Sementara untuk total pendapatan (*revenue*) IMK Wilayah Maluku tahun 2017 mencapai sebesar 5,2 Triliun rupiah meningkat dibandingkan tahun 2013 (2,2 triliun rupiah), dengan revenue terbesar di provinsi Maluku. Sementara untuk penyerapan jumlah tenaga kerja IMK, total tenaga kerja yang

terserap tahun 2017 mencapai 149 ribu orang meningkat sebesar 97,41 persen dari tahun 2013. Penyerapan jumlah tenaga kerja IMK paling besar terdapat di Provinsi Maluku Utara. (**Tabel 39**).

Gambar 44: Perkembangan Jumlah Industri Usaha Mikro-Kecil (IMK) Wilayah Maluku Tahun 2013 dan 2017, (dalam unit).

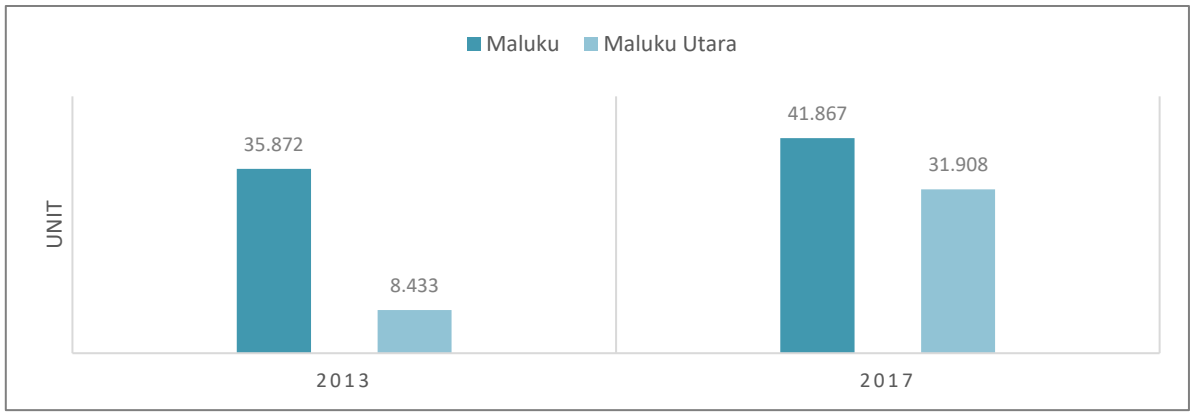

Sumber: BPS, Tahun 2019

Tabel 39: Perkembangan Jumlah Pendapatan dan Tenaga Kerja Industri Mikro-Kecil menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2013 dan 2017.

Provinsi	Pendapatan (Juta)			Jumlah Tenaga Kerja (Orang)		
	2013	2017	Δ 2013-2017	2013	2017	Δ 2013-2017
Maluku	1,787,000	3,182,452	1,395,452	61,487	67,798	6,311
Maluku Utara	422,000	2,006,423	1,584,423	14,400	82,010	67,610
P. MALUKU	**2,209,000**	**5,188,875**	**2,979,875**	**75,887**	**149,808**	**73,921**

Sumber: BPS, Tahun 2019

Industri Menengah Besar. Perkembangan industri menengah besar di Maluku pada tahun 2015 menunjukkan bahwa kontribusi wilayah Maluku terhadap total penciptaan nilai tambah nasional sebesar 0,06 persen setara dengan 1,17 triliun rupiah. Provinsi yang berkontribusi paling besar di wilayah Maluku adalah Provinsi Maluku dengan kontribusi sebesar 1,12 triliun rupiah. Dari sisi tenaga kerja, industri mengengah besar di provinsi Maluku menyerap tenaga kerja paling besar di wilayah Maluku sebesar 4.892 orang dengan komposisi 3.029 orang laki-laki dan 1.863 orang perempuan.

Gambar 45: Komposisi Perkembangan Nilai Tambah Industri Menengah Besar di Indonesia Tahun 2015

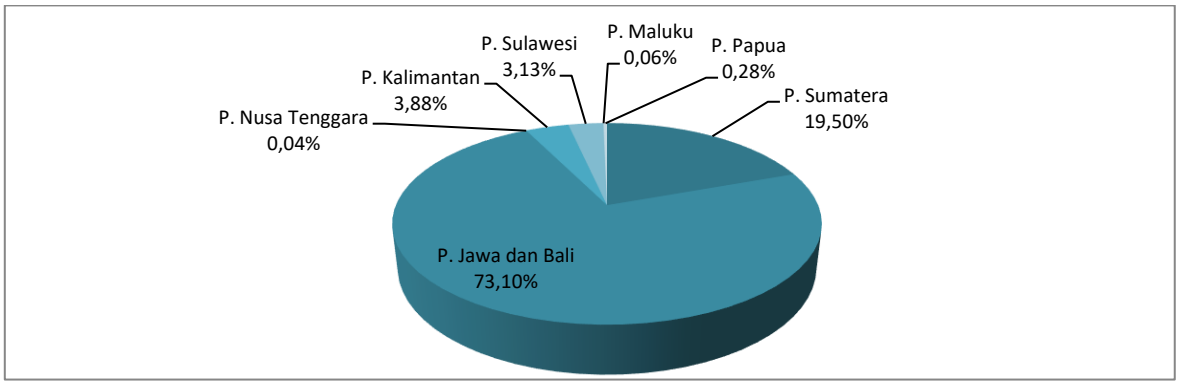

Sumber: BPS, Tahun 2019

Gambar 46: Nilai Tambah Industri Menengah Besar di Wilayah Maluku Berdasarkan Provinsi Tahun 2015

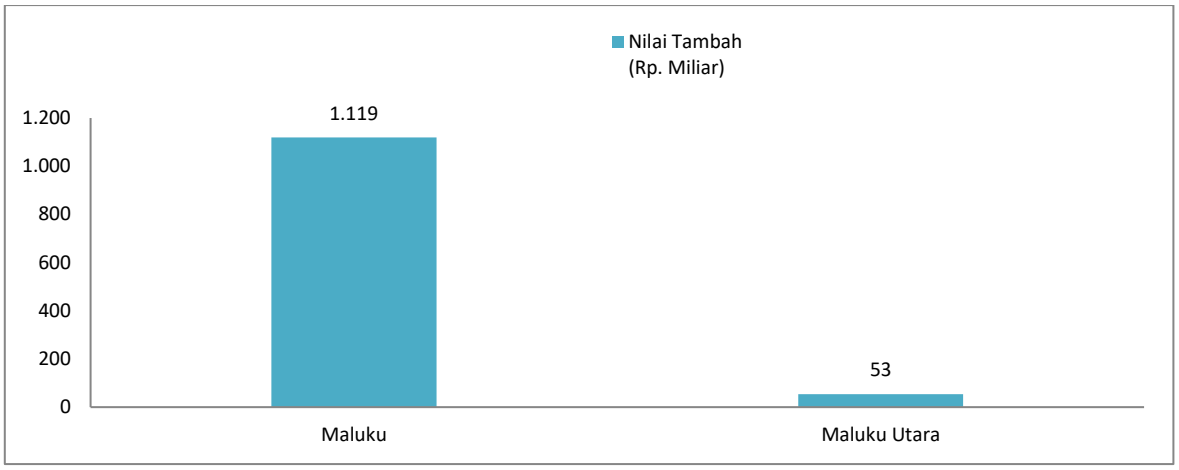

Sumber: BPS, Tahun 2019

Gambar 47: Jumlah Tenaga Kerja Industri Mengenah Besar di Wilayah Maluku Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015.

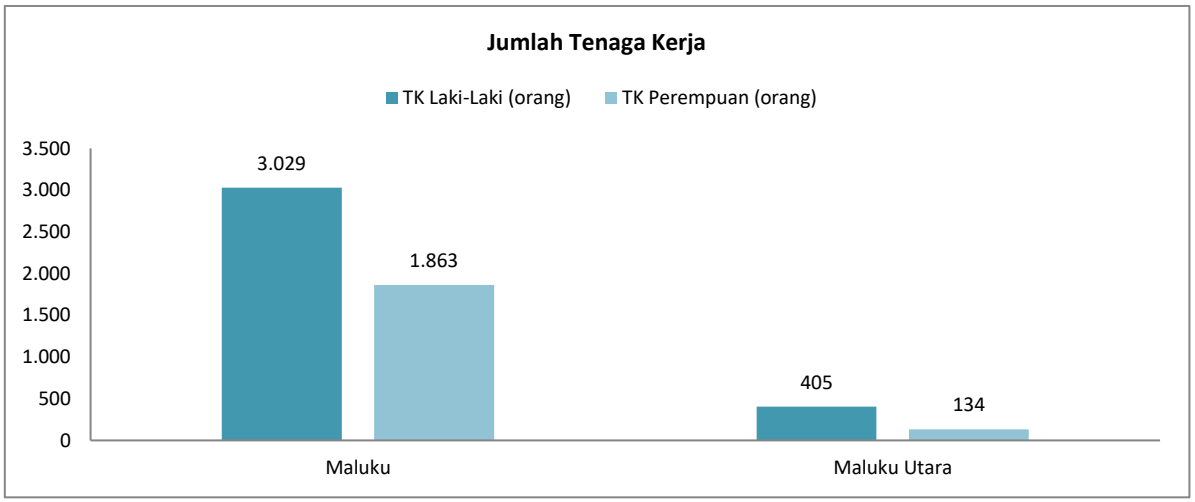

Sumber: BPS, Tahun 2019

1.3 PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tepat guna dan berhasil guna. Komponen utama pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Perkembangan nilai PAD provinsi di Pulau Maluku pada tahun 2018 rata-rata meningkat di Provinsi Maluku Utara maupun Provinsi Malukus dibandingkan nilai PAD tahun 2015, dengan pertumbuhan PAD tahun 2018 Provinsi Maluku lebih tinggi dibandingkan Provinsi Maluku Utara. Nilai PAD tahun 2018, tercatat Maluku sebesar Rp.807.617.106 ribu dan PAD Maluku Utara hanya sertiganya dari PAD Maluku yaitu sebesar Rp. 286.431.767 ribu (**Gambar 48**).

Gambar 48: Perbandingan Nilai Pendapatan Asli Daerah Provinsi di Pulau Maluku Tahun 2015 dan 2018.

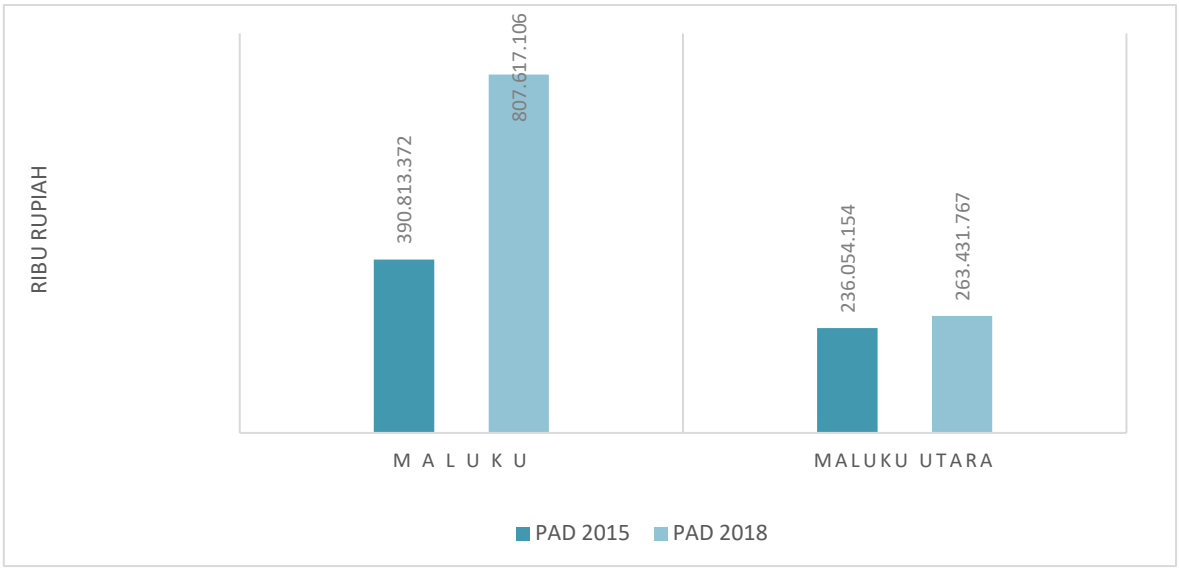

Sumber: Statstik Keuangan Daerah, BPS Tahun 2019

Sementara dilihat dari rasio PAD terhadap total Pendapatan yang mencerminkan tingkan kemandirian keangan daerah. Rasio PAD-Pendapatan baik di Provinsi Maluku dan Maluku Utara masih rendah, dan rasio PAD-Pendapatan di Maluku Utara menunjukan penurunan. Rasio PAD-Pendapatan tahun 2018 di Provinsi Maluku sebesar 0,23 meningkat dibandingkan tahun 2017, sebaliknya rasio PAD-Pendapatan di Maluku Utara tahun 2015 sebesar 0,13 menurun menjadi 0,11 di tahun 2018 (**Gambar 49**).

Gambar 49: Tingkat Kemadirian Keuangan Daerah Provinsi di Pulau Maluku Tahun 2015 dan 2018.

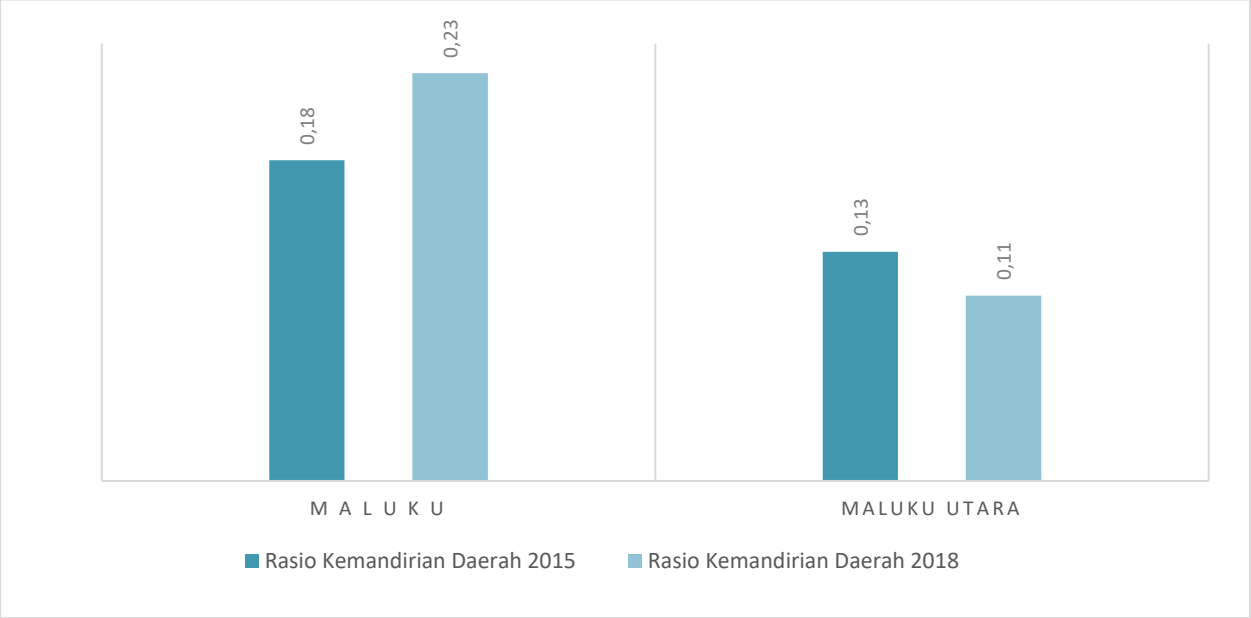

Sumber: Statstik Keuangan Daerah, BPS Tahun 2019

Berdasarkan proporsi komponen belanja langsung dan belanja modal pada tahun 2015 dan 2018, kedua provinsi mengalami penurunan. Rasio komponen belanja langsung Provinsi Maluku Utara lebih besar dibandingkan Provinsi Maluku, rasio belanja langsung tahun 2015 Provinsi Maluku Utara sebesar 58,31 menurun menjadi 49,09 persen, dan rasio belanja modal tahun 2015 sebe23,41 persen menurun menjadi 13,76 persen. Sementara untuk rasi belanja modal, provinsi Maluku lebih tinggi dibandingkan Maluku Utara, rasio belanja modal tahun 2015 sebesar 23,81 persen menurun menjadi 21,59 persen (**Gambar 50**).

.

Gambar 50: Perkembangan Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Modal menurut Provinsi di Pulau Maluku Tahun 2015 dan 2018

Rasio Belanja Langsung

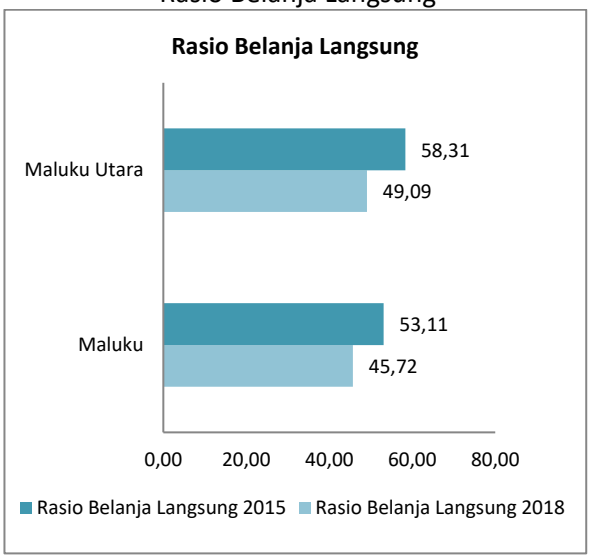

Rasio Belanja Modal

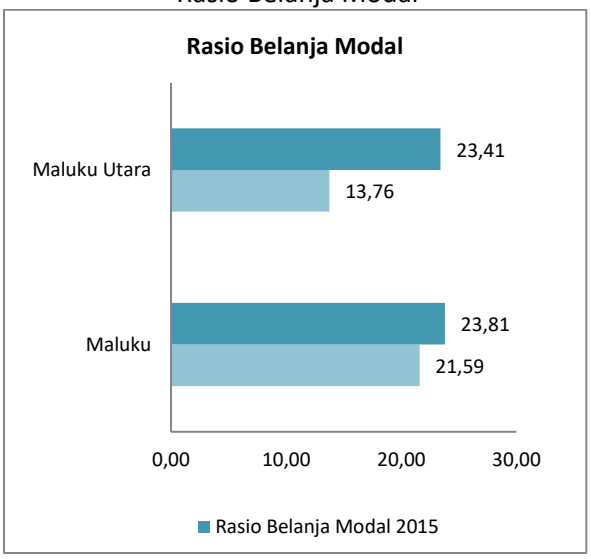

Sumber: Statstik Keuangan Daerah, BPS Tahun 2019

Konsep desentralisasi ditegaskan bertujuan untuk memperkuat hubungan kausalitas antara layanan pembangunan (melalui belanja pemerintah), kinerja makro ekonomi, dan peningkatan penerimaan daerah dan negara. Dimana Semakin berkualitas pengelolaan belanja dan kebijakan publik lainnya, secara normatif semakin baik pula kualitas kesejahteraan dan loyalitas masyarakat terhadap pemerintah. Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

Peta KFD tersebut dapat digunakan untuk tiga hal. Pertama, pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah. Kedua, penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah – jika dipersyaratkan –. Ketiga, penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi Kapasitas Fiskal Daerah di Pulau Maluku dari 1 provinsi yang ada di Maluku diantaranya adalah Maluku Utara tergolong kategori KFD sangat rendah. Sementara KFD kabupaten/kota di Pulau Maluku, sebanyak 9 dari 21 kabupaten/kota diantaranya masuk kategori KFD sangat rendah, selanjutnya, 10 kabupaten/kota yang masuk kategori KFD rendah, dan sebanyak 2 kabupaten/kota masuk kategori KFD sedang.

Tabel 40: Perkembangan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Provinsi di Pulau Maluku Tahun 2014 dan 2018

Provinsi	2014		2018	
	Indeks KFD	Kategori KFD	Indeks KFD	Kategori KFD
Maluku	0,2618	Rendah	0,325	Sangat Tinggi
Maluku Utara	1,1499	Tinggi	0,295	Sangat Rendah

Sumber: Hasil Pengolahan Data APBD, BPS 2019.

Tabel 41: Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Kabupaten dan Kota Per Provinsi di Pulau Maluku Tahun 2018

Provinsi	KFD (Kabupaten/Kota)					Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Maluku	4	6	1	0	0	11
Maluku Utara	5	4	1	0	0	10
P. MALUKU	**9**	**10**	**2**	**0**	**0**	**21**

Sumber: Hasil Pengolahan Data APBD, BPS 2019.

1.5 PERKEMBANGAN PELAYANAN SOSIAL DASAR

1.5.1 PENDIDIKAN

Perkembangan fasilitas pendidikan di wilayah Maluku pada tahun 2018 meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 pada untuk beberapa level pendidikan yaitu SD, SMP, SMU dan SMK. Peningkatan yang paling signifikan pada level pendidikan SD dengan meningkatnya jumlah sekolah SD sebanyak 118 sekolah dibandingkan dengan tahun 2016. Kemudian di ikuti level pendidikan SMP dan SMU dengan jumlah tambahan sekolah sebanyak 90 untuk SMP dan SMA sebanyak 38 sekolah. Rasio antara jumlah murid dan jumlah sekolah di Pulau Maluku sebesar 122-227 siswa per sekolah pada tingkat SD sampai dengan SMA. Jika asumsi per kelas sebanyak 50 murid maka dalam satu kelas artinya rata-rata setiap sekolah memiliki 2 - 5 kelas pembelajaran. (**Tabel 42**)

Gambar 51: Delta Pertumbuhan Sekolah di Wilayah Maluku Tahun 2016 dan 2018 berdasarkan level pendidikan.

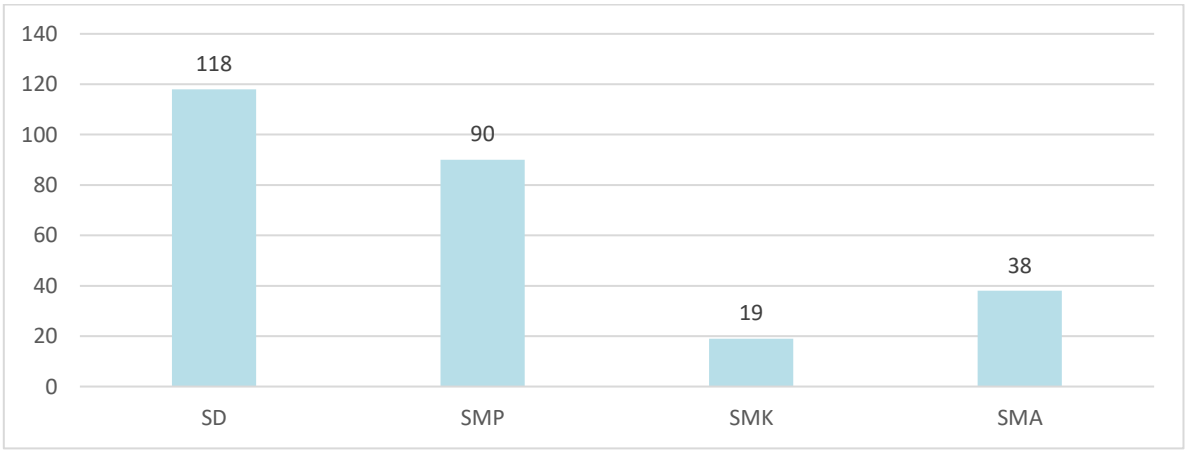

Sumber: BPS, Tahun 2019

Tabel 42: Perkembangan Jumlah Fasilitas Pendidikan dan Rasio Murid Per Sekolah di Wilayah Maluku Bedasarkan Provinsi Tahun 2016 dan 2018.

Provinsi	Jumlah Sekolah								Rasio Murid/Sekolah							
	2016				2018				2016				2018			
	SD	SMP	SMK	SMA	SD	SMP	SMK	SMA	SD	SMP	SMK	SMA	SD	SMP	SMK	SMA
Maluku	1.725	599	105	263	1.781	648	109	279	133	161	190	263	125	147	202	249
Maluku Utara	1.245	443	111	179	1.307	484	126	201	125	134	145	203	117	125	134	195
P. MALUKU	**2.970**	**1.042**	**216**	**442**	**3.088**	**1.132**	**235**	**480**	**129**	**150**	**167**	**238**	**122**	**138**	**166**	**227**

Sumber: BPS, Tahun 2019

1.5.2 KESEHATAN

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan merupakan salah satu agenda penting pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan yang prima terutama dari sisi ketersediaan dan aksesbilitas. Perkembangan fasilitas kesehatan di wilayah Maluku pada tahun 2018 meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 hampir di setiap jenis fasilitas kesehatan. Pada fasilitas rumah sakit, (**Gambar 52**) terlihat terjadi peningkatan jumlah rumah sakit umum di tahun 2018 berjumlah 46 unit lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 (45 unit) sedangkan rumah sakit khusus berjumlah 2 unit mengalami kenaikan 1 unit dibandingkan dengan tahun 2014 (1 unit). Sedangkan untuk perkembangan fasilitas kesehatan lainnya sepeti puskesmas, klinik pratama, apotik dan toko obat juga mengalami peningkatan di tahun 2018 dibandingkan tahun 2014 yang paling signifikan meningkat adalah jumlah klinik pratama dan jumlah apotik dengan peningkatan yang sangat besar.

Jika diamati pada level provinsi, jumlah rumah sakit terbanyak ada di Provinsi Maluku sebanyak 28 unit (Rumah sakit umum dan khusus). Untuk fasilitas kesehatan lainnya seperti puskesmas, toko obat, klinik pratama dan apotik juga paling banyak terdapat di provinsi Maluku. (**Tabel 43 dan Tabel 44**).

Gambar 52: Perkembangan Fasilitas Kesehatan di Wilayah Maluku Tahun 2014 dan 2018.

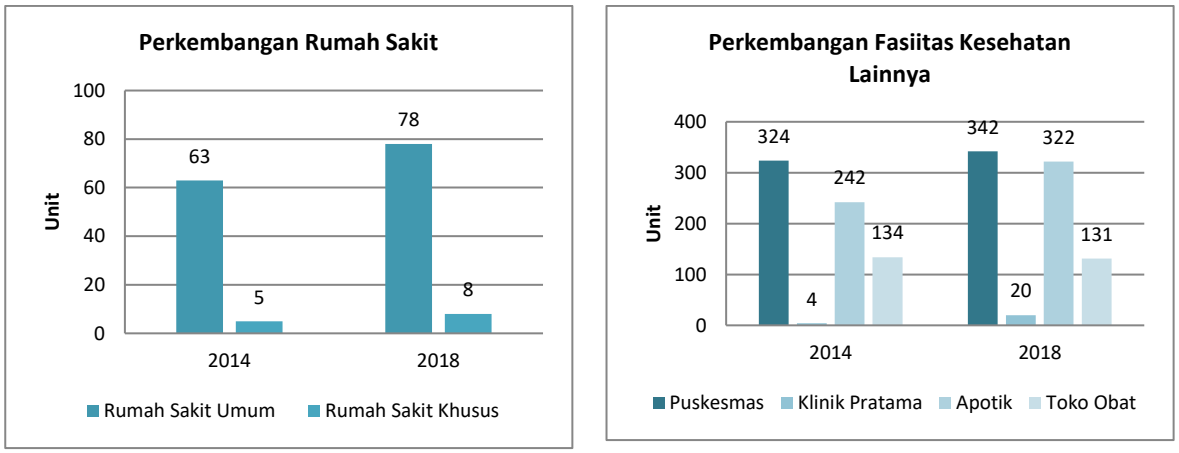

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI

Tabel 43: Perkembangan Fasilitas Rumah Sakit di Wilayah Maluku Tahun 2014 dan 2018 berdasarkan Provinsi.

Provinsi	Rumah Sakit		Rumah Sakit Umum		Rumah Sakit Khusus	
	2014	2018	2014	2018	2014	2018
Maluku	27	28	26	27	1	1
Maluku Utara	19	20	19	19	0	1
P. MALUKU	**46**	**48**	**45**	**46**	**1**	**2**

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI

Tabel 44: Perkembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya di Wilayah Maluku Tahun 2014 dan 2018 Berdasarkan Provinsi.

Provinsi	Puskesmas		Klinik Pratama		Apotik		Toko Obat	
	2014	2018	2014	2018	2014	2018	2014	2018
Maluku	197	208	1	17	139	179	113	111
Maluku Utara	127	134	3	3	103	143	21	20
P. MALUKU	**324**	**342**	**4**	**20**	**242**	**322**	**134**	**131**

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI

1.5.3 PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

Perumahan. Kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang akan terus berkembang seiring dengan bertambahnya penduduk. Perumahan yang layak huni harus dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum, diantaranya adalah penyediaan air minum, pembuangan sampah, sanitasi, tersedianya listrik, telepon, jalan, dan infrastruktur lainnya.

T**abel 45** mengenai status kepemilikan rumah berdasarkan provinsi, dapat dilihat bahwa di wilayah Maluku memiliki persentasi yang tinggi atas kepemilikan rumah sendiri dengan persentase diatas 50% (80,15 persen di Maluku dan 86,83 persen di Maluku Utara). Di wilayah Maluku, tahun 2017 persentase rumah tangga yang memiliki rumah mencapai diatas 80% dan rumah tangga yang masih menyewa rumah hanya dibawah 7 persen sehingga dapat dipastikan hampir semua rumah tangga di wilayah Maluku memiliki rumah sediri.

Tabel 45: Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Milik Sendiri, Tahun 2013-2017.

Provinsi	Kepemilikan Sendiri					Kontrak/Sewa				
	2013*	2014	2015	2016	2017	2013*	2014	2015	2016	2017
Maluku	79.53	79.84	81.51	80.48	80.15	5.14	5.76	5.65	6.93	6.53
Maluku Utara	85.88	86.13	87.84	87.65	86.83	4.58	4.25	4.86	5.59	5.47
NASIONAL	**80.08**	**79.77**	**82.63**	**82.58**	**79.61**	**8.06**	**8.37**	**8.08**	**8.51**	**9.52**

Sumber: BPS, Tahun 2019

T**abel 46** mengenai persentase rumah tangga dengan sumber ar minum layak, dapat dilihat bahwa di wilayah Maluku, semua provinsi memiliki persetase sumber air minum layak di bawah nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat kesulitan dalam mengakses akses air bersih di daerahnya.

Tabel 46: Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Sumber Air Minum Layak, 2013-2017.

Provinsi	2013	2014	2015	2016	2017
Maluku	57,56	63,01	64,96	67,20	68,34
Maluku Utara	59,65	61,98	60,07	62,99	65,73
NASIONAL	**67,73**	**68,11**	**70,97**	**71,14**	**72,04**

Sumber: BPS, Tahun 2019

Tabel 47 mengenai persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik PLN, dapat dilihat bahwa di Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagian besar presentase rumah tangga yang mendapat listrik PLN sudah berada di atas 80 persen, yang artinya hampir semua rumah tangga mendapat akses jaringan listrik PLN hampir di semua tahun analisis.

Tabel 47: Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Sumber Penerangan Listrik PLN, Tahun 2013-2017.

Provinsi	2013	2014	2015	2016	2017
Maluku	75,70	79,90	81,41	83,58	86,41
Maluku Utara	73,35	74,36	76,60	79,02	84,33
NASIONAL	**93,17**	**93,97**	**94,44**	**94,93**	**95,99**

Sumber: BPS, Tahun 2019

T**abel 48** mengenai persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak, pada tahun 2017 dapat dilihat bahwa di semua provinsi di wilayah Maluku nilai persentasenya masih dibawah nasional.

Tabel 48: Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak, 2013-2017.

Provinsi	2013	2014	2015	2016	2017
Maluku	62,39	62,87	60,02	66,81	63,29
Maluku Utara	57,72	55,75	59,17	64,71	66,18
NASIONAL	**60,91**	**61,08**	**62,14**	**67,80**	**67,89**

Sumber: BPS, Tahun 2019

T**abel 49** mengenai persentase rumah tangga dengan luas lantai terluas bukan tanah, dapat dilihat bahwa di wilayah pulau Maluku hampir semua provinsi persentasenya lebih rendah dibandingkan nasional pada tahun 2013-2017.

Tabel 49: Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Lantai Terluas bukan Tanah, Tahun 2013-2017.

Provinsi	2013	2014	2015	2016	2017
	Perkotaan+ Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
Maluku	89,56	92,48	91,97	93,41	93,92
Maluku Utara	88,28	90,14	90,88	91,08	92,69
NASIONAL	**91,17**	**92,80**	**93,10**	**93,58**	**94,38**

Sumber: BPS, Tahun 2019

PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1.5.4 JALAN

Perkembangan panjang jalan dalam empat tahun terakhir tidak banyak mengalami banyak kenaikan di tahun 2015-2017, sedangkan di tahun 2018 tidak mengalami penambahan ruas jalan **(Gambar 53**). Pada tahun 2018 total panjang jalan di Wilayah Maluku tercatat sepanjang 17.645 km dengan panjang jalan negara sebesar 2.975 km, jalan provinsi sebesar 2.357 km, dan jalan kabupaten sebesar 12.313 km. Jika di rasiokan dengan jumlah kendaraan di pulau Maluku, dalam setiap kilometer menampung 66 kendaraan pada tahun 2018, dan trendnya terus meningkat dari tahun 2015 hingga 2018.

Gambar 53: Perkembangan Panjang Jalan menurut Kewenangan di Wilayah Maluku Tahun 2015-2018, (dalam Km).

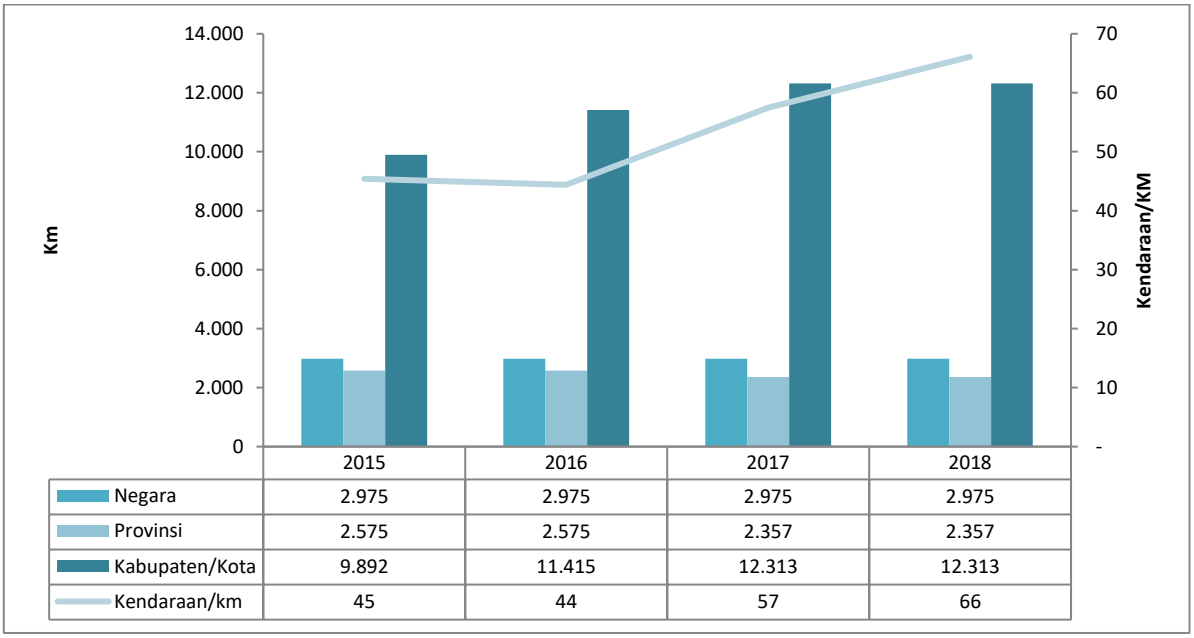

	2015	2016	2017	2018
Negara	2.975	2.975	2.975	2.975
Provinsi	2.575	2.575	2.357	2.357
Kabupaten/Kota	9.892	11.415	12.313	12.313
Kendaraan/km	45	44	57	66

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum, 2019

Kondisi kualitas jalan di Wilayah Maluku pada tahun 2016 rata-rata termasuk kedalam kategori mantap (baik+sedang), yaitu mencapai 54,19 persen dan kondisi tidak mantap sebesar 45,81 persen dari total panjang jalan. Rata-rata persentase panjang jalan (Provinsi, Kabupaten dan Kota) dengan kualitas mantap terbesar dicapai oleh Provinsi Maluku dengan persentase yaitu mencapai 62,19 persen, dan untuk kualitas jalan dengan kelompok tidak mantap mencapai 37,81 persen. (**Tabel 50**).

Tabel 50: Kualitas Jalan menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2016.

Provinsi	Jalan Provinsi			Jalan Kabupate			Jalan Kota		
	% Mantap	% Tidak Mantap	Panjang Jalan	% Mantap	% Tidak Mantap	Panjang Jalan	% Mantap	% Tidak Mantap	Panjang Jalan
Maluku	54.26	45.74	851.91	50.53	49.47	5,789.70	81.78	18.22	599.28
Maluku Utara	19.78	80.22	2,404.74	37.86	62.14	3,845.17	80.95	19.05	825.98

Sumber: Statistik Perhubungan, BPS

1.5.5 LISTRIK

Perkembangan produksi energi listrik di Wilayah Maluku meningkat, di tahun 2013 dan 2017 terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun yang lain. Produksi listrik tahun 2017 mencapai 858,98 GWh atau turun sebesar 9,75 persen dari produksi tahun 2015 (**Gambar 54**). Produksi energi listrik di Wilayah Maluku sebagian besar dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD Diesel PP Rented) yaitu mencapai 61 persen dan PLTD Diesel PP sebesar 30 persen (**Gambar 55**).

Gambar 54: Perkembangan Energi yang Diproduksi di Wilayah Maluku Tahun 2013-2017, (dalam GWh).

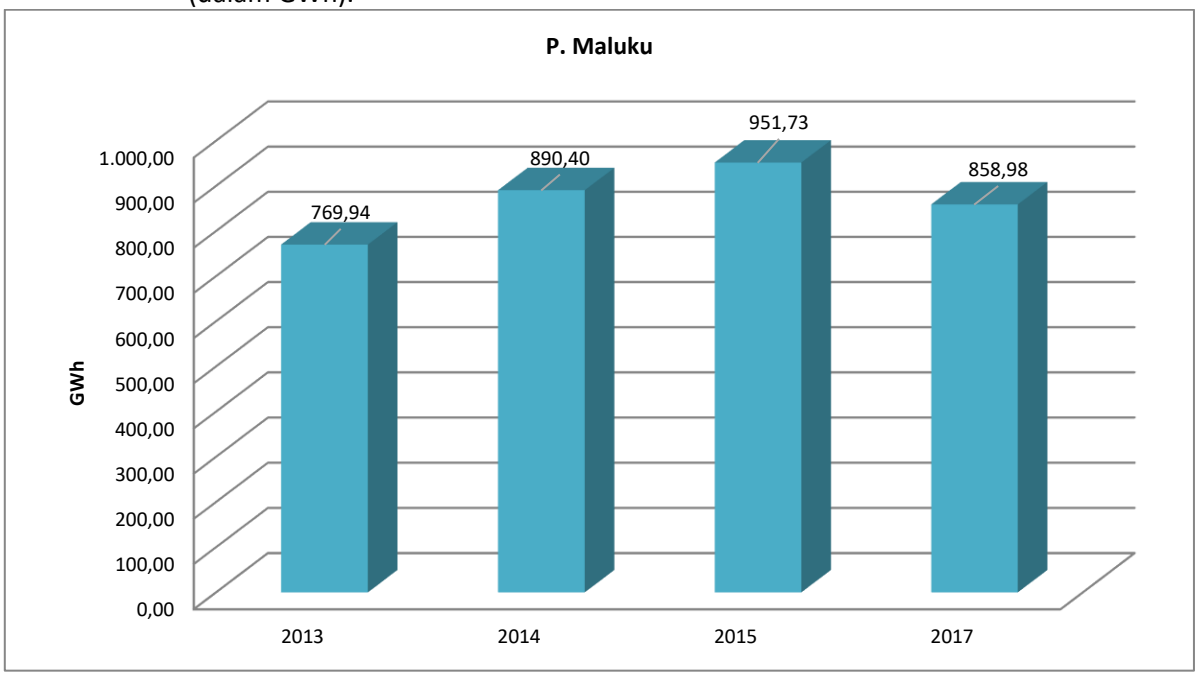

Gambar 55: Komposisi Produksi Energi Listrik menurut Jenis Pembangkit di Wilayah Maluku Tahun 2013, (dalam persen).

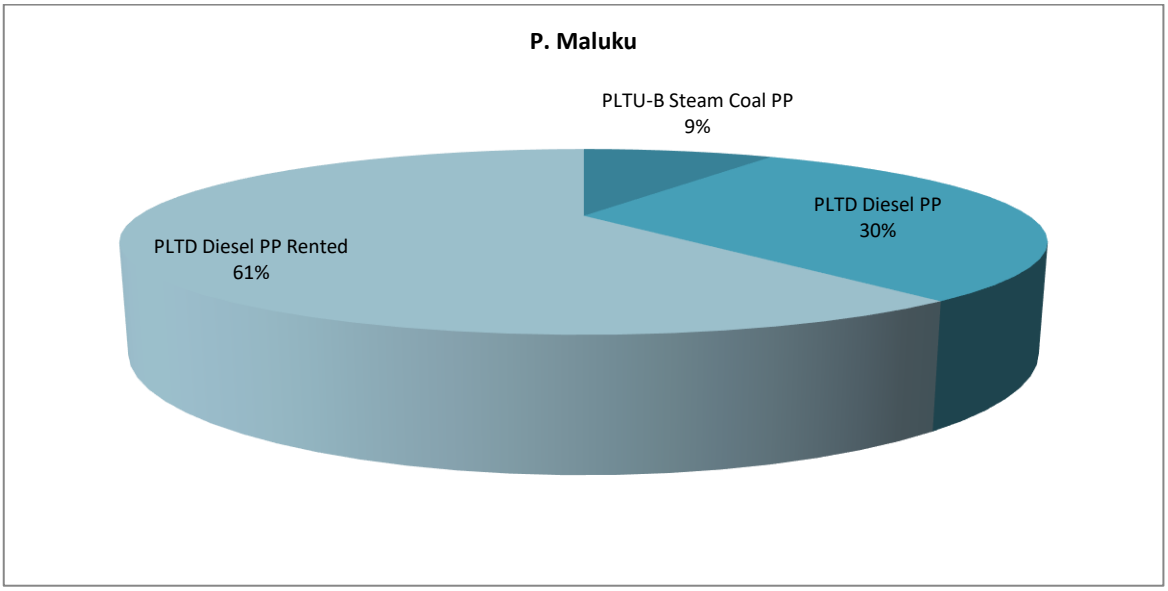

Sumber : BPS, 2019

Perkembangan rasio elektrifikasi, dalam kurun waktu 2015-2018 Wilayah Maluku meningkat walaupun masih ada provinsi yang angkanya berada di bawah rata-rata rasio elektrifikasi nasional. Capaian rasio elektifikasi tahun 2015 mencapai 88,74 persen, lebih tinggi 0,44 dibandingkan dengan nilai nasional (**Gambar 56**). Capaian rasio elektrifikasi di tahun 2018 mengalami peningkatan 4,07 persen, masih lebih tinggi dibandingkan dengan nasional 3,09 persen. Pada tahun 2018 hanya provinsi Maluku yang memiliki angka rasio elektrifikasinya di bawah nasional. (**Gambar 57**).

Gambar 56: Perkembangan Rasio Elektrifikasi Wilayah Maluku Tahun 2015-2018, (dalam persen).

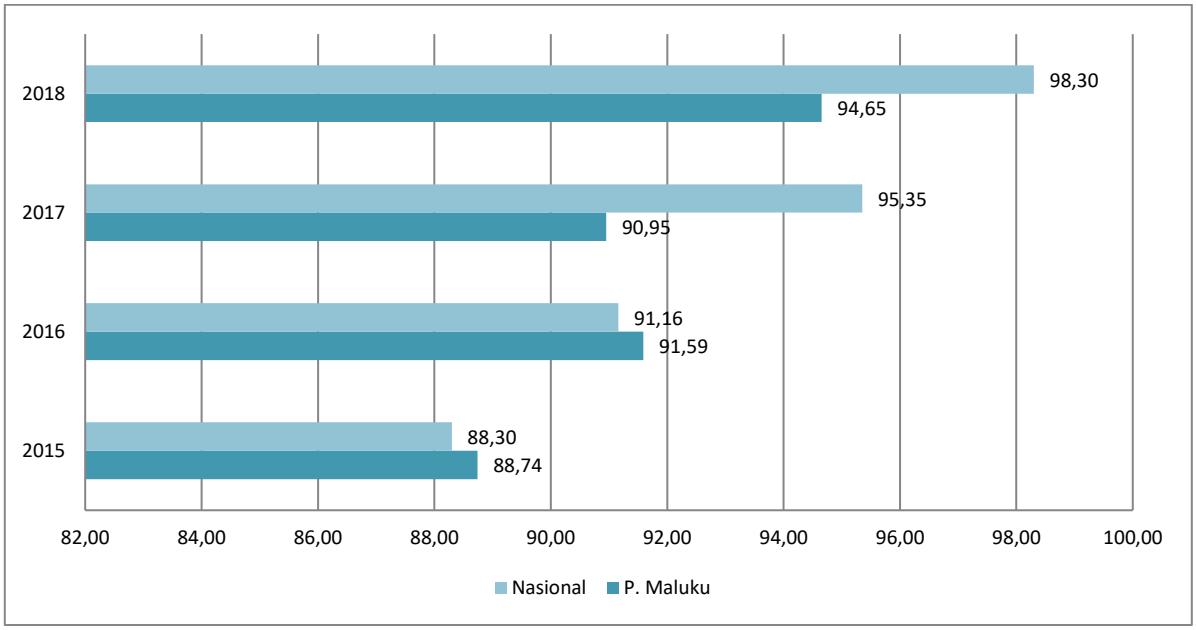

Sumber: BPS, 2019

Gambar 57: Rasio Elektrifikasi menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2018, (dalam persen).

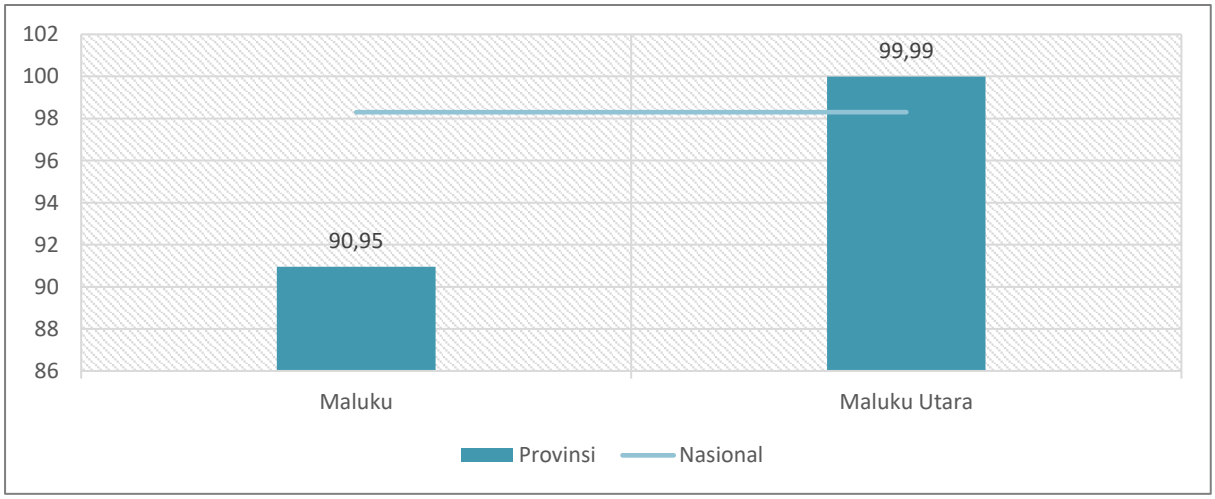

Sumber: BPS, 2019

1.6 PENGEMBANGAN WILAYAH

1.6.1 KAWASAN HUTAN DAN NON HUTAN DI WILAYAH MALUKU

Kawasan hutan di wilayah Maluku meliputi luasan 6.425,60 Ribu Hektar atau 82,88 persen dari wilayah Maluku. Pada kawasan hutan tersebut seluas 4.536,70 Ribu Hektar merupakan Kawasan Hutan Tetap (70,60%), dan sisanya seluas 1.888,90 Ribu Hektar (29,40%) merupakan kawasan Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK). Berdasarkan perbandingan antarkawasan hutan dan non hutan, kawasan HPK menunjukkan persentase area terluas (24,36%), berikutnya Kawasan Hutan Produksi

Terbatas (HPT) sebesar 20,14 persen, dan Areal Penggunaan lainnya (APL) sebesar 17,12 persen. Kawasan Hutan Tetap meliputi Hutan Konservasi (HK), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi (HP), dengan kawasan terluas adalah Hutan Produksi Terbatas (HPT) yaitu 1.561,20 ribu hektar dengan tutupan lahan berupa hutan seluas 1.306,90 Ribu Hektar, dan non hutan seluas 254,20 ribu Hektar.

Gambar 58: Kawasan Hutan dan Non Hutan (Ribu Ha) di Wilayah Maluku Tahun 2017

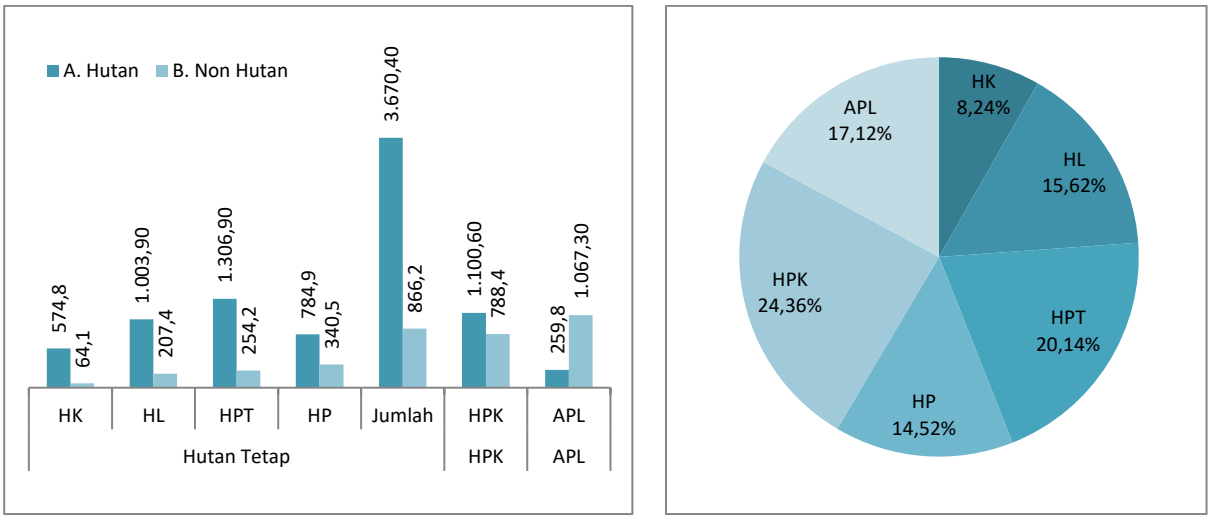

Sumber: - Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017

Berdasarkan perbandingan kawasan hutan antarprovinsi, Provinsi Maluku memiliki luasan terbesar yaitu 3.910,40 ribu Ha atau 60,86 persen dari total kawasan hutan di wilayah Maluku. Hal yang sama untuk disetiap jenis kawasan hutan tetap menunjukkan luasan tertinggi berada di Provinsi Maluku. Diantara jenis kawasan hutan, HPK di wilayah Maluku menunjukkan luasan terbesar yakni 1.324,90 Ribu Hektar, dan di Provinsi Maluku Utara hanya seluas 564,10 Ribu Hektar.

Tabel 51: Luas Kawasan Hutan dan Non Hutan di Wilayah Maluku Tahun 2017 (Ribu Ha)

Penutupan Lahan	Kawasan Hutan							APL
	Hutan Tetap					HPK	Jumlah	
	HK	HL	HPT	HP	Jumlah			
Maluku Utara	218,5	584,1	666,9	481,7	1.951,10	564,10	2.515,20	615,4
Maluku	420,3	627,3	894,3	643,7	2.585,50	1.324,90	3.910,40	711,7
P. MALUKU	**638,8**	**1.211,30**	**1.561,10**	**1.125,40**	**4.536,70**	**1.888,90**	**6.425,60**	**1.327,10**

Sumber: - Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017

Perkembangan luasan kawasan hutan dan kawasan hutan tetap antarprovinsi pada tahun 2014 dan 2017 menunjukkan penurunan di Provinsi Maluku, sementara di Provinsi Maluku Utara tidak menunjukkan perubahan. Penurunan Kawasan Hutan di Provinsi Maluku sebesar 13,20 ribu hektar, sementara penurunan Kawasan Hutan Tetap sebesar 11,20 Ribu hektar.

Tabel 52: Perkembangan Kawasan Hutan antarprovinsi di Wilayah Maluku pada Tahun 2014 dan Tahun 2017 .

Provinsi	KAWASAN HUTAN							
	HUTAN TETAP			HPK		Jumlah		
	2014	2017	Δ (2017-2014)	2014	2017	2014	2017	Δ (2017-2014)
Maluku Utara	**1.951,10**	**1.951,10**	**0,00**	**564,10**	**564,10**	**2.515,2**	**2.515,20**	**0,00**
A. Hutan	1.647,90	1.612,10	-35,80	320,40	297,70	1.968,3	1.909,80	-58,50
B. Non Hutan	303,30	339	35,70	243,70	266,40	547,0	605,40	58,40
Maluku	**2.596,70**	**2.585,50**	**-11,20**	**1.326,90**	**1.324,90**	**3.923,6**	**3.910,40**	**-13,20**
A. Hutan	2.065,70	2.058,30	-7,40	810,30	802,90	2.876,0	2.861,20	-14,80
B. Non Hutan	530,90	527,20	-3,70	516,60	522,00	1.047,5	1.049,20	1,70
P. MALUKU	**4.547,80**	**4.536,60**	**-11,20**	**1.891,00**	**1.889,00**	**6.438,8**	**6.425,60**	**-13,20**
A. Hutan	**3.713,60**	**3.670,40**	**-43,20**	**1.130,70**	**1.100,60**	**4.844,3**	**4.771,00**	**-73,30**
B. Non Hutan	**834,20**	**866,20**	**32,00**	**760,30**	**788,40**	**1.594,5**	**1.654,60**	**60,10**

Sumber: - Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2014, 2017

Berdasarkan pembagian kawasan hutan tetap dan kawasan lainnya, kawasan HPK dan APL adalah kawasan yang dapat digunakan untuk kegiatan non kehutanan diwilayah Maluku adalah seluas seluas 3.216,10 Ribu Ha atau 41,48 persen dari wilayah Maluku. Pada kawasan tersebut seluas 1.855,70 persen sudah merupakan tutupan lahan non hutan (57,70%), dan seluas 1.360,40 ribu Ha atau 42,30 persen diantaranya yang masih merupakan tutupan hutan. Pada kawasan ini merupakan bagian dari kawasan budidaya dan dapat menjadi alternatif ekstensifikasi dari kegiatan budidaya seperti perkebunan, pertanian dan kegiatan lainnya.

Gambar 59: kawasan HPK dan APL (Ribu Ha) dengan Tutupan Lahan Hutan di wilayah Maluku menurut provinsi, Tahun 2016.

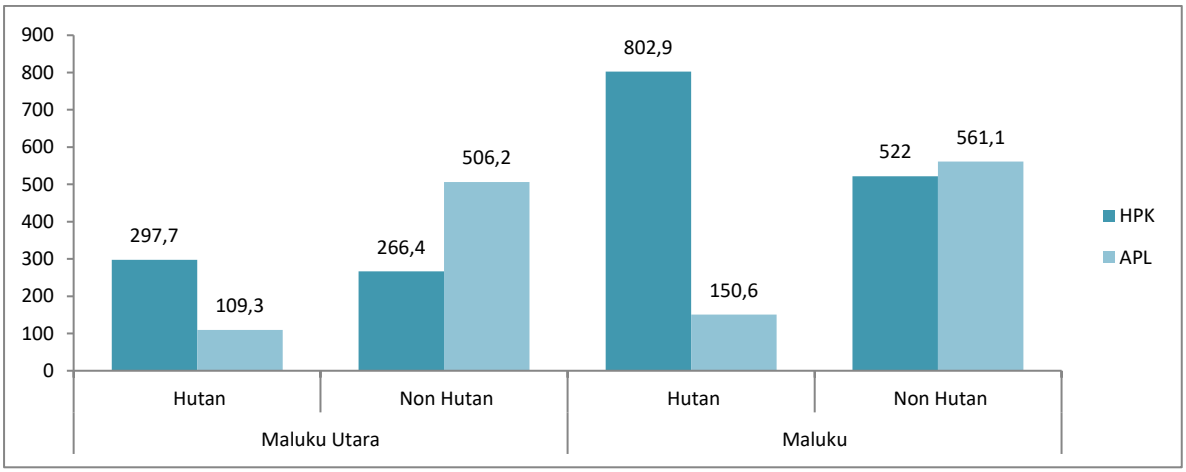

Sumber: - Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017

1.6.2 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Wilayah Maluku

Pengembangan KEK bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan merupakan model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata dan perdagangan sehingga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan. Pengembangan KEK didasarkan pada potensi keunggulan ekonomi dan geostrategis serta aksesibilitas kawasan tersebut ke pasar global, sehingga diiharapkan mampu mengundang lebih banyak investor, dan menggeliatkan kegiatan ekonomi, serta dapat menciptakan kegiatan ekonomi berskala tinggi dan berdaya saing global di kawasan tersebut.

KEK Morotai terletak di Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. KEK Morotai ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2014 dengan luas area 1.101,76 Ha. Dengan posisi geostrategis sebagai pulau terluar di sisi timur laut Indonesia yang dekat dengan negara-negara ASEAN dan Asia Timur. KEK Morotai memberikan nuansa sejarah sebagai nilai tambah bagi wisatawan. KEK Morotai diharapkan dapat menjadi destinasi wisata internasional dengan perkiraan investasi pelaku usaha sebesar Rp 30,44 triliun hingga 2025

Pulau Morotai dahulu merupakan salah satu basis militer pada Perang Dunia II yang kini kaya akan barang peninggalan bersejarah. Selain menjadi wisata sejarah, KEK Morotai juga memiliki keunggulan wisata bahari dengan keindahan pantai dan bawah laut yang mempesona. Hamparan pasir putih halus, air laut yang jernih serta terumbu karang yang indah merupakan daya tarik wisata KEK Morotai.

Dilintasi oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia III yang juga merupakan jalur migrasi ikan tuna, KEK Morotai merupakan sumber bahan baku bagi industri pengolahan perikanan. Dengan potensi yang dimiliki, KEK Morotai akan menjadi pusat industri perikanan didukung dengan logistik yang akan menjadikan Pulau Morotai hub internasional di kawasan timur Indonesia.

Gambaran status Terakhir tentang status lahan, dukungan infrastruktur dalam dan luar kawasan serta regulasi dan kelembagan dapat dilihat pada **Tabel 53.**

Tabel 53: Status terakhir KEK Morotai Menurut Status Lahan, Dukungan Infrastruktur serta Regulasi dan kelembagaan.

	Status Akhir 2018/2019
Usulan Baru	
Persiapan	
Operasional Bermasalah	v
Operasional Penuh	
Pembangunan infrastruktur dalam kawasan	
Lahan Clear and Clean	Seluas 87 Ha lahan masih dalam sertifikasi HPL.
Terbangunnya jalan dalam kawasan	sepanjang 1,6 km
Terbangunnya WTP Air Bersih	SPAM IKK Morotai Selatan 5l/d, IPA 20l/dt di 3 lokasi 2019
Ketersediaan energi listrik	5 unit PLTD dengan kapasitas terpasang 2.360 kW. PLTS hybrid 2 unit dengan masing-masing kapasitas 350 KW dan 600 KW. Namun baru sekitar seper tiga dari total kapasitas PLTS yang telah dimanfaatkan
Terbangunnya Drainase	Belum semua ruas jalan ter fasilitasi oleh saluran drainase. (Drainase Lingkungan Kota Daruba)

Terbangunnya IPAL		(belum ada IPAL Komunal
Terbangunnya TPA		TPA Sampah Kab. Pulau Morotai (Pelayanan persampahan baru menjangkau 18,9% penduduk; dimana sampah yang terangkut dari TPS tidak dibawa ke TPA, melainkan ke lahan kosong.
Pembangunan Infrastruktur Wilayah (Luar Kawasan)		
Ketersediaan Sumber Air Bersih		Debit sebesar 1.130 l/dt tersebar di 7 titik dengan jarak ke pelayanan 7-15km
Ketersediaan Sumber Energi		5 unit PLTD dengan kapasitas terpasang 2.360 kW. PLTS hybrid 2 unit dengan masing-masing kapasitas 350 KW dan 600 KW. Namun baru sekitar seper tiga dari total kapasitas PLTS yang telah dimanfaatkan
Bandara		Bandara Pitu - Morotai panjang runaway 2.400 m dan lebar 30 m. Meupakan bandara pangkalan militer dan tipe domestik (4C)
Pelabuhan		Pel abuhan Regional Daruba masuk dalam pelabuhan kelas III. Dengan kapasitas angkutan <1000 penumpang/hari
Jalan Nasional		2018 telah dibangun SOFI - WAYABULA
Kelembagaan dan Regulasi		
Regulasi	RTRW	PKSN perbatasan, KSK, sebagai daerah tertinggal, KSPN
	PP	Diperlukan regulasi terkait pelepasan kawasan hutan bakau menjadi sarana pengembangan KEK
Organisasi/ Badan Pengelola		PT Jababeka Morotai
Investasi		Jababeka minta dibentuk Badan Otorita di Morotai (industry.co.id, 2018),
Ketersediaan Anchor Investor		PT Jababeka Morotai, Zann Corporation. Kendala pengembangan investasi: lokasi KEK tidak memiliki garis pantai .
Progress kawasan (Sumber: Sekdenas Apr 2019)		Terkendala morotarium perikanan

Sumber: Bappenas 2019.

1.6.3 Pengembangan Daerah Tertinggal dan Perbatasan

Daerah Tertinggal. Berdasarkan Peraturan Presiden 131 Tahun 2015, ditetapkan jumlah daerah tertinggal sebanyak 122 kabupaten, dan dari 122 daerah tertinggal tersebut, ditargetkan terentaskan 80 kabupaten di akhir tahun 2019 sesuai target RPJMN 2015-2019. Daerah tertinggal di Wilayah Maluku sebanyak 14 kabupaten, dengan penyebaran sebanyak 8 kabupaten di Provinsi Maluku dan 6 kabupaten di Provinsi Maluku Utara. Rincian kabupaten sebagai berikut:

MALUKU		MALUKU UTARA	
1	Maluku Tenggara Barat	1	Halmahera Barat
2	Maluku Tengah	2	Kepulauan Sula
3	Buru	3	Halmahera Selatan
4	Kepulauan Aru	4	Halmahera Timur
5	Seram Bagian Barat	5	Pulau Morotai
6	Seram Bagian Timur	6	Pulau Taliabu
7	Maluku Barat Daya		
8	Buru Selatan		

Masih tertinggalnya daerah-daerah di Wilayah Maluku secara umum disebabkan oleh masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia, tingginya tingkat kemiskinan, terbatasnya ketersediaan infrastruktur ekonomi dan sosial, rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta perekonomian masyarakat masih tertumpu pada sektor primer (seperti pertanian, pertambangan dan penggalian). Gambaran umum daerah tertinggal di Wilayah Maluku disajikan pada **Tabel 54**, dengan beberapa indikator yang menggambarkan kondisi daerah tertinggal, diantaranya adalah: IPM, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan kemiskinan.

Menurut data IPM tahun 2018, tingkat pembangunan sumberdaya manusia di 16 daerah tertinggal di Wilayah Maluku seluruhnya masih berada di bawah IPM Nasional (70,81), dengan IPM tertinggi berada di Kabupaten Maluku Tengah sebesar 70,60, dan Kabupaten Buru sebesar 68,25. IPM terendah berada di kabupaten Taliabu Provinsi Maluku Utara sebesar 59,67, dan Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku sebesar 60,64.

Tabel 54: Karakteristik Daerah Tertinggal di Wilayah Maluku Tahun 2017/2018.

Kabupaten	Ekonomi 2018		Kemiskinan 2018		IPM 2018	Penganguran Terbuka 2017	
	LPE (%)	Perkapita* (Rp. juta)	000 orang	%		Jumlah	TPT
Maluku Tenggara Barat	6,07	22,12	31,53	28,08	62,39	2.419	5,12
Maluku Tengah	5,94	21,73	74,85	20,11	70,60	14.232	9,58
Buru	6,22	16,05	23,62	17,03	68,25	1.995	3,45
Kepulauan Aru	6,05	34,24	25,68	27,12	63,12	2.384	6,68
Seram Bagian Barat	5,95	16,44	43,77	25,62	65,14	5.055	7,02
Seram Bagian Timur	0,38	25,18	26,64	23,62	62,98	4.149	9,30
Maluku Barat Daya	6,13	21,00	21,98	30,20	60,64	3.036	9,72
Buru Selatan	6,02	20,95	10,12	16,31	63,62	1.110	4,63
Maluku	**5,94**	**24,28**	**320,08**	**18,12**	**65,59**	**65.735**	**9,29**
Halmahera Barat	5,27	17,95	10,14	8,74	64,54	1.165	2,19
Kepulauan Sula	5,34	22,68	9,19	8,89	62,96	2.286	5,86
Halmahera Selatan	15,38	27,33	11,01	4,80	63,39	4.555	4,68
Halmahera Timur	8,68	34,68	13,82	15,02	66,20	1.877	4,36
Pulau Morotai	6,55	21,94	4,67	7,16	61,39	1.607	6,11
Pulau Taliabu	12,06	25,55	3,85	7,35	59,67	1.549	6,69
Maluku Utara	**7,92**	**29,61**	**81,46**	**6,64**	**67,80**	**27.516**	**5,33**
NASIONAL	**5,31**	**39,34**		**9,82**	**71,20**		**5,34**

*Keterangan: * PDRB Perkapita Harga Berlaku.*

Warna merah menunjukkan kondisi lebih buruk dibanding angka Nasional

Sumber: Data BPS tahun 2017/2018

Perekonomian daerah tertinggal di wilayah Maluku pada tahun 2018 sebagian besar kabupaten daerah tertinggal tumbuh positif dan sudah berada di atas rata-rata pertumbuhan Nasional (5,07%) kecuali di Kabupaten Seram Bagian Timur (0,38%) dan Kabupaten Halmahera Barat (5,27%). Pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara sebesar 15,38 persen dan Kabupaten Pulau Taliabu sebesar 12,06 persen. Berdasarkan PDRB perkapita (ADHB) tahun 2018, seluruh daerah tertinggal berada di bawah PDRB Perkapita Nasional (Rp. 39,34 juta), dengan PDRB Perkapita tertinggi berada di Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp. 34,68 juta dan Kepulauan Aru Rp. 34,24 Juta. PDRB terendah berada di Kabupaten Buru Provinsi Maluku sebesar Rp. 16,05 juta, Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 17,95 Juta.

Dilihat dari indikator kemiskinan tahun 2018, seluruh kabupaten tertinggal di Provinsi Maluku memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata Nasional (9,82%), dengan tingkat kemiskinan tertinggi di kabupaten Maluku Barat Daya (30,20%) dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (28,08%). Sementara kabupaten tertinggal di Provinsi Maluku Utara sebagian besar sudah berada di bawah tingkat kemiskinan nasional, kecuali di kabupaten Halmahera Timur sebesar 15,02 persen.

Berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2017, sebagian besar kabupaten daerah tertinggal di Provinsi Maluku masih berada di atas TPT Nasional (5,34%), kecuali di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (5,12%), Kabupaten Buru (3,45%), dan kabupaten Buru Selatan (4,63%). Kondisi sebaliknya di provinsi Maluku Utara, tingkat pengangguran daerah tertinggal sebagian besar sudah berada di bawah rata-rata nasional, kecuali Kabupaten Morotai (6,11%) dan Kabupaten Pulau Taliabu (6,69%).

Percepatan pembangunan Perdesaan. Dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal di wilayah Maluku, alokasi dana desa yang telah dikucurkan menunjukkan peningkatan yang signifikan selama periode 2015-2018. Pada tahun 2018 alokasi dana desa telah mencapai 1,33 Trilyun yang terbagi kepada 1.708 desa.

Alokasi dana desa untuk daerah tertinggal diwilayah Maluku pada tahun 2018 menunjukkan nilai alokasi yang sebanding dengan jumlah desa disetiap kabupaten. Alokasi tertinggi terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan dengan jumlah desa sebanyak 249 desa mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp. 171,935 Milyar Rupiah atau rata-rata sekitar Rp. 690,50 juta, dan Kabupaten Seram Bagian Timur dengan 198 desa mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp. 140,065 Milyar Rupiah atau rata-rata sekitar Rp. 707,402 juta. Lihat **Gambar 60.**

Gambar 60: Alokasi Dana Desa untuk Daerah Tertinggal di Wilayah Maluku pada periode 2015-2018.

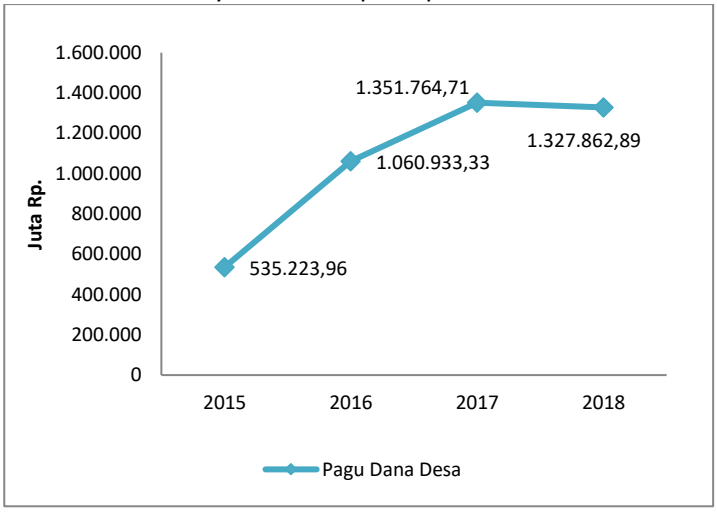

Sumber Data: Pusdatin Kemendes PPDT, 2019

Gambar 61: Alokasi Dana Desa untuk Daerah Tertinggal di Wilayah Maluku pada Tahun 2018.

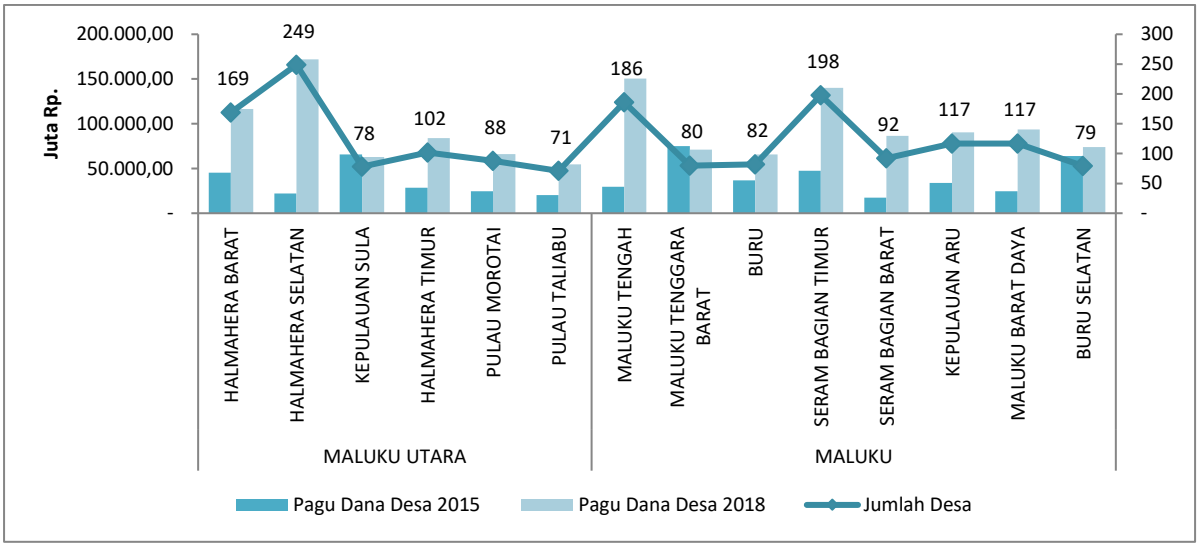

Rincian pagu dana desa pada tahun 2015- 2018 menurut kabupaten-kabupaten daerah tertinggal di wilayah Maluku dapat dilihat pada **Tabel 55.**

Tabel 55: Perkembangan Alokasi Dana Desa untuk Daerah Tertinggal di Wilayah Maluku pada periode 2015-2018

Provinsi	Kabupaten	∑ Desa	PAGU DANA DESA (Ribu Rp)			
			2015	2016	2017	2018
Maluku Utara	Halmahera Barat	169	45.329,59	101.717,60	129.912,79	116.654,29
Maluku Utara	Halmahera Selatan	249	22.223,95	147.723,10	188.920,31	171.935,11
Maluku Utara	Kepulauan Sula	78	65.643,79	49.859,36	63.209,11	62.699,59
Maluku Utara	Halmahera Timur	102	28.552,22	64.029,14	81.953,32	83.978,43
Maluku Utara	Pulau Morotai	88	24.417,52	54.777,78	69.402,83	65.910,75
Maluku Utara	Pulau Taliabu	71	20.126,02	45.163,12	57.141,03	54.510,78
Maluku	Maluku Tengah	186	29.674,01	116.853,37	148.929,56	150.561,59
Maluku	Maluku Tenggara Barat	80	75.150,16	52.352,32	66.312,28	71.097,36
Maluku	Buru	82	36.811,88	52.252,72	67.524,01	65.863,40
Maluku	Seram Bagian Timur	198	47.575,81	119.099,94	151.736,02	140.065,60
Maluku	Seram Bagian Barat	92	17.487,48	59.572,94	76.287,95	86.318,04
Maluku	Kepulauan Aru	117	33.876,34	73.194,18	93.057,70	90.552,39
Maluku	Maluku Barat Daya	117	24.485,26	73.779,76	93.305,11	93.674,33
Maluku	Buru Selatan	79	63.869,95	50.558,03	64.072,69	74.041,24
TOTAL		**1.708**	**535.223,96**	**1.060.933,33**	**1.351.764,71**	**1.327.862,89**

Sumber Data: Pusdatin Kemendes PPDT, 2019.

Kawasan Perbatasan. Kawasan perbatasan Republik Indonesia yang berada di wilayah maluku merupakan kawasan perbatasan laut yang meliputi Batas Laut Teritorial (BLT), Batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), Batas Landas Kontinen (BLK), Batas Zona Tambahan (BZT), dan Batas Zona Perikanan Khusus (Special Fisheries Zone/SFZ). Ketiga garis batas laut pertama ditentukan lebarnya oleh keberadaan pulau-pulau kecil di kawasan perbatasan yang diperlukan untuk penentuan titik dasar/garis pangkal kepulauan. Pulau-pulau kecil terluar wilayah Maluku berbatasan langsung dengan negara Palau, Australia, dan Timor Leste.

Kawasan perbatasan Laut RI-Republik Palau, meliputi perairan Landas Kontinen dan atau Zona Ekonomi Eksklusif di Samudera Pasifik yang berbatasan dengan perairan negara Palau. Kecamatan pesisir strategis di sekitar kawasan ini yang menjadi lokasi Pulau- Pulau Kecil Terluar dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional tersebar di 5 Kabupaten dan 3 Provinsi (sebagaimana Tabel 2.20.). Pulau-pulau kecil terluar di kawasan ini meliputi 8 pulau kecil terluar yaitu Pulau Jiew, Budd, Fani, Miossu, Fanildo, Bras, Bepondi, dan Liki , dan PKSN berada di Kota Daruba (Kabupaten Pulau Morotai).

Tabel 56: Kawasan Perbatasan Laut RI – Republik Palau

Kawasan Perbatasan Laut	Perairan Perbatasan	Kecamatan Strategis (LOKASI PRIORITAS)		
		Provinsi	Kabupaten	LOKPRI
Kawasan Perbatasan Laut RI – Palau	Samudera Pasifik	Maluku Utara	Halmahera Tengah	**Patani Utara**
			Pulau Morotai	Morotai Selatan, Morotai Selatan Barat, Morotai Jaya, Morotai Utara, Morotai Timur

Sumber: Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2011-2014.

Sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan yang ada di kawasan perbatasan laut RI-Palau di samudera Pasifik masih belum memadai sehingga menyulitkan pengawasan dan pengamanan terhadap berbagai kegiatan illegal. Kurangnya pengawasan perbatasan mengakibatkan kawasan ini rawan terhadap aktivitas penyelundupan dan pencurian ikan. Potensi untuk terjadinya kegiatan illegal di wilayah perairan RI seperti illegal fishing, illegal logging, illegal trading maupun kegiatan ilegal lainnya juga sangat potensial terjadi sehingga perhatian terhadap wilayah perairan dan pulau-pulau kecil terluar perlu dilakukan secara optimal.

Kegiatan usaha nelayan dan petani ikan beserta indutri pengolahannya masih dalam usaha skala kecil dengan teknologi penangkapan dan pengolahan yang sangat sederhana sehingga produktifitasnya juga rendah. Pembangunan pertanian masih belum berkembang secara merata karena masih minimnya pusat-pusat pembibitan dan penelitian, pendidikan dan informasi pertanian tanaman pangan, peternakan perkebunan dan kehutanan serta fungsi kelembagaan yang belum optimal.

Kawasan Perbatasan Laut RI – Timor Leste/ Australia, meliputi perairan Landas Kontinen dan atau Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Arafura dan Laut Aru yang berbatasan dengan perairan negara Timor Leste dan atau Australia. Kecamatan pesisir strategis di sekitar kawasan ini yang menjadi lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional di wilayah maluku

tersebar di 3 Kabupaten Provinsi Maluku. Pulau-pulau kecil terluar di kawasan ini meliputi 20 pulau yaitu Pulau Ararkula, Karaweira, Panambulai, Kultubai Utara, Kultubai Selatan, Karang, Enu, Batu Goyang, Larat, Asutubun, Selaru, Batarkusu, Masela, Miatimiarang, Leti, Kisar, Wetar, Liran, Kolepon, dan Laag. Sedangkan PKSN meliputi 3 kota yaitu Kota Dobo (Kabupaten Kepulauan Aru), Kota Saumlaki (Kabupaten Maluku Tenggara Barat), dan Kota Ilwaki (Kabupaten Maluku Barat Daya).

Tabel 57: Kawasan Perbatasan Laut RI – Timor Leste/ Australia

Kawasan Perbatasan Laut	Perairan Pebatasan	Kecamatan Strategis (Lokasi Prioritas)		
		Provinsi	Kabupaten	LOKPRI
Kawasan Perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia	Laut Arafura, Laut Aru	Maluku	Maluku Tenggara	Kei Besar, Kei Besar Selatan, Kei Besar Utara Timur, Kei Kecil Timur Selatan
			Kep Tanimbar	Selaru, Wertamrian, Tanimbar Utara, Yaru, Kormomolin, Nirunmas, Wermaktian, Wuarlabobar, Molumaru
			Kep Aru	Pulau Pulau Aru, Aru Tengah, Aru Tengah Selatan, Aru Selatan Timur
			Maluku Barat Daya	Moa, Mndona Heira, Pulau Pulau Babar, Wetar, PP Terselatan, P Leti, P Masela, P Lakor, Wetar Utara, Wetar Barat, Wetar Timur
			Kota Tual	Pulau Dullah Utara, Pulau Dullah, Tayando Tam, Pulau Pulau Kur

Sumber: Draft RPJMN 2020-2024

Lautan arafura merupakan lautan dengan kekayaan laut berupa sumber daya perikanan yang menjadi tujuan penangkapan ikan dalam skala internasional, dimana kondisi ini sering dimanfaatkan oleh kapal-kapal asing dalam usaha menangkap ikan dengan menggunakan peralatan yang tidak diijinkan seperti pukat harimau dan bahan peledak. Minimnya sarana dan prasarana keamanan dan pengawasan perbatasan yang tidak sebanding dengan luas wilayah perbatasan yang ada dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pelanggaran hukum dengan menyelundupkan BBM, disamping alasan rendahnya kesejahteraan penduduk penghuni perbatasan yang mendorong untuk melakukan tindak pelanggaran hukum tersebut.

Kegiatan perekonomian di Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru didominasi oleh kegiatan di sektor pertanian dan perikanan. Kondisi ini tidak ditunjang dengan pengolahan hasil pertanian dan perikanan sehingga pendapatan masyarakat perbatasan tidak memiliki nilai tambah. Perikanan tangkap merupakan sektor unggulan Kawasan Perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia di Laut Arafura dan Laut Aru, disamping itu terdapat budidaya laut dan budidaya air payau. Kondisi masyarakat yang umumnya nelayan dan pedagang relatif miskin dengan biaya hidup yang cukup tinggi. Kebutuhan pangan dan sandang kedua kepulauan ini banyak disediakan dari Ambon dengan biaya transport yang tinggi.

Dari keseluruhan pulau-pulau kecil terluar yang ada, terdapat 2 pulau terluar yang diprioritaskan penanganannya oleh pemerintah, karena memiliki arti strategis bagi pembangunan baik di bidang ekonomi, konservasi maupun pertahanan dan keamanan. Pulau tersebut adalah Pulau Asubutan dan Pulau Wetar yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB).

Tabel 58 : Pulau-Pulau Terluar Prioritas

No.	Nama Pulau	Kabupaten/Kota	Provinsi	Negara yang berbatasan
11	P. Asubutun	MTB	Maluku	Australia
13	P. Wetar	MTB	Maluku	Timor-Timur

Sumber: Dephankam, 2003

2019

PEMBANGUNAN DAERAH
D A L A M A N G K A

LAMPIRAN

LAMPIRAN

JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI TAHUN 2014-2018

Perkotaan

Provinsi	2014		2015		2016		2017		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Aceh	161,94	11,76	157,57	11,13	159,50	10,82	172,35	11,11	172,09	10,44
Sumatera Utara	632,2	9,35	699,30	10,16	690,80	9,75	710,71	9,80	694,85	9,15
Sumatera Barat	108,08	5,43	118,03	5,73	118,96	5,54	113,01	5,14	114,84	4,86
Riau	166,36	6,90	166,45	6,79	162,45	6,40	178,58	6,79	173,57	6,35
Jambi	100,12	9,85	119,54	11,60	115,35	10,86	120,62	10,94	118,62	10,41
Sumatera Selatan	367,12	12,93	390,87	13,62	374,53	12,74	375,25	12,45	378,55	12,18
Bengkulu	104,54	18,22	103,13	17,79	97,34	16,19	100,84	16,33	97,47	15,25
Lampung	230,63	11,08	233,27	10,94	233,39	10,53	228,32	10,03	228,82	9,27
Bangka Belitung	22,33	3,39	20,13	2,98	19,63	2,78	21,47	2,89	24,09	3,09
Kepulauan Riau	97,38	6,09	89,48	5,46	87,78	5,16	91,49	5,20	99,20	5,45
DKI Jakarta	393,98	3,92	398,92	3,93	384,30	3,75	389,69	3,77	373,12	3,57
Jawa Barat	2578,36	8,47	2.638,38	8,43	2.497,59	7,67	2.588,62	7,52	2.327,87	6,47
Jawa Tengah	1945,29	12,68	1.837,19	11,85	1.824,08	11,44	1.889,09	11,21	1.716,16	9,73
D.I. Yogyakarta	333,03	13,81	329,65	13,43	297,71	11,79	309,03	11,72	305,24	11,03
Jawa Timur	1535,81	8,35	1.524,62	8,19	1.518,79	7,94	1.574,12	7,87	1.457,61	7,06
Banten	375,69	4,73	408,53	5,03	377,10	4,51	391,03	4,52	393,80	4,38
Bali	99,9	4,01	109,80	4,31	96,98	3,68	96,89	3,58	94,03	3,32
Nusa Tenggara Barat	370,18	18,54	391,88	19,24	385,22	18,20	387,04	17,53	370,38	15,94
Nusa Tenggara Timur	100,34	10,23	116,16	11,28	112,02	10,58	117,40	10,32	121,95	9,94
Kalimantan Barat	82,05	5,76	82,05	5,62	78,29	5,16	76,16	4,88	84,52	5,03
Kalimantan Tengah	40,78	4,98	41,32	4,86	41,07	4,60	42,84	4,59	47,98	4,70
Kalimantan Selatan	62,51	3,79	65,96	3,91	60,83	3,48	62,60	3,46	68,70	3,54
Kalimantan Timur	97,89	4,01	86,82	4,03	88,04	3,93	94,05	3,99	100,45	4,14
Kalimantan Utara	-	-	13,05	3,67	14,21	3,78	18,02	4,59	22,54	5,46
Sulawesi Utara	59,18	5,51	60,71	5,52	60,62	5,34	59,82	5,14	63,88	5,13
Sulawesi Tengah	67,08	9,77	77,97	10,93	75,45	10,18	77,98	10,16	85,03	10,15
Sulawesi Selatan	162,49	5,22	146,42	4,61	149,13	4,51	153,56	4,48	167,93	4,61
Sulawesi Tenggara	48,25	7,06	52,06	7,24	51,01	6,74	62,75	7,56	66,41	6,56
Gorontalo	25,21	6,60	25,36	6,48	24,08	5,84	23,87	5,64	24,06	5,26
Sulawesi Barat	26,31	9,16	27,39	10,52	22,85	8,59	23,50	8,53	30,76	9,64
Maluku	49,83	7,80	51,77	7,91	52,08	7,66	51,24	7,24	45,89	6,22
Maluku Utara	12,19	3,95	12,25	3,85	10,57	3,32	12,00	3,61	13,34	3,80
Papua Barat	14,78	5,86	19,34	5,86	20,96	6,14	20,70	5,83	19,33	5,10
Papua	35,37	4,47	37,27	4,61	37,08	4,42	39,17	4,46	41,28	4,51
SUMATERA	**1990,7**	**9,34**	**2.097,77**	**9,65**	**2.059,73**	**9,17**	**2.112,64**	**9,13**	**2.102,10**	**8,65**
JAWA BALI	**7262,06**	**8,34**	**7.247,09**	**8,17**	**6.996,55**	**7,65**	**7.238,47**	**7,57**	**6.667,83**	**6,71**
NUSA TENGGARA	**470,52**	**15,80**	**508,04**	**16,57**	**497,24**	**15,66**	**504,44**	**15,08**	**492,33**	**13,87**
KALIMANTAN	**283,23**	**4,47**	**289,20**	**4,44**	**282,44**	**4,17**	**293,67**	**4,16**	**324,19**	**4,33**
SULAWESI	**388,52**	**6,24**	**389,91**	**6,13**	**383,14**	**5,79**	**401,48**	**5,83**	**438,07**	**5,83**
MALUKU	**62,02**	**6,55**	**64,02**	**6,58**	**62,65**	**6,28**	**63,24**	**6,08**	**59,23**	**5,44**
PAPUA	**50,15**	**4,81**	**56,61**	**4,97**	**58,04**	**4,92**	**59,87**	**4,85**	**60,61**	**4,68**
NASIONAL	**10507,2**	**8,35**	**10.652,64**	**8,29**	**10.339,79**	**7,80**	**10.673,81**	**7,72**	**10.144,36**	**7,02**

JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI TAHUN 2014-2018

Perdesaan

Provinsi	2014		2015		2016		2017		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Aceh	719,31	20,52	694,01	19,44	688,94	19,15	700,26	19,37	667,40	18,49
Sumatera Utara	654,47	9,40	764,37	10,89	765,15	10,97	743,17	10,66	630,13	9,30
Sumatera Barat	271,12	8,68	261,57	8,35	252,59	8,16	251,50	8,10	242,29	8,07
Riau	333,52	8,92	364,94	9,46	352,95	9,00	336,03	8,43	326,86	8,09
Jambi	163,68	7,07	181,17	7,67	174,46	7,32	165,93	6,92	163,07	6,75
Sumatera Selatan	733,71	14,46	754,76	14,60	726,67	13,99	711,67	13,62	689,71	13,17
Bengkulu	216,41	17,14	230,94	17,93	231,27	17,85	216,14	16,51	204,34	15,52
Lampung	912,28	15,41	930,22	15,56	936,21	15,69	903,41	15,08	868,22	14,76
Bangka Belitung	49,31	7,27	53,96	7,75	53,13	7,72	52,61	7,74	52,18	7,76
Kepulauan Riau	30,42	9,86	32,92	10,23	32,63	10,43	33,88	10,92	32,48	10,77
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	1.748,71	11,35	1.797,32	11,82	1.726,73	11,80	1.579,82	11,75	1.287,92	10,25
Jawa Tengah	2.891,16	15,96	2.739,85	15,05	2.682,81	14,89	2.561,63	14,77	2.181,04	12,99
D.I. Yogyakarta	211,84	17,36	220,57	17,85	197,23	16,63	179,51	16,11	154,86	15,12
Jawa Timur	3.250,98	16,13	3.264,50	16,18	3.184,51	16,01	3.042,89	15,82	2.874,97	15,30
Banten	247,14	6,67	293,87	7,78	281,01	7,45	284,00	7,61	267,55	7,33
Bali	85,30	5,34	86,92	5,44	81,20	5,23	83,23	5,45	77,73	5,38
Nusa Tenggara Barat	450,64	16,31	432,01	15,53	419,23	15,17	406,73	14,89	367,08	13,72
Nusa Tenggara Timur	894,33	22,15	1.043,68	25,46	1.037,90	25,17	1.033,39	25,03	1.020,21	24,74
Kalimantan Barat	319,46	9,76	301,65	9,09	303,06	9,11	311,27	9,28	302,56	9,16
Kalimantan Tengah	105,55	6,57	106,38	6,50	102,42	6,23	96,32	5,81	88,95	5,47
Kalimantan Selatan	120,37	5,33	132,48	5,78	134,87	5,89	131,32	5,73	120,33	5,40
Kalimantan Timur	155,71	10,33	126,06	9,96	124,88	10,05	126,12	10,50	118,44	9,84
Kalimantan Utara	-	-	26,64	9,49	26,91	9,47	31,45	10,78	27,81	9,36
Sulawesi Utara	149,05	11,41	147,83	11,27	142,20	10,97	139,05	10,77	129,43	10,48
Sulawesi Tengah	325,57	15,27	343,66	15,90	345,07	15,91	339,88	15,54	335,18	15,51
Sulawesi Selatan	701,81	13,25	651,30	12,23	657,90	12,46	659,51	12,59	624,70	12,24
Sulawesi Tenggara	294,01	16,78	269,82	15,19	275,86	15,49	268,96	15,29	240,69	14,77
Gorontalo	168,96	23,10	181,48	24,62	179,11	24,41	181,50	24,52	174,45	24,09
Sulawesi Barat	127,58	13,19	133,09	12,87	129,88	12,56	126,26	12,03	121,02	11,75
Maluku	266,28	26,28	276,64	26,90	275,64	26,82	269,27	26,14	274,19	26,64
Maluku Utara	70,45	8,56	67,65	7,95	64,10	7,44	64,47	7,40	68,12	7,78
Papua Barat	214,65	36,16	206,03	37,97	204,85	37,48	207,69	37,44	195,14	35,31
Papua	889,03	38,92	821,88	36,66	874,25	37,14	858,51	36,20	876,35	36,63
SUMATERA	**4.084,23**	**12,42**	**4.268,86**	**12,78**	**4.214,00**	**12,61**	**4.114,60**	**12,25**	**3.876,68**	**11,66**
JAWA BALI	**8.435,13**	**14,01**	**8.403,03**	**13,96**	**8.153,49**	**13,81**	**7.731,08**	**13,71**	**6.844,07**	**12,61**
NUSA TENGGARA	**1.344,97**	**19,78**	**1.475,69**	**21,45**	**1.457,13**	**21,16**	**1.440,12**	**20,99**	**1.387,29**	**20,40**
KALIMANTAN	**701,09**	**8,11**	**693,21**	**7,88**	**692,14**	**7,88**	**696,48**	**7,92**	**658,09**	**7,60**
SULAWESI	**1.766,98**	**14,50**	**1.727,18**	**13,99**	**1.730,02**	**14,07**	**1.715,16**	**13,98**	**1.625,47**	**13,68**
MALUKU	**336,73**	**18,34**	**344,29**	**18,32**	**339,74**	**17,98**	**333,74**	**17,55**	**342,31**	**17,97**
PAPUA	**1.103,68**	**38,35**	**1.027,91**	**36,92**	**1.079,10**	**37,20**	**1.066,20**	**36,44**	**1.071,49**	**36,38**
NASIONAL	**17.772,81**	**14,17**	**17.940,17**	**14,21**	**17.665,62**	**14,11**	**17.097,38**	**13,93**	**15.805,40**	**13,20**

JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI TAHUN 2014-2018

Perkotaan + Perdesaan

Provinsi	2014		2015		2016		2017		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Aceh	881,26	18,05	851,59	17,08	848,44	16,73	872,61	16,89	839,49	15,97
Sumatera Utara	1.286,67	9,38	1.463,67	10,53	1.455,95	10,35	1.453,87	10,22	1.324,98	9,22
Sumatera Barat	379,20	7,41	379,61	7,31	371,56	7,09	364,51	6,87	357,13	6,65
Riau	499,88	8,12	531,39	8,42	515,40	7,98	514,62	7,78	500,44	7,39
Jambi	263,80	7,92	300,71	8,86	289,80	8,41	286,55	8,19	281,69	7,92
Sumatera Selatan	1.100,83	13,91	1.145,63	14,25	1.101,19	13,54	1.086,92	13,19	1.068,27	12,80
Bengkulu	320,95	17,48	334,07	17,88	328,61	17,32	316,98	16,45	301,81	15,43
Lampung	1.142,92	14,28	1.163,49	14,35	1.169,60	14,29	1.131,73	13,69	1.097,05	13,14
Bangka Belitung	71,64	5,36	74,09	5,40	72,76	5,22	74,09	5,20	76,26	5,25
Kepulauan Riau	127,80	6,70	122,40	6,24	120,41	5,98	125,37	6,06	131,68	6,20
DKI Jakarta	393,98	3,92	398,92	3,93	384,30	3,75	389,69	3,77	373,12	3,57
Jawa Barat	4.327,07	9,44	4.435,70	9,53	4.224,33	8,95	4.168,44	8,71	3.615,79	7,45
Jawa Tengah	4.836,45	14,46	4.577,04	13,58	4.506,89	13,27	4.450,72	13,01	3.897,20	11,32
D.I. Yogyakarta	544,87	15,00	550,23	14,91	494,94	13,34	488,53	13,02	460,10	12,13
Jawa Timur	4.786,79	12,42	4.789,12	12,34	4.703,30	12,05	4.617,01	11,77	4.332,59	10,98
Banten	622,84	5,35	702,40	5,90	658,11	5,42	675,04	5,45	661,36	5,24
Bali	185,20	4,53	196,71	4,74	178,18	4,25	180,13	4,25	171,76	4,01
Nusa Tenggara Barat	820,82	17,25	823,89	17,10	804,44	16,48	793,78	16,07	737,46	14,75
Nusa Tenggara Timur	994,67	19,82	1.159,84	22,61	1.149,92	22,19	1.150,79	21,85	1.142,17	21,35
Kalimantan Barat	401,51	8,54	383,70	8,03	381,35	7,87	387,43	7,88	387,08	7,77
Kalimantan Tengah	146,32	6,03	147,70	5,94	143,49	5,66	139,16	5,37	136,93	5,17
Kalimantan Selatan	182,88	4,68	198,44	4,99	195,70	4,85	193,92	4,73	189,03	4,54
Kalimantan Timur	253,60	6,42	212,89	6,23	212,92	6,11	220,17	6,19	218,90	6,03
Kalimantan Utara	-	-	39,69	6,24	41,12	6,23	49,47	7,22	50,35	7,09
Sulawesi Utara	208,23	8,75	208,54	8,65	202,82	8,34	198,88	8,10	193,31	7,80
Sulawesi Tengah	392,65	13,93	421,62	14,66	420,52	14,45	417,87	14,14	420,21	14,01
Sulawesi Selatan	864,30	10,28	797,72	9,39	807,03	9,40	813,07	9,38	792,63	9,06
Sulawesi Tenggara	342,25	14,05	321,88	12,90	326,86	12,88	331,71	12,81	307,10	11,63
Gorontalo	194,17	17,44	206,84	18,32	203,19	17,72	205,37	17,65	198,51	16,81
Sulawesi Barat	153,89	12,27	160,48	12,40	152,73	11,74	149,76	11,30	151,78	11,25
Maluku	316,11	19,13	328,41	19,51	327,72	19,18	320,51	18,45	320,08	18,12
Maluku Utara	82,64	7,30	79,90	6,84	74,68	6,33	76,47	6,35	81,46	6,64
Papua Barat	229,43	27,13	225,36	25,82	225,80	25,43	228,38	25,10	214,47	23,01
Papua	924,40	30,05	859,15	28,17	911,33	28,54	897,69	27,62	917,63	27,74
SUMATERA	**6.074,95**	**11,21**	**6.366,65**	**11,55**	**6.273,72**	**11,22**	**6.227,25**	**10,98**	**5.978,80**	**10,39**
JAWA BALI	**15.697,20**	**10,66**	**15.650,12**	**10,51**	**15.150,05**	**10,07**	**14.969,56**	**9,85**	**13.511,92**	**8,80**
NUSA TENGGARA	**1.815,49**	**18,57**	**1.983,73**	**19,94**	**1.954,36**	**19,42**	**1.944,57**	**19,05**	**1.879,63**	**18,16**
KALIMANTAN	**984,31**	**6,57**	**982,42**	**6,42**	**974,58**	**6,26**	**990,15**	**6,25**	**982,29**	**6,09**
SULAWESI	**2.155,49**	**11,71**	**2.117,08**	**11,32**	**2.113,15**	**11,17**	**2.116,66**	**11,05**	**2.063,54**	**10,64**
MALUKU	**398,75**	**14,32**	**408,31**	**14,32**	**402,40**	**13,94**	**396,98**	**13,50**	**401,54**	**13,41**
PAPUA	**1.153,83**	**29,42**	**1.084,51**	**27,64**	**1.137,13**	**27,87**	**1.126,07**	**27,07**	**1.132,10**	**26,70**
NASIONAL	**28.280,02**	**11,25**	**28.592,82**	**11,22**	**28.005,39**	**10,86**	**27.771,24**	**10,64**	**25.949,82**	**9,82**

No.	PROVINSI	IPM					Δ (2014-2018)	Reduksi Shortfall Per tahun
		2014	2015	2016	2017	2018		
1	Aceh	68,81	69,45	70,00	70,60	71,19	2,38	1,66
2	Sumatera Utara	68,87	69,51	70,00	70,57	71,18	2,31	1,65
3	Sumatera Barat	69,36	69,98	70,73	71,24	71,73	2,37	1,67
4	Riau	70,33	70,84	71,20	71,79	72,44	2,11	1,63
5	Jambi	68,24	68,89	69,62	69,99	70,65	2,41	1,66
6	Sumatera Selatan	66,75	67,46	68,24	68,86	69,39	2,64	1,68
7	Bengkulu	68,06	68,59	69,33	69,95	70,64	2,58	1,69
8	Lampung	66,42	66,95	67,65	68,25	69,02	2,60	1,67
9	Kep. Bangka Belitung	68,27	69,05	69,55	69,99	70,67	2,40	1,66
10	Kep. Riau	73,40	73,75	73,99	74,45	74,84	1,44	1,53
11	D K I Jakarta	78,39	78,99	79,60	80,06	80,47	2,08	1,76
12	Jawa Barat	68,80	69,50	70,05	70,69	71,30	2,50	1,68
13	Jawa Tengah	68,78	69,49	69,98	70,52	71,12	2,34	1,65
14	DI Yogyakarta	76,81	77,59	78,38	78,89	79,53	2,72	1,85
15	Jawa Timur	68,14	68,95	69,74	70,27	70,77	2,63	1,70
16	Banten	69,89	70,27	70,96	71,42	71,95	2,06	1,62
17	Bali	72,48	73,27	73,65	74,30	74,77	2,29	1,70
18	Nusa Tenggara Barat	64,31	65,19	65,81	66,58	67,30	2,99	1,70
19	Nusa Tenggara Timur	62,26	62,67	63,13	63,73	64,39	2,13	1,54
20	Kalimantan Barat	64,89	65,59	65,88	66,26	66,98	2,09	1,56
21	Kalimantan Tengah	67,77	68,53	69,13	69,79	70,42	2,65	1,69
22	Kalimantan Selatan	67,63	68,38	69,05	69,65	70,17	2,54	1,67
23	Kalimantan Timur	73,82	74,17	74,59	75,12	75,83	2,01	1,66
24	Kalimantan Utara	68,64	68,76	69,20	69,84	70,56	1,92	1,57
25	Sulawesi Utara	69,96	70,39	71,05	71,66	72,20	2,24	1,65
26	Sulawesi Tengah	66,43	66,76	67,47	68,11	68,88	2,45	1,64
27	Sulawesi Selatan	68,49	69,15	69,76	70,34	70,90	2,41	1,66
28	Sulawesi Tenggara	68,07	68,75	69,31	69,86	70,61	2,54	1,68
29	Gorontalo	65,17	65,86	66,29	67,01	67,71	2,54	1,64
30	Sulawesi Barat	62,24	62,96	63,60	64,30	65,10	2,86	1,66
31	Maluku	66,74	67,05	67,60	68,19	68,87	2,13	1,59
32	Maluku Utara	65,18	65,91	66,63	67,20	67,76	2,58	1,65
33	Papua Barat	61,28	61,73	62,21	62,99	63,74	2,46	1,59
34	Papua	56,75	57,25	58,05	59,09	60,06	3,31	1,66
	INDONESIA	**68,90**	**69,55**	**70,18**	**70,81**	**71,39**	2,49	1,68

No.	PROVINSI	Angka Harapan Hidup					Δ (2014-2018)
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Aceh	69,35	69,5	69,51	69,52	69,64	0,29
2	Sumatera Utara	68,04	68,29	68,33	68,37	68,61	0,57
3	Sumatera Barat	68,32	68,66	68,73	68,78	69,01	0,69
4	Riau	70,76	70,93	70,97	70,99	71,19	0,43
5	Jambi	70,43	70,56	70,71	70,76	70,89	0,46
6	Sumatera Selatan	68,93	69,14	69,16	69,18	69,41	0,48
7	Bengkulu	68,37	68,5	68,56	68,59	68,84	0,47
8	Lampung	69,66	69,9	69,94	69,95	70,18	0,52
9	Kep. Bangka Belitung	69,72	69,88	69,92	69,95	70,18	0,46
10	Kep. Riau	69,15	69,41	69,45	69,48	69,64	0,49
11	D K I Jakarta	72,27	72,43	72,49	72,55	72,67	0,40
12	Jawa Barat	72,23	72,41	72,44	72,47	72,66	0,43
13	Jawa Tengah	73,88	73,96	74,02	74,08	74,18	0,30
14	DI Yogyakarta	74,5	74,68	74,71	74,74	74,82	0,32
15	Jawa Timur	70,45	70,68	70,74	70,80	70,97	0,52
16	Banten	69,13	69,43	69,46	69,49	69,64	0,51
17	Bali	71,2	71,35	71,41	71,46	71,68	0,48
18	Nusa Tenggara Barat	64,9	65,38	65,48	65,55	65,87	0,97
19	Nusa Tenggara Timur	65,91	65,96	66,04	66,07	66,38	0,47
20	Kalimantan Barat	69,76	69,87	69,9	69,92	70,18	0,42
21	Kalimantan Tengah	69,39	69,54	69,57	69,59	69,64	0,25
22	Kalimantan Selatan	67,47	67,8	67,92	68,02	68,23	0,76
23	Kalimantan Timur	73,62	73,65	73,68	73,70	73,96	0,34
24	Kalimantan Utara	72,12	72,16	72,43	72,47	72,50	0,38
25	Sulawesi Utara	70,94	70,99	71,02	71,04	71,26	0,32
26	Sulawesi Tengah	67,18	67,26	67,31	67,32	67,78	0,60
27	Sulawesi Selatan	69,6	69,8	69,82	69,84	70,08	0,48
28	Sulawesi Tenggara	70,39	70,44	70,46	70,47	70,72	0,33
29	Gorontalo	67	67,12	67,13	67,14	67,45	0,45
30	Sulawesi Barat	64,04	64,22	64,31	64,34	64,58	0,54
31	Maluku	65,01	65,31	65,35	65,40	65,59	0,58
32	Maluku Utara	67,34	67,44	67,51	67,54	67,80	0,46
33	Papua Barat	65,14	65,19	65,3	65,32	65,55	0,41
34	Papua	64,84	65,09	65,12	65,14	65,36	0,52
	Nasional	**70,59**	**70,78**	**70,9**	71,06	**71,20**	0,61

No.	PROVINSI	Harapan Lama Sekolah					Δ (2014-2018)
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Aceh	13,53	13,73	13,89	14,13	14,27	0,74
2	Sumatera Utara	12,61	12,82	13	13,10	13,14	0,53
3	Sumatera Barat	13,48	13,6	13,79	13,94	13,95	0,47
4	Riau	12,45	12,74	12,86	13,03	13,11	0,66
5	Jambi	12,38	12,57	12,72	12,87	12,90	0,52
6	Sumatera Selatan	11,75	12,02	12,23	12,35	12,36	0,61
7	Bengkulu	13,01	13,18	13,38	13,57	13,58	0,57
8	Lampung	12,24	12,25	12,35	12,46	12,61	0,37
9	Kep. Bangka Belitung	11,18	11,6	11,71	11,83	11,87	0,69
10	Kep. Riau	12,51	12,6	12,66	12,81	12,82	0,31
11	D K I Jakarta	12,38	12,59	12,73	12,86	12,95	0,57
12	Jawa Barat	12,08	12,15	12,3	**12,42**	12,45	0,37
13	Jawa Tengah	12,17	12,38	12,45	12,57	12,63	0,46
14	DI Yogyakarta	14,85	15,03	15,23	**15,42**	15,56	0,71
15	Jawa Timur	12,45	12,66	12,98	13,09	13,10	0,65
16	Banten	12,31	12,35	12,7	12,78	12,85	0,54
17	Bali	12,64	12,97	13,04	13,21	13,23	0,59
18	Nusa Tenggara Barat	12,73	13,04	13,16	**13,46**	13,47	0,74
19	Nusa Tenggara Timur	12,65	12,84	12,97	13,07	13,10	0,45
20	Kalimantan Barat	11,89	12,25	12,37	12,50	12,55	0,66
21	Kalimantan Tengah	11,93	12,22	12,33	12,45	12,55	0,62
22	Kalimantan Selatan	11,96	12,21	12,29	12,46	12,50	0,54
23	Kalimantan Timur	13,17	13,18	13,35	13,49	13,67	0,50
24	Kalimantan Utara	12,52	12,54	12,59	12,79	12,82	0,30
25	Sulawesi Utara	12,16	12,43	12,55	12,66	12,68	0,52
26	Sulawesi Tengah	12,71	12,72	12,92	13,04	13,13	0,42
27	Sulawesi Selatan	12,9	12,99	13,16	13,28	13,34	0,44
28	Sulawesi Tenggara	12,78	13,07	13,24	13,36	13,53	0,75
29	Gorontalo	12,49	12,7	12,88	13,01	13,03	0,54
30	Sulawesi Barat	11,78	12,22	12,34	12,48	12,59	0,81
31	Maluku	13,53	13,56	13,73	13,91	13,92	0,39
32	Maluku Utara	12,72	13,1	13,45	13,56	13,62	0,90
33	Papua Barat	11,87	12,06	12,26	12,47	12,53	0,66
34	Papua	9,94	9,95	10,23	10,54	10,83	0,89
	Nasional	**12,39**	**12,55**	**12,72**	**12,85**	**12,91**	0,52

No.	PROVINSI	Rata-rata Lama Sekolah					Δ (2014-2018)
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Aceh	8,71	8,77	8,86	8,98	9,09	0,38
2	Sumatera Utara	8,93	9,03	9,12	9,25	9,34	0,41
3	Sumatera Barat	8,29	8,42	8,59	8,72	8,76	0,47
4	Riau	8,47	8,49	8,59	8,76	8,92	0,45
5	Jambi	7,92	7,96	8,07	8,15	8,23	0,31
6	Sumatera Selatan	7,66	7,77	7,83	7,99	8,00	0,34
7	Bengkulu	8,28	8,29	8,37	8,47	8,61	0,33
8	Lampung	7,48	7,56	7,63	7,79	7,82	0,34
9	Kep. Bangka Belitung	7,35	7,46	7,62	7,78	7,84	0,49
10	Kep. Riau	9,64	9,65	9,67	9,79	9,81	0,17
11	D K I Jakarta	10,54	10,7	10,88	11,02	11,05	0,51
12	Jawa Barat	7,71	7,86	7,95	8,14	8,15	0,44
13	Jawa Tengah	6,93	7,03	7,15	7,27	7,35	0,42
14	DI Yogyakarta	8,84	9	9,12	9,19	9,32	0,48
15	Jawa Timur	7,05	7,14	7,23	7,34	7,39	0,34
16	Banten	8,19	8,27	8,37	8,53	8,62	0,43
17	Bali	8,11	8,26	8,36	8,55	8,65	0,54
18	Nusa Tenggara Barat	6,67	6,71	6,79	6,90	7,03	0,36
19	Nusa Tenggara Timur	6,85	6,93	7,02	7,15	7,30	0,45
20	Kalimantan Barat	6,83	6,93	6,98	7,05	7,12	0,29
21	Kalimantan Tengah	7,82	8,03	8,13	8,29	8,37	0,55
22	Kalimantan Selatan	7,6	7,76	7,89	7,99	8,00	0,40
23	Kalimantan Timur	9,04	9,15	9,24	9,36	9,48	0,44
24	Kalimantan Utara	8,35	8,36	8,49	8,62	8,87	0,52
25	Sulawesi Utara	8,86	8,88	8,96	9,14	9,24	0,38
26	Sulawesi Tengah	7,89	7,97	8,12	8,29	8,52	0,63
27	Sulawesi Selatan	7,49	7,64	7,75	7,95	8,02	0,53
28	Sulawesi Tenggara	8,02	8,18	8,32	8,46	8,69	0,67
29	Gorontalo	6,97	7,05	7,12	7,28	7,46	0,49
30	Sulawesi Barat	6,88	6,94	7,14	7,31	7,50	0,62
31	Maluku	9,15	9,16	9,27	9,38	9,58	0,43
32	Maluku Utara	8,34	8,37	8,52	8,61	8,72	0,38
33	Papua Barat	6,96	7,01	7,06	7,15	7,27	0,31
34	Papua	5,76	5,99	6,15	6,27	6,52	0,76
	Nasional	**7,73**	**7,84**	**7,95**	**8,10**	**8,17**	0,44

No.	PROVINSI	Pengeluaran Perkapita					Δ (2014-2018)
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Aceh	8.297,48	8.533,05	8.768,00	8.957,00	9.186,00	888,52
2	Sumatera Utara	9.391,00	9.563,19	9.744,00	10.036,00	10.391,00	1.000,00
3	Sumatera Barat	9.620,73	9.803,74	10.126,00	10.306,00	10.638,00	1.017,27
4	Riau	10.262,40	10.364,39	10.465,00	10.677,00	10.968,00	705,60
5	Jambi	9.141,15	9.446,18	9.795,00	9.880,00	10.357,00	1.215,85
6	Sumatera Selatan	9.302,02	9.474,21	9.935,00	10.220,00	10.652,00	1.349,98
7	Bengkulu	8.864,12	9.122,88	9.492,00	9.778,00	10.162,00	1.297,88
8	Lampung	8.476,24	8.729,32	9.156,00	9.413,00	9.858,00	1.381,76
9	Kep. Bangka Belitung	11.690,57	11.780,86	11.960,00	12.066,00	12.666,00	975,43
10	Kep. Riau	13.018,53	13.176,79	13.359,00	13.566,00	13.976,00	957,47
11	D K I Jakarta	16.897,51	17.075,43	17.468,00	17.707,00	18.128,00	1.230,49
12	Jawa Barat	9.447,16	9.777,61	10.035,00	10.285,00	10.790,00	1.342,84
13	Jawa Tengah	9.639,74	9.929,71	10.153,00	10.377,00	10.777,00	1.137,26
14	DI Yogyakarta	12.294,43	12.684,24	13.229,00	13.521,00	13.946,00	1.651,57
15	Jawa Timur	10.012,16	10.383,37	10.715,00	10.973,00	11.380,00	1.367,84
16	Banten	11.150,00	11.261,48	11.469,00	11.659,00	11.994,00	844,00
17	Bali	12.830,51	13.078,34	13.279,00	13.573,00	13.886,00	1.055,49
18	Nusa Tenggara Barat	8.986,96	9.241,31	9.575,00	9.877,00	10.284,00	1.297,04
19	Nusa Tenggara Timur	6.933,54	7.003,35	7.122,00	7.350,00	7.566,00	632,46
20	Kalimantan Barat	8.174,98	8.279,34	8.348,00	8.472,00	8.860,00	685,02
21	Kalimantan Tengah	9.681,87	9.809,46	10.155,00	10.492,00	10.931,00	1.249,13
22	Kalimantan Selatan	10.747,57	10.890,97	11.307,00	11.600,00	12.062,00	1.314,43
23	Kalimantan Timur	11.018,83	11.228,81	11.355,00	11.612,00	11.917,00	898,17
24	Kalimantan Utara	8.288,86	8.353,97	8.434,00	8.643,00	8.943,00	654,14
25	Sulawesi Utara	9.627,82	9.729,11	10.148,00	10.422,00	10.731,00	1.103,18
26	Sulawesi Tengah	8.601,52	8.767,73	9.034,00	9.311,00	9.488,00	886,48
27	Sulawesi Selatan	9.722,70	9.991,72	10.281,00	10.489,00	10.814,00	1.091,30
28	Sulawesi Tenggara	8.555,13	8.697,40	8.871,00	9.094,00	9.262,00	706,87
29	Gorontalo	8.762,26	9.035,12	9.175,00	9.532,00	9.839,00	1.076,74
30	Sulawesi Barat	8.169,87	8.259,98	8.450,00	8.736,00	9.051,00	881,13
31	Maluku	7.925,16	8.025,60	8.215,00	8.433,00	8.721,00	795,84
32	Maluku Utara	7.233,82	7.423,30	7.545,00	7.792,00	7.980,00	746,18
33	Papua Barat	6.943,98	7.063,88	7.175,00	7.493,00	7.816,00	872,02
34	Papua	6.416,10	6.468,55	6.637,00	6.996,00	7.159,00	742,90
	Nasional	**9.902,85**	**10.149,67**	**10.420,00**	**10.664,00**	**11.059,00**	1.156,15

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Provinsi (Agustus 2018)

Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural

Provinsi	2014	2015	2016	2017	2018
Aceh	2.123.312	2.182.824	2.257.943	2.288.777	2.353.440
Sumatera Utara	6.272.083	6.391.098	6.362.909	6.743.277	7.124.458
Sumatera Barat	2.331.993	2.346.163	2.473.814	2.483.675	2.552.130
Riau	2.695.247	2.771.349	2.987.952	2.965.585	3.108.398
Jambi	1.570.822	1.620.752	1.692.193	1.724.633	1.790.437
Sumatera Selatan	3.885.674	3.934.787	4.178.794	4.123.669	4.138.957
Bengkulu	900.054	951.007	997.913	969.255	998.524
Lampung	3.857.936	3.832.108	4.121.668	4.072.487	4.232.066
Bangka Belitung	636.959	665.842	705.173	699.017	727.918
Kepulauan Riau	878.415	891.988	931.435	966.091	970.132
DKI Jakarta	5.063.479	5.092.219	5.178.839	4.856.116	5.041.620
Jawa Barat	21.006.139	20.586.356	21.075.899	22.391.003	22.628.122
Jawa Tengah	17.547.026	17.298.925	17.312.466	18.010.612	18.059.895
D.I. Yogyakarta	2.023.461	1.971.463	2.099.436	2.117.187	2.191.742
Jawa Timur	20.149.998	20.274.681	19.953.846	20.937.716	21.300.423
Banten	5.338.045	5.334.843	5.587.093	5.596.963	5.829.228
Bali	2.316.758	2.372.015	2.463.039	2.434.450	2.525.355
Nusa Tenggara Barat	2.221.810	2.255.879	2.464.331	2.396.169	2.237.381
Nusa Tenggara Timur	2.247.438	2.307.737	2.353.648	2.398.609	2.486.281
Kalimantan Barat	2.320.229	2.357.224	2.388.758	2.408.259	2.451.399
Kalimantan Tengah	1.193.171	1.272.461	1.311.427	1.276.669	1.355.399
Kalimantan Selatan	1.941.229	1.987.250	2.078.384	2.074.117	2.116.944
Kalimantan Timur	1.811.129	1.539.491	1.717.892	1.654.964	1.732.598
Kalimantan Utara		283.102	288.522	330.731	341.197
Sulawesi Utara	1.060.752	1.099.272	1.183.721	1.121.309	1.175.809
Sulawesi Tengah	1.342.615	1.384.235	1.509.505	1.428.583	1.502.972
Sulawesi Selatan	3.715.801	3.706.128	3.881.003	3.812.358	3.988.029
Sulawesi Tenggara	1.085.509	1.138.045	1.253.624	1.200.605	1.248.212
Gorontalo	500.056	517.788	562.196	547.766	578.880
Sulawesi Barat	608.446	616.549	645.671	614.748	639.622
Maluku	672.304	727.259	743.149	707.796	755.034
Maluku Utara	481.504	513.601	524.526	516.231	541.446
Papua Barat	398.424	413.635	434.817	430.478	445.630
Papua	1.675.113	1.741.945	1.722.162	1.762.841	1.835.963
SUMATERA	25.152.495	25.587.918	26.709.794	27.036.466	27.996.460
JAWA BALI	73.444.906	72.930.502	73.670.618	76.344.047	77.576.385
NUSA TENGGARA	4.469.248	4.563.616	4.817.979	4.794.778	4.723.662
KALIMANTAN	7.265.758	7.439.528	7.784.983	7.744.740	7.997.537
SULAWESI	8.313.179	8.462.017	9.035.720	8.725.369	9.133.524
MALUKU	1.153.808	1.240.860	1.267.675	1.224.027	1.296.480
PAPUA	2.073.537	2.155.580	2.156.979	2.193.319	2.281.593
INDONESIA	**121.872.931**	**122.380.021**	**125.443.748**	**128.062.746**	**131.005.641**

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Provinsi (Agustus 2018)

Perkotaan/Urban

Provinsi	2014	2015	2016	2017	2018
Aceh	584.509	646.475	714.111	735.445	735.723
Sumatera Utara	2.987.856	3.189.725	3.147.642	3.510.520	3.760.250
Sumatera Barat	898.429	1.023.505	1.118.919	1.132.031	1.186.926
Riau	1.043.743	1.102.938	1.203.114	1.189.839	1.248.989
Jambi	478.740	507.559	534.869	546.597	577.505
Sumatera Selatan	1.319.136	1.369.140	1.486.759	1.434.985	1.429.790
Bengkulu	273.048	292.421	325.874	305.639	308.597
Lampung	935.488	1.049.317	1.184.800	1.154.463	1.239.524
Bangka Belitung	308.752	341.660	358.828	368.825	382.550
Kepulauan Riau	745.018	759.352	806.676	843.948	858.519
DKI Jakarta	5.063.479	5.092.219	5.178.839	4.856.116	5.041.620
Jawa Barat	13.880.482	14.967.377	15.311.589	16.657.317	17.052.659
Jawa Tengah	7.962.451	8.287.575	8.342.142	8.812.053	8.899.999
D.I. Yogyakarta	1.283.902	1.355.882	1.451.255	1.481.013	1.552.812
Jawa Timur	9.307.666	10.098.551	9.834.935	10.688.622	10.949.188
Banten	3.679.794	3.744.277	3.964.706	3.975.045	4.159.805
Bali	1.365.359	1.504.340	1.606.758	1.604.463	1.664.331
Nusa Tenggara Barat	927.990	1.022.188	1.072.940	1.086.946	1.062.465
Nusa Tenggara Timur	388.987	440.178	506.468	478.616	523.095
Kalimantan Barat	628.487	694.633	729.273	768.561	789.435
Kalimantan Tengah	379.193	453.320	475.533	478.305	534.639
Kalimantan Selatan	774.351	861.769	909.106	905.590	946.378
Kalimantan Timur	1.104.748	1.028.097	1.151.230	1.060.425	1.142.758
Kalimantan Utara		162.016	160.845	198.898	203.389
Sulawesi Utara	485.496	543.194	581.199	567.380	615.396
Sulawesi Tengah	327.468	375.306	399.635	413.739	439.781
Sulawesi Selatan	1.326.986	1.439.884	1.505.724	1.559.774	1.670.176
Sulawesi Tenggara	282.667	348.751	405.865	397.925	405.282
Gorontalo	174.112	202.847	211.930	219.652	232.615
Sulawesi Barat	133.730	119.549	145.608	125.327	127.438
Maluku	263.584	283.769	300.234	293.771	324.543
Maluku Utara	133.712	137.027	156.414	148.306	144.083
Papua Barat	105.709	151.719	132.530	163.390	177.351
Papua	351.753	389.201	408.467	410.350	446.455
Angkatan Kerja Di Perkotaan	9.574.719	10.282.092	10.881.592	11.222.292	11.728.373
JAWA BALI	42.543.133	45.050.221	45.690.224	48.074.629	49.320.414
NUSA TENGGARA	1.316.977	1.462.366	1.579.408	1.565.562	1.585.560
KALIMANTAN	2.886.779	3.199.835	3.425.987	3.411.779	3.616.599
SULAWESI	2.730.459	3.029.531	3.249.961	3.283.797	3.490.688
MALUKU	397.296	420.796	456.648	442.077	468.626
PAPUA	457.462	540.920	540.997	573.740	623.806
INDONESIA	**59.906.825**	**63.985.761**	**65.824.817**	**68.573.876**	**70.834.066**

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Provinsi (Agustus 2018)

Perdesaan/Rural

Provinsi	2014	2015	2016	2017	2018
Aceh	1.538.803	1.536.349	1.543.832	1.553.332	1.617.717
Sumatera Utara	3.284.227	3.201.373	3.215.267	3.232.757	3.364.208
Sumatera Barat	1.433.564	1.322.658	1.354.895	1.351.644	1.365.204
Riau	1.651.504	1.668.411	1.784.838	1.775.746	1.859.409
Jambi	1.092.082	1.113.193	1.157.324	1.178.036	1.212.932
Sumatera Selatan	2.566.538	2.565.647	2.692.035	2.688.684	2.709.167
Bengkulu	627.006	658.586	672.039	663.616	689.927
Lampung	2.922.448	2.782.791	2.936.868	2.918.024	2.992.542
Bangka Belitung	328.207	324.182	346.345	330.192	345.368
Kepulauan Riau	133.397	132.636	124.759	122.143	111.613
DKI Jakarta		-	-	-	-
Jawa Barat	7.125.657	5.618.979	5.764.310	5.733.686	5.575.463
Jawa Tengah	9.584.575	9.011.350	8.970.324	9.198.559	9.159.896
D.I. Yogyakarta	739.559	615.581	648.181	636.174	638.930
Jawa Timur	10.842.332	10.176.130	10.118.911	10.249.094	10.351.235
Banten	1.658.251	1.590.566	1.622.387	1.621.918	1.669.423
Bali	951.399	867.675	856.281	829.987	861.024
Nusa Tenggara Barat	1.293.820	1.233.691	1.391.391	1.309.223	1.174.916
Nusa Tenggara Timur	1.858.451	1.867.559	1.847.180	1.919.993	1.963.186
Kalimantan Barat	1.691.742	1.662.591	1.659.485	1.639.698	1.661.964
Kalimantan Tengah	813.978	819.141	835.894	798.364	820.760
Kalimantan Selatan	1.166.878	1.125.481	1.169.278	1.168.527	1.170.566
Kalimantan Timur	706.381	511.394	566.662	594.539	589.840
Kalimantan Utara		121.086	127.677	131.833	137.808
Sulawesi Utara	575.256	556.078	602.522	553.929	560.413
Sulawesi Tengah	1.015.147	1.008.929	1.109.870	1.014.844	1.063.191
Sulawesi Selatan	2.388.815	2.266.244	2.375.279	2.252.584	2.317.853
Sulawesi Tenggara	802.842	789.294	847.759	802.680	842.930
Gorontalo	325.944	314.941	350.266	328.114	346.265
Sulawesi Barat	474.716	497.000	500.063	489.421	512.184
Maluku	408.720	443.490	442.915	414.025	430.491
Maluku Utara	347.792	376.574	368.112	367.925	397.363
Papua Barat	292.715	261.916	302.287	267.088	268.279
Papua	1.323.360	1.352.744	1.313.695	1.352.491	1.389.508
SUMATERA	15.577.776	15.305.826	15.828.202	15.814.174	16.268.087
JAWA BALI	30.901.773	27.880.281	27.980.394	28.269.418	28.255.971
NUSA TENGGARA	3.152.271	3.101.250	3.238.571	3.229.216	3.138.102
KALIMANTAN	4.378.979	4.239.693	4.358.996	4.332.961	4.380.938
SULAWESI	5.582.720	5.432.486	5.785.759	5.441.572	5.642.836
MALUKU	756.512	820.064	811.027	781.950	827.854
PAPUA	1.616.075	1.614.660	1.615.982	1.619.579	1.657.787
INDONESIA	**61.966.106**	**58.394.260**	**59.618.931**	**59.488.870**	**60.171.575**

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Agustus 2014-2018)

Perkotaan+ Perdesaan

PROVINSI	2014		2015		2016		2017		2018	
	Jumlah (Orang)	TPT (%)	Jumlah (Orang)	TPT (%)	Jumlah (Orang)	TPT (%)	Jumlah (Orang)	TPT (%)	Jumlah (Orang)	TPT (%)
Aceh	191.489	9,02	216.806	9,93	170.898	7,57	150.265	6,57	149.723	6,36
Sumatera Utara	390.712	6,23	428.794	6,71	371.680	5,84	377.288	5,60	396.027	5,56
Sumatera Barat	151.657	6,50	161.564	6,89	125.903	5,09	138.703	5,58	141.680	5,55
Riau	176.762	6,56	217.053	7,83	222.006	7,43	184.564	6,22	192.801	6,20
Jambi	79.784	5,08	70.349	4,34	67.671	4,00	66.816	3,87	69.075	3,86
Sumatera Selatan	192.868	4,96	238.921	6,07	180.157	4,31	181.135	4,39	175.087	4,23
Bengkulu	31.260	3,47	46.690	4,91	32.942	3,30	36.279	3,74	35.061	3,51
Lampung	184.778	4,79	196.850	5,14	190.347	4,62	176.257	4,33	171.689	4,06
Bangka Belitung	32.736	5,14	41.893	6,29	18.343	2,60	26.399	3,78	26.552	3,65
Kepulauan Riau	58.759	6,69	55.318	6,20	71.622	7,69	69.160	7,16	69.113	7,12
DKI Jakarta	429.110	8,47	368.190	7,23	317.007	6,12	346.945	7,14	314.841	6,24
Jawa Barat	1.775.196	8,45	1.794.874	8,72	1.873.861	8,89	1.839.428	8,22	1.848.234	8,17
Jawa Tengah	996.344	5,68	863.783	4,99	801.330	4,63	823.938	4,57	814.347	4,51
D.I. Yogyakarta	67.418	3,33	80.245	4,07	57.036	2,72	64.019	3,02	73.350	3,35
Jawa Timur	843.490	4,19	906.904	4,47	839.283	4,21	838.496	4,00	850.474	3,99
Banten	484.053	9,07	509.383	9,55	498.596	8,92	519.563	9,28	496.732	8,52
Bali	44.126	1,90	47.210	1,99	46.484	1,89	36.143	1,48	34.485	1,37
Nusa Tenggara Barat	127.710	5,75	128.376	5,69	97.021	3,94	79.449	3,32	83.257	3,72
Nusa Tenggara Timur	73.210	3,26	88.446	3,83	76.580	3,25	78.548	3,27	74.748	3,01
Kalimantan Barat	93.719	4,04	121.337	5,15	100.935	4,23	105.061	4,36	104.518	4,26
Kalimantan Tengah	38.682	3,24	57.780	4,54	63.238	4,82	53.962	4,23	54.397	4,01
Kalimantan Selatan	73.767	3,80	97.748	4,92	113.296	5,45	98.956	4,77	95.278	4,50
Kalimantan Timur	133.663	7,38	115.534	7,50	136.653	7,95	114.289	6,91	114.313	6,60
		-	16.079	5,68	15.099	5,23	18.315	5,54	17.797	5,22
Sulawesi Utara	79.996	7,54	99.240	9,03	73.157	6,18	80.483	7,18	80.664	6,86
Sulawesi Tengah	49.389	3,68	56.817	4,10	49.702	3,29	54.369	3,81	51.481	3,43
Sulawesi Selatan	188.765	5,08	220.636	5,95	186.291	4,80	213.695	5,61	213.105	5,34
Sulawesi Tenggara	48.090	4,43	63.129	5,55	34.076	2,72	39.631	3,30	40.724	3,26
Gorontalo	20.919	4,18	24.101	4,65	15.528	2,76	23.450	4,28	23.347	4,03
Sulawesi Barat	12.649	2,08	20.644	3,35	21.489	3,33	19.744	3,21	20.227	3,16
Maluku	70.653	10,51	72.196	9,93	52.363	7,05	65.735	9,29	54.891	7,27
Maluku Utara	25.487	5,29	31.058	6,05	21.047	4,01	27.516	5,33	25.831	4,77
Papua Barat	19.988	5,02	33.409	8,08	32.457	7,46	27.952	6,49	28.086	6,30
Papua	57.676	3,44	69.465	3,99	57.677	3,35	63.770	3,62	58.756	3,20
SUMATERA	**1.490.805**	**5,93**	**1.674.238**	**6,54**	**1.451.569**	**5,43**	**1.406.866**	**5,20**	**1.426.808**	**5,10**
JAWA BALI	**4.639.737**	**6,32**	**4.570.589**	**6,27**	**4.433.597**	**6,02**	**4.468.532**	**5,85**	**4.432.463**	**5,71**
NUSA TENGGARA	**200.920**	**4,50**	**216.822**	**4,75**	**173.601**	**3,60**	**157.997**	**3,30**	**158.005**	**3,34**
KALIMANTAN	**339.831**	**4,68**	**408.478**	**5,49**	**429.221**	**5,51**	**390.583**	**5,04**	**386.303**	**4,83**
SULAWESI	**399.808**	**4,81**	**484.567**	**5,73**	**380.243**	**4,21**	**431.372**	**4,94**	**429.548**	**4,70**
MALUKU	**96.140**	**8,33**	**103.254**	**8,32**	**73.410**	**5,79**	**93.251**	**7,62**	**80.722**	**6,23**
PAPUA	**77.664**	**3,75**	**102.874**	**4,77**	**90.134**	**4,18**	**91.722**	**4,18**	**86.842**	**3,81**
NASIONAL	**7.244.905**	**5,94**	**7.560.822**	**6,18**	**7.031.775**	**5,61**	**7.040.323**	**5,50**	**7.000.691**	**5,34**

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Agustus 2014-2018)

Perkotaan

PROVINSI	2014		2015		2016		2017		2018	
	Jumlah (Orang)	TPT (%)	Jumlah (Orang)	TPT (%)	Jumlah (Orang)	TPT (%)	Jumlah (Orang)	TPT (%)	Jumlah (Orang)	TPT (%)
Aceh	57.769	9,88	73.977	11,44	64.402	9,02	53.702	7,30	55.821	7,59
Sumatera Utara	237.022	7,93	281.127	8,81	237.739	7,55	258.801	7,37	264.248	7,03
Sumatera Barat	80.555	8,97	96.908	9,47	69.360	6,20	75.107	6,63	79.639	6,71
Riau	94.700	9,07	101.992	9,25	111.347	9,25	110.014	9,25	110.750	8,87
Jambi	38.231	7,99	31.287	6,16	23.145	4,33	28.579	5,23	30.587	5,30
Sumatera Selatan	107.250	8,13	117.169	8,56	86.825	5,84	100.207	6,98	87.496	6,12
Bengkulu	12.384	4,54	18.740	6,41	9.095	2,79	16.351	5,35	12.912	4,18
Lampung	65.401	6,99	82.094	7,82	76.546	6,46	78.941	6,84	74.806	6,04
Bangka Belitung	19.258	6,24	30.773	9,01	8.627	2,40	18.704	5,07	16.528	4,32
Kepulauan Riau	52.410	7,03	47.919	6,31	65.959	8,18	62.572	7,41	66.018	7,69
DKI Jakarta	429.110	8,47	368.190	7,23	317.007	6,12	346.945	7,14	314.841	6,24
Jawa Barat	1.142.124	8,23	1.292.937	8,64	1.339.975	8,75	1.451.820	8,72	1.403.122	8,23
Jawa Tengah	510.176	6,41	455.134	5,49	459.601	5,51	454.504	5,16	459.547	5,16
D.I. Yogyakarta	51.378	4,00	61.631	4,55	40.478	2,79	53.469	3,61	63.137	4,07
Jawa Timur	455.579	4,89	559.198	5,54	488.413	4,97	502.882	4,70	508.055	4,64
Banten	308.915	8,39	330.545	8,83	327.650	8,26	345.562	8,69	316.936	7,62
Bali	29.468	2,16	33.267	2,21	36.278	2,26	26.951	1,68	25.758	1,55
Nusa Tenggara Barat	65.013	7,01	62.266	6,09	43.930	4,09	49.101	4,52	45.152	4,25
Nusa Tenggara Timur	31.320	8,05	38.751	8,80	28.172	5,56	41.453	8,66	36.407	6,96
Kalimantan Barat	40.577	6,46	57.245	8,24	41.055	5,63	58.438	7,60	61.319	7,77
Kalimantan Tengah	15.578	4,11	25.107	5,54	28.491	5,99	24.978	5,22	29.103	5,44
Kalimantan Selatan	41.301	5,33	57.331	6,65	66.340	7,30	61.838	6,83	63.418	6,70
Kalimantan Timur	90.238	8,17	73.253	7,13	95.700	8,31	80.853	7,62	86.073	7,53
Kalimantan Utara		-	10.158	6,27	7.942	4,94	12.732	6,40	9.952	4,89
Sulawesi Utara	49.102	10,11	62.692	11,54	48.541	8,35	46.323	8,16	52.205	8,48
Sulawesi Tengah	15.790	4,82	24.762	6,60	15.656	3,92	26.918	6,51	22.651	5,15
Sulawesi Selatan	105.610	7,96	123.013	8,54	87.883	5,84	126.366	8,10	139.899	8,38
Sulawesi Tenggara	20.836	7,37	31.919	9,15	16.035	3,95	21.735	5,46	19.749	4,87
Gorontalo	12.966	7,45	11.622	5,73	8.340	3,94	12.316	5,61	11.821	5,08
Sulawesi Barat	3.345	2,50	7.733	6,47	7.860	5,40	5.589	4,46	7.791	6,11
Maluku	32.555	12,35	37.747	13,30	29.690	9,89	34.144	11,62	32.667	10,07
Maluku Utara	10.655	7,97	9.825	7,17	7.108	4,54	10.705	7,22	8.022	5,57
Papua Barat	8.700	8,23	21.258	14,01	19.077	14,39	18.146	11,11	17.989	10,14
Papua	27.841	7,91	41.607	10,69	28.999	7,10	37.031	9,02	37.453	8,39
SUMATERA	**764.980**	**7,99**	**881.986**	**8,58**	**753.045**	**6,92**	**802.978**	**7,16**	**798.805**	**6,81**
JAWA BALI	**2.926.750**	**6,88**	**3.100.902**	**6,88**	**3.009.402**	**6,59**	**3.182.133**	**6,62**	**3.091.396**	**6,27**
NUSA TENGGARA	**96.333**	**7,31**	**101.017**	**6,91**	**72.102**	**4,57**	**90.554**	**5,78**	**81.559**	**5,14**
KALIMANTAN	**187.694**	**6,50**	**223.094**	**6,97**	**239.528**	**6,99**	**238.839**	**7,00**	**249.865**	**6,91**
SULAWESI	**207.649**	**7,60**	**261.741**	**8,64**	**184.315**	**5,67**	**239.247**	**7,29**	**254.116**	**7,28**
MALUKU	**43.210**	**10,88**	**47.572**	**11,31**	**36.798**	**8,06**	**44.849**	**10,15**	**40.689**	**8,68**
PAPUA	**36.541**	**7,99**	**62.865**	**11,62**	**48.076**	**8,89**	**55.177**	**9,62**	**55.442**	**8,89**
NASIONAL	**4.263.157**	**7,12**	**4.679.177**	**7,31**	**4.343.266**	**6,60**	**4.653.777**	**6,79**	**4.571.872**	**6,45**

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Agustus 2014-2018)

Perdesaan

PROVINSI	2014		2015		2016		2017		2018	
	Jumlah (Orang)	TPT (%)	Jumlah (Orang)	TPT (%)	Jumlah (Orang)	TPT (%)	Jumlah (Orang)	TPT (%)	Jumlah (Orang)	TPT (%)
Aceh	133.720	8,69	142.829	9,30	106.496	6,90	96.563	6,22	93.902	5,80
Sumatera Utara	153.690	4,68	147.667	4,61	133.941	4,17	118.487	3,67	131.779	3,92
Sumatera Barat	71.102	4,96	64.656	4,89	56.543	4,17	63.596	4,71	62.041	4,54
Riau	82.062	4,97	115.061	6,90	110.659	6,20	74.550	4,20	82.051	4,41
Jambi	41.553	3,80	39.062	3,51	44.526	3,85	38.237	3,25	38.488	3,17
Sumatera Selatan	85.618	3,34	121.752	4,75	93.332	3,47	80.928	3,01	87.591	3,23
Bengkulu	18.876	3,01	27.950	4,24	23.847	3,55	19.928	3,00	22.149	3,21
Lampung	119.377	4,08	114.756	4,12	113.801	3,87	97.316	3,33	96.883	3,24
Bangka Belitung	13.478	4,11	11.120	3,43	9.716	2,81	7.695	2,33	10.024	2,90
Kepulauan Riau	6.349	4,76	7.399	5,58	5.663	4,54	6.588	5,39	3.095	2,77
DKI Jakarta		-	-	-	-	-	-	-		-
Jawa Barat	633.072	8,88	501.937	8,93	533.886	9,26	387.608	6,76	445.112	7,98
Jawa Tengah	486.168	5,07	408.649	4,53	341.729	3,81	369.434	4,02	354.800	3,87
D.I. Yogyakarta	16.040	2,17	18.614	3,02	16.558	2,55	10.550	1,66	10.213	1,60
Jawa Timur	387.911	3,58	347.706	3,42	350.870	3,47	335.614	3,27	342.419	3,31
Banten	175.138	10,56	178.838	11,24	170.946	10,54	174.001	10,73	179.796	10,77
Bali	14.658	1,54	13.943	1,61	10.206	1,19	9.192	1,11	8.727	1,01
Nusa Tenggara Barat	62.697	4,85	66.110	5,36	53.091	3,82	30.348	2,32	38.105	3,24
Nusa Tenggara Timur	41.890	2,25	49.695	2,66	48.408	2,62	37.095	1,93	38.341	1,95
Kalimantan Barat	53.142	3,14	64.092	3,85	59.880	3,61	46.623	2,84	43.199	2,60
Kalimantan Tengah	23.104	2,84	32.673	3,99	34.747	4,16	28.984	3,63	25.294	3,08
Kalimantan Selatan	32.466	2,78	40.417	3,59	46.956	4,02	37.118	3,18	31.860	2,72
Kalimantan Timur	43.425	6,15	42.281	8,27	40.953	7,23	33.436	5,62	28.240	4,79
Kalimantan Utara		-	5.921	4,89	7.157	5,61	5.583	4,23	7.845	5,69
Sulawesi Utara	30.894	5,37	36.548	6,57	24.616	4,09	34.160	6,17	28.459	5,08
Sulawesi Tengah	33.599	3,31	32.055	3,18	34.046	3,07	27.451	2,70	28.830	2,71
Sulawesi Selatan	83.155	3,48	97.623	4,31	98.408	4,14	87.329	3,88	73.206	3,16
Sulawesi Tenggara	27.254	3,39	31.210	3,95	18.041	2,13	17.896	2,23	20.975	2,49
Gorontalo	7.953	2,44	12.479	3,96	7.188	2,05	11.134	3,39	11.526	3,33
Sulawesi Barat	9.304	1,96	12.911	2,60	13.629	2,73	14.155	2,89	12.436	2,43
Maluku	38.098	9,32	34.449	7,77	22.673	5,12	31.591	7,63	22.224	5,16
Maluku Utara	14.832	4,26	21.233	5,64	13.939	3,79	16.811	4,57	17.809	4,48
Papua Barat	11.288	3,86	12.151	4,64	13.380	4,43	9.806	3,67	10.097	3,76
Papua	29.835	2,25	27.858	2,06	28.678	2,18	26.739	1,98	21.303	1,53
SUMATERA	**725.825**	**4,66**	**792.252**	**5,18**	**698.524**	**4,41**	**603.888**	**3,82**	**628.003**	**3,86**
JAWA BALI	**1.712.987**	**5,54**	**1.469.687**	**5,27**	**1.424.195**	**5,09**	**1.286.399**	**4,55**	**1.341.067**	**4,75**
NUSA TENGGARA	**104.587**	**3,32**	**115.805**	**3,73**	**101.499**	**3,13**	**67.443**	**2,09**	**76.446**	**2,44**
KALIMANTAN	**152.137**	**3,47**	**185.384**	**4,37**	**189.693**	**4,35**	**151.744**	**3,50**	**136.438**	**3,11**
SULAWESI	**192.159**	**3,44**	**222.826**	**4,10**	**195.928**	**3,39**	**192.125**	**3,53**	**175.432**	**3,11**
MALUKU	**52.930**	**7,00**	**55.682**	**6,79**	**36.612**	**4,51**	**48.402**	**6,19**	**40.033**	**4,84**
PAPUA	**41.123**	**2,54**	**40.009**	**2,48**	**42.058**	**2,60**	**36.545**	**2,26**	**31.400**	**1,89**
NASIONAL	**2.981.748**	**4,81**	**2.881.645**	**4,93**	**2.688.509**	**4,51**	**2.386.546**	**4,01**	**2.428.819**	**4,04**

PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 DAN 2018

No	Provinsi	Gizi Buruk		Gizi Kurang		Gizi Baik		Gizi Lebih	
		2013	2018	2013	2018	2013	2018	2013	2018
1	Aceh	7,90	6,70	18,40	16,80	70,70	73,60	2,90	2,90
2	Sumatera Utara	8,30	5,40	14,10	14,30	72,80	76,30	4,80	4,00
3	Sumatera Barat	6,90	3,50	14,30	15,40	76,00	79,50	2,80	1,60
4	Riau	9,00	4,30	13,50	14,00	70,80	78,10	6,70	3,50
5	Jambi	5,70	3,80	14,00	11,90	75,60	80,00	4,80	4,20
6	Sumatera Selatan	6,30	4,90	12,00	12,30	74,50	78,60	7,20	4,20
7	Bengkulu	6,00	2,80	12,70	10,40	73,30	82,30	8,00	4,50
8	Lampung	6,90	3,10	11,90	12,80	73,70	81,20	7,60	2,80
9	Kep. Bangka Belitung	2,80	3,40	12,30	13,60	80,40	78,70	4,60	4,30
10	Kepulauan Riau	4,00	3,20	11,60	9,80	81,70	82,60	2,60	4,40
11	DKI Jakarta	2,80	2,30	11,20	12,00	78,50	80,90	7,50	4,80
12	Jawa Barat	4,40	2,60	11,30	10,60	79,90	84,30	4,30	2,50
13	Jawa Tengah	4,10	3,10	13,50	13,70	78,90	80,60	3,50	2,70
14	DI Yogyakarta	4,00	2,50	12,20	13,00	80,30	82,30	3,50	2,20
15	Jawa Timur	4,90	3,30	14,20	13,40	76,70	79,80	4,10	3,40
16	Banten	4,30	3,60	12,90	12,60	78,10	79,90	4,70	3,90
17	Bali	3,00	2,00	10,20	11,10	81,40	83,80	5,50	3,10
18	Nusa Tenggara Barat	6,30	5,90	19,40	20,50	71,50	71,50	2,80	2,10
19	Nusa Tenggara Timur	11,50	7,30	21,50	22,20	64,40	69,30	2,50	1,10
20	Kalimantan Barat	10,30	5,20	16,20	18,60	68,50	73,10	5,00	3,00
21	Kalimantan Tengah	6,60	5,50	16,70	16,30	72,30	74,10	4,40	4,10
22	Kalimantan Selatan	8,20	5,50	19,20	19,00	69,20	73,00	3,40	2,50
23	Kalimantan Timur	3,90	3,20	12,70	11,50	77,60	80,80	5,80	4,50
24	Kalimantan Utara		2,40		14,40		80,30		2,90
25	Sulawesi Utara	3,70	4,20	12,80	11,20	79,00	81,60	4,50	2,90
26	Sulawesi Tengah	6,60	4,80	17,50	18,60	73,50	74,70	2,50	1,80
27	Sulawesi Selatan	6,60	4,60	19,00	18,40	71,50	74,20	2,90	2,90
28	Sulawesi Tenggara	8,00	5,60	15,90	16,40	72,20	76,20	3,90	1,80
29	Gorontalo	6,90	6,80	19,20	19,30	70,90	69,10	3,00	4,70
30	Sulawesi Barat	7,00	6,30	22,10	18,40	66,90	74,10	4,00	1,20
31	Maluku	10,50	7,40	17,80	17,50	67,20	72,40	4,50	2,70
32	Maluku Utara	9,20	5,60	15,70	16,60	71,70	74,80	3,40	3,00
33	Papua Barat	11,90	5,10	19,00	14,10	66,20	77,50	2,90	3,20
34	Papua	9,20	5,10	12,60	11,40	71,90	76,00	6,30	7,40
	INDONESIA	**5,70**	**3,90**	**13,90**	**13,80**	**75,90**	**79,20**	**4,50**	**3,10**

Sumber: Riskesdas 2013, 2018, Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes

PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS TB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 dan 2018

No	Provinsi	Sangat Pendek		Pendek		Normal	
		2013	2018	2013	2018	2013	2018
1	Aceh	20,10	16,00	21,40	21,10	58,50	62,90
2	Sumatera Utara	22,70	13,20	19,80	19,20	57,50	67,60
3	Sumatera Barat	18,40	9,60	20,80	20,30	60,80	70,10
4	Riau	20,00	10,30	16,80	17,10	63,20	72,60
5	Jambi	19,00	13,40	18,90	16,80	62,10	69,90
6	Sumatera Selatan	19,90	14,40	16,80	17,20	63,30	68,30
7	Bengkulu	22,50	9,80	17,20	18,20	60,30	72,00
8	Lampung	27,60	9,60	15,00	17,70	57,40	72,70
9	Kep. Bangka Belitung	12,60	7,30	16,10	16,10	71,30	76,60
10	Kepulauan Riau	10,00	8,50	16,30	15,10	73,70	76,40
11	DKI Jakarta	12,10	6,10	15,40	11,50	72,50	82,40
12	Jawa Barat	16,90	11,70	18,40	19,40	64,70	68,90
13	Jawa Tengah	16,80	11,20	19,90	20,10	63,20	68,80
14	DI Yogyakarta	8,20	6,30	19,10	15,10	72,80	78,60
15	Jawa Timur	16,80	12,90	19,00	19,90	64,20	67,20
16	Banten	16,40	9,60	16,60	17,00	67,00	73,40
17	Bali	13,10	5,60	19,50	16,30	67,50	78,20
18	Nusa Tenggara Barat	20,50	9,20	24,70	24,30	54,70	66,50
19	Nusa Tenggara Timur	26,20	16,00	25,50	26,70	48,30	57,40
20	Kalimantan Barat	22,50	11,40	16,10	21,90	61,40	66,70
21	Kalimantan Tengah	18,40	12,70	22,90	21,30	58,70	66,00
22	Kalimantan Selatan	20,40	12,00	23,80	21,10	55,80	66,90
23	Kalimantan Timur	11,80	10,20	15,80	19,00	72,50	70,80
24	Kalimantan Utara		6,80		20,10		73,10
25	Sulawesi Utara	17,00	9,80	17,80	15,70	65,20	74,50
26	Sulawesi Tengah	17,70	11,90	23,30	20,40	58,90	67,70
27	Sulawesi Selatan	16,40	12,50	24,50	23,20	59,10	64,30
28	Sulawesi Tenggara	21,20	10,10	21,40	18,60	57,40	71,30
29	Gorontalo	14,70	12,70	24,20	19,80	61,10	67,50
30	Sulawesi Barat	22,30	16,20	25,70	25,40	52,00	58,40
31	Maluku	20,40	12,50	20,20	21,50	59,40	66,00
32	Maluku Utara	18,30	11,00	22,80	20,40	59,00	68,60
33	Papua Barat	21,90	11,70	22,80	16,10	55,40	72,30
34	Papua	25,00	15,30	15,10	17,80	59,90	66,90
	INDONESIA	**18,00**	**11,50**	**19,20**	**19,30**	**62,80**	**69,20**

PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/TB MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 dan 2018

No.	Provinsi	Sangat Kurus		Kurus		Normal		Gemuk	
		2013	2018	2013	2018	2013	2018	2013	2018
1	Aceh	6,10	5,00	9,60	6,90	74,50	79,30	9,80	8,80
2	Sumatera Utara	7,50	4,60	7,40	7,50	72,20	79,10	12,80	8,90
3	Sumatera Barat	5,20	2,90	7,40	8,40	77,30	83,30	10,10	5,40
4	Riau	6,90	4,20	8,70	8,00	70,20	80,00	14,30	7,80
5	Jambi	5,80	5,70	7,70	6,30	73,30	77,10	13,10	10,80
6	Sumatera Selatan	5,90	4,70	6,40	6,70	70,90	77,80	16,70	10,80
7	Bengkulu	6,90	3,50	7,90	4,80	68,70	81,40	16,40	10,40
8	Lampung	5,60	3,90	6,20	6,80	66,80	82,20	21,40	7,20
9	Kep. Bangka Belitung	4,00	2,80	6,20	7,10	76,10	82,20	13,60	8,00
10	Kepulauan Riau	6,00	4,50	6,30	6,70	78,70	79,50	8,90	9,20
11	DKI Jakarta	4,40	3,90	5,80	6,20	78,10	82,00	11,70	7,90
12	Jawa Barat	5,00	3,20	5,90	5,20	77,30	82,90	11,80	8,70
13	Jawa Tengah	4,50	2,70	6,60	5,80	76,90	83,90	12,00	7,60
14	DI Yogyakarta	4,70	1,20	4,70	7,20	80,20	86,90	10,30	4,70
15	Jawa Timur	4,40	2,90	7,00	6,30	76,90	81,60	11,80	9,30
16	Banten	6,50	4,60	7,30	5,90	74,40	81,00	11,80	8,60
17	Bali	3,40	1,90	5,40	4,40	78,60	85,90	12,60	7,90
18	Nusa Tenggara Barat	5,20	4,40	6,70	10,00	79,70	82,30	8,50	3,30
19	Nusa Tenggara Timur	7,40	4,60	8,10	8,20	76,60	83,40	8,00	3,80
20	Kalimantan Barat	10,40	4,00	8,30	10,30	68,90	77,70	12,50	8,00
21	Kalimantan Tengah	5,40	4,00	7,00	9,90	76,70	76,20	10,90	9,80
22	Kalimantan Selatan	4,50	3,90	8,30	9,20	77,40	79,70	9,90	7,10
23	Kalimantan Timur	3,90	2,00	7,70	5,50	75,90	83,00	12,60	9,40
24	Kalimantan Utara		1,10		3,50		87,80		7,60
25	Sulawesi Utara	3,40	2,90	6,50	6,70	79,60	82,80	10,50	7,70
26	Sulawesi Tengah	3,60	3,70	5,80	9,20	82,10	83,70	8,50	3,50
27	Sulawesi Selatan	3,80	2,50	7,20	7,50	82,20	82,90	6,80	7,10
28	Sulawesi Tenggara	5,90	3,40	5,50	8,50	79,00	81,90	9,60	6,10
29	Gorontalo	5,60	3,80	6,10	10,60	81,40	80,20	6,90	5,40
30	Sulawesi Barat	4,60	3,20	6,20	7,30	81,30	84,00	7,90	5,50
31	Maluku	6,10	4,00	10,10	9,10	77,40	81,80	6,40	5,00
32	Maluku Utara	3,90	4,00	8,30	7,90	80,50	82,50	7,30	5,70
33	Papua Barat	6,20	3,90	9,20	8,30	77,10	80,00	7,50	7,80
34	Papua	8,00	4,80	6,80	5,50	70,20	76,50	15,00	13,20
	INDONESIA	**5,30**	**3,50**	**6,80**	**6,70**	**76,10**	**81,80**	**11,80**	**8,00**

Gini Ration Menurut Provinsi Tahun 2014-2018

Provinsi	Perkotaan					Perdesaan					Perkotaan + Perdesaan				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Aceh	0,358	0,367	0,343	0,347	0,344	0,259	0,292	0,288	0,293	0,285	0,325	0,334	0,333	0,329	0,325
Sumatera Utara	0,346	0,360	0,334	0,342	0,335	0,274	0,296	0,282	0,256	0,272	0,321	0,336	0,319	0,315	0,318
Sumatera Barat	0,338	0,358	0,353	0,336	0,338	0,295	0,304	0,288	0,276	0,280	0,334	0,342	0,331	0,318	0,321
Riau	0,389	0,392	0,369	0,353	0,356	0,276	0,328	0,309	0,289	0,288	0,353	0,364	0,347	0,325	0,327
Jambi	0,314	0,381	0,377	0,384	0,354	0,316	0,339	0,313	0,284	0,308	0,329	0,361	0,349	0,335	0,334
Sumatera Selatan	0,438	0,390	0,373	0,384	0,381	0,316	0,314	0,293	0,317	0,316	0,399	0,360	0,348	0,361	0,358
Bengkulu	0,404	0,405	0,385	0,390	0,394	0,305	0,345	0,302	0,305	0,318	0,356	0,376	0,357	0,351	0,362
Lampung	0,400	0,403	0,393	0,364	0,367	0,290	0,345	0,330	0,297	0,317	0,347	0,376	0,364	0,334	0,346
Kep.BaBel	0,316	0,291	0,289	0,303	0,296	0,273	0,263	0,240	0,219	0,238	0,303	0,283	0,275	0,282	0,281
Kepulauan Riau	0,404	0,361	0,351	0,327	0,325	0,293	0,293	0,284	0,279	0,289	0,402	0,364	0,354	0,334	0,330
DKI Jakarta	0,431	0,431	0,411	0,413	0,394	-	-	-	-	-	0,431	0,431	0,411	0,413	0,394
Jawa Barat	0,433	0,433	0,423	0,412	0,418	0,301	0,316	0,317	0,324	0,322	0,413	0,415	0,413	0,403	0,407
Jawa Tengah	0,402	0,420	0,381	0,386	0,400	0,334	0,326	0,323	0,327	0,336	0,376	0,382	0,366	0,365	0,378
DI Yogyakarta	0,444	0,443	0,423	0,435	0,442	0,299	0,334	0,334	0,340	0,350	0,419	0,433	0,420	0,432	0,441
Jawa Timur	0,391	0,442	0,423	0,418	0,387	0,310	0,344	0,333	0,326	0,327	0,369	0,415	0,402	0,396	0,379
Banten	0,401	0,411	0,402	0,381	0,386	0,280	0,269	0,264	0,267	0,283	0,395	0,401	0,394	0,382	0,385
Bali	0,429	0,382	0,369	0,382	0,381	0,315	0,332	0,329	0,325	0,317	0,415	0,377	0,366	0,384	0,377
NTB	0,426	0,399	0,391	0,413	0,398	0,307	0,333	0,317	0,314	0,333	0,377	0,368	0,359	0,371	0,372
NTT	0,345	0,332	0,330	0,362	0,358	0,279	0,288	0,281	0,311	0,297	0,355	0,339	0,336	0,359	0,351
Kalimantan Barat	0,423	0,354	0,373	0,356	0,377	0,317	0,301	0,296	0,274	0,277	0,391	0,334	0,341	0,327	0,339
Kalimantan Tengah	0,419	0,366	0,359	0,370	0,387	0,287	0,293	0,296	0,310	0,295	0,350	0,326	0,330	0,343	0,342
Kalimantan Selatan	0,388	0,377	0,346	0,365	0,365	0,302	0,299	0,297	0,292	0,285	0,359	0,353	0,332	0,347	0,344
Kalimantan Timur	0,336	0,313	0,314	0,323	0,350	0,287	0,293	0,288	0,298	0,287	0,348	0,316	0,315	0,330	0,342
Kalimantan Utara	-	0,298	0,304	0,298	0,310	-	0,270	0,268	0,268	0,278	-	0,294	0,300	0,308	0,303
Sulawesi Utara	0,464	0,386	0,386	0,405	0,402	0,353	0,324	0,355	0,355	0,349	0,424	0,368	0,386	0,396	0,394
Sulawesi Tengah	0,406	0,425	0,387	0,379	0,370	0,305	0,329	0,320	0,309	0,307	0,372	0,374	0,362	0,355	0,346
Sulawesi Selatan	0,436	0,421	0,422	0,410	0,392	0,373	0,380	0,367	0,348	0,361	0,425	0,424	0,426	0,407	0,397
Sulawesi Tenggara	0,454	0,414	0,407	0,403	0,420	0,342	0,369	0,367	0,358	0,370	0,409	0,399	0,402	0,394	0,409
Gorontalo	0,409	0,423	0,414	0,417	0,390	0,392	0,369	0,392	0,403	0,383	0,412	0,420	0,419	0,430	0,403
Sulawesi Barat	0,329	0,395	0,393	0,424	0,421	0,349	0,348	0,347	0,323	0,335	0,352	0,363	0,364	0,354	0,370
Maluku	0,338	0,312	0,327	0,333	0,314	0,310	0,323	0,313	0,312	0,291	0,351	0,340	0,348	0,343	0,343
Maluku Utara	0,335	0,282	0,295	0,322	0,345	0,264	0,263	0,249	0,265	0,266	0,325	0,280	0,286	0,317	0,328
Papua Barat	0,437	0,343	0,326	0,349	0,331	0,391	0,476	0,376	0,392	0,424	0,439	0,440	0,373	0,390	0,394
Papua	0,350	0,339	0,312	0,322	0,312	0,331	0,380	0,383	0,395	0,384	0,408	0,421	0,390	0,397	0,384
INDONESIA	**0,428**	**0,428**	**0,410**	**0,407**	**0,401**	**0,319**	**0,334**	**0,327**	**0,320**	**0,324**	**0,406**	**0,408**	**0,397**	**0,393**	**0,389**

JUMLAH KASUS BARU DAN KASUS KUMULATIF AIDS MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2018

No	Provinsi	Tahun					Jumlah Kasus Baru
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Aceh	56	49	60	78	89	332
2	Sumatera Utara	231	53		155	149	588
3	Sumatera Barat	240		152	267	347	1.006
4	Riau	171	251	371	383	269	1.445
5	Jambi	59	52	75	87	25	298
6	Sumatera Selatan	87	175	115	170	246	793
7	Bengkulu	19	20	77	29	55	200
8	Lampung	81	128	76	41	143	469
9	Kep.BaBel	33	62	27	57	38	217
10	Kepulauan Riau	44	212	224	208	289	977
11	DKI Jakarta	130	130	555	567	717	2.099
12	Jawa Barat	61	685	382	1.251	247	2.626
13	Jawa Tengah	740	970	1.402	1.719	1.941	6.772
14	DI Yogyakarta	199	91	112	50	48	500
15	Jawa Timur	1.623	1.489	1.865	741	1.586	7.304
16	Banten	209	137	817	512	207	1.882
17	Bali	880	966	784	736	549	3.915
18	NTB	80	91	75	93	27	366
19	NTT	389	-	27	11	94	521
20	Kalimantan Barat	168	140	26	110	95	539
21	Kalimantan Tengah	25	54	59	12	25	175
22	Kalimantan Selatan	76	12	15	14		117
23	Kalimantan Timur	226	256	51	358	171	1.062
24	Kalimantan Utara	36	27	58	55	267	443
25	Sulawesi Utara	163	180	199	127	332	1.001
26	Sulawesi Tengah	119	127	106	144	2	498
27	Sulawesi Selatan	209	180	581	220	337	1.527
28	Sulawesi Tenggara	54	60	20	92	113	339
29	Gorontalo	6	25	37	61	5	134
30	Sulawesi Barat	3	-	9	6	-	18
31	Maluku	118	68	128	**88**	68	470
32	Maluku Utara	77	104	77	34	108	400
33	Papua Barat	13	7				20
34	Papua	1.338	2.414	1.584	2.012	1.601	8.949
	SUMATERA	**1.021**	**1.002**	**1.177**	**1.475**	**1.650**	**6.325**
	JAWA BALI	**3.842**	**4.468**	**5.917**	**5.576**	**5.295**	**25.098**
	NUSA TENGGARA	**469**	**91**	**102**	**104**	**121**	**887**
	KALIMANTAN	**531**	**489**	**209**	**549**	**558**	**2.336**
	SULAWESI	**554**	**572**	**952**	**650**	**789**	**3.517**
	MALUKU	**195**	**172**	**205**	**122**	**176**	**870**
	PAPUA	**1.351**	**2.421**	**1.584**	**2.012**	**1.601**	**8.969**
	NASIONAL	**7.963**	**9.215**	**10.146**	**10.488**	**10.190**	**48.002**

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2019

Data SIHA per 17 Januari 2019

JUMLAH KASUS BARU DAN KASUS KUMULATIF HIV MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2018

No	Provinsi	Tahun					Jumlah Kasus Baru
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Aceh	60	48	70	111	155	444
2	Sumatera Utara	1.628	1.491	1.891	1.914	1.999	8.923
3	Sumatera Barat	321	243	396	563	624	2.147
4	Riau	550	586	822	711	539	3.208
5	Jambi	170	148	215	278	246	1.057
6	Sumatera Selatan	252	265	346	486	508	1.857
7	Bengkulu	92	87	115	95	107	496
8	Lampung	256	345	381	580	524	2.086
9	Kep.BaBel	113	147	135	268	205	868
10	Kepulauan Riau	973	885	1.037	1.105	1.033	5.033
11	DKI Jakarta	5.851	4.695	6.019	6.626	6.896	30.087
12	Jawa Barat	3.740	3.741	5.466	5.819	5.185	23.951
13	Jawa Tengah	2.867	3.005	4.032	5.425	5.400	20.729
14	DI Yogyakarta	614	531	736	723	833	3.437
15	Jawa Timur	4.508	4.155	6.513	8.204	8.608	31.988
16	Banten	680	649	1.092	1.315	1.334	5.070
17	Bali	2.129	2.028	2.367	2.441	2.211	11.176
18	NTB	149	194	175	222	192	932
19	NTT	249	299	487	837	842	2.714
20	Kalimantan Barat	699	456	525	608	692	2.980
21	Kalimantan Tengah	113	134	141	119	122	629
22	Kalimantan Selatan	227	250	454	572	297	1.800
23	Kalimantan Timur	539	504	813	1.202	1.126	4.184
24	Kalimantan Utara	-	84	163	172	166	585
25	Sulawesi Utara	392	311	409	516	555	2.183
26	Sulawesi Tengah	131	138	157	200	292	918
27	Sulawesi Selatan	839	700	993	1.366	1.174	5.072
28	Sulawesi Tenggara	160	129	134	134	106	663
29	Gorontalo	24	24	7	51	74	180
30	Sulawesi Barat	30	13	22	37	26	128
31	Maluku	414	409	621	688	462	2.594
32	Maluku Utara	63	45	120	145	200	573
33	Papua Barat	600	702	530	409	380	2.621
34	Papua	3.278	3.494	3.866	4.358	3.546	18.542
	SUMATERA	**4.415**	**4.245**	**5.408**	**6.111**	**5.940**	**26.119**
	JAWA BALI	**20.389**	**18.804**	**26.225**	**30.553**	**30.467**	**126.438**
	NUSA TENGGARA	**398**	**493**	**662**	**1.059**	**1.034**	**3.646**
	KALIMANTAN	**1.578**	**1.428**	**2.096**	**2.673**	**2.403**	**10.178**
	SULAWESI	**1.576**	**1.315**	**1.722**	**2.304**	**2.227**	**9.144**
	MALUKU	**477**	**454**	**741**	**833**	**662**	**3.167**
	PAPUA	**3.878**	**4.196**	**4.396**	**4.767**	**3.926**	**21.163**
	NASIONAL	**32.711**	**30.935**	**41.250**	**48.300**	**46.659**	**199.855**

Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Menurut Provinsi Tahun 2014-2018, (Rp. Miliar)

No.	Provinsi	Nilai PMDN (Rp. Miliar)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	ACEH	5.110,3	4.192,4	2.456,1	782,80	969,98
2	SUMATERA UTARA	4.223,8	4.287,4	4.864,2	11683,60	8.371,82
3	SUMATERA BARAT	421,1	1.552,5	3.795,6	1517,00	2.309,45
4	R I A U	7.707,5	9.943,0	6.613,7	10829,80	9.056,40
5	JAMBI	907,9	3.540,2	3.884,4	3006,60	2.876,52
6	SUMATERA SELATAN	7.042,8	10.944,1	8.534,1	8200,20	9.519,81
7	BENGKULU	7,8	553,9	949,1	296,50	4.902,80
8	LAMPUNG	3.495,7	1.102,3	6.031,8	7014,80	12.314,71
9	KEP. BANGKA BELITUNG	615,4	1.023,7	2.202,0	1734,70	3.112,92
10	KEP. RIAU	28,5	612,1	492,5	1398,00	4.385,98
11	DKI JAKARTA	17.811,4	15.512,7	12.216,9	47262,30	49.097,42
12	JAWA BARAT	18.726,9	26.272,9	24.070,4	38390,60	42.278,21
13	JAWA TENGAH	13.601,6	15.410,7	30.360,2	19866,00	27.474,89
14	D.I YOGYAKARTA	703,9	362,4	948,6	294,60	6.131,71
15	JAWA TIMUR	38.132,0	35.489,8	46.349,3	45044,50	33.333,13
16	BANTEN	8.081,3	10.709,9	12.426,3	15141,90	18.637,56
17	B A L I	252,8	1.250,4	482,3	592,50	1.548,85
18	NUSA TENGGARA BARAT	212,5	347,8	1.342,8	5413,50	4.135,07
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3,5	1.295,7	822,2	1081,90	4.246,06
20	KALIMANTAN BARAT	4.320,9	6.143,5	9.015,5	12380,90	6.591,38
21	KALIMANTAN TENGAH	980,4	1.270,1	8.179,1	3037,80	13.091,61
22	KALIMANTAN SELATAN	2.616,5	2.060,4	6.220,5	2981,90	9.975,24
23	KALIMANTAN TIMUR	12.859,0	9.611,3	6.885,1	10980,20	25.941,96
24	KALIMANTAN UTARA	642,8	921,8	3.345,7	853,30	1.356,80
25	SULAWESI UTARA	83,0	270,6	5.069,6	1488,20	4.320,13
26	SULAWESI TENGAH	95,8	968,4	1.081,2	1929,70	8.488,88
27	SULAWESI SELATAN	4.949,5	9.215,3	3.334,6	1969,40	3.275,88
28	SULAWESI TENGGARA	1.249,9	2.015,4	1.794,2	3148,70	1.603,41
29	GORONTALO	45,1	94,3	2.202,5	888,40	2.666,82
30	SULAWESI BARAT	690,1	1.103,8	84,1	660,20	3.144,24
31	MALUKU		-	11,4	1150,60	2.276,27
32	MALUKU UTARA	156,4	48,2	8,8	52,30	1.013,49
33	PAPUA	249,9	1.275,2	220,5	1217,90	104,62
34	PAPUA BARAT	100,1	63,4	10,6	59,20	50,86
INDONESIA		**156.126,2**	**179.465,9**	**216.306,1**	**262.350,5**	**328.604,9**

Distribusi Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Provinsi Terhadap Masing-Masing Pulau Tahun 2014-2018, (persen)

No.	Provinsi	Share terhadap Pulau					
		2014	2015	2016	2017	2018	2014-
1	ACEH	17,3	11,1	6,2	1,7	1,7	7,6
2	SUMATERA UTARA	14,3	11,4	12,2	25,1	14,5	15,5
3	SUMATERA BARAT	1,4	4,1	9,5	3,3	4,0	4,5
4	R I A U	26,1	26,3	16,6	23,3	15,7	21,6
5	JAMBI	3,1	9,4	9,8	6,5	5,0	6,7
6	SUMATERA SELATAN	23,8	29,0	21,4	17,6	16,5	21,7
7	BENGKULU	0,0	1,5	2,4	0,6	8,5	2,6
8	LAMPUNG	11,8	2,9	15,1	15,1	21,3	13,3
9	KEP. BANGKA BELITUNG	2,1	2,7	5,5	3,7	5,4	3,9
10	KEP. RIAU	0,1	1,6	1,2	3,0	7,6	2,7
11	DKI JAKARTA	18,3	14,8	9,6	28,4	27,5	19,7
12	JAWA BARAT	19,2	25,0	19,0	23,0	23,7	22,0
13	JAWA TENGAH	14,0	14,7	23,9	11,9	15,4	16,0
14	D.I YOGYAKARTA	0,7	0,3	0,7	0,2	3,4	1,1
15	JAWA TIMUR	39,2	33,8	36,5	27,0	18,7	31,0
16	BANTEN	8,3	10,2	9,8	9,1	10,4	9,6
17	B A L I	0,3	1,2	0,4	0,4	0,9	0,6
18	NUSA TENGGARA BARAT	98,36	21,16	62,02	83,34	49,34	62,8
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1,64	78,84	37,98	16,66	50,66	37,2
20	KALIMANTAN BARAT	20,2	30,7	26,8	41,0	11,6	26,0
21	KALIMANTAN TENGAH	4,6	6,3	24,3	10,0	23,0	13,7
22	KALIMANTAN SELATAN	12,2	10,3	18,5	9,9	17,5	13,7
23	KALIMANTAN TIMUR	60,0	48,0	20,5	36,3	45,5	42,1
24	KALIMANTAN UTARA	3,0	4,6	9,9	2,8	2,4	4,6
25	SULAWESI UTARA	1,2	2,0	37,4	14,8	18,4	14,7
26	SULAWESI TENGAH	1,3	7,1	8,0	19,1	36,1	14,3
27	SULAWESI SELATAN	69,6	67,4	24,6	19,5	13,9	39,0
28	SULAWESI TENGGARA	17,6	14,7	13,2	31,2	6,8	16,7
29	GORONTALO	0,6	0,7	16,2	8,8	11,3	7,5
30	SULAWESI BARAT	9,7	8,1	0,6	6,5	13,4	7,7
31	MALUKU	0,0	0,0	56,5	95,7	69,2	44,3
32	MALUKU UTARA	100,0	100,0	43,5	4,3	30,8	55,7
33	PAPUA	71,4	95,3	95,4	95,4	67,3	84,9
34	PAPUA BARAT	28,6	4,7	4,6	4,6	32,7	15,1

Distrubusi Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Provinsi Terhadap Nasional Tahun 2014-2018, (persen)

No.	Provinsi	Share terhadap Nasional					
		2014	2015	2016	2017	2018	2014-
1	ACEH	3,3	2,3	1,1	0,3	0,3	1,5
2	SUMATERA UTARA	2,7	2,4	2,2	4,5	2,5	2,9
3	SUMATERA BARAT	0,3	0,9	1,8	0,6	0,7	0,8
4	R I A U	4,9	5,5	3,1	4,1	2,8	4,1
5	JAMBI	0,6	2,0	1,8	1,1	0,9	1,3
6	SUMATERA SELATAN	4,5	6,1	3,9	3,1	2,9	4,1
7	BENGKULU	0,0	0,3	0,4	0,1	1,5	0,5
8	LAMPUNG	2,2	0,6	2,8	2,7	3,7	2,4
9	KEP. BANGKA BELITUNG	0,4	0,6	1,0	0,7	0,9	0,7
10	KEP. RIAU	0,0	0,3	0,2	0,5	1,3	0,5
11	DKI JAKARTA	11,4	8,6	5,6	18,0	14,9	11,7
12	JAWA BARAT	12,0	14,6	11,1	14,6	12,9	13,1
13	JAWA TENGAH	8,7	8,6	14,0	7,6	8,4	9,5
14	D.I YOGYAKARTA	0,5	0,2	0,4	0,1	1,9	0,6
15	JAWA TIMUR	24,4	19,8	21,4	17,2	10,1	18,6
16	BANTEN	5,2	6,0	5,7	5,8	5,7	5,7
17	B A L I	0,2	0,7	0,2	0,2	0,5	0,4
18	NUSA TENGGARA BARAT	0,1	0,2	0,6	2,1	1,3	0,9
19	NUSA TENGGARA TIMUR	0,0	0,7	0,4	0,4	1,3	0,6
20	KALIMANTAN BARAT	2,8	3,4	4,2	4,7	2,0	3,4
21	KALIMANTAN TENGAH	0,6	0,7	3,8	1,2	4,0	2,1
22	KALIMANTAN SELATAN	1,7	1,1	2,9	1,1	3,0	2,0
23	KALIMANTAN TIMUR	8,2	5,4	3,2	4,2	7,9	5,8
24	KALIMANTAN UTARA	0,4	0,5	1,5	0,3	0,4	0,6
25	SULAWESI UTARA	0,1	0,2	2,3	0,6	1,3	0,9
26	SULAWESI TENGAH	0,1	0,5	0,5	0,7	2,6	0,9
27	SULAWESI SELATAN	3,2	5,1	1,5	0,8	1,0	2,3
28	SULAWESI TENGGARA	0,8	1,1	0,8	1,2	0,5	0,9
29	GORONTALO	0,0	0,1	1,0	0,3	0,8	0,4
30	SULAWESI BARAT	0,4	0,6	0,0	0,3	1,0	0,5
31	MALUKU	-	-	0,0	0,4	0,7	0,2
32	MALUKU UTARA	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
33	PAPUA	0,2	0,7	0,1	0,5	0,0	0,3
34	PAPUA BARAT	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INDONESIA		**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Perkembangan Realisasi PMA Menurut Lokasi Tahun 2014-2018

No.	Provinsi	Nilai Investasi PMA (juta US$)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	ACEH	31,1	21,2	134,5	23,2	71,21
2	SUMATERA UTARA	550,8	1.246,1	1.014,7	1514,9	1.227,61
3	SUMATERA BARAT	112,1	57,1	79,3	194,4	180,8
4	R I A U	1.369,6	653,4	869,1	1061,1	1.032,88
5	JAMBI	51,4	107,7	61,0	76,8	101,87
6	SUMATERA SELATAN	1.056,5	645,8	2.793,5	1182,9	1.078,55
7	BENGKULU	19,3	20,6	55,7	138,7	136,61
8	LAMPUNG	156,5	257,7	85,7	120,6	132,29
9	KEP. BANGKA BELITUNG	105,0	82,7	52,7	153,1	46,28
10	KEP. RIAU	392,1	640,4	519,1	1031,5	831,25
11	DKI JAKARTA	4.509,4	3.619,4	3.398,2	4595	4.857,73
12	JAWA BARAT	6.561,9	5.738,7	5.470,9	5142,9	5.573,52
13	JAWA TENGAH	463,4	850,4	1.030,8	2372,5	2.372,70
14	D.I YOGYAKARTA	64,9	89,1	19,6	36,5	81,34
15	JAWA TIMUR	1.802,5	2.593,4	1.941,0	3047,5	1.333,38
16	BANTEN	2.034,6	2.542,0	2.912,1	1566,7	2.827,28
17	B A L I	427,2	495,8	450,6	886,9	1.002,46
18	NUSA TENGGARA BARAT	551,1	699,4	439,0	132,1	251,55
19	NUSA TENGGARA TIMUR	15,1	69,9	58,2	139	100,37
20	KALIMANTAN BARAT	966,1	1.335,7	630,7	568,4	491,94
21	KALIMANTAN TENGAH	951,0	933,6	408,2	641	678,52
22	KALIMANTAN SELATAN	502,5	961,2	249,4	243,8	129,15
23	KALIMANTAN TIMUR	2.145,7	2.381,4	1.139,6	1285,2	587,5
24	KALIMANTAN UTARA	108,3	230,9	160,8	149	67,33
25	SULAWESI UTARA	98,5	88,0	382,8	482,9	295,85
26	SULAWESI TENGAH	1.494,2	1.085,2	1.600,3	1545,6	672,42
27	SULAWESI SELATAN	280,9	233,3	372,5	712,8	617,19
28	SULAWESI TENGGARA	161,8	145,0	376,1	693	672,93
29	GORONTALO	4,1	6,9	12,7	41,3	40,82
30	SULAWESI BARAT	16,2	2,0	20,6	11,4	24,7
31	MALUKU	13,1	82,4	102,6	228,1	7,96
32	MALUKU UTARA	98,7	203,8	438,9	212	362,79
33	PAPUA	1.260,6	897,0	1.168,4	1924,1	1.132,27
34	PAPUA BARAT	153,3	258,6	514,5	84,7	286,86
	INDONESIA	**28529,699**	**29275,941**	**28964,075**	**32239,6**	**29307,91**

Distribusi Perkembangan Realisasi PMA Provinsi Terhadap Pulau Menurut Lokasi Tahun 2014-2018, (persen)

No.	Provinsi	Share terhadap Pulau					
		2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018
1	ACEH	0,8	0,6	2,4	0,4	1,5	1,1
2	SUMATERA UTARA	14,3	33,4	17,9	27,6	25,4	23,7
3	SUMATERA BARAT	2,9	1,5	1,4	3,5	3,7	2,6
4	R I A U	35,6	17,5	15,3	19,3	21,3	21,8
5	JAMBI	1,3	2,9	1,1	1,4	2,1	1,8
6	SUMATERA SELATAN	27,5	17,3	49,3	21,5	22,3	27,6
7	BENGKULU	0,5	0,6	1,0	2,5	2,8	1,5
8	LAMPUNG	4,1	6,9	1,5	2,2	2,7	3,5
9	KEP. BANGKA BELITUNG	2,7	2,2	0,9	2,8	1,0	1,9
10	KEP. RIAU	10,2	17,2	9,2	18,8	17,2	14,5
11	DKI JAKARTA	28,4	22,7	22,3	26,0	26,9	25,3
12	JAWA BARAT	41,4	36,0	35,9	29,1	30,9	34,7
13	JAWA TENGAH	2,9	5,3	6,8	13,4	13,1	8,3
14	D.I YOGYAKARTA	0,4	0,6	0,1	0,2	0,5	0,4
15	JAWA TIMUR	11,4	16,3	12,8	17,3	7,4	13,0
16	BANTEN	12,8	16,0	19,1	8,9	15,7	14,5
17	B A L I	2,7	3,1	3,0	5,0	5,6	3,9
18	NUSA TENGGARA BARAT	97,34	90,92	88,29	48,73	71,48	79,3
19	NUSA TENGGARA TIMUR	2,66	9,08	11,71	51,27	28,52	20,7
20	KALIMANTAN BARAT	20,7	22,9	24,4	19,7	25,2	22,6
21	KALIMANTAN TENGAH	20,3	16,0	15,8	22,2	34,7	21,8
22	KALIMANTAN SELATAN	10,8	16,5	9,6	8,4	6,6	10,4
23	KALIMANTAN TIMUR	45,9	40,8	44,0	44,5	30,1	41,1
24	KALIMANTAN UTARA	2,3	4,0	6,2	5,2	3,4	4,2
25	SULAWESI UTARA	4,8	5,6	13,8	13,8	12,7	10,2
26	SULAWESI TENGAH	72,7	69,5	57,9	44,3	28,9	54,7
27	SULAWESI SELATAN	13,7	15,0	13,5	20,4	26,6	17,8
28	SULAWESI TENGGARA	7,9	9,3	13,6	19,9	29,0	15,9
29	GORONTALO	0,2	0,4	0,5	1,2	1,8	0,8
30	SULAWESI BARAT	0,8	0,1	0,7	0,3	1,1	0,6
31	MALUKU	11,7	28,8	19,0	51,8	2,1	22,7
32	MALUKU UTARA	88,3	71,2	81,0	48,2	97,9	77,3
33	PAPUA	89,2	77,6	69,4	95,8	79,8	82,4
34	PAPUA BARAT	10,8	22,4	30,6	4,2	20,2	17,6

Distribusi Realisasi PMA Provinsi Terhadap Nasional Menurut Lokasi Tahun 2014-2018, (persen)

No.	Provinsi	Share terhadap Nasional					
		2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018
1	ACEH	0,1	0,1	0,5	0,1	0,2	0,2
2	SUMATERA UTARA	1,9	4,3	3,5	4,7	4,2	3,7
3	SUMATERA BARAT	0,4	0,2	0,3	0,6	0,6	0,4
4	R I A U	4,8	2,2	3,0	3,3	3,5	3,4
5	JAMBI	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,3
6	SUMATERA SELATAN	3,7	2,2	9,6	3,7	3,7	4,6
7	BENGKULU	0,1	0,1	0,2	0,4	0,5	0,2
8	LAMPUNG	0,5	0,9	0,3	0,4	0,5	0,5
9	KEP. BANGKA BELITUNG	0,4	0,3	0,2	0,5	0,2	0,3
10	KEP. RIAU	1,4	2,2	1,8	3,2	2,8	2,3
11	DKI JAKARTA	15,8	12,4	11,7	14,3	16,6	14,1
12	JAWA BARAT	23,0	19,6	18,9	16,0	19,0	19,3
13	JAWA TENGAH	1,6	2,9	3,6	7,4	8,1	4,7
14	D.I YOGYAKARTA	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,2
15	JAWA TIMUR	6,3	8,9	6,7	9,5	4,5	7,2
16	BANTEN	7,1	8,7	10,1	4,9	9,6	8,1
17	B A L I	1,5	1,7	1,6	2,8	3,4	2,2
18	NUSA TENGGARA BARAT	1,9	2,4	1,5	0,4	0,9	1,4
19	NUSA TENGGARA TIMUR	0,1	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3
20	KALIMANTAN BARAT	3,4	4,6	2,2	1,8	1,7	2,7
21	KALIMANTAN TENGAH	3,3	3,2	1,4	2,0	2,3	2,4
22	KALIMANTAN SELATAN	1,8	3,3	0,9	0,8	0,4	1,4
23	KALIMANTAN TIMUR	7,5	8,1	3,9	4,0	2,0	5,1
24	KALIMANTAN UTARA	0,4	0,8	0,6	0,5	0,2	0,5
25	SULAWESI UTARA	0,3	0,3	1,3	1,5	1,0	0,9
26	SULAWESI TENGAH	5,2	3,7	5,5	4,8	2,3	4,3
27	SULAWESI SELATAN	1,0	0,8	1,3	2,2	2,1	1,5
28	SULAWESI TENGGARA	0,6	0,5	1,3	2,1	2,3	1,4
29	GORONTALO	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
30	SULAWESI BARAT	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
31	MALUKU	0,0	0,3	0,4	0,7	0,0	0,3
32	MALUKU UTARA	0,3	0,7	1,5	0,7	1,2	0,9
33	PAPUA	4,4	3,1	4,0	6,0	3,9	4,3
34	PAPUA BARAT	0,5	0,9	1,8	0,3	1,0	0,9
	Nasional	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

PDRB Perkapita ADHB Tahun 2014-2018 (Rp. Ribu)

No.	Provinsi	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (Ribu Rupiah)				
		Harga Berlaku				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	ACEH	26.065	25.808	26.852	28.097	29.522
2	SUMATERA UTARA	37.914	41.020	44.392	47.978	51.417
3	SUMATERA BARAT	32.141	34.631	37.285	40.194	42.833
4	RIAU	109.785	102.888	104.861	105.859	110.827
5	JAMBI	43.300	45.580	49.495	54.016	58.365
6	SUMATERA SELATAN	38.585	41.201	43.361	46.315	50.144
7	BENGKULU	24.604	26.846	29.076	31.359	33.827
8	LAMPUNG	28.755	31.154	34.054	36.998	39.864
9	KEP. BANGKA BELITUNG	41.948	44.425	46.402	48.825	50.052
10	KEP. RIAU	94.335	101.149	106.504	109.360	116.581
11	DKI JAKARTA	174.914	195.432	210.075	228.004	248.306
12	JAWA BARAT	30.107	32.648	34.894	37.229	40.306
13	JAWA TENGAH	27.518	29.934	31.962	34.223	36.784
14	DI YOGYAKARTA	25.526	27.572	29.553	31.666	34.152
15	JAWA TIMUR	39.833	43.541	47.492	51.228	55.436
16	BANTEN	36.629	40.091	42.440	45.265	48.457
17	BALI	38.100	42.480	46.211	50.288	54.618
18	NUSA TENGGARA BARAT	17.098	21.852	23.787	24.994	24.707
19	NUSA TENGGARA TIMUR	13.600	14.867	16.094	17.165	18.447
20	KALIMANTAN BARAT	28.062	30.619	33.191	35.984	38.794
21	KALIMANTAN TENGAH	36.842	40.105	43.905	48.296	52.154
22	KALIMANTAN SELATAN	32.600	34.352	36.023	38.638	41.106
23	KALIMANTAN TIMUR	157.400	147.405	145.343	165.652	174.882
24	KALIMANTAN UTARA	95.735	96.150	99.112	111.320	120.126
25	SULAWESI UTARA	33.800	37.787	41.246	44.746	48.118
26	SULAWESI TENGAH	31.875	37.395	41.082	45.157	50.038
27	SULAWESI SELATAN	35.345	39.950	43.817	47.840	52.707
28	SULAWESI TENGGARA	32.116	35.092	38.022	41.279	44.502
29	GORONTALO	22.583	25.143	27.545	29.565	31.832
30	SULAWESI BARAT	23.415	25.728	27.513	29.741	32.124
31	MALUKU	19.100	20.366	21.599	22.859	24.278
32	MALUKU UTARA	21.114	22.918	24.581	26.686	29.610
33	PAPUA BARAT	68.464	72.160	74.585	78.429	84.958
34	PAPUA	43.134	47.726	54.002	57.866	63.404

PDRB Perkapita ADHK Tahun 2014-2018 (Rp. Ribu)

No.	Provinsi	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (Ribu Rupiah) Harga Konstan 2010				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	ACEH	23.129	22.524	22.835	23.363	24.014
2	SUMATERA UTARA	30.477	31.637	32.885	34.184	35.571
3	SUMATERA BARAT	25.983	27.081	28.165	29.311	30.471
4	RIAU	72.391	70.770	70.569	70.755	70.740
5	JAMBI	35.878	36.754	37.729	38.850	40.052
6	SUMATERA SELATAN	30.636	31.549	32.700	34.060	35.670
7	BENGKULU	19.627	20.302	21.040	21.752	22.498
8	LAMPUNG	23.647	24.582	25.569	26.615	27.742
9	KEP. BANGKA BELITUNG	32.860	33.480	34.133	34.935	35.765
10	KEP. RIAU	76.314	78.625	80.296	79.758	81.295
11	DKI JAKARTA	136.312	142.914	149.832	157.637	165.863
12	JAWA BARAT	24.967	25.846	26.924	27.975	29.161
13	JAWA TENGAH	22.819	23.887	24.959	26.089	27.291
14	DI YOGYAKARTA	21.868	22.688	23.566	24.534	25.777
15	JAWA TIMUR	32.703	34.272	35.971	37.724	39.588
16	BANTEN	29.847	30.813	31.782	32.940	34.192
17	BALI	29.669	31.094	32.689	34.133	35.915
18	NUSA TENGGARA BARAT	15.370	18.475	19.306	19.098	18.015
19	NUSA TENGGARA TIMUR	10.742	11.088	11.469	11.863	12.276
20	KALIMANTAN BARAT	22.713	23.457	24.309	25.199	26.108
21	KALIMANTAN TENGAH	30.217	31.619	32.900	34.369	35.560
22	KALIMANTAN SELATAN	27.220	27.787	28.540	29.578	30.628
23	KALIMANTAN TIMUR	133.086	128.603	125.386	126.625	127.390
24	KALIMANTAN UTARA	77.153	76.823	76.635	78.915	80.716
25	SULAWESI UTARA	27.806	29.196	30.680	32.298	33.915
26	SULAWESI TENGAH	25.316	28.779	31.151	32.860	34.419
27	SULAWESI SELATAN	27.749	29.436	31.303	33.234	35.254
28	SULAWESI TENGGARA	27.896	29.203	30.476	31.894	33.286
29	GORONTALO	18.622	19.474	20.427	21.478	22.541
30	SULAWESI BARAT	19.232	20.251	21.068	22.050	22.999
31	MALUKU	14.220	14.740	15.321	15.942	16.612
32	MALUKU UTARA	16.870	17.534	18.177	19.193	20.322
33	PAPUA BARAT	59.143	60.064	61.242	62.164	64.487
34	PAPUA	39.272	41.377	44.342	45.578	48.075

Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK Tahun 2014-2018 (persen)

No.	Provinsi	Pertumbuhan [Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto Harga Konstan 2010				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	ACEH	-0,43	-2,61	1,38	2,31	2,79
2	SUMATERA UTARA	3,88	3,81	3,94	3,95	4,06
3	SUMATERA BARAT	4,53	4,23	4,00	4,07	3,96
4	RIAU	0,13	-2,24	-0,28	0,26	-0,02
5	JAMBI	5,49	2,44	2,65	2,97	3,09
6	SUMATERA SELATAN	3,30	2,98	3,65	4,16	4,73
7	BENGKULU	3,74	3,44	3,63	3,38	3,43
8	LAMPUNG	3,85	3,95	4,01	4,09	4,24
9	KEP. BANGKA BELITUNG	2,43	1,89	1,95	2,35	2,38
10	KEP. RIAU	3,49	3,03	2,12	-0,67	1,93
11	DKI JAKARTA	4,81	4,84	4,84	5,21	5,22
12	JAWA BARAT	3,52	3,52	4,17	3,91	4,24
13	JAWA TENGAH	4,46	4,68	4,49	4,53	4,61
14	DI YOGYAKARTA	3,95	3,75	3,87	4,11	5,07
15	JAWA TIMUR	5,18	4,80	4,96	4,87	4,94
16	BANTEN	3,24	3,24	3,14	3,65	3,80
17	BALI	5,47	4,80	5,13	4,42	5,22
18	NUSA TENGGARA BARAT	3,78	20,20	4,50	-1,08	-5,67
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3,32	3,22	3,44	3,44	3,48
20	KALIMANTAN BARAT	3,37	3,28	3,63	3,66	3,61
21	KALIMANTAN TENGAH	3,81	4,64	4,05	4,47	3,46
22	KALIMANTAN SELATAN	3,01	2,08	2,71	3,64	3,55
23	KALIMANTAN TIMUR	-0,58	-3,37	-2,50	0,99	0,60
24	KALIMANTAN UTARA	4,11	-0,43	-0,24	2,97	2,28
25	SULAWESI UTARA	5,14	5,00	5,08	5,27	5,01
26	SULAWESI TENGAH	3,37	13,68	8,24	5,49	4,74
27	SULAWESI SELATAN	6,39	6,08	6,34	6,17	6,08
28	SULAWESI TENGGARA	4,03	4,68	4,36	4,65	4,36
29	GORONTALO	5,57	4,57	4,90	5,14	4,95
30	SULAWESI BARAT	6,79	5,30	4,04	4,66	4,31
31	MALUKU	4,77	3,66	3,94	4,05	4,20
32	MALUKU UTARA	3,29	3,94	3,67	5,59	5,88
33	PAPUA BARAT	2,71	1,56	1,96	1,51	3,74
34	PAPUA	1,68	5,36	7,17	2,79	5,48

Nilai PDRB ADHB Tahun 2014-2018 (Rp. Miliar)

PROPINSI		ADHB (Rp. Miliar)				
		2014	2015	2016	2017	2018
Sumatera		**2.458.866**	**2.584.134**	**2.781.629**	**2.986.505**	**3.233.250**
01.	Aceh	127.897	129.093	136.844	145.807	155.912
02.	Sumatra Utara	521.955	571.722	626.063	684.275	741.193
03.	Sumatera Barat	164.944	179.952	196.099	213.890	230.529
04.	Riau	679.396	652.762	681.699	704.798	755.274
05.	Jambi	144.814	155.066	171.199	189.868	208.379
06.	Sumatra Selatan	306.422	331.766	353.867	382.886	419.723
07.	Bengkulu	45.390	50.334	55.384	60.658	66.413
08.	Lampung	230.794	252.883	279.418	306.700	333.681
09.	Kep. Bangka Belitung	56.374	60.987	65.048	69.861	73.069
10.	Kepulauan Riau	180.880	199.570	216.008	227.763	249.077
Jawa Bali		**6.286.539**	**6.973.681**	**7.577.317**	**8.235.206**	**8.999.105**
11.	DKI Jakarta	1.762.316	1.989.089	2.159.074	2.365.363	2.599.174
12.	Jawa Barat	1.385.825	1.524.975	1.653.238	1.788.381	1.962.232
13.	Jawa Tengah	922.471	1.010.987	1.087.317	1.172.400	1.268.701
14.	DI Yogyakarta	92.842	101.441	109.962	119.131	129.877
15.	Jawa Timur	1.537.948	1.691.477	1.855.738	2.012.918	2.189.784
16.	Banten	428.740	479.300	517.898	563.463	614.907
17.	Bali	156.396	176.413	194.090	213.550	234.431
Nusa Tenggara		**150.121**	**181.786**	**200.208**	**214.619**	**222.959**
18.	Nusa Tenggara Barat	81.621	105.665	116.465	123.862	123.872
19.	Nusa Tenggara Timur	68.500	76.121	83.743	90.758	99.087
Kalimantan		**936.817**	**950.601**	**994.344**	**1.131.705**	**1.228.885**
20.	Kalimantan Barat	132.345	146.654	161.364	177.491	194.033
21.	Kalimantan Tengah	89.890	100.064	111.967	125.824	138.741
22.	Kalimantan Selatan	127.882	137.056	146.090	159.181	171.936
23.	Kalimantan Timur	527.515	505.105	508.880	592.280	638.117
24.	Kalimantan Utara	59.184	61.722	66.042	76.928	86.059
Sulawesi		**602.222**	**688.305**	**762.290**	**841.362**	**931.896**
25.	Sulawesi Utara	80.668	91.146	100.514	110.121	119.544
26.	Sulawesi Tengah	90.246	107.573	120.030	133.951	150.636
27.	Sulawesi Selatan	298.034	340.390	377.109	415.745	462.342
28.	Sulawesi Tenggara	78.622	87.714	96.995	107.424	118.093
29.	Gorontalo	25.194	28.493	31.698	34.538	37.736
30.	Sulawesi Barat	29.458	32.988	35.945	39.584	43.545
Maluku		**55.699**	**60.984**	**66.205**	**72.154**	**79.562**
31.	LPE Maluku	31.656	34.346	37.054	39.882	43.065
32.	Maluku Utara	24.042	26.638	29.151	32.273	36.498
Papua		**191.511**	**213.195**	**239.840**	**260.736**	**290.304**
33.	Papua Barat	58.181	62.888	66.631	71.791	79.644
34.	Papua	133.330	150.307	173.209	188.945	**210.660**
34 provinsi		**10.681.774**	**11.652.686**	**12.621.833**	**13.742.287**	**14.985.962**

Nilai PDRB ADHK Tahun 2014-2018 (Rp. Miliar)

PROPINSI		ADHK (Rp. Miliar)				
		2014	2015	2016	2017	2018
Sumatera		**1.894.170**	**1.961.112**	**2.044.984**	**2.132.755**	**2.229.524**
01.	Aceh	113.490	112.666	116.374	121.241	126.824
02.	Sumatra Utara	419.573	440.956	463.775	487.531	512.766
03.	Sumatera Barat	133.341	140.719	148.134	155.976	163.995
04.	Riau	447.987	448.992	458.769	471.082	482.087
05.	Jambi	119.991	125.037	130.501	136.557	142.995
06.	Sumatra Selatan	243.298	254.045	266.857	281.571	298.569
07.	Bengkulu	36.207	38.066	40.077	42.074	44.171
08.	Lampung	189.797	199.537	209.794	220.626	232.214
09.	Kep. Bangka Belitung	44.159	45.962	47.848	49.987	52.212
10.	Kepulauan Riau	146.325	155.131	162.853	166.111	173.689
Jawa Bali		**5.100.924**	**5.380.916**	**5.683.016**	**6.002.574**	**6.346.986**
11.	DKI Jakarta	1.373.389	1.454.564	1.539.917	1.635.367	1.736.196
12.	Jawa Barat	1.149.216	1.207.232	1.275.619	1.343.864	1.419.689
13.	Jawa Tengah	764.959	806.765	849.099	893.750	941.283
14.	DI Yogyakarta	79.536	83.474	87.686	92.302	98.027
15.	Jawa Timur	1.262.684	1.331.376	1.405.564	1.482.300	1.563.756
16.	Banten	349.351	368.377	387.835	410.046	433.884
17.	Bali	121.788	129.127	137.296	144.945	154.151
Nusa Tenggara		**127.481**	**146.109**	**154.202**	**157.364**	**156.265**
18.	Nusa Tenggara Barat	73.373	89.338	94.524	94.640	90.323
19.	Nusa Tenggara Timur	54.108	56.771	59.678	62.725	65.941
Kalimantan		**781.344**	**792.093**	**807.896**	**842.968**	**875.936**
20.	Kalimantan Barat	107.115	112.347	118.183	124.294	130.584
21.	Kalimantan Tengah	73.725	78.891	83.900	89.541	94.596
22.	Kalimantan Selatan	106.779	110.863	115.744	121.856	128.106
23.	Kalimantan Timur	446.029	440.676	439.004	452.742	464.823
24.	Kalimantan Utara	47.696	49.316	51.065	54.535	57.826
Sulawesi		**485.290**	**525.042**	**563.958**	**603.214**	**643.348**
25.	Sulawesi Utara	66.361	70.425	74.765	79.485	84.259
26.	Sulawesi Tengah	71.678	82.787	91.015	97.475	103.618
27.	Sulawesi Selatan	233.988	250.803	269.401	288.814	309.244
28.	Sulawesi Tenggara	68.292	72.993	77.746	83.002	88.329
29.	Gorontalo	20.776	22.069	23.507	25.090	26.723
30.	Sulawesi Barat	24.196	25.964	27.525	29.347	31.177
Maluku		**42.776**	**45.240**	**47.841**	**51.025**	**54.515**
31.	LPE Maluku	23.568	24.859	26.284	27.814	29.465
32.	Maluku Utara	19.209	20.380	21.557	23.211	25.050
Papua		**171.651**	**182.658**	**196.936**	**205.725**	**220.182**
33.	Papua Barat	50.260	52.346	54.711	56.903	60.454
34.	Papua	121.391	130.312	142.225	148.823	**159.729**
34 provinsi		**8.603.636**	**9.033.169**	**9.498.833**	**9.995.625**	**10.526.756**

Nilai Share Provinsi Terhadap PDRB ADHB 34 Provinsi Tahun 2014-2018 (persen)

PROPINSI		Share Provinsi (%) terhadap 34 provinsi					rata-rata 2014-2018
		2014	2015	2016	2017	2018	
Sumatera		**23,02**	**22,18**	**22,04**	**21,73**	**21,58**	**22,11**
01.	Aceh	1,20	1,11	1,08	1,06	1,04	1,10
02.	Sumatra Utara	4,89	4,91	4,96	4,98	4,95	4,94
03.	Sumatera Barat	1,54	1,54	1,55	1,56	1,54	1,55
04.	Riau	6,36	5,60	5,40	5,13	5,04	5,51
05.	Jambi	1,36	1,33	1,36	1,38	1,39	1,36
06.	Sumatra Selatan	2,87	2,85	2,80	2,79	2,80	2,82
07.	Bengkulu	0,42	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44
08.	Lampung	2,16	2,17	2,21	2,23	2,23	2,20
09.	Kep. Bangka Belitung	0,53	0,52	0,52	0,51	0,49	0,51
10.	Kepulauan Riau	1,69	1,71	1,71	1,66	1,66	1,69
Jawa Bali		**58,85**	**59,85**	**60,03**	**59,93**	**60,05**	**59,74**
11.	DKI Jakarta	16,50	17,07	17,11	17,21	17,34	17,05
12.	Jawa Barat	12,97	13,09	13,10	13,01	13,09	13,05
13.	Jawa Tengah	8,64	8,68	8,61	8,53	8,47	8,58
14.	DI Yogyakarta	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
15.	Jawa Timur	14,40	14,52	14,70	14,65	14,61	14,58
16.	Banten	4,01	4,11	4,10	4,10	4,10	4,09
17.	Bali	1,46	1,51	1,54	1,55	1,56	1,53
Nusa Tenggara		**1,41**	**1,56**	**1,59**	**1,56**	**1,49**	**1,52**
18.	Nusa Tenggara Barat	0,76	0,91	0,92	0,90	0,83	0,86
19.	Nusa Tenggara Timur	0,64	0,65	0,66	0,66	0,66	0,66
Kalimantan		**8,77**	**8,16**	**7,88**	**8,24**	**8,20**	**8,25**
20.	Kalimantan Barat	1,24	1,26	1,28	1,29	1,29	1,27
21.	Kalimantan Tengah	0,84	0,86	0,89	0,92	0,93	0,89
22.	Kalimantan Selatan	1,20	1,18	1,16	1,16	1,15	1,17
23.	Kalimantan Timur	4,94	4,33	4,03	4,31	4,26	4,37
24.	Kalimantan Utara	0,55	0,53	0,52	0,56	0,57	0,55
Sulawesi		**5,64**	**5,91**	**6,04**	**6,12**	**6,22**	**5,99**
25.	Sulawesi Utara	0,76	0,78	0,80	0,80	0,80	0,79
26.	Sulawesi Tengah	0,84	0,92	0,95	0,97	1,01	0,94
27.	Sulawesi Selatan	2,79	2,92	2,99	3,03	3,09	2,96
28.	Sulawesi Tenggara	0,74	0,75	0,77	0,78	0,79	0,77
29.	Gorontalo	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25
30.	Sulawesi Barat	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	0,28
Maluku		**0,52**	**0,52**	**0,52**	**0,53**	**0,53**	**0,53**
31.	LPE Maluku	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
32.	Maluku Utara	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,23
Papua		**1,79**	**1,83**	**1,90**	**1,90**	**1,94**	**1,87**
33.	Papua Barat	0,54	0,54	0,53	0,52	0,53	0,53
34.	Papua	1,25	1,29	1,37	1,37	1,41	1,34
34 provinsi		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Nilai Share Provinsi Terhadap PDRB ADHB Masing-Masing Pulau Tahun 2014-2018 (persen)

PROPINSI		Share Provinsi % terhadap Masing-Masing Pulau					rata-rata 2014-2018
		2014	2015	2016	2017	2018	
Sumatera		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
01.	Aceh	5,20	5,00	4,92	4,88	4,82	4,96
02.	Sumatra Utara	21,23	22,12	22,51	22,91	22,92	22,34
03.	Sumatera Barat	6,71	6,96	7,05	7,16	7,13	7,00
04.	Riau	27,63	25,26	24,51	23,60	23,36	24,87
05.	Jambi	5,89	6,00	6,15	6,36	6,44	6,17
06.	Sumatra Selatan	12,46	12,84	12,72	12,82	12,98	12,76
07.	Bengkulu	1,85	1,95	1,99	2,03	2,05	1,97
08.	Lampung	9,39	9,79	10,05	10,27	10,32	9,96
09.	Kep. Bangka Belitung	2,29	2,36	2,34	2,34	2,26	2,32
10.	Kepulauan Riau	7,36	7,72	7,77	7,63	7,70	7,63
Jawa Bali		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
11.	DKI Jakarta	28,88	26,80	26,84	27,03	27,24	27,36
12.	Jawa Barat	21,80	22,55	22,64	22,44	22,39	22,36
13.	Jawa Tengah	14,10	15,32	15,04	14,99	14,89	14,87
14.	DI Yogyakarta	1,44	1,59	1,57	1,55	1,54	1,54
15.	Jawa Timur	24,33	24,62	24,69	24,74	24,69	24,62
16.	Banten	6,83	6,78	6,85	6,85	6,83	6,83
17.	Bali	2,61	2,33	2,36	2,40	2,41	2,42
Nusa Tenggara		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
18.	Nusa Tenggara Barat	54,37	58,13	58,17	57,71	55,56	56,79
19.	Nusa Tenggara Timur	45,63	41,87	41,83	42,29	44,44	43,21
Kalimantan		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
20.	Kalimantan Barat	14,13	15,43	16,23	15,68	15,79	15,45
21.	Kalimantan Tengah	9,60	10,53	11,26	11,12	11,29	10,76
22.	Kalimantan Selatan	13,65	14,42	14,69	14,07	13,99	14,16
23.	Kalimantan Timur	56,31	53,14	51,18	52,34	51,93	52,98
24.	Kalimantan Utara	6,32	6,49	6,64	6,80	7,00	6,65
Sulawesi		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
25.	Sulawesi Utara	13,40	13,24	13,19	13,09	12,83	13,15
26.	Sulawesi Tengah	14,99	15,63	15,75	15,92	16,16	15,69
27.	Sulawesi Selatan	49,49	49,45	49,47	49,41	49,61	49,49
28.	Sulawesi Tenggara	13,06	12,74	12,72	12,77	12,67	12,79
29.	Gorontalo	4,18	4,14	4,16	4,11	4,05	4,13
30.	Sulawesi Barat	4,89	4,79	4,72	4,70	4,67	4,76
Maluku		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31.	LPE Maluku	56,84	56,32	55,97	55,27	54,13	55,15
32.	Maluku Utara	43,16	43,68	44,03	44,73	45,87	44,85
Papua		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
33.	Papua Barat	30,38	29,50	27,78	27,53	27,43	27,18
34.	Papua	69,62	70,50	72,22	72,47	72,57	72,82

Nilai Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi ADHK Tahun 2014-2018 (persen)

PROPINSI		Pertumbuhan (%)					rata-rata 2014-2018
		2014	2015	2016	2017	2018	
Sumatera		**4,60**	**3,53**	**4,28**	**4,29**	**4,54**	**4,25**
01.	Aceh	1,55	-0,73	3,29	4,18	4,61	2,58
02.	Sumatra Utara	5,23	5,10	5,18	5,12	5,18	5,16
03.	Sumatera Barat	5,88	5,53	5,27	5,29	5,14	5,42
04.	Riau	2,71	0,22	2,18	2,68	2,34	2,03
05.	Jambi	7,36	4,21	4,37	4,64	4,71	5,06
06.	Sumatra Selatan	4,79	4,42	5,04	5,51	6,04	5,16
07.	Bengkulu	5,48	5,13	5,28	4,98	4,99	5,17
08.	Lampung	5,08	5,13	5,14	5,16	5,25	5,15
09.	Kep. Bangka Belitung	4,67	4,08	4,10	4,47	4,45	4,35
10.	Kepulauan Riau	6,60	6,02	4,98	2,00	4,56	4,83
Jawa Bali		**5,60**	**5,49**	**5,61**	**5,62**	**5,74**	**5,61**
11.	DKI Jakarta	5,91	5,91	5,87	6,20	6,17	6,01
12.	Jawa Barat	5,09	5,05	5,66	5,35	5,64	5,36
13.	Jawa Tengah	5,27	5,47	5,25	5,26	5,32	5,31
14.	DI Yogyakarta	5,17	4,95	5,05	5,26	6,20	5,33
15.	Jawa Timur	5,86	5,44	5,57	5,46	5,50	5,57
16.	Banten	5,51	5,45	5,28	5,73	5,81	5,56
17.	Bali	6,73	6,03	6,33	5,57	6,35	6,20
Nusa Tenggara		**5,12**	**14,61**	**5,54**	**2,05**	**-0,70**	**5,32**
18.	Nusa Tenggara Barat	5,17	21,76	5,81	0,12	-4,56	5,66
19.	Nusa Tenggara Timur	5,05	4,92	5,12	5,11	5,13	5,07
Kalimantan		**3,37**	**1,38**	**2,00**	**4,34**	**3,91**	**3,00**
20.	Kalimantan Barat	5,03	4,88	5,20	5,17	5,06	5,07
21.	Kalimantan Tengah	6,21	7,01	6,35	6,72	5,64	6,39
22.	Kalimantan Selatan	4,84	3,82	4,40	5,28	5,13	4,70
23.	Kalimantan Timur	1,71	-1,20	-0,38	3,13	2,67	1,19
24.	Kalimantan Utara	8,18	3,40	3,55	6,79	6,04	5,59
Sulawesi		**6,87**	**8,19**	**7,41**	**6,96**	**6,65**	**7,22**
25.	Sulawesi Utara	6,31	6,12	6,16	6,31	6,01	6,18
26.	Sulawesi Tengah	5,07	15,50	9,94	7,10	6,30	8,78
27.	Sulawesi Selatan	7,54	7,19	7,42	7,21	7,07	7,28
28.	Sulawesi Tenggara	6,26	6,88	6,51	6,76	6,42	6,57
29.	Gorontalo	7,27	6,22	6,52	6,73	6,51	6,65
30.	Sulawesi Barat	8,86	7,31	6,01	6,62	6,23	7,01
Maluku		**6,12**	**5,76**	**5,75**	**6,66**	**6,84**	**6,22**
31.	LPE Maluku	6,64	5,48	5,73	5,82	5,94	5,92
32.	Maluku Utara	5,49	6,10	5,77	7,67	7,92	6,59
Papua		**4,15**	**6,41**	**7,82**	**4,46**	**7,03**	**5,97**
33.	Papua Barat	5,38	4,15	4,52	4,01	6,24	4,86
34.	Papua	3,65	7,35	9,14	4,64	7,33	6,42
Nasional		**5,01**	**4,88**	**5,02**	**5,07**	**5,17**	**5,03**

PDRB ADHK Merdasarkan Pengeluaran Tahun 2014 (Rp. Juta)

No.	Provinsi	ADHK (Rp. Juta)								PDRB
		Konsumsi Rumah Tangga	Konsumsi LNPRT	Konsumsi Pemerintah	Perubahan Inventori	PMTB	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	Ekspor Barang dan Jasa	Net Ekspor Antar Provinsi	
1	ACEH	62.326.264	2.058.708	23.097.244	33.991	36.571.543	1.567.260	4.941.688	13.971.817	113.490.359
2	SUMATERA UTARA	215.720.143	4.533.948	30.308.581	9.661.925	124.148.573	55.737.412	94.037.909	3.100.358	419.573.309
3	SUMATERA BARAT	70.045.166	1.510.560	16.097.884	135.397	39.883.150	8.872.591	19.921.710	5.380.439	133.340.836
4	RIAU	140.479.393	2.027.080	17.795.785	11.199.138	129.639.728	20.048.166	208.785.665	41.891.841	447.986.782
5	JAMBI	52.923.998	626.015	9.800.659	1.468.417	28.117.165	2.412.877	34.082.269	4.614.201	119.991.445
6	SUMATERA SELATAN	156.430.722	3.626.410	18.867.672	1.614.934	93.404.414	9.088.146	43.339.731	64.897.966	243.297.772
7	BENGKULU	22.795.158	1.026.965	7.068.105	756.549	16.014.028	402.712	2.889.038	13.939.984	36.207.146
8	LAMPUNG	112.289.849	2.353.846	15.113.038	222.691	58.841.761	35.145.781	38.181.246	2.059.159	189.797.491
9	KEP. BANGKA BELITUNG	22.396.670	261.768	4.470.518	885.693	9.408.028	1.038.976	27.201.531	19.425.792	44.159.440
10	KEP. RIAU	53.333.413	325.270	8.197.285	2.570.398	58.731.612	111.208.262	106.382.461	27.993.057	146.325.235
11	DKI JAKARTA	807.875.420	28.360.842	172.921.683	5.749.784	637.777.698	801.138.804	230.043.956	291.798.551	1.373.389.129
12	JAWA BARAT	723.018.268	7.726.701	61.013.469	51.367.730	287.389.550	149.533.866	269.833.687	101.599.482	1.149.216.057
13	JAWA TENGAH	465.234.026	8.299.374	56.643.275	16.261.492	220.772.866	118.498.481	68.523.198	47.723.401	764.959.151
14	DI YOGYAKARTA	47.923.893	2.317.123	12.056.063	930.599	21.358.622	3.228.540	4.278.248	6.099.926	79.536.082
15	JAWA TIMUR	781.086.597	13.574.967	70.049.396	35.268.132	344.715.564	269.540.307	194.635.845	92.894.300	1.262.684.495
16	BANTEN	201.716.644	1.799.086	14.879.483	3.325.710	103.115.307	243.940.093	108.932.940	159.522.151	349.351.228
17	BALI	63.893.036	1.500.332	12.138.660	792.127	38.800.143	10.276.551	43.139.801	28.199.972	121.787.575
18	NUSA TENGGARA BARAT	51.809.238	1.128.598	11.112.209	395.320	22.950.229	2.231.650	4.048.769	15.839.748	73.372.964
19	NUSA TENGGARA TIMUR	42.109.358	1.961.574	15.528.915	794.505	22.195.978	418.543	1.009.833	29.073.646	54.107.974
20	KALIMANTAN BARAT	57.374.174	1.146.225	13.555.230	1.305.291	36.145.685	6.273.626	8.689.258	4.827.274	107.114.963
21	KALIMANTAN TENGAH	30.406.951	956.338	10.797.662	887.640	31.910.246	837.019	14.583.983	14.981.280	73.724.523
22	KALIMANTAN SELATAN	49.351.085	919.307	12.196.050	237.050	23.375.035	25.388.613	85.735.314	39.645.829	106.779.398
23	KALIMANTAN TIMUR	63.242.817	1.634.574	17.562.259	5.836.965	117.106.156	80.791.307	299.360.400	22.077.185	446.029.049
24	KALIMANTAN UTARA	8.230.137	342.581	4.697.742	640.533	14.043.441	1.125.816	15.662.221	5.205.516	47.696.355
25	SULAWESI UTARA	31.658.844	1.427.683	11.537.630	48.033	23.801.172	2.382.598	12.396.746	12.126.754	66.360.757
26	SULAWESI TENGAH	40.095.675	1.401.352	9.870.284	1.136.331	30.720.125	411.802	3.915.543	15.049.978	71.677.531
27	SULAWESI SELATAN	127.669.325	2.917.635	23.505.017	- 971.162	89.710.700	7.973.671	18.071.268	18.941.063	233.988.051
28	SULAWESI TENGGARA	33.220.138	781.871	10.313.593	496.889	28.742.490	5.795.397	4.066.264	3.534.064	68.291.785
29	GORONTALO	12.590.344	144.803	4.555.445	634.510	6.722.079	562.454	177.790	3.486.714	20.775.803
30	SULAWESI BARAT	12.651.767	194.453	3.927.979	263.080	6.726.598	9.554	2.532.784	2.091.453	24.195.655
31	MALUKU	15.438.619	546.127	9.378.997	239.029	7.344.176	2.418.482	2.201.616	9.162.348	23.567.734
32	MALUKU UTARA	11.510.349	239.559	6.014.046	- 183.670	5.251.233	155.218	311.034	3.778.572	19.208.761
33	PAPUA BARAT	12.696.223	449.426	8.791.446	- 1.369.361	9.020.799	590.162	30.710.167	9.448.630	50.259.908
34	PAPUA	50.506.760	1.995.573	23.987.386	- 183.545	33.168.026	11.190.905	17.091.171	6.016.768	121.391.234
	34 PROVINSI	**4.650.050.463**	**100.116.673**	**747.850.689**	**152.452.144**	**2.757.623.921**	**1.990.235.642**	**2.019.715.087**	**166.062.638**	**8.603.635.973**

PDRB ADHK Merdasarkan Pengeluaran Tahun 2015 (Rp. juta)

No.	Provinsi	ADHK (Rp. Juta)								PDRB
		Konsumsi Rumah Tangga	Konsumsi LNPRT	Konsumsi Pemerintah	Perubahan Inventori	PMTB	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	Ekspor Barang dan Jasa	Net Ekspor Antar Provinsi	
1	ACEH	64.201.370	1.969.098	23.960.169	- 88.310	37.892.086	2.470.910	1.749.921	14.547.892	112.665.532
2	SUMATERA UTARA	225.907.466	4.515.277	31.050.201	10.958.434	128.952.212	48.957.031	91.878.248	3.348.954	440.955.852
3	SUMATERA BARAT	73.028.731	1.561.830	17.764.921	501.553	41.609.412	8.762.256	20.529.972	5.514.688	140.719.474
4	RIAU	148.856.386	2.032.937	18.419.223	3.663.056	134.850.260	18.661.536	185.191.529	25.359.890	448.991.964
5	JAMBI	55.135.389	653.591	9.842.156	1.299.006	27.834.649	1.542.354	32.974.655	1.159.694	125.037.398
6	SUMATERA SELATAN	163.296.765	3.840.042	19.467.478	943.064	93.638.158	19.895.741	38.244.820	45.489.710	254.044.876
7	BENGKULU	24.007.102	995.405	7.582.735	790.247	16.572.904	275.692	2.475.676	14.082.371	38.066.006
8	LAMPUNG	118.564.095	2.519.690	16.892.813	276.249	62.035.820	25.364.939	43.020.829	18.407.640	199.536.917
9	KEP. BANGKA BELITUNG	23.627.484	280.836	4.668.367	880.047	9.823.533	1.107.711	21.882.041	14.092.292	45.962.304
10	KEP. RIAU	57.123.966	349.470	8.463.883	697.883	60.637.959	108.542.712	132.424.681	3.976.221	155.131.351
11	DKI JAKARTA	850.789.785	27.040.692	174.686.722	5.602.368	654.605.156	709.942.439	227.786.927	223.994.637	1.454.563.847
12	JAWA BARAT	759.652.857	7.098.776	65.955.833	42.887.061	299.342.638	145.837.894	272.010.778	93.877.707	1.207.232.342
13	JAWA TENGAH	485.947.262	8.047.359	58.117.816	5.076.120	232.335.202	99.894.366	68.716.856	48.418.843	806.765.092
14	DI YOGYAKARTA	50.193.386	2.384.374	12.719.134	974.645	22.286.615	3.728.749	4.416.252	5.771.205	83.474.452
15	JAWA TIMUR	808.699.299	13.419.207	71.636.305	30.384.493	364.831.010	240.955.458	190.037.056	93.324.187	1.331.376.099
16	BANTEN	212.650.567	1.869.878	15.604.964	1.145.827	109.012.807	239.292.531	102.593.389	164.792.302	368.377.203
17	BALI	68.660.365	1.547.867	12.934.622	176.190	41.397.444	9.157.239	45.736.990	32.169.676	129.126.562
18	NUSA TENGGARA BARAT	53.385.826	1.182.649	11.321.417	222.190	25.615.716	2.834.461	15.930.942	15.486.293	89.337.986
19	NUSA TENGGARA TIMUR	44.379.087	2.049.607	16.608.100	673.542	24.832.317	188.368	1.330.767	32.914.259	56.770.793
20	KALIMANTAN BARAT	60.036.088	1.185.979	14.609.189	1.355.602	38.205.249	7.571.059	8.377.842	3.852.135	112.346.755
21	KALIMANTAN TENGAH	31.860.907	1.024.479	11.930.661	996.366	34.049.499	576.839	13.319.666	13.713.771	78.890.968
22	KALIMANTAN SELATAN	51.730.775	975.117	12.883.380	67.327	24.622.972	18.133.358	78.672.207	39.955.304	110.863.117
23	KALIMANTAN TIMUR	64.164.136	1.770.226	16.697.099	3.742.191	115.380.245	83.607.147	251.249.527	71.280.080	440.676.356
24	KALIMANTAN UTARA	8.500.899	367.577	4.221.042	763.471	15.246.053	848.509	12.459.992	8.605.220	49.315.745
25	SULAWESI UTARA	33.676.774	1.431.274	12.684.033	17.638	26.067.779	2.361.562	10.945.881	12.036.487	70.425.330
26	SULAWESI TENGAH	41.731.272	1.482.859	10.716.218	2.379.699	35.082.328	1.571.705	8.131.153	15.164.623	82.787.202
27	SULAWESI SELATAN	134.421.201	2.950.591	25.407.421	4.659.781	96.963.272	10.240.267	16.703.582	20.062.588	250.802.993
28	SULAWESI TENGGARA	34.916.641	762.377	10.773.075	328.310	29.956.179	5.291.627	3.201.950	1.653.578	72.993.328
29	GORONTALO	13.382.972	156.047	4.842.404	383.448	7.317.380	1.183.697	372.339	3.202.090	22.068.803
30	SULAWESI BARAT	13.290.329	191.735	4.364.746	92.359	7.182.868	10.394	3.699.210	2.846.420	25.964.432
31	MALUKU	16.615.291	574.114	10.184.213	124.336	7.619.588	2.539.039	2.213.127	9.932.432	24.859.197
32	MALUKU UTARA	11.910.964	249.122	6.355.941	- 234.610	5.786.402	717.313	146.494	3.116.697	20.380.304
33	PAPUA BARAT	13.413.479	442.625	9.174.898	961.255	10.008.944	499.428	35.728.089	16.883.376	52.346.486
34	PAPUA	53.590.758	2.113.022	25.220.754	132.626	35.524.778	8.896.566	23.736.758	1.110.525	130.311.605
	34 PROVINSI	**4.871.349.674**	**99.035.730**	**777.761.930**	**122.833.461**	**2.877.119.432**	**1.831.460.894**	**1.967.890.145**	**148.639.191**	**9.033.168.670**

PDRB ADHK Merdasarkan Pengeluaran Tahun 2016 (Rp. juta)

No.	Provinsi	ADHK (Rp. juta)								PDRB
		Konsumsi Rumah Tangga	Konsumsi LNPRT	Konsumsi Pemerintah	Perubahan Inventori	PMTB	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	Ekspor Barang dan Jasa	Net Ekspor Antar Provinsi	
1	ACEH	66.335.057	2.129.276	19.930.251	28.661	40.598.055	1.866.018	1.097.962	11.878.944	116.374.300
2	SUMATERA UTARA	237.147.363	4.683.867	30.933.127	7.797.442	135.207.978	47.906.820	87.694.352	8.218.155	463.775.465
3	SUMATERA BARAT	76.279.873	1.634.841	17.768.113	882.222	44.221.669	6.164.537	18.179.768	4.667.705	148.134.244
4	RIAU	156.857.835	2.086.725	18.383.131	4.196.836	139.706.389	20.899.563	161.767.684	3.329.698	458.769.340
5	JAMBI	57.609.585	668.924	9.754.410	1.256.629	29.038.987	1.574.622	28.727.736	5.019.483	130.501.132
6	SUMATERA SELATAN	170.532.255	4.078.286	18.559.483	121.259	101.309.897	13.334.859	33.010.898	47.419.818	266.857.401
7	BENGKULU	25.403.929	1.054.517	7.752.625	704.713	17.404.345	145.399	2.497.978	14.596.163	40.076.544
8	LAMPUNG	125.342.981	2.659.905	17.473.048	421.891	67.779.396	25.385.717	35.732.200	14.229.975	209.793.728
9	KEP. BANGKA BELITUNG	25.027.249	302.278	4.868.523	509.575	10.450.945	2.091.352	19.416.749	10.635.595	47.848.372
10	KEP. RIAU	61.001.826	342.902	8.845.305	432.763	62.584.780	105.541.732	131.745.460	3.441.735	162.853.039
11	DKI JAKARTA	897.959.029	30.107.389	176.991.679	- 2.469.062	664.738.687	695.046.540	227.542.943	240.092.757	1.539.916.881
12	JAWA BARAT	800.012.097	7.487.436	66.093.153	44.598.377	313.083.696	153.437.741	261.381.265	63.599.043	1.275.619.241
13	JAWA TENGAH	508.104.938	8.498.966	57.782.238	7.576.171	246.247.089	95.528.922	66.644.885	49.773.989	849.099.355
14	DI YOGYAKARTA	52.619.164	2.362.344	12.949.746	1.045.164	23.616.948	4.492.511	4.400.889	4.815.934	87.685.810
15	JAWA TIMUR	845.870.400	14.206.301	65.239.538	17.664.436	386.709.403	241.000.486	209.023.111	107.850.809	1.405.563.511
16	BANTEN	224.111.971	1.948.243	16.206.294	109.301	115.877.264	218.438.495	103.075.117	144.945.393	387.835.089
17	BALI	73.229.889	1.680.651	13.756.968	224.558	45.030.742	11.369.063	52.314.230	37.571.530	137.296.445
18	NUSA TENGGARA BARAT	54.328.121	1.243.292	11.457.581	376.693	27.709.645	2.537.080	18.514.145	16.568.108	94.524.290
19	NUSA TENGGARA TIMUR	46.188.411	2.057.915	16.686.034	297.675	28.741.681	199.500	1.256.663	35.350.867	59.678.012
20	KALIMANTAN BARAT	63.143.293	1.275.851	13.606.888	875.217	38.402.217	6.075.479	9.253.507	2.298.221	118.183.273
21	KALIMANTAN TENGAH	33.365.646	1.097.140	11.652.262	1.040.272	35.835.840	897.021	12.529.251	10.723.151	83.900.239
22	KALIMANTAN SELATAN	54.210.376	1.031.347	12.894.554	- 644.417	25.455.834	13.190.330	78.708.239	42.722.030	115.743.573
23	KALIMANTAN TIMUR	65.167.537	1.698.700	14.522.269	1.302.838	108.405.553	72.988.235	226.417.675	94.477.496	439.003.832
24	KALIMANTAN UTARA	8.734.845	367.433	3.947.168	363.035	16.317.819	765.073	12.644.607	9.454.903	51.064.737
25	SULAWESI UTARA	35.783.164	1.499.381	12.785.761	7.872	27.710.484	3.034.335	11.170.929	11.158.596	74.764.660
26	SULAWESI TENGAH	44.301.413	1.543.496	10.700.327	3.142.407	39.964.673	12.272.821	21.002.828	17.367.759	91.014.565
27	SULAWESI SELATAN	141.791.483	3.046.762	25.066.639	3.330.640	103.857.188	10.023.623	13.095.029	10.762.803	269.401.313
28	SULAWESI TENGGARA	37.073.444	796.487	11.059.613	387.748	32.248.519	6.253.747	2.998.983	565.534	77.745.512
29	GORONTALO	14.291.854	169.076	4.949.584	393.426	7.721.289	335.087	81.390	3.764.324	23.507.209
30	SULAWESI BARAT	13.966.446	201.244	4.622.930	- 33.251	7.984.376	274.029	3.696.554	2.639.504	27.524.767
31	MALUKU	17.597.739	621.911	10.446.298	129.249	8.177.012	2.518.555	2.174.295	10.343.721	26.284.228
32	MALUKU UTARA	12.529.727	261.923	6.428.666	165.497	6.414.637	2.418.133	432.626	2.258.263	21.556.680
33	PAPUA BARAT	14.312.318	464.520	9.286.843	1.929.564	10.472.305	1.118.481	30.274.095	10.909.881	54.711.282
34	PAPUA	56.722.703	2.250.722	25.602.901	163.602	37.824.227	9.309.077	25.377.054	3.592.800	142.224.931
	34 PROVINSI	**5.116.953.959**	**105.560.052**	**769.003.950**	**98.329.004**	**3.006.849.567**	**1.788.434.984**	**1.913.881.096**	**276.690.356**	**9.498.833.001**

PDRB ADHK Merdasarkan Pengeluaran Tahun 2017 (Rp. juta)

No.	Provinsi	ADHK (Rp. juta)								PDRB
		Konsumsi Rumah Tangga	Konsumsi LNPRT	Konsumsi Pemerintah	Perubahan Inventori	PMTB	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	Ekspor Barang dan Jasa	Net Ekspor Antar Provinsi	
		2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
1	ACEH	68.426.847	2.300.610	20.665.697	- 82.506	39.990.161	1.895.664	2.183.251	10.347.418	121.240.979
2	SUMATERA UTARA	249.298.156	4.836.360	32.714.160	6.888.384	143.203.726	52.920.097	102.004.000	1.506.543	487.531.232
3	SUMATERA BARAT	79.928.561	1.702.688	17.679.414	101.774	46.100.247	6.850.603	21.184.886	3.870.475	155.976.492
4	RIAU	164.001.805	2.181.902	18.507.087	2.958.094	144.910.519	26.589.204	169.959.823	4.848.312	471.081.714
5	JAMBI	60.166.063	686.559	10.232.582	772.873	30.127.534	926.304	34.858.555	638.844	136.556.706
6	SUMATERA SELATAN	175.670.775	4.202.878	20.258.495	- 224.009	108.966.465	7.541.260	59.164.539	78.926.870	281.571.013
7	BENGKULU	26.819.258	1.105.045	7.962.152	662.232	18.363.248	257.841	3.784.883	16.365.461	42.073.516
8	LAMPUNG	132.593.855	2.957.422	17.515.096	681.515	73.045.898	35.726.950	41.375.597	11.816.866	220.625.566
9	KEP. BANGKA BELITUNG	26.300.278	319.480	5.030.740	341.167	11.111.340	1.414.984	25.592.304	17.293.477	49.986.847
10	KEP. RIAU	64.949.868	360.347	8.906.542	255.116	63.509.216	115.567.718	141.707.903	1.990.082	166.111.356
11	DKI JAKARTA	948.944.832	33.754.116	182.530.971	14.188.968	704.826.807	767.498.882	219.850.221	298.769.548	1.635.366.581
12	JAWA BARAT	836.915.019	7.844.282	70.025.434	42.304.730	332.750.607	142.827.182	279.390.010	82.538.468	1.343.864.432
13	JAWA TENGAH	531.583.770	8.875.110	59.554.139	7.952.833	264.716.106	104.677.126	75.670.848	50.074.758	893.750.437
14	DI YOGYAKARTA	55.364.064	2.589.250	13.104.559	1.066.314	24.791.862	4.905.222	4.808.527	4.517.332	92.302.022
15	JAWA TIMUR	884.011.658	14.540.177	67.574.946	18.024.036	410.621.543	259.692.917	198.162.967	149.057.168	1.482.299.577
16	BANTEN	235.491.156	2.012.090	17.064.488	103.131	126.206.252	241.918.399	116.616.152	154.471.053	410.045.924
17	BALI	76.174.700	1.746.822	14.483.454	239.278	46.623.268	13.317.177	56.024.959	37.030.613	144.944.692
18	NUSA TENGGARA BARAT	55.309.565	1.319.662	12.051.869	384.014	28.526.821	2.573.732	13.239.097	13.617.754	94.639.544
19	NUSA TENGGARA TIMUR	48.369.641	2.199.034	17.721.103	356.129	32.479.914	827.907	1.566.743	39.139.937	62.724.720
20	KALIMANTAN BARAT	65.872.652	1.413.065	14.404.300	- 1.786.179	39.297.728	5.955.497	13.213.813	2.165.523	124.294.359
21	KALIMANTAN TENGAH	34.853.394	1.175.476	12.094.024	844.037	37.275.022	852.197	20.079.093	15.927.648	89.541.202
22	KALIMANTAN SELATAN	56.822.277	1.088.863	13.025.994	292.846	26.551.068	17.308.581	86.057.573	44.674.285	121.855.756
23	KALIMANTAN TIMUR	66.777.742	1.781.779	12.759.052	1.096.366	111.386.665	74.817.836	232.187.148	101.570.992	452.741.908
24	KALIMANTAN UTARA	8.989.269	404.849	3.556.783	305.558	16.969.655	832.438	13.446.017	11.694.813	54.534.507
25	SULAWESI UTARA	37.390.799	1.583.839	13.516.032	8.101	29.718.183	3.141.135	11.523.185	11.113.530	79.485.474
26	SULAWESI TENGAH	47.081.639	1.680.712	11.172.918	1.490.761	41.367.172	13.586.230	37.271.604	29.003.717	97.474.859
27	SULAWESI SELATAN	150.507.106	3.254.763	25.746.955	2.154.892	112.387.272	10.327.251	12.948.139	7.857.705	288.814.171
28	SULAWESI TENGGARA	39.341.255	873.666	11.752.103	1.564.769	35.067.203	9.754.140	4.793.577	636.608	83.001.823
29	GORONTALO	15.268.541	184.289	5.177.148	429.241	7.957.558	104.485	52.430	3.874.378	25.090.345
30	SULAWESI BARAT	14.632.822	210.697	4.827.809	54.773	8.648.863	172.298	3.819.762	2.675.232	29.347.194
31	MALUKU	18.552.830	652.150	10.679.333	136.898	8.679.359	2.704.970	2.233.598	10.415.237	27.813.962
32	MALUKU UTARA	13.169.867	282.835	6.865.637	- 325.524	7.158.016	1.723.059	3.540.977	5.757.885	23.210.865
33	PAPUA BARAT	15.264.464	498.236	9.315.310	3.075.896	10.752.873	597.086	28.211.984	9.619.055	56.902.622
34	PAPUA	59.802.401	2.474.773	26.411.246	40.538	39.870.096	5.955.440	24.016.292	2.162.609	148.822.516
	34 PROVINSI	**5.364.646.931**	**113.093.825**	**794.887.573**	**106.357.045**	**3.183.958.267**	**1.935.761.810**	**2.060.540.456**	**307.902.624**	**9.995.624.911**

PDRB ADHK Merdasarkan Pengeluaran Tahun 2018 (Rp. juta)

No.	Provinsi	ADHK (Rp. juta)								PDRB
		Konsumsi Rumah Tangga	Konsumsi LNPRT	Konsumsi Pemerintah	Perubahan Inventori	PMTB	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	Ekspor Barang dan Jasa	Net Ekspor Antar Provinsi	
1	ACEH	70.638.321	2.395.445	20.944.657	- 1.154	41.421.159	1.762.604	3.296.782	10.108.114	126.824.491
2	SUMATERA UTARA	263.925.549	5.386.840	35.713.421	8.171.620	157.883.636	66.158.246	105.988.755	1.854.054	512.765.628
3	SUMATERA BARAT	83.687.079	1.813.993	18.498.411	- 7.926	47.616.932	6.885.643	18.208.503	1.063.920	163.995.268
4	RIAU	169.431.228	2.383.634	18.588.599	2.442.898	151.787.837	26.627.395	169.469.072	5.388.656	482.087.216
5	JAMBI	62.653.113	785.469	10.689.630	896.762	30.765.991	1.082.915	38.156.508	130.722	142.995.280
6	SUMATERA SELATAN	183.420.980	4.563.101	21.604.627	- 987.233	111.963.371	11.618.219	59.589.475	70.026.475	298.509.628
7	BENGKULU	28.152.286	1.193.806	8.397.901	315.703	19.351.883	967.065	3.663.784	15.937.138	44.171.161
8	LAMPUNG	140.121.945	3.425.766	18.013.804	714.139	79.650.772	35.757.469	40.207.991	14.162.668	232.214.280
9	KEP. BANGKA BELITUNG	27.794.139	345.741	5.119.335	389.331	11.779.865	2.007.892	25.021.253	16.229.685	52.212.088
10	KEP. RIAU	68.274.044	396.396	9.086.327	378.450	69.708.122	133.216.876	151.483.820	7.578.851	173.689.134
11	DKI JAKARTA	1.006.120.818	36.569.818	212.553.509	30.413.613	737.730.297	848.664.329	229.814.868	331.657.026	1.736.195.620
12	JAWA BARAT	878.991.272	9.129.247	72.683.995	42.865.504	352.312.422	146.000.689	298.137.108	88.429.744	1.419.689.116
13	JAWA TENGAH	556.540.858	9.551.014	61.329.149	8.423.390	285.045.113	138.816.756	84.767.419	74.443.091	941.283.278
14	DI YOGYAKARTA	57.552.317	2.657.427	13.559.566	1.104.088	27.313.862	5.210.391	5.424.803	4.375.109	98.026.564
15	JAWA TIMUR	926.783.859	15.494.991	70.952.281	18.261.802	435.569.300	278.822.072	203.049.670	172.466.537	1.563.756.369
16	BANTEN	247.893.295	2.148.259	18.282.275	112.634	135.188.334	249.089.914	124.207.961	155.141.474	433.884.318
17	BALI	79.987.169	1.864.930	14.929.130	246.511	50.837.129	16.568.491	59.638.401	36.783.800	154.150.979
18	NUSA TENGGARA BARAT	56.510.111	1.457.369	12.176.372	329.617	30.007.146	3.223.142	6.574.059	13.508.112	90.323.420
19	NUSA TENGGARA TIMUR	50.523.143	2.413.710	18.689.331	529.786	33.345.400	691.079	1.274.343	40.143.220	65.941.414
20	KALIMANTAN BARAT	69.588.955	1.549.802	14.955.013	1.115.403	40.404.310	7.047.562	13.428.498	3.410.326	130.584.092
21	KALIMANTAN TENGAH	36.477.557	1.296.947	12.591.711	851.595	39.410.540	2.263.201	20.446.250	14.215.654	94.595.744
22	KALIMANTAN SELATAN	59.713.331	1.184.017	13.379.320	963.531	28.677.559	19.308.547	89.660.216	46.163.045	128.106.382
23	KALIMANTAN TIMUR	68.655.805	1.949.454	13.807.074	930.475	119.779.846	81.842.554	223.564.146	117.979.239	464.823.485
24	KALIMANTAN UTARA	9.309.640	408.652	3.703.168	236.646	17.840.023	1.143.168	15.282.335	12.188.543	57.825.839
25	SULAWESI UTARA	38.874.154	1.718.961	14.340.692	6.075	31.099.523	2.780.935	13.766.239	12.766.018	84.258.691
26	SULAWESI TENGAH	49.473.980	1.948.576	10.798.576	2.914.903	43.304.257	30.624.481	63.518.422	37.716.548	103.617.686
27	SULAWESI SELATAN	160.726.178	3.764.854	27.346.386	866.774	118.819.795	11.852.690	15.746.818	6.174.486	309.243.628
28	SULAWESI TENGGARA	41.766.688	951.488	12.489.925	167.847	37.117.504	9.400.661	13.772.267	8.536.540	88.328.518
29	GORONTALO	16.322.334	200.059	5.392.038	460.250	8.288.283	55.287	369.264	4.254.348	26.722.593
30	SULAWESI BARAT	15.380.143	221.392	5.365.686	- 56.524	9.196.962	62.055	7.076.063	5.945.076	31.176.590
31	MALUKU	19.202.733	693.012	11.107.231	146.315	9.427.749	2.911.383	2.277.729	10.478.023	29.465.362
32	MALUKU UTARA	13.747.246	322.663	7.142.079	191.904	7.923.133	2.880.806	7.581.105	8.977.206	25.050.118
33	PAPUA BARAT	16.053.902	536.736	9.393.479	661.964	11.133.956	896.561	38.706.417	15.136.331	60.453.560
34	PAPUA	63.233.971	2.612.959	26.853.492	1.837.499	42.707.952	6.457.711	33.525.497	4.584.734	159.728.926
	34 PROVINSI	**5.637.528.139**	**123.336.526**	**850.478.190**	**125.894.191**	**3.374.409.967**	**2.152.698.788**	**2.186.695.840**	**381.052.401**	**10.526.696.466**

PDRB ADHB Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2014 (Rp. Juta)

No.	Provinsi	ADHB (Rp. Juta)								PDRB
		Konsumsi Rumah Tangga	Konsumsi LNPRT	Konsumsi Pemerintah	Perubahan Inventori	PMTB	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	Ekspor Barang dan Jasa	Net Ekspor Antar Provinsi	
		2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014
1	ACEH	74.185.221	2.418.269	31.463.525	43.107	43.172.722	2.156.000	7.458.505	(28.688.280)	127.897.070
2	SUMATERA UTARA	281.431.384	5.053.856	40.798.561	10.437.916	164.701.340	69.423.360	113.771.823	(24.816.568)	521.954.952
3	SUMATERA BARAT	88.282.601	1.849.249	21.622.468	144.020	49.684.324	13.844.064	23.326.450	(6.120.790)	164.944.257
4	RIAU	197.162.816	2.728.466	20.562.898	30.133.339	173.219.855	26.480.612	262.159.378	19.909.721	679.395.860
5	JAMBI	66.802.356	776.206	13.000.173	1.338.604	34.951.295	3.070.978	47.545.785	(16.529.024)	144.814.418
6	SUMATERA SELATAN	208.208.394	4.518.787	24.444.772	1.838.671	125.397.627	11.635.622	39.695.332	(86.046.360)	306.421.601
7	BENGKULU	29.476.478	1.209.629	8.850.672	1.222.816	19.055.492	518.252	3.107.337	(17.014.269)	45.389.904
8	LAMPUNG	138.464.983	2.993.651	20.697.888	893.627	71.015.353	42.408.174	46.656.992	(7.519.870)	230.794.450
9	KEP. BANGKA BELITUNG	29.332.295	339.516	5.768.626	1.227.717	12.983.531	1.392.256	27.900.672	(19.786.486)	56.373.615
10	KEP. RIAU	63.725.522	417.520	10.962.687	3.833.903	76.074.334	142.454.129	140.449.286	27.870.859	180.879.983
11	DKI JAKARTA	1.065.088.138	35.376.320	222.659.398	15.569.227	756.764.981	1.010.343.673	297.669.225	379.532.784	1.762.316.399
12	JAWA BARAT	881.109.399	9.189.586	81.202.692	77.750.129	346.009.578	185.811.813	329.350.772	(152.975.265)	1.385.825.076
13	JAWA TENGAH	570.433.401	10.773.170	75.556.449	27.054.493	274.558.464	220.421.202	84.542.042	99.974.365	922.471.181
14	DI YOGYAKARTA	62.875.141	2.948.427	15.347.428	980.197	27.744.794	4.085.245	5.465.423	(18.433.682)	92.842.484
15	JAWA TIMUR	949.343.438	19.053.854	96.944.244	47.147.968	422.772.357	356.887.086	243.721.820	115.851.033	1.537.947.628
16	BANTEN	234.035.091	2.025.613	19.237.578	1.471.615	124.100.207	294.210.665	138.111.696	203.968.935	428.740.069
17	BALI	76.468.025	1.968.468	15.985.791	1.533.636	48.647.550	13.890.930	55.101.728	(29.418.536)	156.395.732
18	NUSA TENGGARA BARAT	62.018.052	1.385.893	15.387.606	874.152	31.846.287	2.816.676	4.947.058	(32.021.646)	81.620.725
19	NUSA TENGGARA TIMUR	50.692.465	2.323.762	19.486.122	1.024.332	26.660.333	527.152	1.383.713	(32.543.141)	68.500.434
20	KALIMANTAN BARAT	74.326.100	1.567.779	17.080.086	1.780.327	45.058.458	8.832.170	11.137.034	(9.772.328)	132.345.287
21	KALIMANTAN TENGAH	38.030.000	1.183.153	13.513.158	1.398.623	41.297.383	1.135.055	16.158.078	(20.555.457)	89.889.883
22	KALIMANTAN SELATAN	58.574.581	1.170.026	16.030.655	278.912	29.206.515	32.585.616	95.212.664	(40.005.455)	127.882.282
23	KALIMANTAN TIMUR	80.180.287	2.090.681	23.523.174	12.344.421	139.830.348	119.093.437	350.299.172	38.340.611	527.515.256
24	KALIMANTAN UTARA	11.011.179	464.791	6.586.509	870.472	17.333.797	1.514.002	16.366.406	8.064.850	59.184.003
25	SULAWESI UTARA	36.541.276	1.671.668	14.016.073	56.079	26.227.489	3.010.524	15.630.020	(10.464.455)	80.667.626
26	SULAWESI TENGAH	50.558.563	1.728.336	13.047.760	1.949.046	40.129.383	735.653	4.798.334	(21.229.495)	90.246.274
27	SULAWESI SELATAN	165.652.216	3.863.839	31.774.366	(1.550.670)	110.225.836	10.961.425	21.723.590	(22.693.946)	298.033.805
28	SULAWESI TENGGARA	40.339.623	869.533	11.717.190	675.322	31.296.241	10.025.302	4.417.625	(668.081)	78.622.151
29	GORONTALO	15.403.967	175.311	6.077.545	753.243	7.923.719	673.768	224.150	(4.690.383)	25.193.783
30	SULAWESI BARAT	15.261.635	235.432	5.153.209	355.235	8.471.142	13.643	3.082.292	(3.087.056)	29.458.246
31	MALUKU	21.226.234	674.870	11.825.588	301.731	8.922.857	4.685.999	3.345.262	(9.954.061)	31.656.483
32	MALUKU UTARA	13.957.149	287.720	7.965.612	(227.971)	6.210.617	186.577	390.863	(4.355.337)	24.042.077
33	PAPUA BARAT	14.716.999	556.121	11.594.724	(1.493.381)	11.134.357	776.325	45.855.816	(23.407.348)	58.180.964
34	PAPUA	65.393.761	2.592.804	30.457.009	(378.209)	41.549.468	14.019.563	19.619.142	(11.884.431)	133.329.981
	34 PROVINSI	**5.830.308.769**	**126.482.306**	**980.342.236**	**241.632.650**	**3.394.178.034**	**2.610.626.951**	**2.480.625.487**	**238.831.408**	**10.681.773.939**

PDRB ADHB Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2015 (Rp. Juta)

No.	Provinsi	ADHB (Rp. Juta)								PDRB
		Konsumsi Rumah Tangga	Konsumsi LNPRT	Konsumsi Pemerintah	Perubahan Inventori	PMTB	Ekspor Barang dan Jasa	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	Net Ekspor Antar Provinsi	
		2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
1	ACEH	79.851.130	2.490.060	35.180.035	(113.301)	46.067.932	2.134.011	3.538.905	(32.978.302)	129.092.659
2	SUMATERA UTARA	306.071.859	5.258.702	43.960.454	13.119.108	182.367.638	107.872.498	64.494.652	(23.576.597)	570.579.009
3	SUMATERA BARAT	96.531.831	1.997.475	24.255.719	594.813	54.928.424	22.495.330	9.885.456	(10.966.154)	179.951.980
4	RIAU	222.173.096	2.910.248	23.462.837	7.365.023	198.061.292	212.030.401	25.055.153	11.813.887	652.761.631
5	JAMBI	71.817.541	830.368	14.353.139	1.754.356	35.770.418	35.540.599	2.164.778	(2.835.988)	155.065.656
6	SUMATERA SELATAN	222.487.660	4.886.976	25.889.700	874.394	123.866.817	37.001.612	25.266.975	(57.974.483)	331.765.702
7	BENGKULU	33.165.076	1.213.687	10.231.617	1.306.290	20.270.722	2.206.087	354.874	(17.704.588)	50.334.018
8	LAMPUNG	153.233.046	3.447.905	23.972.125	638.109	76.757.609	52.314.980	33.289.061	(24.191.610)	252.883.103
9	KEP. BANGKA BELITUNG	32.577.016	391.643	6.423.805	1.189.006	14.336.036	21.105.715	1.419.629	(13.616.268)	60.987.325
10	KEP. RIAU	73.064.167	480.609	12.384.396	1.104.294	84.770.997	175.399.425	145.078.826	(2.554.669)	199.570.394
11	DKI JAKARTA	1.208.347.576	35.858.999	260.416.641	17.556.040	812.951.792	337.769.431	999.374.969	315.563.238	1.989.088.748
12	JAWA BARAT	983.765.227	8.908.646	98.292.765	59.421.458	382.975.600	348.639.105	194.526.908	(162.501.066)	1.524.974.827
13	JAWA TENGAH	620.264.015	11.438.505	85.225.912	14.268.808	308.702.422	92.813.476	188.360.109	66.633.608	1.010.986.637
14	DI YOGYAKARTA	68.730.528	3.171.193	17.214.154	1.151.797	30.798.881	6.266.264	5.066.145	(20.826.153)	101.440.518
15	JAWA TIMUR	1.019.622.141	20.228.792	104.912.334	41.438.449	464.468.787	246.890.094	303.043.016	96.959.480	1.691.477.063
16	BANTEN	253.382.608	2.204.245	21.118.167	560.298	139.899.780	136.333.968	284.265.963	210.067.339	479.300.444
17	BALI	85.910.954	2.197.116	17.750.679	358.064	55.333.041	63.633.146	13.612.368	(35.157.965)	176.412.668
18	NUSA TENGGARA BARAT	66.021.500	1.512.375	16.862.329	632.955	36.122.921	21.137.872	3.933.929	(32.691.281)	105.664.742
19	NUSA TENGGARA TIMUR	56.851.466	2.539.408	22.091.093	969.129	30.996.063	1.834.217	261.549	(38.899.037)	76.120.791
20	KALIMANTAN BARAT	80.934.226	1.629.099	19.309.344	1.891.778	51.054.673	8.704.549	10.616.225	9.777.145	162.684.590
21	KALIMANTAN TENGAH	42.418.618	1.342.316	15.744.457	1.572.522	45.543.416	15.015.899	810.925	(20.762.782)	100.063.520
22	KALIMANTAN SELATAN	63.942.094	1.300.555	18.230.518	78.736	32.181.401	87.124.509	23.201.680	(42.600.011)	137.056.121
23	KALIMANTAN TIMUR	86.786.224	2.460.192	25.949.715	5.771.866	145.766.484	256.979.357	88.717.186	70.108.410	505.105.062
24	KALIMANTAN UTARA	12.243.723	539.610	6.884.836	935.612	21.144.069	13.696.805	1.300.298	7.578.036	61.722.392
25	SULAWESI UTARA	41.806.112	1.792.357	16.267.834	19.934	31.036.594	13.287.201	2.805.652	(10.258.702)	91.145.678
26	SULAWESI TENGAH	55.834.297	1.973.010	15.369.757	3.397.698	46.686.130	10.088.674	2.908.993	(22.867.099)	107.573.474
27	SULAWESI SELATAN	185.585.543	4.265.899	36.396.616	5.641.244	125.989.170	20.159.345	13.365.439	(24.282.162)	340.390.214
28	SULAWESI TENGGARA	44.092.255	886.039	13.103.284	417.731	33.949.624	3.380.693	5.805.008	(2.310.143)	87.714.475
29	GORONTALO	17.483.652	196.957	6.809.069	498.525	8.976.607	487.692	1.468.415	(4.490.669)	28.493.417
30	SULAWESI BARAT	17.219.021	246.525	6.026.226	33.597	9.563.597	4.214.275	15.808	(4.299.883)	32.987.550
31	MALUKU	24.048.412	748.966	13.775.001	169.590	9.654.063	3.466.845	5.147.543	(12.369.378)	34.345.956
32	MALUKU UTARA	15.464.568	320.929	8.856.577	(370.990)	7.245.510	203.248	897.859	(4.183.680)	26.638.303
33	PAPUA BARAT	16.573.309	584.362	12.982.663	1.320.220	13.116.111	36.428.402	732.829	(17.384.208)	62.888.030
34	PAPUA	71.699.212	2.908.335	34.069.655	(177.691)	46.796.439	27.976.704	11.308.325	(21.657.044)	150.307.284
	34 PROVINSI	**6.429.999.703**	**133.162.104**	**1.113.773.453**	**185.389.462**	**3.728.151.058**	**2.424.632.430**	**2.472.095.450**	**124.561.222**	**11.667.573.983**

PDRB ADHB Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2016 (Rp. Juta)

No.	Provinsi	ADHB (Rp. Juta)								PDRB
		Konsumsi Rumah Tangga	Konsumsi LNPRT	Konsumsi Pemerintah	Perubahan Inventori	PMTB	Ekspor Barang dan Jasa	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	Net Ekspor Antar Provinsi	
		2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
1	ACEH	85.639.166	2.782.413	31.802.696	40.896	51.310.356	1.567.585	2.956.992	(33.342.302)	136.843.818
2	SUMATERA UTARA	333.511.725	5.708.823	46.072.716	9.047.442	198.592.881	109.437.898	64.134.579	(12.173.999)	626.062.907
3	SUMATERA BARAT	103.844.966	2.191.549	25.511.598	1.147.678	59.605.598	21.329.277	6.025.642	(11.505.848)	196.099.177
4	RIAU	241.264.481	3.117.078	25.547.537	11.838.354	221.468.183	178.281.742	27.801.550	27.983.205	681.699.030
5	JAMBI	76.982.265	882.532	14.663.952	1.765.440	38.980.939	25.548.344	1.920.157	14.296.154	171.199.468
6	SUMATERA SELATAN	240.977.339	5.311.191	26.313.944	435.805	137.226.041	30.755.678	17.471.915	(69.681.118)	353.866.965
7	BENGKULU	36.475.575	1.338.891	11.235.134	1.229.883	22.769.190	2.588.431	203.352	(20.049.581)	55.384.172
8	LAMPUNG	166.902.925	3.876.125	25.534.196	998.420	85.463.367	45.884.060	32.794.315	(16.447.161)	279.417.617
9	KEP. BANGKA BELITUNG	36.367.009	448.172	7.250.912	701.615	16.341.297	17.952.970	2.497.682	(11.516.060)	65.048.232
10	KEP. RIAU	82.862.014	502.780	13.810.271	729.966	92.458.731	184.522.395	156.924.592	(1.953.901)	216.007.664
11	DKI JAKARTA	1.313.385.627	40.851.737	288.981.665	(4.523.176)	832.112.567	343.004.144	936.209.346	281.470.400	2.159.073.618
12	JAWA BARAT	1.075.522.041	9.570.207	100.672.817	67.700.282	412.295.911	347.764.478	187.689.371	(172.597.944)	1.653.238.422
13	JAWA TENGAH	660.988.586	12.256.989	87.589.147	7.307.461	333.977.418	92.562.664	134.238.540	26.872.958	1.087.316.683
14	DI YOGYAKARTA	74.429.796	3.225.070	18.321.761	1.295.788	33.428.978	6.495.282	5.922.732	(21.311.589)	109.962.354
15	JAWA TIMUR	1.109.014.191	22.169.694	100.536.919	25.399.123	518.192.257	264.511.025	293.671.993	109.587.212	1.855.738.429
16	BANTEN	272.806.889	2.385.185	22.897.757	53.594	153.741.869	133.927.474	257.651.859	189.737.437	517.898.344
17	BALI	95.497.686	2.465.258	19.977.807	465.069	60.018.365	78.332.451	17.637.504	(45.029.558)	194.089.575
18	NUSA TENGGARA BARAT	70.678.201	1.643.778	17.766.902	962.901	41.117.882	23.087.588	3.744.358	(35.048.133)	116.464.762
19	NUSA TENGGARA TIMUR	61.506.312	2.636.946	23.994.706	458.340	39.722.903	1.776.697	274.813	(46.078.302)	83.742.790
20	KALIMANTAN BARAT	88.906.170	1.739.353	18.998.424	430.755	55.024.133	8.825.035	9.587.790	(2.971.843)	161.364.237
21	KALIMANTAN TENGAH	47.357.348	1.521.249	16.218.633	1.581.651	50.403.172	13.009.497	1.226.723	(16.897.808)	111.967.018
22	KALIMANTAN SELATAN	69.096.597	1.439.423	19.094.319	(773.933)	34.303.443	86.891.288	14.567.224	(49.393.478)	146.090.435
23	KALIMANTAN TIMUR	91.536.846	2.439.025	23.578.344	1.922.887	144.654.384	197.483.435	65.089.941	112.355.257	508.880.237
24	KALIMANTAN UTARA	13.041.726	555.796	6.722.185	406.580	24.064.446	12.428.503	1.238.783	10.061.360	66.041.813
25	SULAWESI UTARA	45.568.217	2.006.194	17.219.165	9.504	34.528.455	14.752.263	3.685.507	(9.884.448)	100.513.843
26	SULAWESI TENGAH	60.961.079	2.150.890	16.210.691	4.031.276	51.785.965	20.952.916	15.464.703	(20.598.108)	120.030.007
27	SULAWESI SELATAN	204.368.750	4.626.455	37.399.192	4.848.290	141.414.704	17.850.665	12.998.050	(20.401.099)	377.108.907
28	SULAWESI TENGGARA	48.316.553	970.999	14.220.093	259.703	37.496.698	3.274.343	5.822.526	(1.721.103)	96.994.761
29	GORONTALO	19.300.322	220.432	7.215.175	676.318	9.715.697	115.234	407.233	(5.138.388)	31.697.556
30	SULAWESI BARAT	18.883.978	272.378	6.781.949	(50.831)	10.827.339	4.668.510	359.894	(5.078.228)	35.945.202
31	MALUKU	26.646.284	842.364	14.900.712	189.107	11.000.819	3.632.285	5.431.135	(14.726.029)	37.054.408
32	MALUKU UTARA	16.943.243	346.772	9.222.777	247.086	8.355.626	478.844	2.638.510	(3.805.237)	29.150.601
33	PAPUA BARAT	18.549.038	654.263	14.383.112	2.846.680	13.991.265	23.355.461	1.546.423	(5.602.321)	66.631.076
34	PAPUA	80.062.233	3.184.672	36.238.897	1.109.167	51.749.803	28.666.066	11.810.250	(15.991.728)	173.208.860
	34 PROVINSI	**6.988.195.177**	**146.334.685**	**1.166.886.103**	**144.789.124**	**4.028.140.680**	**2.345.714.529**	**2.301.645.983**	**103.418.670**	**12.621.832.985**

PDRB ADHB Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2014 (Rp. Juta)

No.	Provinsi	ADHB (Rp. Juta)								PDRB
		Konsumsi Rumah Tangga	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	Konsumsi Pemerintah	Perubahan Inventori	PMTB	Ekspor Barang dan Jasa	Konsumsi LNPRT	Net Ekspor Antar Provinsi	
		2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
1	ACEH	91.765.735	3.102.903	33.244.067	(124.116)	52.367.815	2.825.202	3.113.921	(34.282.800)	145.806.923
2	SUMATERA UTARA	364.057.392	72.249.264	51.838.128	8.053.875	213.362.358	132.941.644	6.058.241	(19.786.930)	684.275.444
3	SUMATERA BARAT	112.795.752	7.397.882	26.852.476	144.659	64.168.289	27.093.953	2.250.916	(12.018.303)	213.889.860
4	RIAU	259.002.304	36.341.684	26.760.715	5.056.471	238.512.078	210.781.161	3.415.547	(2.389.009)	704.797.584
5	JAMBI	83.274.310	1.178.297	15.936.632	988.600	41.131.947	34.672.786	950.362	14.091.785	189.868.125
6	SUMATERA SELATAN	257.277.122	10.008.080	29.712.576	(145.910)	147.794.042	61.028.074	5.688.641	(108.460.763)	382.885.701
7	BENGKULU	39.307.247	330.051	12.028.795	1.196.730	24.926.493	4.324.158	1.450.052	(22.245.748)	60.657.677
8	LAMPUNG	182.889.386	46.488.937	26.381.507	1.364.769	97.063.988	55.438.606	4.539.285	(14.488.869)	306.699.736
9	KEP. BANGKA BELITUNG	40.297.277	1.710.304	7.760.398	499.426	18.379.221	23.373.191	495.714	(19.233.624)	69.861.298
10	KEP. RIAU	92.508.519	183.584.235	14.737.145	381.729	97.338.839	210.361.744	556.521	(4.537.575)	227.762.687
11	DKI JAKARTA	1.437.576.490	1.078.710.866	306.792.176	20.302.686	919.498.263	336.477.584	47.190.482	376.236.489	2.365.363.304
12	JAWA BARAT	1.169.367.387	188.932.697	110.964.024	67.564.526	449.337.047	397.350.792	10.450.024	(227.720.494)	1.788.380.608
13	JAWA TENGAH	714.362.513	160.854.809	94.261.559	9.627.928	366.766.466	106.463.041	13.168.407	28.605.378	1.172.400.482
14	DI YOGYAKARTA	81.335.810	6.540.719	19.508.072	1.368.184	37.111.436	7.436.959	3.756.395	(24.845.137)	119.131.000
15	JAWA TIMUR	1.193.915.047	333.495.598	109.444.001	25.943.944	568.965.370	268.998.072	23.399.522	155.747.635	2.012.917.992
16	BANTEN	294.483.768	289.601.232	24.602.181	70.314	173.092.929	153.363.511	2.541.389	204.910.213	563.463.073
17	BALI	102.093.533	20.777.897	21.954.167	651.027	63.293.058	86.638.507	2.580.414	(42.883.224)	213.549.584
18	NUSA TENGGARA BARAT	74.849.147	3.903.926	19.218.414	993.754	43.826.438	17.526.279	1.810.762	(30.459.163)	123.861.704
19	NUSA TENGGARA TIMUR	66.707.543	1.101.703	26.728.378	571.030	46.205.423	2.282.868	2.920.514	(53.556.442)	90.757.612
20	KALIMANTAN BARAT	96.686.975	10.313.263	20.593.759	(1.752.914)	59.823.307	13.630.259	2.046.938	(3.223.940)	177.491.122
21	KALIMANTAN TENGAH	52.298.281	1.159.995	17.521.799	1.759.707	54.684.328	24.206.856	1.654.517	(25.141.235)	125.824.257
22	KALIMANTAN SELATAN	74.554.961	20.353.572	19.759.367	359.120	36.562.051	103.403.443	1.567.294	(56.671.461)	159.181.203
23	KALIMANTAN TIMUR	96.785.575	69.188.554	21.092.789	1.757.926	154.503.230	239.454.921	2.629.574	145.244.479	592.279.940
24	KALIMANTAN UTARA	13.747.601	1.341.251	6.115.828	365.232	25.927.323	13.886.790	615.163	17.611.582	76.928.267
25	SULAWESI UTARA	49.364.987	4.497.235	19.033.744	9.700	38.421.806	16.724.122	2.262.669	(11.199.203)	110.120.589
26	SULAWESI TENGAH	66.440.684	17.869.847	17.545.238	2.475.879	55.057.654	40.749.848	2.423.514	(32.871.814)	133.951.157
27	SULAWESI SELATAN	225.404.555	16.056.835	39.393.172	2.937.296	157.246.493	18.207.506	5.109.718	(16.497.017)	415.744.889
28	SULAWESI TENGGARA	53.297.732	11.059.936	15.897.055	1.348.933	42.983.469	5.623.933	1.099.783	(1.767.376)	107.423.594
29	GORONTALO	21.233.694	135.233	7.804.162	787.446	10.309.596	75.811	246.466	(5.783.945)	34.537.996
30	SULAWESI BARAT	20.390.064	236.748	7.408.870	92.329	11.958.394	5.160.455	297.637	(5.486.986)	39.584.015
31	MALUKU	28.656.670	6.039.005	16.598.090	212.602	12.270.580	3.809.388	926.070	(16.552.771)	39.881.623
32	MALUKU UTARA	18.359.623	2.042.610	10.235.796	(522.484)	9.677.282	3.804.198	383.530	(7.622.763)	32.272.572
33	PAPUA BARAT	20.483.626	858.162	14.893.737	3.934.346	14.997.305	26.289.317	713.601	(8.663.214)	71.790.556
34	PAPUA	87.903.534	7.497.950	38.810.543	(7.047.414)	56.543.198	34.829.845	3.670.016	(18.266.602)	188.945.169
	34 PROVINSI	**7.583.474.844**	**2.614.961.280**	**1.251.429.359**	**151.227.330**	**4.404.107.516**	**2.689.234.824**	**161.983.599**	**115.791.152**	**13.742.287.344**

PDRB ADHB Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2018 (Rp. Juta)

No.	Provinsi	ADHB (Rp. Juta)								PDRB
		Konsumsi Rumah Tangga	Konsumsi LNPRT	Konsumsi Pemerintah	Perubahan Inventori	PMTB	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	Ekspor Barang dan Jasa	Net Ekspor Antar Provinsi	
		2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
1	ACEH	96.346.435	3.298.812	33.675.497	(2.547)	57.229.216	3.048.344	5.331.305	(36.918.059)	155.912.315
2	SUMATERA UTARA	397.872.810	6.948.327	55.569.762	10.762.527	235.556.084	95.417.330	136.172.640	(6.272.126)	741.192.694
3	SUMATERA BARAT	122.364.542	2.453.079	29.157.823	(13.948)	68.660.221	9.268.718	24.443.499	(7.267.684)	230.528.813
4	RIAU	272.940.742	3.855.165	27.663.834	6.634.215	258.496.340	38.954.889	217.548.403	7.090.475	755.274.285
5	JAMBI	89.274.231	1.124.743	16.886.429	1.192.599	43.304.076	1.637.972	43.651.006	14.583.447	208.378.559
6	SUMATERA SELATAN	277.771.062	6.358.147	31.821.010	(1.239.870)	155.794.550	16.863.105	69.070.808	(102.338.018)	420.374.584
7	BENGKULU	42.202.380	1.604.091	13.081.022	421.534	27.263.778	1.661.005	4.694.777	(21.193.682)	66.412.895
8	LAMPUNG	201.529.804	5.481.671	28.001.702	1.666.742	110.866.311	48.293.382	55.775.394	(21.346.810)	333.681.431
9	KEP. BANGKA BELITUNG	44.169.401	577.556	8.167.612	518.851	20.295.325	2.817.827	26.303.262	(24.144.866)	73.069.313
10	KEP. RIAU	99.380.308	622.407	15.560.189	582.208	109.811.360	215.053.859	235.548.125	2.626.172	249.076.910
11	DKI JAKARTA	1.572.966.429	52.878.594	371.518.921	48.997.900	1.012.717.074	1.310.209.547	372.498.687	477.805.691	2.599.173.749
12	JAWA BARAT	1.278.278.896	12.992.300	117.394.394	72.273.883	495.827.138	213.295.453	439.646.926	(240.886.503)	1.962.231.581
13	JAWA TENGAH	768.534.014	14.491.862	98.712.449	15.699.070	413.749.153	234.958.244	124.316.368	68.156.295	1.268.700.966
14	DI YOGYAKARTA	86.753.197	4.095.046	21.346.113	1.435.491	43.173.678	7.206.068	8.749.632	(28.469.631)	129.877.458
15	JAWA TIMUR	1.298.390.492	25.711.990	121.418.366	28.393.473	620.630.331	401.031.799	288.125.807	208.145.037	2.189.783.697
16	BANTEN	321.877.595	2.803.268	27.259.506	108.196	193.232.291	312.330.091	167.574.632	214.381.217	614.906.614
17	BALI	111.847.955	2.764.028	23.593.753	691.268	71.601.533	26.203.761	96.685.771	(46.549.823)	234.430.724
18	NUSA TENGGARA BARAT	79.035.517	2.067.613	19.768.790	874.798	47.243.912	5.097.307	10.104.565	(30.126.204)	123.871.684
19	NUSA TENGGARA TIMUR	71.254.439	3.286.924	30.187.059	884.142	49.247.353	1.022.139	2.018.599	(56.769.125)	99.087.252
20	KALIMANTAN BARAT	104.784.061	2.367.122	22.306.180	2.607.588	64.111.316	13.697.668	15.222.133	(3.667.881)	194.032.851
21	KALIMANTAN TENGAH	56.121.929	1.935.579	18.592.942	1.718.293	60.444.106	3.531.333	27.266.956	(23.807.757)	138.740.716
22	KALIMANTAN SELATAN	80.519.721	1.746.799	20.902.554	1.211.711	40.801.486	27.359.224	121.855.180	(67.742.480)	171.935.748
23	KALIMANTAN TIMUR	103.435.774	2.973.197	23.195.231	1.610.952	173.413.127	79.397.599	254.778.027	158.108.191	638.116.900
24	KALIMANTAN UTARA	14.608.034	641.741	6.498.912	294.196	28.147.163	1.880.007	17.706.563	20.042.284	86.058.887
25	SULAWESI UTARA	52.701.668	2.563.097	21.146.537	7.800	42.660.375	4.195.098	18.044.927	(13.385.693)	119.543.612
26	SULAWESI TENGAH	73.377.981	2.895.423	17.354.262	5.487.366	60.084.494	40.883.458	72.734.427	(40.414.177)	150.636.319
27	SULAWESI SELATAN	251.147.505	6.145.459	44.827.508	1.539.201	171.943.698	19.313.214	23.296.297	(17.244.499)	462.341.955
28	SULAWESI TENGGARA	58.271.075	1.219.349	17.580.184	172.642	47.283.911	13.209.180	16.086.360	(9.311.686)	118.092.655
29	GORONTALO	23.239.884	274.401	8.245.793	869.643	11.046.235	82.450	534.260	(6.391.495)	37.736.271
30	SULAWESI BARAT	22.160.501	317.483	8.436.843	(79.319)	13.078.593	95.976	7.374.946	(7.647.596)	43.545.475
31	MALUKU	30.266.579	1.015.213	17.807.214	249.311	14.412.770	6.743.249	3.949.822	(17.893.047)	43.064.612
32	MALUKU UTARA	19.996.617	459.177	11.395.138	340.146	11.455.008	4.221.107	10.019.891	(12.947.228)	36.497.643
33	PAPUA BARAT	22.513.252	779.954	15.934.561	842.977	16.237.109	1.339.740	39.467.642	(14.791.287)	79.644.468
34	PAPUA	98.110.318	4.097.138	40.859.615	(2.832.236)	64.171.816	9.041.635	55.817.152	(40.522.354)	210.659.814
	34 PROVINSI	**8.244.045.148**	**182.846.754**	**1.385.867.705**	**203.920.805**	**4.853.990.931**	**3.169.361.781**	**3.012.414.790**	**272.889.096**	**14.986.613.449**

PDRB ADHB Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2014 (Rp. Juta)

No.	Provinsi	ADHB (Rp. Juta)								PDRB
		Konsumsi Rumah Tangga	Konsumsi LNPRT	Konsumsi Pemerintah	Perubahan Inventori	PMTB	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	Ekspor Barang dan Jasa	Net Ekspor Antar Provinsi	
		2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014
1	ACEH	74.185.221	2.418.269	31.463.525	43.107	43.172.722	2.156.000	7.458.505	(28.688.280)	127.897.070
2	SUMATERA UTARA	281.431.384	5.053.856	40.798.561	10.437.916	164.701.340	69.423.360	113.771.823	(24.816.568)	521.954.952
3	SUMATERA BARAT	88.282.601	1.849.249	21.622.468	144.020	49.684.324	13.844.064	23.326.450	(6.120.790)	164.944.257
4	RIAU	197.162.816	2.728.466	20.562.898	30.133.339	173.219.855	26.480.612	262.159.378	19.909.721	679.395.860
5	JAMBI	66.802.356	776.206	13.000.173	1.338.604	34.951.295	3.070.978	47.545.785	(16.529.024)	144.814.418
6	SUMATERA SELATAN	208.208.394	4.518.787	24.444.772	1.838.671	125.397.627	11.635.622	39.695.332	(86.046.360)	306.421.601
7	BENGKULU	29.476.478	1.209.629	8.850.672	1.222.816	19.055.492	518.252	3.107.337	(17.014.269)	45.389.904
8	LAMPUNG	138.464.983	2.993.651	20.697.888	893.627	71.015.353	42.408.174	46.656.992	(7.519.870)	230.794.450
9	KEP. BANGKA BELITUNG	29.332.295	339.516	5.768.626	1.227.717	12.983.531	1.392.256	27.900.672	(19.786.486)	56.373.615
10	KEP. RIAU	63.725.522	417.520	10.962.687	3.833.903	76.074.334	142.454.129	140.449.286	27.870.859	180.879.983
11	DKI JAKARTA	1.065.088.138	35.376.320	222.659.398	15.569.227	756.764.981	1.010.343.673	297.669.225	379.532.784	1.762.316.399
12	JAWA BARAT	881.109.399	9.189.586	81.202.692	77.750.129	346.009.578	185.811.813	329.350.772	(152.975.265)	1.385.825.076
13	JAWA TENGAH	570.433.401	10.773.170	75.556.449	27.054.493	274.558.464	220.421.202	84.542.042	99.974.365	922.471.181
14	DI YOGYAKARTA	62.875.141	2.948.427	15.347.428	980.197	27.744.794	4.085.245	5.465.423	(18.433.682)	92.842.484
15	JAWA TIMUR	949.343.438	19.053.854	96.944.244	47.147.968	422.772.357	356.887.086	243.721.820	115.851.033	1.537.947.628
16	BANTEN	234.035.091	2.025.613	19.237.578	1.471.615	124.100.207	294.210.665	138.111.696	203.968.935	428.740.069
17	BALI	76.468.025	1.968.468	15.985.791	1.533.636	48.647.550	13.890.930	55.101.728	(29.418.536)	156.395.732
18	NUSA TENGGARA BARAT	62.018.052	1.385.893	15.387.606	874.152	31.846.287	2.816.676	4.947.058	(32.021.646)	81.620.725
19	NUSA TENGGARA TIMUR	50.692.465	2.323.762	19.486.122	1.024.332	26.660.333	527.152	1.383.713	(32.543.141)	68.500.434
20	KALIMANTAN BARAT	74.326.100	1.567.779	17.080.086	1.780.327	45.058.458	8.832.170	11.137.034	(9.772.328)	132.345.287
21	KALIMANTAN TENGAH	38.030.000	1.183.153	13.513.158	1.398.623	41.297.383	1.135.055	16.158.078	(20.555.457)	89.889.883
22	KALIMANTAN SELATAN	58.574.581	1.170.026	16.030.655	278.912	29.206.515	32.585.616	95.212.664	(40.005.455)	127.882.282
23	KALIMANTAN TIMUR	80.180.287	2.090.681	23.523.174	12.344.421	139.830.348	119.093.437	350.299.172	38.340.611	527.515.256
24	KALIMANTAN UTARA	11.011.179	464.791	6.586.509	870.472	17.333.797	1.514.002	16.366.406	8.064.850	59.184.003
25	SULAWESI UTARA	36.541.276	1.671.668	14.016.073	56.079	26.227.489	3.010.524	15.630.020	(10.464.455)	80.667.626
26	SULAWESI TENGAH	50.558.563	1.728.336	13.047.760	1.949.046	40.129.383	735.653	4.798.334	(21.229.495)	90.246.274
27	SULAWESI SELATAN	165.652.216	3.863.839	31.774.366	(1.550.670)	110.225.836	10.961.425	21.723.590	(22.693.946)	298.033.805
28	SULAWESI TENGGARA	40.339.623	869.533	11.717.190	675.322	31.296.241	10.025.302	4.417.625	(668.081)	78.622.151
29	GORONTALO	15.403.967	175.311	6.077.545	753.243	7.923.719	673.768	224.150	(4.690.383)	25.193.783
30	SULAWESI BARAT	15.261.635	235.432	5.153.209	355.235	8.471.142	13.643	3.082.292	(3.087.056)	29.458.246
31	MALUKU	21.226.234	674.870	11.825.588	301.731	8.922.857	4.685.999	3.345.262	(9.954.061)	31.656.483
32	MALUKU UTARA	13.957.149	287.720	7.965.612	(227.971)	6.210.617	186.577	390.863	(4.355.337)	24.042.077
33	PAPUA BARAT	14.716.999	556.121	11.594.724	(1.493.381)	11.134.357	776.325	45.855.816	(23.407.348)	58.180.964
34	PAPUA	65.393.761	2.592.804	30.457.009	(378.209)	41.549.468	14.019.563	19.619.142	(11.884.431)	133.329.981
	34 PROVINSI	**5.830.308.769**	**126.482.306**	**980.342.236**	**241.632.650**	**3.394.178.034**	**2.610.626.951**	**2.480.625.487**	**238.831.408**	**10.681.773.939**

PDRB ADHB Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2015 (Rp. Juta)

No.	Provinsi	ADHB (Rp. Juta)								PDRB
		Konsumsi Rumah Tangga	Konsumsi LNPRT	Konsumsi Pemerintah	Perubahan Inventori	PMTB	Ekspor Barang dan Jasa	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	Net Ekspor Antar Provinsi	
		2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
1	ACEH	79.851.130	2.490.060	35.180.035	(113.301)	46.067.932	2.134.011	3.538.905	(32.978.302)	129.092.659
2	SUMATERA UTARA	306.071.859	5.258.702	43.960.454	13.119.108	182.367.638	107.872.498	64.494.652	(23.576.597)	570.579.009
3	SUMATERA BARAT	96.531.831	1.997.475	24.255.719	594.813	54.928.424	22.495.330	9.885.456	(10.966.154)	179.951.980
4	RIAU	222.173.096	2.910.248	23.462.837	7.365.023	198.061.292	212.030.401	25.055.153	11.813.887	652.761.631
5	JAMBI	71.817.541	830.368	14.353.139	1.754.356	35.770.418	35.540.599	2.164.778	(2.835.988)	155.065.656
6	SUMATERA SELATAN	222.487.660	4.886.976	25.889.700	874.394	123.866.817	37.001.612	25.266.975	(57.974.483)	331.765.702
7	BENGKULU	33.165.076	1.213.687	10.231.617	1.306.290	20.270.722	2.206.087	354.874	(17.704.588)	50.334.018
8	LAMPUNG	153.233.046	3.447.905	23.972.125	638.109	76.757.609	52.314.980	33.289.061	(24.191.610)	252.883.103
9	KEP. BANGKA BELITUNG	32.577.016	391.643	6.423.805	1.189.006	14.336.036	21.105.715	1.419.629	(13.616.268)	60.987.325
10	KEP. RIAU	73.064.167	480.609	12.384.396	1.104.294	84.770.997	175.399.425	145.078.826	(2.554.669)	199.570.394
11	DKI JAKARTA	1.208.347.576	35.858.999	260.416.641	17.556.040	812.951.792	337.769.431	999.374.969	315.563.238	1.989.088.748
12	JAWA BARAT	983.765.227	8.908.646	98.292.765	59.421.458	382.975.600	348.639.105	194.526.908	(162.501.066)	1.524.974.827
13	JAWA TENGAH	620.264.015	11.438.505	85.225.912	14.268.808	308.702.422	92.813.476	188.360.109	66.633.608	1.010.986.637
14	DI YOGYAKARTA	68.730.528	3.171.193	17.214.154	1.151.797	30.798.881	6.266.264	5.066.145	(20.826.153)	101.440.518
15	JAWA TIMUR	1.019.622.141	20.228.792	104.912.334	41.438.449	464.468.787	246.890.094	303.043.016	96.959.480	1.691.477.063
16	BANTEN	253.382.608	2.204.245	21.118.167	560.298	139.899.780	136.333.968	284.265.963	210.067.339	479.300.444
17	BALI	85.910.954	2.197.116	17.750.679	358.064	55.333.041	63.633.146	13.612.368	(35.157.965)	176.412.668
18	NUSA TENGGARA BARAT	66.021.500	1.512.375	16.862.329	632.955	36.122.921	21.137.872	3.933.929	(32.691.281)	105.664.742
19	NUSA TENGGARA TIMUR	56.851.466	2.539.408	22.091.093	969.129	30.996.063	1.834.217	261.549	(38.899.037)	76.120.791
20	KALIMANTAN BARAT	80.934.226	1.629.099	19.309.344	1.891.778	51.054.673	8.704.549	10.616.225	9.777.145	162.684.590
21	KALIMANTAN TENGAH	42.418.618	1.342.316	15.744.457	1.572.522	45.543.416	15.015.899	810.925	(20.762.782)	100.063.520
22	KALIMANTAN SELATAN	63.942.094	1.300.555	18.230.518	78.736	32.181.401	87.124.509	23.201.680	(42.600.011)	137.056.121
23	KALIMANTAN TIMUR	86.786.224	2.460.192	25.949.715	5.771.866	145.766.484	256.979.357	88.717.186	70.108.410	505.105.062
24	KALIMANTAN UTARA	12.243.723	539.610	6.884.836	935.612	21.144.069	13.696.805	1.300.298	7.578.036	61.722.392
25	SULAWESI UTARA	41.806.112	1.792.357	16.267.834	19.934	31.036.594	13.287.201	2.805.652	(10.258.702)	91.145.678
26	SULAWESI TENGAH	55.834.297	1.973.010	15.369.757	3.397.698	46.686.130	10.088.674	2.908.993	(22.867.099)	107.573.474
27	SULAWESI SELATAN	185.585.543	4.265.899	36.396.616	5.641.244	125.989.170	20.159.345	13.365.439	(24.282.162)	340.390.214
28	SULAWESI TENGGARA	44.092.255	886.039	13.103.284	417.731	33.949.624	3.380.693	5.805.008	(2.310.143)	87.714.475
29	GORONTALO	17.483.652	196.957	6.809.069	498.525	8.976.607	487.692	1.468.415	(4.490.669)	28.493.417
30	SULAWESI BARAT	17.219.021	246.525	6.026.226	33.597	9.563.597	4.214.275	15.808	(4.299.883)	32.987.550
31	MALUKU	24.048.412	748.966	13.775.001	169.590	9.654.063	3.466.845	5.147.543	(12.369.378)	34.345.956
32	MALUKU UTARA	15.464.568	320.929	8.856.577	(370.990)	7.245.510	203.248	897.859	(4.183.680)	26.638.303
33	PAPUA BARAT	16.573.309	584.362	12.982.663	1.320.220	13.116.111	36.428.402	732.829	(17.384.208)	62.888.030
34	PAPUA	71.699.212	2.908.335	34.069.655	(177.691)	46.796.439	27.976.704	11.308.325	(21.657.044)	150.307.284
	34 PROVINSI	**6.429.999.703**	**133.162.104**	**1.113.773.453**	**185.389.462**	**3.728.151.058**	**2.424.632.430**	**2.472.095.450**	**124.561.222**	**11.667.573.983**

PDRB ADHB Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2016 (Rp. Juta)

No.	Provinsi	ADHB (Rp. Juta)								PDRB
		Konsumsi Rumah Tangga	Konsumsi LNPRT	Konsumsi Pemerintah	Perubahan Inventori	PMTB	Ekspor Barang dan Jasa	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	Net Ekspor Antar Provinsi	
		2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
1	ACEH	85.639.166	2.782.413	31.802.696	40.896	51.310.356	1.567.585	2.956.992	(33.342.302)	136.843.818
2	SUMATERA UTARA	333.511.725	5.708.823	46.072.716	9.047.442	198.592.881	109.437.898	64.134.579	(12.173.999)	626.062.907
3	SUMATERA BARAT	103.844.966	2.191.549	25.511.598	1.147.678	59.605.598	21.329.277	6.025.642	(11.505.848)	196.099.177
4	RIAU	241.264.481	3.117.078	25.547.537	11.838.354	221.468.183	178.281.742	27.801.550	27.983.205	681.699.030
5	JAMBI	76.982.265	882.532	14.663.952	1.765.440	38.980.939	25.548.344	1.920.157	14.296.154	171.199.468
6	SUMATERA SELATAN	240.977.339	5.311.191	26.313.944	435.805	137.226.041	30.755.678	17.471.915	(69.681.118)	353.866.965
7	BENGKULU	36.475.575	1.338.891	11.235.134	1.229.883	22.769.190	2.588.431	203.352	(20.049.581)	55.384.172
8	LAMPUNG	166.902.925	3.876.125	25.534.196	998.420	85.463.367	45.884.060	32.794.315	(16.447.161)	279.417.617
9	KEP. BANGKA BELITUNG	36.367.009	448.172	7.250.912	701.615	16.341.297	17.952.970	2.497.682	(11.516.060)	65.048.232
10	KEP. RIAU	82.862.014	502.780	13.810.271	729.966	92.458.731	184.522.395	156.924.592	(1.953.901)	216.007.664
11	DKI JAKARTA	1.313.385.627	40.851.737	288.981.665	(4.523.176)	832.112.567	343.004.144	936.209.346	281.470.400	2.159.073.618
12	JAWA BARAT	1.075.522.041	9.570.207	100.672.817	67.700.282	412.295.911	347.764.478	187.689.371	(172.597.944)	1.653.238.422
13	JAWA TENGAH	660.988.586	12.256.989	87.589.147	7.307.461	333.977.418	92.562.664	134.238.540	26.872.958	1.087.316.683
14	DI YOGYAKARTA	74.429.796	3.225.070	18.321.761	1.295.788	33.428.978	6.495.282	5.922.732	(21.311.589)	109.962.354
15	JAWA TIMUR	1.109.014.191	22.169.694	100.536.919	25.399.123	518.192.257	264.511.025	293.671.993	109.587.212	1.855.738.429
16	BANTEN	272.806.889	2.385.185	22.897.757	53.594	153.741.869	133.927.474	257.651.859	189.737.437	517.898.344
17	BALI	95.497.686	2.465.258	19.977.807	465.069	60.018.365	78.332.451	17.637.504	(45.029.558)	194.089.575
18	NUSA TENGGARA BARAT	70.678.201	1.643.778	17.766.902	962.901	41.117.882	23.087.588	3.744.358	(35.048.133)	116.464.762
19	NUSA TENGGARA TIMUR	61.506.312	2.636.946	23.994.706	458.340	39.722.903	1.776.697	274.813	(46.078.302)	83.742.790
20	KALIMANTAN BARAT	88.906.170	1.739.353	18.998.424	430.755	55.024.133	8.825.035	9.587.790	(2.971.843)	161.364.237
21	KALIMANTAN TENGAH	47.357.348	1.521.249	16.218.633	1.581.651	50.403.172	13.009.497	1.226.723	(16.897.808)	111.967.018
22	KALIMANTAN SELATAN	69.096.597	1.439.423	19.094.319	(773.933)	34.303.443	86.891.288	14.567.224	(49.393.478)	146.090.435
23	KALIMANTAN TIMUR	91.536.846	2.439.025	23.578.344	1.922.887	144.654.384	197.483.435	65.089.941	112.355.257	508.880.237
24	KALIMANTAN UTARA	13.041.726	555.796	6.722.185	406.580	24.064.446	12.428.503	1.238.783	10.061.360	66.041.813
25	SULAWESI UTARA	45.568.217	2.006.194	17.219.165	9.504	34.528.455	14.752.263	3.685.507	(9.884.448)	100.513.843
26	SULAWESI TENGAH	60.961.079	2.150.890	16.210.691	4.031.276	51.785.965	20.952.916	15.464.703	(20.598.108)	120.030.007
27	SULAWESI SELATAN	204.368.750	4.626.455	37.399.192	4.848.290	141.414.704	17.850.665	12.998.050	(20.401.099)	377.108.907
28	SULAWESI TENGGARA	48.316.553	970.999	14.220.093	259.703	37.496.698	3.274.343	5.822.526	(1.721.103)	96.994.761
29	GORONTALO	19.300.322	220.432	7.215.175	676.318	9.715.697	115.234	407.233	(5.138.388)	31.697.556
30	SULAWESI BARAT	18.883.978	272.378	6.781.949	(50.831)	10.827.339	4.668.510	359.894	(5.078.228)	35.945.202
31	MALUKU	26.646.284	842.364	14.900.712	189.107	11.000.819	3.632.285	5.431.135	(14.726.029)	37.054.408
32	MALUKU UTARA	16.943.243	346.772	9.222.777	247.086	8.355.626	478.844	2.638.510	(3.805.237)	29.150.601
33	PAPUA BARAT	18.549.038	654.263	14.383.112	2.846.680	13.991.265	23.355.461	1.546.423	(5.602.321)	66.631.076
34	PAPUA	80.062.233	3.184.672	36.238.897	1.109.167	51.749.803	28.666.066	11.810.250	(15.991.728)	173.208.860
	34 PROVINSI	**6.988.195.177**	**146.334.685**	**1.166.886.103**	**144.789.124**	**4.028.140.680**	**2.345.714.529**	**2.301.645.983**	**103.418.670**	**12.621.832.985**

PDRB ADHB Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2014 (Rp. Juta)

No.	Provinsi	ADHB (Rp. Juta)								PDRB
		Konsumsi Rumah Tangga	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	Konsumsi Pemerintah	Perubahan Inventori	PMTB	Ekspor Barang dan Jasa	Konsumsi LNPRT	Net Ekspor Antar Provinsi	
		2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
1	ACEH	91.765.735	3.102.903	33.244.067	(124.116)	52.367.815	2.825.202	3.113.921	(34.282.800)	145.806.923
2	SUMATERA UTARA	364.057.392	72.249.264	51.838.128	8.053.875	213.362.358	132.941.644	6.058.241	(19.786.930)	684.275.444
3	SUMATERA BARAT	112.795.752	7.397.882	26.852.476	144.659	64.168.289	27.093.953	2.250.916	(12.018.303)	213.889.860
4	RIAU	259.002.304	36.341.684	26.760.715	5.056.471	238.512.078	210.781.161	3.415.547	(2.389.009)	704.797.584
5	JAMBI	83.274.310	1.178.297	15.936.632	988.600	41.131.947	34.672.786	950.362	14.091.785	189.868.125
6	SUMATERA SELATAN	257.277.122	10.008.080	29.712.576	(145.910)	147.794.042	61.028.074	5.688.641	(108.460.763)	382.885.701
7	BENGKULU	39.307.247	330.051	12.028.795	1.196.730	24.926.493	4.324.158	1.450.052	(22.245.748)	60.657.677
8	LAMPUNG	182.889.386	46.488.937	26.381.507	1.364.769	97.063.988	55.438.606	4.539.285	(14.488.869)	306.699.736
9	KEP. BANGKA BELITUNG	40.297.277	1.710.304	7.760.398	499.426	18.379.221	23.373.191	495.714	(19.233.624)	69.861.298
10	KEP. RIAU	92.508.519	183.584.235	14.737.145	381.729	97.338.839	210.361.744	556.521	(4.537.575)	227.762.687
11	DKI JAKARTA	1.437.576.490	1.078.710.866	306.792.176	20.302.686	919.498.263	336.477.584	47.190.482	376.236.489	2.365.363.304
12	JAWA BARAT	1.169.367.387	188.932.697	110.964.024	67.564.526	449.337.047	397.350.792	10.450.024	(227.720.494)	1.788.380.608
13	JAWA TENGAH	714.362.513	160.854.809	94.261.559	9.627.928	366.766.466	106.463.041	13.168.407	28.605.378	1.172.400.482
14	DI YOGYAKARTA	81.335.810	6.540.719	19.508.072	1.368.184	37.111.436	7.436.959	3.756.395	(24.845.137)	119.131.000
15	JAWA TIMUR	1.193.915.047	333.495.598	109.444.001	25.943.944	568.965.370	268.998.072	23.399.522	155.747.635	2.012.917.992
16	BANTEN	294.483.768	289.601.232	24.602.181	70.314	173.092.929	153.363.511	2.541.389	204.910.213	563.463.073
17	BALI	102.093.533	20.777.897	21.954.167	651.027	63.293.058	86.638.507	2.580.414	(42.883.224)	213.549.584
18	NUSA TENGGARA BARAT	74.849.147	3.903.926	19.218.414	993.754	43.826.438	17.526.279	1.810.762	(30.459.163)	123.861.704
19	NUSA TENGGARA TIMUR	66.707.543	1.101.703	26.728.378	571.030	46.205.423	2.282.868	2.920.514	(53.556.442)	90.757.612
20	KALIMANTAN BARAT	96.686.975	10.313.263	20.593.759	(1.752.914)	59.823.307	13.630.259	2.046.938	(3.223.940)	177.491.122
21	KALIMANTAN TENGAH	52.298.281	1.159.995	17.521.799	1.759.707	54.684.328	24.206.856	1.654.517	(25.141.235)	125.824.257
22	KALIMANTAN SELATAN	74.554.961	20.353.572	19.759.367	359.120	36.562.051	103.403.443	1.567.294	(56.671.461)	159.181.203
23	KALIMANTAN TIMUR	96.785.575	69.188.554	21.092.789	1.757.926	154.503.230	239.454.921	2.629.574	145.244.479	592.279.940
24	KALIMANTAN UTARA	13.747.601	1.341.251	6.115.828	365.232	25.927.323	13.886.790	615.163	17.611.582	76.928.267
25	SULAWESI UTARA	49.364.987	4.497.235	19.033.744	9.700	38.421.806	16.724.122	2.262.669	(11.199.203)	110.120.589
26	SULAWESI TENGAH	66.440.684	17.869.847	17.545.238	2.475.879	55.057.654	40.749.848	2.423.514	(32.871.814)	133.951.157
27	SULAWESI SELATAN	225.404.555	16.056.835	39.393.172	2.937.296	157.246.493	18.207.506	5.109.718	(16.497.017)	415.744.889
28	SULAWESI TENGGARA	53.297.732	11.059.936	15.897.055	1.348.933	42.983.469	5.623.933	1.099.783	(1.767.376)	107.423.594
29	GORONTALO	21.233.694	135.233	7.804.162	787.446	10.309.596	75.811	246.466	(5.783.945)	34.537.996
30	SULAWESI BARAT	20.390.064	236.748	7.408.870	92.329	11.958.394	5.160.455	297.637	(5.486.986)	39.584.015
31	MALUKU	28.656.670	6.039.005	16.598.090	212.602	12.270.580	3.809.388	926.070	(16.552.771)	39.881.623
32	MALUKU UTARA	18.359.623	2.042.610	10.235.796	(522.484)	9.677.282	3.804.198	383.530	(7.622.763)	32.272.572
33	PAPUA BARAT	20.483.626	858.162	14.893.737	3.934.346	14.997.305	26.289.317	713.601	(8.663.214)	71.790.556
34	PAPUA	87.903.534	7.497.950	38.810.543	(7.047.414)	56.543.198	34.829.845	3.670.016	(18.266.602)	188.945.169
	34 PROVINSI	**7.583.474.844**	**2.614.961.280**	**1.251.429.359**	**151.227.330**	**4.404.107.516**	**2.689.234.824**	**161.983.599**	**115.791.152**	**13.742.287.344**

PDRB ADHB Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2018 (Rp. Juta)

No.	Provinsi	ADHB (Rp. Juta)								PDRB
		Konsumsi Rumah Tangga	Konsumsi LNPRT	Konsumsi Pemerintah	Perubahan Inventori	PMTB	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	Ekspor Barang dan Jasa	Net Ekspor Antar Provinsi	
		2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
1	ACEH	96.346.435	3.298.812	33.675.497	(2.547)	57.229.216	3.048.344	5.331.305	(36.918.059)	155.912.315
2	SUMATERA UTARA	397.872.810	6.948.327	55.569.762	10.762.527	235.556.084	95.417.330	136.172.640	(6.272.126)	741.192.694
3	SUMATERA BARAT	122.364.542	2.453.079	29.157.823	(13.948)	68.660.221	9.268.718	24.443.499	(7.267.684)	230.528.813
4	RIAU	272.940.742	3.855.165	27.663.834	6.634.215	258.496.340	38.954.889	217.548.403	7.090.475	755.274.285
5	JAMBI	89.274.231	1.124.743	16.886.429	1.192.599	43.304.076	1.637.972	43.651.006	14.583.447	208.378.559
6	SUMATERA SELATAN	277.771.062	6.358.147	31.821.010	(1.239.870)	155.794.550	16.863.105	69.070.808	(102.338.018)	420.374.584
7	BENGKULU	42.202.380	1.604.091	13.081.022	421.534	27.263.778	1.661.005	4.694.777	(21.193.682)	66.412.895
8	LAMPUNG	201.529.804	5.481.671	28.001.702	1.666.742	110.866.311	48.293.382	55.775.394	(21.346.810)	333.681.431
9	KEP. BANGKA BELITUNG	44.169.401	577.556	8.167.612	518.851	20.295.325	2.817.827	26.303.262	(24.144.866)	73.069.313
10	KEP. RIAU	99.380.308	622.407	15.560.189	582.208	109.811.360	215.053.859	235.548.125	2.626.172	249.076.910
11	DKI JAKARTA	1.572.966.429	52.878.594	371.518.921	48.997.900	1.012.717.074	1.310.209.547	372.498.687	477.805.691	2.599.173.749
12	JAWA BARAT	1.278.278.896	12.992.300	117.394.394	72.273.883	495.827.138	213.295.453	439.646.926	(240.886.503)	1.962.231.581
13	JAWA TENGAH	768.534.014	14.491.862	98.712.449	15.699.070	413.749.153	234.958.244	124.316.368	68.156.295	1.268.700.966
14	DI YOGYAKARTA	86.753.197	4.095.046	21.346.113	1.435.491	43.173.678	7.206.068	8.749.632	(28.469.631)	129.877.458
15	JAWA TIMUR	1.298.390.492	25.711.990	121.418.366	28.393.473	620.630.331	401.031.799	288.125.807	208.145.037	2.189.783.697
16	BANTEN	321.877.595	2.803.268	27.259.506	108.196	193.232.291	312.330.091	167.574.632	214.381.217	614.906.614
17	BALI	111.847.955	2.764.028	23.593.753	691.268	71.601.533	26.203.761	96.685.771	(46.549.823)	234.430.724
18	NUSA TENGGARA BARAT	79.035.517	2.067.613	19.768.790	874.798	47.243.912	5.097.307	10.104.565	(30.126.204)	123.871.684
19	NUSA TENGGARA TIMUR	71.254.439	3.286.924	30.187.059	884.142	49.247.353	1.022.139	2.018.599	(56.769.125)	99.087.252
20	KALIMANTAN BARAT	104.784.061	2.367.122	22.306.180	2.607.588	64.111.316	13.697.668	15.222.133	(3.667.881)	194.032.851
21	KALIMANTAN TENGAH	56.121.929	1.935.579	18.592.942	1.718.293	60.444.106	3.531.333	27.266.956	(23.807.757)	138.740.716
22	KALIMANTAN SELATAN	80.519.721	1.746.799	20.902.554	1.211.711	40.801.486	27.359.224	121.855.180	(67.742.480)	171.935.748
23	KALIMANTAN TIMUR	103.435.774	2.973.197	23.195.231	1.610.952	173.413.127	79.397.599	254.778.027	158.108.191	638.116.900
24	KALIMANTAN UTARA	14.608.034	641.741	6.498.912	294.196	28.147.163	1.880.007	17.706.563	20.042.284	86.058.887
25	SULAWESI UTARA	52.701.668	2.563.097	21.146.537	7.800	42.660.375	4.195.098	18.044.927	(13.385.693)	119.543.612
26	SULAWESI TENGAH	73.377.981	2.895.423	17.354.262	5.487.366	60.084.494	40.883.458	72.734.427	(40.414.177)	150.636.319
27	SULAWESI SELATAN	251.147.505	6.145.459	44.827.508	1.539.201	171.943.698	19.313.214	23.296.297	(17.244.499)	462.341.955
28	SULAWESI TENGGARA	58.271.075	1.219.349	17.580.184	172.642	47.283.911	13.209.180	16.086.360	(9.311.686)	118.092.655
29	GORONTALO	23.239.884	274.401	8.245.793	869.643	11.046.235	82.450	534.260	(6.391.495)	37.736.271
30	SULAWESI BARAT	22.160.501	317.483	8.436.843	(79.319)	13.078.593	95.976	7.374.946	(7.647.596)	43.545.475
31	MALUKU	30.266.579	1.015.213	17.807.214	249.311	14.412.770	6.743.249	3.949.822	(17.893.047)	43.064.612
32	MALUKU UTARA	19.996.617	459.177	11.395.138	340.146	11.455.008	4.221.107	10.019.891	(12.947.228)	36.497.643
33	PAPUA BARAT	22.513.252	779.954	15.934.561	842.977	16.237.109	1.339.740	39.467.642	(14.791.287)	79.644.468
34	PAPUA	98.110.318	4.097.138	40.859.615	(2.832.236)	64.171.816	9.041.635	55.817.152	(40.522.354)	210.659.814
	34 PROVINSI	**8.244.045.148**	**182.846.754**	**1.385.867.705**	**203.920.805**	**4.853.990.931**	**3.169.361.781**	**3.012.414.790**	**272.889.096**	**14.986.613.449**

POSISI PINJAMAN/KREDIT YANG DIBERIKAN RUPIAH BANK UMUM DAN BPR

No.	Provinsi	Nilai Pinjaman				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Aceh	28.647	30.589	33.600	36.825	40.163
2	Sumatera Utara	140.243	154.704	160.834	171.672	191.110
3	Sumatera Barat	42.241	47.272	50.242	53.896	55.375
4	Riau	67.448	74.858	76.387	78.932	86.615
5	Jambi	31.928	35.067	36.227	38.884	43.911
6	Sumatera Selatan	75.719	85.120	93.556	98.775	111.681
7	Bangka Belitung	11.730	12.260	13.887	14.821	17.762
8	Bengkulu	15.660	17.303	19.122	20.688	23.364
9	Lampung	51.354	57.079	61.150	65.052	73.367
33	Kepulauan Riau	29.489	35.062	38.053	42.356	46.159
10	Banten	170.160	195.680	213.926	237.082	272.442
11	D.K.I. Jakarta	875.936	1.004.330	1.109.215	1.205.521	1.360.433
12	Jawa Barat	429.092	467.291	514.999	557.000	621.293
13	Jawa Tengah	233.766	263.139	292.604	310.016	337.015
14	D.I. Yogyakarta	29.626	32.883	35.627	39.979	46.461
15	Jawa Timur	366.705	409.338	438.524	476.780	521.666
16	Bali	75.438	84.616	92.162	96.119	99.805
17	NTB	23.882	26.737	31.069	34.990	37.958
18	NTT	18.017	20.650	23.286	26.539	30.179
19	Kalimantan Barat	47.357	53.234	60.837	65.450	71.145
20	Kalimantan Tengah	28.189	28.361	30.118	37.043	40.720
21	Kalimantan Selatan	41.891	44.118	44.795	52.385	56.525
22	Kalimantan Timur	78.828	80.909	78.844	79.280	87.781
34	Kalimantan Utara	0	0	6.410	7.000	8.298
23	Sulawesi Utara	28.696	32.030	34.804	37.593	39.975
24	Gorontalo	9.254	10.347	11.229	12.472	13.827
25	Sulawesi Tengah	23.479	26.345	28.174	31.139	33.240
26	Sulawesi Selatan	85.675	96.413	105.381	115.160	122.524
27	Sulawesi Tenggara	16.022	17.988	20.559	22.830	25.601
32	Sulawesi Barat	5.774	6.570	7.874	9.063	10.700
28	Maluku Utara	5.472	6.054	6.679	7.848	8.881
29	Maluku	8.501	9.248	10.413	12.065	13.945
30	Papua	20.929	23.228	25.682	27.524	30.335
31	Papua Barat	9.246	9.991	11.686	13.367	15.522
Nasional		**3.126.394**	**3.498.815**	**3.817.953**	**4.136.145**	**4.595.776**

POSISI SIMPANAN MASYARAKAT RUPIAH BANK UMUM DAN BPR

No.	Provinsi	Nilai Simpanan				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Aceh	25.819	30.394	31.355	37.218	38.654
2	Sumatera Utara	151.867	160.151	179.370	194.112	196.883
3	Sumatera Barat	29.917	33.285	35.303	38.448	40.313
4	Riau	62.395	60.068	64.327	70.055	73.266
5	Jambi	21.824	23.262	26.111	29.722	31.065
6	Sumatera Selatan	53.217	54.394	58.510	66.792	74.699
7	Bangka Belitung	13.738	14.757	16.267	17.642	18.680
8	Bengkulu	8.494	9.625	10.642	12.050	12.581
9	Lampung	31.109	35.203	38.958	42.410	46.297
33	Kepulauan Riau	30.986	32.672	36.188	42.695	55.757
10	Banten	110.022	118.450	140.270	166.141	177.427
11	D.K.I. Jakarta	1.485.532	1.561.778	1.792.835	1.934.909	2.000.768
12	Jawa Barat	320.520	359.893	390.637	444.770	461.129
13	Jawa Tengah	189.916	215.579	238.524	263.806	290.815
14	D.I. Yogyakarta	41.740	46.543	52.094	57.716	61.802
15	Jawa Timur	350.195	389.763	420.197	458.795	503.303
16	Bali	67.684	72.996	78.784	86.497	95.060
17	NTB	17.024	19.646	21.268	25.387	28.167
18	NTT	18.537	21.663	21.728	23.138	25.091
19	Kalimantan Barat	39.123	43.424	45.951	51.555	54.739
20	Kalimantan Tengah	16.610	17.749	19.812	22.157	25.340
21	Kalimantan Selatan	36.074	37.543	40.812	43.644	48.763
22	Kalimantan Timur	79.021	73.849	65.752	70.422	80.990
34	Kalimantan Utara	0	0	9.234	9.754	10.290
23	Sulawesi Utara	18.503	19.913	19.890	22.421	22.973
24	Gorontalo	3.312	3.872	4.068	4.533	4.622
25	Sulawesi Tengah	13.832	16.776	17.134	19.268	21.502
26	Sulawesi Selatan	64.216	76.328	80.717	86.124	91.720
27	Sulawesi Tenggara	11.195	14.193	14.556	16.683	18.767
32	Sulawesi Barat	3.244	3.813	3.862	4.434	4.843
28	Maluku Utara	5.239	6.314	6.449	6.892	7.333
29	Maluku	10.563	12.281	11.941	12.675	13.207
30	Papua	31.755	33.387	36.772	37.787	39.405
31	Papua Barat	12.728	12.876	13.341	14.530	16.038
Nasional		**3.375.950**	**3.632.440**	**4.043.662**	**4.435.179**	**4.692.291**

Rasio Pinjaman terhadap Pinjaman Masyarakat Rupiah Bank Umum dan BPR Tahun 2014-2019

No.	Provinsi	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Aceh	1,11	1,01	1,07	0,99	1,04
2	Sumatera Utara	0,92	0,97	0,90	0,88	0,97
3	Sumatera Barat	1,41	1,42	1,42	1,40	1,37
4	Riau	1,08	1,25	1,19	1,13	1,18
5	Jambi	1,46	1,51	1,39	1,31	1,41
6	Sumatera Selatan	1,42	1,56	1,60	1,48	1,50
7	Bangka Belitung	0,85	0,83	0,85	0,84	0,95
8	Bengkulu	1,84	1,80	1,80	1,72	1,86
9	Lampung	1,65	1,62	1,57	1,53	1,58
33	Kepulauan Riau	0,95	1,07	1,05	0,99	0,83
10	Banten	1,55	1,65	1,53	1,43	1,54
11	D.K.I. Jakarta	0,59	0,64	0,62	0,62	0,68
12	Jawa Barat	1,34	1,30	1,32	1,25	1,35
13	Jawa Tengah	1,23	1,22	1,23	1,18	1,16
14	D.I. Yogyakarta	0,71	0,71	0,68	0,69	0,75
15	Jawa Timur	1,05	1,05	1,04	1,04	1,04
16	Bali	1,11	1,16	1,17	1,11	1,05
17	NTB	1,40	1,36	1,46	1,38	1,35
18	NTT	0,97	0,95	1,07	1,15	1,20
19	Kalimantan Barat	1,21	1,23	1,32	1,27	1,30
20	Kalimantan Tengah	1,70	1,60	1,52	1,67	1,61
21	Kalimantan Selatan	1,16	1,18	1,10	1,20	1,16
22	Kalimantan Timur	1,00	1,10	1,20	1,13	1,08
34	Kalimantan Utara			0,69	0,72	0,81
23	Sulawesi Utara	1,55	1,61	1,75	1,68	1,74
24	Gorontalo	2,79	2,67	2,76	2,75	2,99
25	Sulawesi Tengah	1,70	1,57	1,64	1,62	1,55
26	Sulawesi Selatan	1,33	1,26	1,31	1,34	1,34
27	Sulawesi Tenggara	1,43	1,27	1,41	1,37	1,36
32	Sulawesi Barat	1,78	1,72	2,04	2,04	2,21
28	Maluku Utara	1,04	0,96	1,04	1,14	1,21
29	Maluku	0,80	0,75	0,87	0,95	1,06
30	Papua	0,66	0,70	0,70	0,73	0,77
31	Papua Barat	0,73	0,78	0,88	0,92	0,97
Nasional		**0,93**	**0,96**	**0,94**	**0,93**	**0,98**

PROVINSI	TOTAL PERDAGANGAN (Juta US$)				
	2014	2015	2016	2017	2018
ACEH	564,88	449,65	85,06	186,05	279,74
SUMATERA UTARA	1297,85	917,24	1181,91	1195,96	1144,67
SUMATERA BARAT	2886,49	2391,06	1839,44	2346,66	2136,76
RIAU	23859,64	15601,52	15014,52	17876,92	17561,14
JAMBI	4168,53	2918,62	2026,22	2616,90	3149,75
SUMATERA SELATAN	3829,07	3752,77	3051,99	4447,83	5126,13
BENGKULU	254,06	136,65	161,19	287,19	370,62
LAMPUNG	7336,10	6256,81	5522,82	6598,60	6306,66
KEP. BANGKA BELITUNG	2392,21	1557,86	1477,76	1934,29	1989,56
DKI JAKARTA	96.151,01	89.471,21	82.476,69	91.129,22	103.873,14
JAWA BARAT	29.188,93	26.834,56	27.774,08	32.150,58	33.941,51
JAWA TENGAH	22.252,14	16.540,23	15.248,45	18.119,53	23.039,56
DIY	330,45	113,20	339,91	398,46	434,70
JAWA TIMUR	43.330,04	35.466,75	36.957,41	40.526,43	44.790,41
BANTEN	22.406,10	14.252,79	17.839,14	22.264,34	24.814,69
BALI	913,26	494,54	654,91	660,98	840,54
NTB	434,96	1.650,62	1.753,49	1.187,04	715,74
NTT	55,19	32,33	83,21	142,61	219,15
KALBAR	1.158,75	1.185,75	977,43	1.704,20	1.973,30
KALTENG	1.203,31	2.531,88	1.031,96	1.869,03	2.127,19
KALSEL	10.306,07	5.676,76	6.297,99	8.750,11	9.908,73
KALTIM	34.638,73	23.873,84	17.674,03	20.922,92	23.150,65
KALTARA	50,04	277,88	798,93	982,44	1.305,14
SULUT	1.297,85	917,24	1.181,91	1.195,96	1.144,67
SULTENG	303,95	1.226,11	2.702,94	4.324,79	7.929,19
SULSEL	2.612,43	2.364,61	2.016,09	2.227,74	2.639,06
SULTRA	930,30	644,27	628,49	1.167,97	1.898,69
GORONTALO	67,67	134,62	35,54	10,05	39,77
SULBAR	2.886,49	2.391,06	1.839,44	2.346,66	2.136,76
MALUKU	587,07	312,82	369,07	490,70	598,94
MALUKU UTARA	41,49	72,13	277,16	422,30	972,50
PAPUA BARAT	27,55	35,65	64,56	68,53	57,38
PAPUA	2.544,15	2.754,24	2.820,95	2.989,78	4.462,23
SUMATERA	**46.588,83**	**33.982,19**	**30.360,91**	**37.490,40**	**38.065,04**
JAWA BALI	**214.571,93**	**183.173,27**	**181.290,59**	**205.249,53**	**231.734,56**
NUSA TENGGARA	**490,15**	**1.682,94**	**1.836,70**	**1.329,65**	**934,89**
KALIMANTAN	**47.356,91**	**33.546,10**	**26.780,34**	**34.228,70**	**38.465,00**
SULAWESI	**8.098,67**	**7.677,92**	**8.404,41**	**11.273,16**	**15.788,14**
MALUKU	**628,56**	**384,95**	**646,23**	**913,00**	**1.571,44**
PAPUA	**2.571,70**	**2.789,89**	**2.885,50**	**3.058,32**	**4.519,60**
NASIONAL	**320.306,75**	**263.237,27**	**252.204,68**	**293.542,76**	**331.078,67**

Neraca Perdagangan Provinsi 2014-2018

PROVINSI	TOTAL PERDAGANGAN (Juta US$)				
	2014	2015	2016	2017	2018
ACEH	564,88	449,65	85,06	186,05	279,74
SUMATERA UTARA	1297,85	917,24	1181,91	1195,96	1144,67
SUMATERA BARAT	2886,49	2391,06	1839,44	2346,66	2136,76
RIAU	23859,64	15601,52	15014,52	17876,92	17561,14
JAMBI	4168,53	2918,62	2026,22	2616,90	3149,75
SUMATERA SELATAN	3829,07	3752,77	3051,99	4447,83	5126,13
BENGKULU	254,06	136,65	161,19	287,19	370,62
LAMPUNG	7336,10	6256,81	5522,82	6598,60	6306,66
KEP. BANGKA BELITUNG	2392,21	1557,86	1477,76	1934,29	1989,56
DKI JAKARTA	96.151,01	89.471,21	82.476,69	91.129,22	103.873,14
JAWA BARAT	29.188,93	26.834,56	27.774,08	32.150,58	33.941,51
JAWA TENGAH	22.252,14	16.540,23	15.248,45	18.119,53	23.039,56
DIY	330,45	113,20	339,91	398,46	434,70
JAWA TIMUR	43.330,04	35.466,75	36.957,41	40.526,43	44.790,41
BANTEN	22.406,10	14.252,79	17.839,14	22.264,34	24.814,69
BALI	913,26	494,54	654,91	660,98	840,54
NTB	434,96	1.650,62	1.753,49	1.187,04	715,74
NTT	55,19	32,33	83,21	142,61	219,15
KALBAR	1.158,75	1.185,75	977,43	1.704,20	1.973,30
KALTENG	1.203,31	2.531,88	1.031,96	1.869,03	2.127,19
KALSEL	10.306,07	5.676,76	6.297,99	8.750,11	9.908,73
KALTIM	34.638,73	23.873,84	17.674,03	20.922,92	23.150,65
KALTARA	50,04	277,88	798,93	982,44	1.305,14
SULUT	1.297,85	917,24	1.181,91	1.195,96	1.144,67
SULTENG	303,95	1.226,11	2.702,94	4.324,79	7.929,19
SULSEL	2.612,43	2.364,61	2.016,09	2.227,74	2.639,06
SULTRA	930,30	644,27	628,49	1.167,97	1.898,69
GORONTALO	67,67	134,62	35,54	10,05	39,77
SULBAR	2.886,49	2.391,06	1.839,44	2.346,66	2.136,76
MALUKU	587,07	312,82	369,07	490,70	598,94
MALUKU UTARA	41,49	72,13	277,16	422,30	972,50
PAPUA BARAT	27,55	35,65	64,56	68,53	57,38
PAPUA	2.544,15	2.754,24	2.820,95	2.989,78	4.462,23
SUMATERA	**46.588,83**	**33.982,19**	**30.360,91**	**37.490,40**	**38.065,04**
JAWA BALI	**214.571,93**	**183.173,27**	**181.290,59**	**205.249,53**	**231.734,56**
NUSA TENGGARA	**490,15**	**1.682,94**	**1.836,70**	**1.329,65**	**934,89**
KALIMANTAN	**47.356,91**	**33.546,10**	**26.780,34**	**34.228,70**	**38.465,00**
SULAWESI	**8.098,67**	**7.677,92**	**8.404,41**	**11.273,16**	**15.788,14**
MALUKU	**628,56**	**384,95**	**646,23**	**913,00**	**1.571,44**
PAPUA	**2.571,70**	**2.789,89**	**2.885,50**	**3.058,32**	**4.519,60**
NASIONAL	**320.306,75**	**263.237,27**	**252.204,68**	**293.542,76**	**331.078,67**

Neraca Perdagangan Migas Provinsi 2014-2018 (Juta US$)

PROVINSI	MIGAS				
	2014	2015	2016	2017	2018
ACEH	513,56	46,22	5,46	6,48	7,76
SUMATERA UTARA	10,32	10,80	40,86	33,35	67,27
SUMATERA BARAT	920,27	541,94	273,75	369,61	404,76
RIAU	5464,68	3802,51	2712,90	2659,38	2930,86
JAMBI	2964,55	1712,06	912,30	1118,78	1783,73
SUMATERA SELATAN	632,09	390,32	134,37	266,16	397,78
BENGKULU	4,66	5,03	2,30	4,55	6,47
LAMPUNG	2108,95	1268,19	975,67	1503,33	1714,21
KEP. BANGKA BELITUNG	445,79	237,82	190,65	244,13	339,27
DKI JAKARTA	3.950,81	2.429,67	1.744,24	2.095,38	2.004,83
JAWA BARAT	2.889,35	1.642,03	1.280,48	1.509,86	1.764,42
JAWA TENGAH	10.351,10	5.581,49	3.776,99	4.421,06	5.803,76
DIY	-	-	-	-	-
JAWA TIMUR	8.044,76	4.253,88	3.950,63	5.497,43	6.304,82
BANTEN	2.872,49	1.960,34	2.101,77	3.329,55	4.052,55
BALI	25,83	23,60	17,03	10,46	3,15
NTB	15,76	11,11	8,61	7,66	5,46
NTT	10,94	6,24	18,33	37,46	63,90
KALBAR	245,25	132,01	86,62	105,53	118,11
KALTENG	21,00	17,13	10,85	12,57	18,79
KALSEL	2.183,18	1.100,84	831,26	1.180,95	1.453,31
KALTIM	17.643,36	10.550,75	6.394,68	6.705,50	6.539,99
KALTARA	-	-	0,70	1,14	1,66
SULUT	10,32	10,80	40,86	33,35	67,27
SULTENG	45,73	283,81	745,22	1.104,45	1.482,79
SULSEL	224,19	176,90	113,48	228,71	459,81
SULTRA	478,31	308,51	258,79	340,57	419,90
GORONTALO	8,95	6,92	4,12	3,96	3,55
SULBAR	920,27	541,94	273,75	369,61	404,76
MALUKU	467,74	290,68	239,42	342,49	519,25
MALUKU UTARA	3,28	0,38	1,02	1,32	1,27
PAPUA BARAT	0,01	-	0,98	0,26	6,03
PAPUA	285,78	164,61	212,50	132,47	180,22
SUMATERA	**13.064,87**	**8.014,89**	**5.248,26**	**6.205,77**	**7.652,12**
JAWA BALI	**28.134,33**	**15.891,01**	**12.871,14**	**16.863,74**	**19.933,52**
NUSA TENGGARA	**26,70**	**17,36**	**26,93**	**45,11**	**69,36**
KALIMANTAN	**20.092,79**	**11.800,74**	**7.324,11**	**8.005,68**	**8.131,87**
SULAWESI	**1.687,76**	**1.328,87**	**1.436,22**	**2.080,65**	**2.838,08**
MALUKU	**471,02**	**291,06**	**240,45**	**343,80**	**520,53**
PAPUA	**285,78**	**164,61**	**213,48**	**132,73**	**186,25**
NASIONAL	**63.763,26**	**37.508,54**	**27.360,58**	**33.677,50**	**39.331,72**

Neraca Perdagangan Non Migas Provinsi 2014-2018 (Juta US$)

Provinsi	NON MIGAS				
	2014	2015	2016	2017	2018
ACEH	51,32	403,43	79,60	179,57	271,97
SUMATERA UTARA	1287,53	906,45	1141,05	1162,61	1077,40
SUMATERA BARAT	1966,22	1849,12	1565,69	1977,05	1732,00
RIAU	18394,96	11799,01	12301,62	15217,54	14630,28
JAMBI	1203,98	1206,56	1113,92	1498,12	1366,02
SUMATERA SELATAN	3196,98	3362,45	2917,62	4181,67	4728,35
BENGKULU	249,40	131,62	158,89	282,64	364,16
LAMPUNG	5227,15	4988,62	4547,15	5095,27	4592,45
KEP. BANGKA BELITUNG	1946,42	1320,04	1287,11	1690,16	1650,29
DKI JAKARTA	92.200,20	87.041,54	80.732,45	89.033,84	101.868,31
JAWA BARAT	26.299,58	25.192,53	26.493,60	30.640,72	32.177,09
JAWA TENGAH	11.901,04	10.958,74	11.471,45	13.698,47	17.235,80
DIY	330,45	113,20	339,91	398,46	434,70
JAWA TIMUR	35.285,28	31.212,88	33.006,78	35.029,00	38.485,60
BANTEN	19.533,61	12.292,45	15.737,37	18.934,79	20.762,14
BALI	887,43	470,93	637,88	650,52	837,39
NTB	419,20	1.639,51	1.744,88	1.179,38	710,28
NTT	44,25	26,08	64,88	105,15	155,25
KALBAR	913,50	1.053,74	890,81	1.598,68	1.855,19
KALTENG	1.182,31	2.514,74	1.021,12	1.856,46	2.108,40
KALSEL	8.122,89	4.575,92	5.466,73	7.569,16	8.455,41
KALTIM	16.995,37	13.323,09	11.279,36	14.217,41	16.610,66
KALTARA	50,04	277,88	798,22	981,31	1.303,47
SULUT	1.287,53	906,45	1.141,05	1.162,61	1.077,40
SULTENG	258,22	942,31	1.957,72	3.220,34	6.446,40
SULSEL	2.388,24	2.187,71	1.902,60	1.999,03	2.179,25
SULTRA	451,99	335,75	369,70	827,40	1.478,78
GORONTALO	58,72	127,71	31,43	6,09	36,22
SULBAR	1.966,22	1.849,12	1.565,69	1.977,05	1.732,00
MALUKU	119,33	22,14	129,65	148,22	79,69
MALUKU UTARA	38,21	71,75	276,13	420,98	971,22
PAPUA BARAT	27,54	35,65	63,57	68,27	51,35
PAPUA	2.258,37	2.589,63	2.608,45	2.857,31	4.282,01
SUMATERA	**33.523,96**	**25.967,30**	**25.112,65**	**31.284,63**	**30.412,92**
JAWA BALI	**186.437,60**	**167.282,26**	**168.419,45**	**188.385,79**	**211.801,04**
NUSA TENGGARA	**463,45**	**1.665,59**	**1.809,77**	**1.284,53**	**865,53**
KALIMANTAN	**27.264,12**	**21.745,37**	**19.456,23**	**26.223,02**	**30.333,13**
SULAWESI	**6.410,92**	**6.349,05**	**6.968,19**	**9.192,51**	**12.950,07**
MALUKU	**157,54**	**93,88**	**405,78**	**569,20**	**1.050,91**
PAPUA	**2.285,91**	**2.625,29**	**2.672,03**	**2.925,58**	**4.333,35**
NASIONAL	**256.543,49**	**225.728,73**	**224.844,09**	**259.865,26**	**291.746,95**

Neraca Perdagangan Ekspor Provinsi 2014-2018 (Juta US$)

PROVINSI	EKSPOR				
	2014	2015	2016	2017	2018
ACEH	524,36	332,83	56,07	146,74	250,74
SUMATERA UTARA	1175,78	845,14	1019,92	972,27	974,06
SUMATERA BARAT	1851,88	1758,26	1494,19	1900,39	1590,42
RIAU	22142,88	14260,48	13711,79	16401,54	15993,35
JAMBI	3971,68	2809,59	1895,91	2553,48	3063,79
SUMATERA SELATAN	3078,86	2286,55	2027,28	4016,83	4381,40
BENGKULU	241,41	129,70	158,89	275,25	271,89
LAMPUNG	3895,65	3873,12	3191,74	3873,30	3437,40
KEP. BANGKA BELITUNG	2333,25	1507,97	1345,75	1859,93	1844,82
DKI JAKARTA	11.546,20	18.338,51	11.029,56	9.366,16	9.947,12
JAWA BARAT	27.346,15	24.991,02	25.726,66	29.205,20	30.362,91
JAWA TENGAH	6.451,04	5.801,37	6.437,40	7.461,37	8.260,18
DIY	329,05	110,99	333,70	390,71	424,71
JAWA TIMUR	18.119,14	16.183,03	18.363,03	18.410,86	19.057,71
BANTEN	10.231,20	4.400,72	9.326,93	11.238,39	11.920,74
BALI	536,32	362,60	504,24	536,55	595,84
NTB	316,03	1.483,64	1.585,67	1.113,21	471,15
NTT	23,27	24,45	54,14	68,90	62,06
KALBAR	658,73	557,51	625,61	1.373,61	1.510,23
KALTENG	1.096,62	2.461,14	966,25	1.800,52	1.901,37
KALSEL	7.810,78	4.288,19	5.359,64	7.332,40	8.224,08
KALTIM	26.217,29	18.367,57	13.962,95	17.694,61	18.592,03
KALTARA	-	242,75	781,79	959,82	1.213,93
SULUT	1.175,78	845,14	1.019,92	972,27	974,06
SULTENG	77,26	518,27	1.565,09	3.030,04	5.108,51
SULSEL	1.776,21	1.420,94	1.172,35	1.184,52	1.455,04
SULTRA	351,64	231,45	219,24	382,75	1.082,22
GORONTALO	15,40	31,98	5,32	2,39	35,20
SULBAR	1.851,88	1.758,26	1.494,19	1.900,39	1.590,42
MALUKU	195,47	53,44	164,58	89,54	77,79
MALUKU UTARA	29,83	10,42	35,14	272,46	680,28
PAPUA BARAT	-	-	-	-	-
PAPUA	1.529,67	2.007,52	2.099,61	2.543,17	3.941,81
SUMATERA	**39.215,76**	**27.803,64**	**24.901,54**	**31.999,74**	**31.807,86**
JAWA BALI	**74.559,10**	**70.188,24**	**71.721,52**	**76.609,22**	**80.569,23**
NUSA TENGGARA	**339,30**	**1.508,10**	**1.639,81**	**1.182,12**	**533,21**
KALIMANTAN	**35.783,43**	**25.917,17**	**21.696,24**	**29.160,95**	**31.441,63**
SULAWESI	**5.248,16**	**4.806,03**	**5.476,12**	**7.472,37**	**10.245,45**
MALUKU	**225,30**	**63,87**	**199,73**	**362,00**	**758,06**
PAPUA	**1.529,67**	**2.007,52**	**2.099,61**	**2.543,17**	**3.941,81**
NASIONAL	**156.900,72**	**132.294,57**	**127.734,56**	**149.329,57**	**159.297,25**

Neraca Perdagangan Impor Provinsi 2014-2018 (Juta US$)

PROVINSI	IMPOR				
	2014	2015	2016	2017	2018
ACEH	40,52	116,82	28,99	39,31	29,00
SUMATERA UTARA	122,06	72,10	161,99	223,70	170,61
SUMATERA BARAT	1034,61	632,80	345,25	446,26	546,34
RIAU	1716,76	1341,05	1302,73	1475,38	1567,79
JAMBI	196,85	109,03	130,31	63,41	85,97
SUMATERA SELATAN	750,21	1466,22	1024,71	431,00	744,73
BENGKULU	12,65	6,95	2,30	11,94	98,74
LAMPUNG	3440,46	2383,70	2331,08	2725,30	2869,26
KEP. BANGKA BELITUNG	58,96	49,89	132,01	74,36	144,74
DKI JAKARTA	84.604,81	71.132,70	71.447,13	81.763,06	93.926,02
JAWA BARAT	1.842,78	1.843,54	2.047,42	2.945,38	3.578,60
JAWA TENGAH	15.801,10	10.738,86	8.811,05	10.658,16	14.779,38
DIY	1,41	2,20	6,21	7,75	9,99
JAWA TIMUR	25.210,90	19.283,72	18.594,38	22.115,57	25.732,70
BANTEN	12.174,90	9.852,07	8.512,21	11.025,95	12.893,94
BALI	376,95	131,93	150,67	124,43	244,70
NTB	118,94	166,98	167,82	73,82	244,59
NTT	31,92	7,87	29,07	73,71	157,09
KALBAR	500,02	628,24	351,82	330,60	463,07
KALTENG	106,69	70,73	65,71	68,51	225,82
KALSEL	2.495,29	1.388,57	938,35	1.417,71	1.684,65
KALTIM	8.421,44	5.506,27	3.711,08	3.228,31	4.558,62
KALTARA	50,04	35,12	17,14	22,63	91,21
SULUT	122,06	72,10	161,99	223,70	170,61
SULTENG	226,69	707,84	1.137,85	1.294,74	2.820,69
SULSEL	836,22	943,67	843,74	1.043,22	1.184,02
SULTRA	578,66	412,82	409,25	785,21	816,47
GORONTALO	52,27	102,64	30,22	7,65	4,57
SULBAR	1.034,61	632,80	345,25	446,26	546,34
MALUKU	391,60	259,37	204,49	401,16	521,16
MALUKU UTARA	11,66	61,71	242,01	149,84	292,22
PAPUA BARAT	27,55	35,65	64,56	68,53	57,38
PAPUA	1.014,47	746,72	721,34	446,61	520,42
SUMATERA	**7.373,07**	**6.178,54**	**5.459,37**	**5.490,66**	**6.257,17**
JAWA BALI	**140.012,83**	**112.985,03**	**109.569,07**	**128.640,31**	**151.165,33**
NUSA TENGGARA	**150,86**	**174,85**	**196,89**	**147,53**	**401,68**
KALIMANTAN	**11.573,48**	**7.628,93**	**5.084,10**	**5.067,76**	**7.023,37**
SULAWESI	**2.850,51**	**2.871,88**	**2.928,29**	**3.800,79**	**5.542,69**
MALUKU	**403,26**	**321,08**	**446,50**	**551,00**	**813,38**
PAPUA	**1.042,02**	**782,38**	**785,90**	**515,14**	**577,80**
NASIONAL	**163.406,03**	**130.942,70**	**124.470,12**	**144.213,19**	**171.781,42**

Neraca Perdagangan Provinsi 2014-2018 (Juta US$)

PROVINSI	NERACA PERDAGANGAN				
	2014	2015	2016	2017	2018
ACEH	483,85	216,02	27,07	107,42	221,73
SUMATERA UTARA	1053,72	773,04	857,94	748,57	803,46
SUMATERA BARAT	817,27	1125,46	1148,95	1454,13	1044,08
RIAU	20426,12	12919,43	12409,06	14926,17	14425,56
JAMBI	3774,83	2700,57	1765,59	2490,07	2977,82
SUMATERA SELATAN	2328,65	820,33	1002,57	3585,83	3636,66
BENGKULU	228,77	122,75	156,58	263,32	173,15
LAMPUNG	455,19	1489,42	860,66	1148,00	568,15
KEP. BANGKA BELITUNG	2274,29	1458,07	1213,73	1785,57	1700,08
DKI JAKARTA	73.058,62	52.794,19	60.417,57	72.396,90	83.978,89
JAWA BARAT	25.503,37	23.147,48	23.679,24	26.259,82	26.784,31
JAWA TENGAH	9.350,05	4.937,49	2.373,64	3.196,80	6.519,21
DIY	327,64	108,79	327,49	382,96	414,73
JAWA TIMUR	7.091,75	3.100,69	231,36	3.704,72	6.674,98
BANTEN	1.943,70	5.451,36	814,71	212,44	973,20
BALI	159,37	230,67	353,58	412,12	351,14
NTB	197,09	1.316,67	1.417,85	1.039,39	226,56
NTT	8,65	16,58	25,07	4,80	95,03
KALBAR	158,71	70,73	273,78	1.043,01	1.047,16
KALTENG	989,93	2.390,41	900,55	1.732,00	1.675,55
KALSEL	5.315,50	2.899,62	4.421,30	5.914,68	6.539,44
KALTIM	17.795,85	12.861,30	10.251,87	14.466,30	14.033,41
KALTARA	50,04	207,63	764,65	937,19	1.122,72
SULUT	1.053,72	773,04	857,94	748,57	803,46
SULTENG	149,43	189,58	427,24	1.735,30	2.287,82
SULSEL	939,99	477,26	328,60	141,29	271,01
SULTRA	227,02	181,37	190,00	402,46	265,75
GORONTALO	36,87	70,67	24,90	5,26	30,63
SULBAR	817,27	1.125,46	1.148,95	1.454,13	1.044,08
MALUKU	196,13	205,93	39,91	311,62	443,37
MALUKU UTARA	18,17	51,28	206,87	122,62	388,05
PAPUA BARAT	27,55	35,65	64,56	68,53	57,38
PAPUA	515,20	1.260,79	1.378,27	2.096,56	3.421,39
SUMATERA	**31.842,70**	**21.625,10**	**19.442,16**	**26.509,08**	**25.550,69**
JAWA BALI	**117.434,51**	**89.770,66**	**88.197,58**	**106.565,74**	**125.696,47**
NUSA TENGGARA	**205,74**	**1.333,25**	**1.442,92**	**1.044,19**	**321,59**
KALIMANTAN	**24.310,03**	**18.429,69**	**16.612,15**	**24.093,19**	**24.418,27**
SULAWESI	**3.224,31**	**2.817,38**	**2.977,63**	**4.487,02**	**4.702,76**
MALUKU	**214,30**	**257,21**	**246,77**	**434,25**	**831,42**
PAPUA	**542,75**	**1.296,45**	**1.442,82**	**2.165,10**	**3.478,76**
NASIONAL	**177.774,34**	**135.529,74**	**130.362,04**	**165.298,57**	**184.999,97**

Neraca Perdagangan Migas Provinsi 2014-2018 (Juta US$)

PROVINSI	MIGAS				
	2014	2015	2016	2017	2018
ACEH	488,92	31,34	5,46	6,48	7,76
SUMATERA UTARA	10,32	10,80	40,86	33,35	67,27
SUMATERA BARAT	920,27	541,94	273,75	369,61	404,76
RIAU	4866,16	3259,45	2244,60	2133,17	2455,14
JAMBI	2943,25	1699,32	906,92	1110,50	1775,54
SUMATERA SELATAN	547,63	324,06	95,61	198,22	336,63
BENGKULU	4,66	5,03	2,30	4,55	6,47
LAMPUNG	2108,95	1268,19	975,67	1503,33	1714,21
KEP. BANGKA BELITUNG	412,36	177,48	110,40	137,62	83,14
DKI JAKARTA	3.858,65	2.339,11	1.630,42	1.622,48	1.547,19
JAWA BARAT	750,70	203,73	387,22	1.037,79	1.279,58
JAWA TENGAH	9.658,23	5.338,34	3.530,61	3.954,11	5.466,65
DIY	-	-	-	-	-
JAWA TIMUR	6.559,10	3.007,40	1.932,82	3.031,26	3.749,98
BANTEN	2.835,52	1.942,21	2.023,81	3.280,06	3.939,80
BALI	25,59	23,25	16,97	10,46	3,15
NTB	15,76	11,11	8,61	7,66	5,46
NTT	1,58	1,52	13,51	31,06	59,44
KALBAR	245,25	132,01	86,62	105,53	118,11
KALTENG	21,00	17,13	10,85	12,57	18,79
KALSEL	2.183,18	1.100,84	831,26	1.180,95	1.453,31
KALTIM	3.818,71	2.277,58	1.168,66	1.900,24	127,63
KALTARA	-	-	0,70	1,14	1,66
SULUT	10,32	10,80	40,86	33,35	67,27
SULTENG	24,31	262,28	738,56	1.093,05	1.469,72
SULSEL	224,19	176,90	113,48	228,71	459,81
SULTRA	478,31	308,51	258,79	340,57	419,90
GORONTALO	8,95	6,92	4,12	3,96	3,55
SULBAR	920,27	541,94	273,75	369,61	404,76
MALUKU	304,85	210,66	143,64	254,18	437,85
MALUKU UTARA	3,28	0,38	1,02	1,32	1,27
PAPUA BARAT	0,01	-	0,98	0,26	6,03
PAPUA	285,76	164,55	59,29	127,41	180,11
SUMATERA	**12.302,52**	**7.317,62**	**4.655,57**	**5.496,83**	**6.850,93**
JAWA BALI	**23.687,79**	**12.854,03**	**9.521,84**	**12.936,17**	**15.986,35**
NUSA TENGGARA	**17,34**	**12,63**	**22,11**	**38,72**	**64,90**
KALIMANTAN	**6.268,14**	**3.527,57**	**2.098,09**	**3.200,41**	**1.719,51**
SULAWESI	**1.666,34**	**1.307,34**	**1.429,57**	**2.069,26**	**2.825,01**
MALUKU	**308,13**	**211,04**	**144,66**	**255,50**	**439,12**
PAPUA	**285,77**	**164,55**	**60,27**	**127,67**	**186,14**
NASIONAL	**44.536,04**	**25.394,78**	**17.932,11**	**24.124,57**	**28.071,95**

Neraca Perdagangan Non Migas Provinsi 2014-2018 (Juta US$)

PROVINSI	NON MIGAS				
	2014	2015	2016	2017	2018
ACEH	5,07	184,68	32,54	113,90	229,50
SUMATERA UTARA	1064,04	783,83	898,80	781,92	870,72
SUMATERA BARAT	1737,54	1667,41	1422,70	1823,74	1448,84
RIAU	15559,96	9659,98	10164,47	12793,00	11970,42
JAMBI	831,57	1001,24	858,68	1379,57	1202,28
SUMATERA SELATAN	1781,02	496,27	906,96	3387,61	3300,03
BENGKULU	233,43	127,78	158,89	267,86	179,62
LAMPUNG	2564,14	2757,61	1836,33	2651,33	2282,36
KEP. BANGKA BELITUNG	1861,93	1280,59	1103,33	1647,95	1616,94
DKI JAKARTA	69.199,96	50.455,08	58.787,15	70.774,42	82.431,71
JAWA BARAT	26.254,07	23.351,22	24.066,46	27.297,61	28.063,90
JAWA TENGAH	308,18	400,85	1.156,97	757,31	1.052,56
DIY	327,64	108,79	327,49	382,96	414,73
JAWA TIMUR	532,66	93,30	1.701,46	673,45	2.925,00
BANTEN	891,82	3.509,14	2.838,52	3.492,50	2.966,60
BALI	184,96	253,91	370,54	422,58	354,29
NTB	212,85	1.327,78	1.426,45	1.047,05	232,02
NTT	7,07	18,10	38,57	26,26	35,59
KALBAR	403,97	61,28	360,40	1.148,53	1.165,27
KALTENG	1.010,93	2.407,54	911,39	1.744,57	1.694,34
KALSEL	7.498,68	4.000,46	5.252,55	7.095,63	7.992,75
KALTIM	13.977,14	10.583,72	9.083,21	12.566,07	13.905,78
KALTARA	50,04	207,63	765,35	938,33	1.124,38
SULUT	1.064,04	783,83	898,80	781,92	870,72
SULTENG	173,75	451,85	311,32	642,25	818,10
SULSEL	1.164,18	654,16	442,09	370,01	730,82
SULTRA	251,28	127,14	68,79	61,89	685,65
GORONTALO	27,93	63,75	20,78	1,30	34,18
SULBAR	1.737,54	1.667,41	1.422,70	1.823,74	1.448,84
MALUKU	108,72	4,73	103,73	57,44	5,52
MALUKU UTARA	21,45	50,90	205,84	123,94	389,33
PAPUA BARAT	27,54	35,65	63,57	68,27	51,35
PAPUA	800,97	1.425,35	1.437,56	2.223,97	3.601,49
SUMATERA	**25.638,70**	**17.959,40**	**17.382,69**	**24.846,89**	**23.100,71**
JAWA BALI	**97.699,29**	**78.172,29**	**89.248,59**	**103.800,83**	**118.208,77**
NUSA TENGGARA	**219,93**	**1.345,88**	**1.465,03**	**1.073,31**	**267,61**
KALIMANTAN	**22.940,75**	**17.260,64**	**16.372,92**	**23.493,13**	**25.882,51**
SULAWESI	**4.418,71**	**3.748,15**	**3.164,47**	**3.681,11**	**4.588,32**
MALUKU	**130,17**	**55,63**	**309,58**	**181,38**	**394,85**
PAPUA	**828,51**	**1.461,00**	**1.501,13**	**2.292,25**	**3.652,84**
NASIONAL	**151.876,06**	**120.002,99**	**129.444,41**	**159.368,91**	**176.095,62**

Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak, 1993-2017

Provinsi	2013	2014	2015	2016	2017
Aceh	53,47	33,68	54,68	62,68	63,38
Sumatera Utara	61,92	66,92	67,89	72,86	73,00
Sumatera Barat	46,13	42,34	45,02	53,24	52,77
Riau	63,44	48,74	51,30	71,36	70,04
Jambi	58,53	58,58	58,21	65,65	64,20
Sumatera Selatan	51,66	59,79	61,30	65,05	66,36
Bengkulu	32,37	33,18	39,22	49,75	42,71
Lampung	45,86	37,27	44,83	58,58	52,89
Kepulauan Bangka Belitung	77,95	75,67	80,80	83,16	83,56
Kepulauan Riau	71,35	63,45	71,97	79,55	86,33
DKI Jakarta	86,57	87,05	89,28	91,13	91,13
Jawa Barat	60,18	61,00	59,43	63,79	64,40
Jawa Tengah	63,28	67,43	67,20	70,66	71,84
DI Yogyakarta	84,20	82,50	86,31	85,78	89,40
Jawa Timur	60,38	63,70	63,48	68,15	68,83
Banten	67,27	69,51	67,04	73,42	71,68
Bali	83,63	79,38	85,46	89,33	90,51
Nusa Tenggara Barat	52,88	59,41	63,72	70,31	69,25
Nusa Tenggara Timur	28,80	16,12	23,90	40,46	45,31
Kalimantan Barat	52,10	48,59	39,78	52,06	49,65
Kalimantan Tengah	44,05	30,85	35,88	50,97	45,46
Kalimantan Selatan	57,54	48,44	60,13	60,89	58,09
Kalimantan Timur	75,93	72,65	68,83	76,76	72,83
Kalimantan Utara	-	-	48,40	64,68	66,59
Sulawesi Utara	72,28	69,82	66,79	75,27	71,93
Sulawesi Tengah	54,21	52,47	55,37	59,94	61,12
Sulawesi Selatan	69,51	71,07	72,36	76,51	76,73
Sulawesi Tenggara	59,24	61,26	63,62	68,26	69,52
Gorontalo	52,69	54,07	54,96	59,85	58,75
Sulawesi Barat	46,42	52,45	51,21	59,81	59,48
Maluku	62,39	62,87	60,02	66,81	63,29
Maluku Utara	57,72	55,75	59,17	64,71	66,18
Papua Barat	49,06	61,85	62,81	64,55	65,30
Papua	27,89	21,66	28,04	31,43	33,06
Total	**60,91**	**61,08**	**62,14**	**67,80**	**67,89**

Catatan :

a. Pada tahun 2000 pencacahan Susenas tidak dilakukan di Provinsi NAD (Aceh) dan Maluku

b. Pada tahun 2001 pencacahan Susenas tidak dilakukan di Provinsi NAD (Aceh)

c. Untuk Provinsi Aceh, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, pencacahan Susenas tahun 2002 hanya dilakuka

**)Backcasting*

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS

Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Lantai Terluas bukan Tanah, 2009-2018

Provinsi	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Perkotaan+ Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
Aceh	93,33	94,29	93,77	95,07	95,55	95,90
Sumatera Utara	97,12	97,49	97,47	97,72	98,09	97,95
Sumatera Barat	98,24	98,96	99,07	99,26	98,98	99,32
Riau	98,56	99,03	98,74	98,96	99,12	99,11
Jambi	97,74	98,13	97,40	98,23	98,04	98,17
Sumatera Selatan	95,09	95,67	96,02	96,66	96,94	96,47
Bengkulu	95,93	96,97	96,83	97,30	97,99	97,43
Lampung	88,86	89,88	90,88	92,53	93,04	94,28
Kepulauan Bangka Belitung	99,25	99,39	99,85	99,95	99,82	99,83
Kepulauan Riau	99,62	99,53	99,86	99,67	99,81	99,53
DKI Jakarta	99,44	99,76	99,51	99,71	99,70	99,75
Jawa Barat	94,68	96,86	97,29	97,55	98,01	97,77
Jawa Tengah	81,57	82,88	84,10	84,46	86,21	87,85
DI Yogyakarta	91,51	93,00	93,93	93,07	95,83	96,17
Jawa Timur	86,78	87,95	88,07	88,74	90,22	90,96
Banten	91,66	95,76	95,98	96,29	96,97	97,00
Bali	97,78	97,88	98,27	98,78	98,44	98,30
Nusa Tenggara Barat	93,23	95,85	96,23	97,97	97,41	97,73
Nusa Tenggara Timur	62,42	71,10	72,07	73,79	76,56	78,95
Kalimantan Barat	99,38	99,64	99,46	99,64	99,70	99,76
Kalimantan Tengah	98,85	99,10	98,99	99,08	99,12	99,23
Kalimantan Selatan	99,18	99,13	99,30	99,39	99,52	99,58
Kalimantan Timur	99,35	99,61	99,09	99,24	99,48	99,40
Kalimantan Utara	-	-	99,40	99,32	99,84	99,86
Sulawesi Utara	94,99	95,72	95,09	96,17	97,02	96,59
Sulawesi Tengah	93,20	95,73	96,23	96,75	97,42	97,02
Sulawesi Selatan	97,30	98,42	98,26	98,63	98,76	98,73
Sulawesi Tenggara	92,71	96,04	96,23	97,02	96,64	97,63
Gorontalo	95,98	97,38	97,47	97,79	98,95	98,59
Sulawesi Barat	92,90	95,89	96,03	96,19	97,36	96,98
Maluku	89,56	92,48	91,97	93,41	93,92	95,26
Maluku Utara	88,28	90,14	90,88	91,08	92,69	93,72
Papua Barat	95,86	97,25	97,44	97,21	96,69	97,82
Papua	67,40	77,95	74,30	74,03	74,84	75,06
Nasional	**91,17**	**92,80**	**93,10**	**93,58**	**94,38**	**94,79**

Panjang Jalan menurut Provinsi Tahun 2015-2018

Provinsi	2015				2016				2017				2018			
	Negara	Provinsi	Kab/Kota	Jumlah	Negara	Provinsi	Kab/Kota	Jumlah	Negara	Provinsi	Kab/Kota	Jumlah	Negara	Provinsi	Kab/Kota	Jumlah
Aceh	2.102	1.782	19.940	23.824	2.102	1.782	18.926	22.810	2.102	1.782	20.135	24.019	2.102	1.782	20.135	24.019
Sumatera Utara	2.632	3.049	34.847	40.528	2.632	3.049	35.092	40.773	2.632	3.048	33.863	39.543	2.632	3.048	33.863	39.543
Sumatera Barat	1.449	1.525	20.624	23.598	1.449	1.525	20.460	23.434	1.449	1.525	19.582	22.556	1.449	1.525	19.582	22.556
Riau	1.337	3.033	22.472	26.842	1.337	3.033	22.670	27.040	1.337	2.800	20.855	24.992	1.337	2.800	20.934	25.071
Jambi	1.318	1.505	11.063	13.886	1.318	1.505	10.908	13.731	1.318	1.033	10.676	13.027	1.318	1.033	10.676	13.027
Sumatera Selatan	1.600	1.463	15.557	18.620	1.600	1.463	15.758	18.821	1.600	1.514	16.119	19.233	1.600	1.514	16.119	19.233
Bengkulu	793	1.563	6.874	9.230	793	1.563	6.881	9.237	793	1.563	6.840	9.196	793	1.563	6.840	9.196
Lampung	1.292	1.703	14.608	17.603	1.292	1.703	18.167	21.162	1.292	1.693	18.059	21.044	1.292	1.693	18.059	21.044
Kepulauan Bangka Belitung	600	899	4.026	5.525	600	899	3.934	5.433	600	851	4.034	5.485	600	851	4.034	5.485
Kepulauan Riau	587	895	3.856	5.338	587	895	4.070	5.552	587	896	4.203	5.686	587	896	4.203	5.686
DKI Jakarta	53	7.041	0	7.094	53	7.041	0	7.094	53	6.679	0	6.732	53	6.679	0	6.732
Jawa Barat	1.789	2.191	22.294	26.274	1.789	2.191	22.553	26.533	1.789	2.361	22.830	26.980	1.789	2.361	22.720	26.870
Jawa Tengah	1.518	2.405	23.622	27.545	1.518	2.405	27.257	31.180	1.518	2.405	26.471	30.394	1.518	2.405	26.471	30.394
DI Yogyakarta	248	619	3.007	3.874	248	619	2.909	3.776	248	760	3.369	4.377	248	760	3.369	4.377
Jawa Timur	2.361	1.421	37.958	41.740	2.361	1.421	38.052	41.834	2.361	1.421	37.173	40.955	2.361	1.421	37.173	40.955
Banten	565	732	5.672	6.969	565	732	5.670	6.967	565	762	5.600	6.927	565	762	5.665	6.992
Bali	629	743	6.507	7.879	629	743	6.989	8.361	629	743	7.306	8.678	629	743	7.306	8.678
Nusa Tenggara Barat	935	1.485	5.749	8.169	935	1.485	5.803	8.223	935	1.484	6.106	8.525	935	1.484	6.106	8.525
Nusa Tenggara Timur	1.858	1.737	18.157	21.752	1.858	1.737	19.091	22.686	1.858	2.650	18.685	23.193	1.858	2.650	18.685	23.193
Kalimantan Barat	2.118	1.562	12.070	15.750	2.118	1.562	14.268	17.948	2.118	1.535	14.581	18.234	2.118	1.535	14.573	18.226
Kalimantan Tengah	2.002	1.100	11.979	15.081	2.002	1.100	14.345	17.447	2.002	1.272	14.665	17.939	2.002	1.272	14.665	17.939
Kalimantan Selatan	1.204	852	10.749	12.805	1.204	852	11.567	13.623	1.204	763	11.647	13.614	1.204	763	11.647	13.614
Kalimantan Timur	1.711	1.640	9.112	12.463	1.711	1.640	8.795	12.146	1.711	885	10.737	13.333	1.711	885	10.737	13.333
Kalimantan Utara	585	900	3.492	4.977	585	900	3.062	4.547	585	852	1.746	3.183	585	852	1.747	3.184
Sulawesi Utara	1.664	981	6.843	9.488	1.664	981	7.097	9.742	1.664	927	7.249	9.840	1.664	927	7.249	9.840
Sulawesi Tengah	2.373	1.619	12.242	16.234	2.373	1.619	12.294	16.286	2.373	1.644	12.548	16.565	2.373	1.644	12.548	16.565
Sulawesi Selatan	1.746	1.500	29.969	33.215	1.746	1.500	28.098	31.344	1.746	2.015	26.918	30.679	1.746	2.015	26.918	30.679
Sulawesi Tenggara	1.498	1.009	8.917	11.424	1.498	1.009	10.218	12.725	1.498	1.009	10.557	13.064	1.498	1.009	10.557	13.064
Gorontalo	749	433	4.703	5.885	749	433	4.364	5.546	749	467	4.279	5.495	749	467	4.279	5.495
Sulawesi Barat	763	186	5.993	6.942	763	186	5.460	6.409	763	186	4.809	5.758	763	186	4.808	5.757
Maluku	1.772	1.298	5.272	8.342	1.772	1.298	6.819	9.889	1.772	1.080	7.361	10.213	1.772	1.080	7.361	10.213
Maluku Utara	1.203	1.277	4.620	7.100	1.203	1.277	4.596	7.076	1.203	1.277	4.952	7.432	1.203	1.277	4.952	7.432
Papua Barat	1.326	2.310	5.794	9.430	1.326	2.310	6.124	9.760	1.326	2.310	8.231	11.867	1.326	2.310	8.281	11.917
Papua	2.637	2.958	12.953	18.548	2.637	2.958	13.107	18.702	2.637	2.362	16.733	21.732	2.637	2.362	16.825	21.824
Indonesia	**47.017**	**55.416**	**421.541**	**523.974**	**47.017**	**55.416**	**435.404**	**537.837**	**47.017**	**54.554**	**438.919**	**540.490**	**47.017**	**54.554**	**439.087**	**540.658**

Kondisi Jalan Tahun 2016

Provinsi	Jalan Provinsi		Jalan Kabupaten		Jalan Kota	
	% Mantap	% Tidak Mantap	% Mantap	% Tidak Mantap	% Mantap	% Tidak Mantap
Aceh	57,9	42,1	57,3	42,7	75,50	24,50
Sumatera Utara	76,1	23,9	50,1	49,9	78,86	21,14
Sumatera Barat	69,2	30,8	50,2	49,8	76,87	23,13
Riau	63,0	37,0	59,6	40,4	75,44	24,56
Jambi	75,4	24,6	56,0	44,0	71,86	28,14
Sumatera Selatan	96,7	3,3	64,1	35,9	73,41	26,59
Bengkulu	44,5	55,5	57,1	42,9	77,42	22,58
Lampung	67,0	33,0	0,5	53,7	79,33	20,67
Kepulauan Bangka Belitung	92,2	7,8	74,5	25,6	92,21	7,79
Kepulauan Riau	78,2	21,8	58,8	41,2	81,17	18,83
Jawa Barat	97,8	2,2	70,1	29,9	91,18	8,82
Jawa Tengah	95,3	4,7	73,0	27,1	85,20	14,80
DI Yogyakarta	74,0	26,1	81,3	18,7	84,29	15,71
Jawa Timur	89,8	10,2	71,3	28,7	94,63	5,37
Banten	75,8	24,3	78,1	21,9	98,34	1,66
Bali	82,7	17,4	66,8	33,2	84,96	15,04
Nusa Tenggara Barat	66,2	33,9	52,6	47,4	69,88	30,12
Nusa Tenggara Timur	45,1	54,9	52,2	47,8	65,56	34,44
Kalimantan Barat	81,1	18,9	44,4	55,6	56,39	43,61
Kalimantan Tengah	87,5	12,5	46,4	53,6	50,07	49,93
Kalimantan Selatan	93,6	6,4	53,8	46,2	73,68	26,32
Kalimantan Timur	61,2	38,8	60,0	40,0	89,31	10,69
Kalimantan Utara	18,1	81,9	77,0	23,1	75,87	24,13
Sulawesi Utara	76,1	24,0	44,9	55,1	73,68	26,32
Sulawesi Tengah	57,7	42,3	49,0	51,0	68,04	31,96
Sulawesi Selatan	61,0	39,0	57,2	42,8	70,37	29,63
Sulawesi Tenggara	61,5	38,5	44,9	55,2	72,51	27,49
Gorontalo	77,4	22,6	51,6	48,4	88,86	11,14
Sulawesi Barat	32,4	67,6	43,3	56,7	0,00	0,00
Maluku	54,3	45,7	50,5	49,5	81,78	18,22
Maluku Utara	19,8	80,2	37,9	62,1	80,95	19,05
Papua Barat	62,9	37,1	43,8	56,2	82,44	17,56
Papua	75,2	24,8	49,8	50,3	81,01	18,99

Banyaknya Kendaraaan Bermotor

Provinsi	2014	2015	2016	2017
Aceh	2.873.331	2.913.013	3.064.126	3.177.873
Sumatera Utara	5.865.001	6.026.150	6.191.417	7.369.113
Sumatera Barat	2.042.822	2.199.646	2.317.871	2.442.071
Riau	2.680.163	2.808.613	2.890.671	3.069.332
Jambi	3.970.850	4.103.495	4.932.026	5.524.738
Sumatera Selatan	4.391.111	4.963.694	5.128.207	5.580.365
Bengkulu	976.118	1.039.535	1.082.167	1.141.740
Lampung	2.718.074	2.977.698	3.116.502	3.267.573
Kepulauan Bangka Belitung	910.445	940.602	977.430	1.052.990
Kepulauan Riau	1.133.998	1.231.227	1.402.283	1.445.931
DKI Jakarta	17.853.804	18.947.642	19.848.324	20.730.267
Jawa Barat	9.236.835	10.095.831	11.025.188	12.001.487
Jawa Tengah	13.297.231	14.607.215	15.534.559	16.221.621
DI Yogyakarta	3.707.232	3.754.247	3.969.561	4.616.016
Jawa Timur	13.840.116	14.706.680	15.466.112	16.400.894
Banten	2.434.155	2.621.342	2.792.788	3.013.257
Bali	4.170.073	4.305.966	4.736.813	4.931.597
Nusa Tenggara Barat	1.904.570	1.937.131	2.078.578	2.190.964
Nusa Tenggara Timur	1.219.698	1.233.330	1.364.867	1.667.969
Kalimantan Barat	2.382.441	2.560.970	2.702.243	2.818.148
Kalimantan Tengah	1.310.010	1.432.351	1.576.455	1.728.666
Kalimantan Selatan	2.435.063	2.479.475	2.702.322	2.955.067
Kalimantan Timur dan Utara	2.656.779	2.780.535	2.844.181	2.966.407
Sulawesi Utara	1.269.636	1.349.806	1.531.205	1.584.839
Sulawesi Tengah	2.188.552	2.225.230	2.360.767	2.422.682
Sulawesi Selatan*	3.501.135	3.804.436	4.015.226	4.218.499
Sulawesi Tenggara	1.373.260	1.397.098	1.478.725	1.532.732
Gorontalo	419.165	441.159	460.614	493.255
Sulawesi Barat	-	-	4.924	19.825
Maluku	595.524	607.270	633.601	863.348
Maluku Utara	88.758	93.951	119.584	150.856
Papua Barat	-	-	108.989	127.263
Papua*	763.310	808.847	822.753,00	829.284
Total	**114.209.260**	**121.394.185**	**129.281.079,00**	**138.556.669**

**Tahun 2014 dan 2015 termasuk Sulawesi Barat*

*** Tahun 2014 dan 2015 termasuk Papua Barat*

Sumber: Statistik Transportasi Darat

Rasio Elektrifikasi Tahun 2015-2018 provinsi di Indonesia				
Provinsi	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Aceh	94,77	96,28	97,68	99,2
Sumatera Utara	93,15	95,81	99,9	99,99
Sumatera Barat	83,2	86,13	89,15	91,6
Riau	89,19	88,81	95,25	98,44
Kepulauan Riau	73,53	76,37	76,97	88,11
Sumatera Selatan	80,44	83,74	88,38	91,21
Jambi	85,32	88,99	93,68	98,09
Bengkulu	87,3	91	96,49	99,96
Bangka Belitung	99,97	99,97	106,35	99,99
Lampung	84,71	87,97	91,96	96,38
DKI Jakarta	99,76	99,98	103,75	99,99
Banten	95,64	99,91	105,97	99,99
Jawa Barat	94,27	97,81	102,9	99,99
Jawa Tengah	91,36	93,62	96,3	99,97
DI. Yogyakarta	86,27	88,66	103,03	99,99
Jawa Timur	86,69	89,16	92,03	94,65
Bali	89,19	92,2	97,12	100
Nusa Tenggara Barat	72,77	77,22	84,11	62,07
Nusa Tenggara Timur	58,64	58,93	59,85	90,82
Kalimantan Barat	82,38	86,03	89,93	87,29
Kalimantan Tengah	69,54	73,08	80,82	84,56
Kalimantan Selatan	86,77	89,07	92,12	95,98
Kalimantan Timur	95,41	98,78	100,8	99,99
Kalimantan Utara	73,48	77,37	84,78	90,28
Sulawesi Utara	89,17	91,31	94,56	97,47
Sulawesi Tengah	79,56	89,11	79,31	91,54
Sulawesi Selatan	88,3	92,09	99,12	99,99
Sulawesi Tenggara	68,84	74,47	81,54	90,39
Sulawesi Barat	76,91	80,06	95,28	99,99
Gorontalo	79,18	87,66	86,56	89,59
Maluku	84,8	87,12	87,39	90,95
Maluku Utara	94,46	98,06	96,09	99,99
Papua Barat	45,93	47,78	95,7	90,47
Papua	82,7	88,24	61,42	99,99
TOTAL INDONESIA	88,3	91,16	95,35	98,3
Sumber: BPS				

PRODUKSI TENAGA LISTRIK PLN PER JENIS PEMBANGKIT DAN PER WILAYAH 2017

No	WILAYAH	*REGION*	P LTA *Hydro PP*	PLTP *Geothermal PP*	PLTU-M *Steam Oil PP*	PLTU-G *Steam Natural Gas PP*	PLTU-B *Steam Coal PP*	PLTU-M *Steam Oil PP Rented*	PLTU-G *Steam Natural Gas PP Rented*	PLTU-B *Steam Coal PP Rented*	PLTD *Diesel PP*	PLTD *Diesel PP Rented*	PLTG-M *Gas Turbine PP*	PLTS *Photovoltaic PP*	PLTB *Wind PP*	PLTA dan PLTS *Hydro and Photovoltaic PP Rented*	Jumlah *Total*
1	Aceh	*Aceh*	8,36	-	-	-	-	-	-	-	134,09	320,31	-	-	-	-	462,76
2	Sumatera Utara	*North Sumatera*	-	-	-	-	-	37,47	-	-	5,76	93,86	-	-	-	-	137,09
3	Sumatera Barat	*West Sumatera*	0,60	-	-	-	-	-	-	-	25,51	58,80	-	-	-	-	84,91
4	Riau	*Riau*	-	-	-	-	-	-	-	-	55,77	761,30	-	-	-	-	817,07
5	Kepulauan Riau	*Riau Islands*	-	-	-	-	50,26	-	-	76,82	119,61	163,30	-	0,11	-	-	410,10
6	Sumatera Selatan	*South Sumatera*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Jambi	*Jambi*	-	-	-	-	-	-	-	-	1,03	37,66	-	-	-	-	38,69
8	Bengkulu	*Bengkulu*	0,01	-	-	-	-	-	-	-	6,05	74,67	-	-	-	-	80,73
9	Bangka Belitung	*Bangka Belitung*	-	-	-	-	287,11	141,98	-	-	149,84	378,98	-	0,04	-	-	957,95
10	Lampung	*Lampung*	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	0,18
11	Kalimantan Barat	*West Kalimantan*	1,88	-	-	5,90	158,96	12,70	-	-	242,06	1.074,55	-	0,02	-	-	1.496,07
12	Kalimantan Selatan	*South Kalimantan*	149,45	-	-	5,54	2.115,55	-	-	-	685,58	245,45	-	-	-	-	3.201,57
13	Kalimantan Tengah	*Centre Kalimantan*	-	-	-	-	-	-	-	-	64,59	304,52	-	-	-	-	369,11
14	Kalimantan Timur dan Utara	*East Kalimantan*	-	-	27,49	114,15	391,40	156,79	-	-	277,29	716,54	-	0,06	-	0,35	1.683,72
15	Sulawesi Utara	*North Sulawesi*	262,84	479,51	-	89,62	229,91	-	-	3,21	69,32	66,42	-	0,21	-	-	1.201,04
16	Gorontalo	*Gorontalo*	2,52	-	-	-	-	-	-	-	23,10	0,26	-	0,03	-	-	25,91
17	Sulawesi Tengah	*Centre Sulawesi*	17,18	-	-	-	-	-	-	31,60	74,28	271,50	-	-	-	-	394,56
18	Sulawesi Selatan	*South Sulawesi*	1.047,67	-	-	13,84	423,51	-	394,37	-	69,95	171,11	-	0,43	-	-	2.120,88
19	Sulawesi Tenggara	*South East Sulawesi*	5,09	-	-	53,75	151,43	-	-	-	178,00	485,13	-	0,02	-	-	873,42
20	Sulawesi Barat	*West Sulawesi*	-	-	-	-	-	-	-	-	1,04	43,21	-	-	-	-	44,25
21	Maluku	*Maluku*	-	-	-	-	74,82	-	-	-	159,81	384,94	-	0,60	-	-	620,17
22	Maluku Utara	*North Maluku*	-	-	-	-	-	-	-	-	101,60	135,59	-	0,51	-	-	237,70
23	Papua	*Papua*	62,58	-	-	-	17,29	-	-	3,64	104,19	555,43	-	0,28	-	-	743,41
24	Papua Barat	*West Papua*	21,52	-	-	-	9,49	-	-	8,60	163,30	344,54	-	0,11	-	-	547,56
25	Distribusi Bali	*Bali*	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	0,04
26	Nusa Tenggara Barat	*West Nusa Tenggara*	8,54	-	-	-	159,86	48,39	-	2,42	334,03	964,65	-	1,07	-	-	1.518,96
27	Nusa Tenggara Timur	*East Nusa Tenggara*	14,13	42,45	-	-	123,31	-	-	-	74,96	340,47	-	0,91	-	-	596,23
28	PT PLN Batam	*PT PLN Batam*	-	-	69,97	151,28	-	-	-	-	75,89	-	-	-	-	-	297,14
29	Kit Sumbagut	*Kit Sumbagut*	1.083,58	-	3.889,39	346,61	3.612,36	541,18	-	-	1.400,86	1.909,90	-	-	-	-	12.783,88
30	Kit Sumbagsel	*Kit Sumbagsel*	2.434,62	792,76	792,78	368,65	3.483,99	1.286,77	-	-	210,77	684,73	-	-	-	-	10.055,07
31	P3B Sumatera	*P3B Sumatera *)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LUAR JAWA	***OUT SIDE JAVA***	**5.120,57**	**1.314,72**	**4.779,63**	**1.149,34**	**11.289,25**	**2.225,28**	**39.437,00**	**126,29**	**4.808,50**	**10.587,82**	**-**	**4,40**	**-**	**0,35**	**41.800,18**
32	Dist. Jawa Timur	*Dist. Of East java*	53,04	-	-	-	-	-	-	-	4,28	40,26	-	-	-	-	97,58
33	Jawa Tengah & DIY	*Central Java*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	D.I. Yogyakarta	*D.I. Yogyakarta*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Jawa Barat	*West Java*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Banten	*Banten*	-	-	-	-	-	-	-	-	0,57	-	-	-	-	-	0,57
37	Dist. Jakarta Raya dan Tangerang	*Dist. Jakarta Raya dan Tangerang*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	PT Indonesia Power	*PT Indonesia Power*	4.337,04	2.781,27	9.953,22	268,31	23.894,44	-	-	-	930,32	71,46	-	-	-	-	42.236,06
39	PT PJB	*PT PJB*	2.914,51	-	11.218,93	474,26	9.809,39	-	-	-	89,11	-	-	1,10	-	-	24.507,30
40	P2B Jawa Bagian Barat	*P2B Jawa Bagian Barat*	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	P2B Jawa Bagian Tengah	*P2B Jawa Bagian Tengah*	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	P2B Jawa Bagian Timur dan Bali	*P2B Jawa Bagian Timur dan Bali*	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Pembangkitan Tanjung Jati B	*Pembangkitan Tanjung Jati B*	-	-	-	-	19.352,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.352,86
44	Kit Jawa Bagian Barat	*Kit Jawa Bagian Barat*	-	-	11.620,83	-	12.466,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.087,75
45	Kit Jawa Bagian Tengah	*Kit Jawa Bagian Tengah*	-	-	501,49	-	17.563,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.064,73
46	Kit Jawa Bagian Timur dan Bali	*Kit Jawa Bagian Timur dan Bali*	-	-	-	-	11.275,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.275,29
	JAWA	***J AVA***	**7.304,59**	**2.781,27**	**33.294,47**	**742,57**	**94.362,14**	**-**	**-**	**-**	**1.024,28**	**111,72**	**-**	**1,10**	**-**	**-**	**139.622,14**
47	UIP XI	*UIP XI*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	UIP XII	*UIP XII*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	UIP XIII	*UIP XIII*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	UIP KITSUM	*UIP KITSUM*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	UIP KALBAGBAR	*UIP KALBAGBAR*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	UIP KALBAGTENG	*UIP KALBAGTENG*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	UIP KALBAGTIM	*UIP KALBAGTIM*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	UIP JBB	*UIP JBB*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	UIP JBT I	*UIP JBT I*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	UIP JBTB II	*UIP JBTB II*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PROYEK PEMBANGKITAN	***POWER PLAN***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	INDONESIA	***INDONESIA***	**12.425,16**	**4.095,99**	**38.074,10**	**1.891,91**	**105.651,39**	**2.225,28**	**394,37**	**126,29**	**5.832,78**	**10.699,54**	**-**	**5,50**	**-**	**0,35**	**181.422,32**

Tenaga Listrik Yang Dibangkitkan menurut Provinsi Tahun 2011-2017

Provinsi	Tenaga Listrik yang Dibangkitkan Menurut Provinsi (GWh)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2017
ACEH	794,16	534,80	522,89	582,06	618,26	568,20
SUMATERA UTARA	15.342,39	16.402,98	17.459,73	18.028,30	18.876,59	18.544,99
SUMATERA BARAT	287,05	169,73	185,73	179,47	182,69	89,28
RIAU	742,90	634,56	811,30	892,63	969,73	1.032,83
JAMBI	18,70	108,15	137,62	127,89	134,31	124,19
SUMATERA SELATAN	11.869,97	14.033,65	14.639,61	15.738,07	16.431,48	16.955,88
BENGKULU	84,20	88,63	75,25	81,04	82,87	80,73
LAMPUNG	271,57	41,53	40,56	40,59	40,55	40,60
KEP. BANGKA BELITUNG	605,14	744,45	802,32	927,95	939,41	974,12
KEP. RIAU	2.155,14	2.345,35	2.166,16	3.530,02	2.830,82	2.275,74
DKI JAKARTA	3.566,51	5.526,40	5.433,79	4.115,58	3.408,60	16.070,82
JAWA BARAT	16.089,53	17.378,85	21.615,84	20.849,37	20.617,92	37.801,93
JAWA TENGAH	28.144,95	27.271,44	27.916,22	27.133,45	25.690,27	39.579,73
DI YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-
JAWA TIMUR	51.798,98	51.753,79	54.548,64	56.631,27	52.624,96	53.868,24
BANTEN	39.459,85	46.317,37	52.860,36	63.695,13	70.279,07	46.111,50
BALI	573,60	1.951,83	2.271,20	2.374,48	1.919,80	3.564,45
NUSA TENGGARA BARAT	958,37	1.118,46	1.311,72	1.476,01	1.558,03	1.563,41
NUSA TENGGARA TIMUR	531,90	643,87	717,66	730,93	820,20	600,32
KALIMANTAN BARAT	1.662,91	1.852,69	2.116,47	2.225,89	2.340,32	1.609,28
KALIMANTAN TENGAH	554,12	611,26	615,20	602,42	556,67	369,11
KALIMANTAN SELATAN	2.063,97	2.331,42	2.690,52	3.124,21	3.314,14	3.933,49
KALIMANTAN TIMUR	2.560,09	2.675,06	3.636,90	3.063,27	2.450,57	3.769,59
KALIMANTAN UTARA	168,83	164,44	162,31	206,06	70,48	184,58
SULAWESI UTARA	1.185,80	1.841,21	1.863,31	1.916,15	1.959,76	1.937,36
SULAWESI TENGAH	731,49	803,14	916,27	1.768,15	1.580,22	1.720,51
SULAWESI SELATAN	3.848,83	4.237,42	4.233,85	5.254,27	5.978,87	5.878,51
SULAWESI TENGGARA	499,10	629,22	236,83	273,37	846,29	873,80
GORONTALO	251,45	209,48	174,99	233,59	291,12	115,76
SULAWESI BARAT	9,25	7,68	7,42	18,01	18,90	44,25
MALUKU	471,33	608,88	524,93	751,90	781,38	620,77
MALUKU UTARA	156,85	107,89	245,01	138,50	170,35	238,21
PAPUA BARAT	337,94	381,04	415,60	324,34	447,95	713,88
PAPUA	600,44	678,74	850,71	974,65	917,48	805,28
INDONESIA	**188.397,30**	**204.205,42**	**22.206,93**	**238.019,10**	**239.750,07**	**262.661,38**

REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN Tahun 2015, (Rp. miliar)

No.	PROVINSI	PENDAPATAN DAERAH	1. PAD	1.1. PAJAK DAERAH	1.2. RETRIBUSI DAERAH	1.3. HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN	1.4. LAIN-LAIN P.A.D. YANG SAH	2. DANA PERIMBANGAN	2.1. BAGI HASIL PAJAK	2.2. BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA	2.3. DANA ALOKASI UMUM	2.4. DANA ALOKASI KHUSUS	2.5. PENDAPATAN LAINNYA	B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN
1.	Aceh	11.694	1.986	1.173	5	165	643	1.562	206	47	1.238	71	8.147	917
2.	Sumatera Utara	8.481	4.884	4.427	36	250	170	1.521	314	20	1.139	48	2.076	15
3.	Sumatera Barat	4.052	1.877	1.446	20	85	326	1.391	94	13	1.221	63	785	274
4.	Riau	6.911	3.477	2.573	22	178	704	2.549	756	1.075	654	63	885	3.982
5.	Jambi	3.130	1.241	1.010	19	34	178	1.419	180	172	1.009	58	469	475
6.	Sumatera Selatan	5.990	2.535	2.325	17	61	132	2.330	578	750	932	69	1.126	40
7.	Bengkulu	2.181	701	511	4	18	168	1.209	36	63	1.046	64	270	256
8.	Lampung	4.787	2.247	1.963	10	26	248	1.514	105	67	1.097	245	1.026	111
9.	Bangka Belitung	1.887	572	507	12	5	48	1.130	47	141	898	44	185	326
10.	Kepulauan Riau	2.513	1.012	952	2	4	55	1.246	167	341	696	43	255	136
11.	DKI Jakarta	44.209	33.686	29.077	459	527	3.623	5.887	5.752	136	0	0	4.636	9.210
12.	Jawa Barat	24.010	16.033	14.617	73	282	1.061	2.507	907	278	1.304	19	5.470	4.552
13.	Jawa Tengah	16.828	10.905	9.091	96	321	1.398	2.257	565	5	1.629	58	3.666	1.689
14.	DI Yogyakarta	3.400	1.593	1.398	46	53	97	1.022	60	2	921	39	785	511
15.	Jawa Timur	22.228	15.403	12.497	177	352	2.377	3.116	1.024	438	1.587	66	3.710	2.450
16.	Banten	7.328	4.973	4.687	48	42	196	977	314	5	641	17	1.379	1.908
17.	Bali	4.968	3.041	2.571	60	105	305	1.070	104	0	832	134	856	906
18.	Nusa Tenggara Barat	3.449	1.374	1.011	24	63	276	1.451	134	14	1.089	214	624	199
19.	Nusa Tenggara Timur	3.316	882	663	33	72	115	1.462	56	5	1.300	101	971	255
20.	Kalimantan Barat	4.073	1.703	1.459	121	66	56	1.645	108	45	1.406	86	726	135
21.	Kalimantan Tengah	3.253	1.175	1.019	10	37	109	1.673	117	203	1.281	73	404	294
22.	Kalimantan Selatan	4.747	2.685	2.041	29	50	565	1.576	136	805	571	64	486	753
23.	Kalimantan Timur	9.376	4.862	3.754	15	231	862	4.024	639	3.166	0	219	491	0
24.	Kalimantan Utara	1.444	370	306	0	0	64	910	87	113	651	60	164	1.184
25.	Sulawesi Utara	2.528	1.013	837	54	33	88	1.173	53	17	1.027	77	342	291
26.	Sulawesi Tengah	2.902	905	739	6	20	139	1.558	54	31	1.222	251	439	136
27.	Sulawesi Selatan	6.106	3.271	2.902	94	89	185	1.591	170	18	1.180	223	1.244	310
28.	Sulawesi Tenggara	2.471	667	516	18	23	110	1.384	47	74	1.176	86	420	415
29.	Gorontalo	1.389	290	261	4	3	21	934	19	2	845	68	166	87
30.	Sulawesi Barat	1.474	274	228	12	2	31	992	23	1	896	73	209	0
31.	Maluku	2.133	391	297	63	2	29	1.453	51	7	1.178	217	289	172
32.	Maluku Utara	1.801	236	173	50	0	13	1.304	38	58	1.061	147	261	55
33.	Papua Barat	5.840	323	230	1	8	84	2.496	192	928	1.284	92	3.021	1.666
34.	Papua	11.806	913	633	49	16	214	3.256	197	321	2.278	460	7.637	1.181
JUMLAH		**242.706**	**127.497**	**107.892**	**1.690**	**3.224**	**14.692**	**61.589**	**13.330**	**9.359**	**35.289**	**3.610**	**53.620**	**34.889**

**) Data APBD*

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI MENURUT JENIS PENGELUARAN Tahun 2015, (Rp. Miliar)

No.	PROVINSI	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bagi Hasil	Belanja Bantuan Keuangan	Pengeluaran Tidak Terduga	BELANJA LANGSUNG	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	PEMBIAYAAN DAERAH	JUMLAH
1.	Aceh	5.644	899	0	0	644	250	503	3.344	4	6.506	435	4.046	2.025	462	12.611
2.	Sumatera Utara	5.886	1.055	0	0	2.094	0	2.331	406	0	2.073	151	990	932	536	8.496
3.	Sumatera Barat	2.359	673	0	0	895	0	669	122	0	1.663	100	775	788	304	4.326
4.	Riau	4.134	980	0	0	937	1	1.233	983	0	3.627	216	1.397	2.014	3.132	10.893
5.	Jambi	1.762	552	0	0	622	0	468	119	1	1.663	111	761	791	179	3.604
6.	Sumatera Selatan	3.109	777	0	0	1.638	0	116	576	1	2.081	5	1.035	1.041	840	6.030
7.	Bengkulu	1.069	494	0	0	362	0	212	2	0	1.213	108	626	479	154	2.436
8.	Lampung	2.585	701	0	0	1.092	6	763	22	0	2.197	90	1.237	869	118	4.899
9.	Bangka Belitung	1.081	312	0	0	258	1	303	207	0	789	81	474	234	343	2.213
10.	Kepulauan Riau	1.220	281	0	0	486	58	316	78	1	1.386	164	881	341	44	2.650
11.	DKI Jakarta	20.707	15.866	5	659	1.717	2.087	0	371	1	22.324	1.446	10.634	10.244	10.388	53.419
12.	Jawa Barat	19.256	1.671	0	19	6.827	3	6.406	4.330	0	5.161	223	2.639	2.299	4.144	28.562
13.	Jawa Tengah	12.396	2.187	0	0	3.745	19	4.130	2.303	12	5.425	294	2.616	2.515	697	18.518
14.	DI Yogyakarta	1.811	541	0	0	562	7	583	118	0	1.685	129	929	628	415	3.911
15.	Jawa Timur	15.075	1.806	3	0	5.413	8	4.667	3.150	28	7.871	662	4.951	2.258	1.732	24.679
16.	Banten	4.759	545	0	0	1.500	131	1.921	658	4	3.325	157	1.732	1.436	1.152	9.236
17.	Bali	3.483	734	0	10	809	152	1.088	690	0	1.516	84	870	562	875	5.874
18.	Nusa Tenggara Barat	1.731	564	0	0	686	31	435	13	2	1.633	122	677	835	282	3.647
19.	Nusa Tenggara Timur	2.045	506	0	0	1.171	21	318	27	1	1.284	90	587	607	242	3.570
20.	Kalimantan Barat	2.615	645	0	0	802	2	845	321	0	1.508	149	991	369	84	4.208
21.	Kalimantan Tengah	1.649	435	0	2	604	67	373	166	3	1.833	139	735	959	64	3.547
22.	Kalimantan Selatan	2.434	638	0	0	669	0	1.092	34	2	2.668	167	1.280	1.222	397	5.500
23.	Kalimantan Timur	4.251	943	0	0	967	4	2	2.331	3	4.348	311	2.026	2.011	777	9.376
24.	Kalimantan Utara	708	110	0	0	248	0	84	266	1	1.185	93	424	669	735	2.629
25.	Sulawesi Utara	1.409	521	0	1	548	0	328	10	0	1.284	23	504	757	126	2.819
26.	Sulawesi Tengah	1.526	531	0	0	578	2	308	107	0	1.427	144	841	443	84	3.037
27.	Sulawesi Selatan	3.798	913	28	0	1.222	0	1.176	459	0	2.351	188	1.314	849	266	6.416
28.	Sulawesi Tenggara	1.236	491	21	0	420	0	217	86	0	1.114	56	374	684	537	2.887
29.	Gorontalo	620	270	0	0	204	3	123	18	2	788	52	392	344	68	1.476
30.	Sulawesi Barat	490	240	3	0	234	14	0	0	0	896	0	450	445	88	1.474
31.	Maluku	1.069	466	1	0	389	12	183	16	2	1.211	6	662	543	24	2.305
32.	Maluku Utara	754	334	0	3	262	12	130	11	1	1.055	108	524	423	47	1.856
33.	Papua Barat	3.502	207	0	0	515	44	1.180	1.556	0	3.378	136	1.565	1.677	626	7.506
34.	Papua	6.980	919	0	0	835	94	291	4.830	11	5.416	191	2.360	2.865	590	12.987
	JUMLAH	**143.156**	**38.808**	**61**	**694**	**39.957**	**3.030**	**32.794**	**27.730**	**81**	**103.886**	**6.430**	**52.298**	**45.158**	**30.554**	**277.596**

REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN Tahun 2015, (Rp. miliar)

No.	Provinsi	PENDAPATAN	1. PAD	1.1. PAJAK	1.2. RETRIBU	1.3. HASIL	1.4. LAIN-LAIN	2. DANA PERIMB	2.1. BAGI	2.2. BAGI	2.3. DANA	2.4. DANA	2.5. PENDAP	B. PENERIM
1.	Aceh	12.365	2.060	1.253	10	177	621	1.572	158	21	1.264	130	8.732	289
2.	Sumatera Utara	10.441	4.955	4.446	35	259	214	5.219	486	25	1.605	3.104	267	536
3.	Sumatera Barat	4.625	1.964	1.522	19	90	333	2.577	130	4	1.262	1.180	84	251
4.	Riau	6.943	3.111	2.418	12	83	597	3.824	837	828	738	1.422	8	3.132
5.	Jambi	3.204	1.192	967	19	27	180	1.398	70	177	1.070	82	613	178
6.	Sumatera Selatan	6.583	2.546	2.379	18	63	86	2.506	656	631	1.071	148	1.530	45
7.	Bengkulu	2.356	732	526	5	18	182	1.616	53	25	1.071	468	8	136
8.	Lampung	5.589	2.369	2.052	7	27	283	3.159	150	36	1.322	1.652	61	103
9.	Bangka Belitung	1.950	574	508	9	6	52	1.126	50	93	906	78	249	338
10.	Kepulauan Riau	2.853	1.039	952	3	0	84	1.465	240	282	867	76	348	0
11.	DKI Jakarta	53.785	36.888	31.613	675	303	4.296	15.272	12.030	359	0	2.883	1.625	5.608
12.	Jawa Barat	27.694	17.043	15.727	74	322	919	10.623	1.495	283	1.248	7.596	28	3.650
13.	Jawa Tengah	19.633	11.541	9.673	106	340	1.422	8.017	779	114	1.860	5.264	74	418
14.	DI Yogyakarta	3.899	1.674	1.441	37	57	139	1.697	113	0	941	643	528	371
15.	Jawa Timur	24.962	15.818	12.772	134	364	2.548	9.039	1.486	364	1.673	5.516	105	1.565
16.	Banten	8.656	5.463	5.215	73	50	125	3.186	490	4	694	1.998	8	1.130
17.	Bali	5.249	3.041	2.593	64	172	212	1.867	172	0	850	845	341	675
18.	Nusa Tenggara Barat	3.950	1.360	1.003	30	73	254	2.583	328	47	1.118	1.090	7	199
19.	Nusa Tenggara Timur	3.876	995	745	40	77	132	2.840	88	3	1.337	1.411	41	165
20.	Kalimantan Barat	4.494	1.664	1.424	34	71	136	1.861	142	26	1.493	200	969	9
21.	Kalimantan Tengah	3.549	1.158	941	11	45	161	1.879	200	143	1.295	241	511	39
22.	Kalimantan Selatan	5.218	2.500	1.867	28	46	559	2.095	209	835	780	271	623	383
23.	Kalimantan Timur	7.986	4.029	3.127	19	167	715	3.942	691	2.154	80	1.016	15	227
24.	Kalimantan Utara	2.333	508	250	0	0	258	1.580	54	116	1.032	378	245	735
25.	Sulawesi Utara	2.885	981	838	65	21	56	1.881	91	11	1.066	713	23	101
26.	Sulawesi Tengah	3.176	939	776	7	24	132	2.211	65	37	1.273	836	26	77
27.	Sulawesi Selatan	7.163	3.450	3.080	87	107	177	3.700	232	83	1.394	1.991	13	130
28.	Sulawesi Tenggara	2.810	756	580	13	23	140	2.037	61	37	1.201	739	16	451
29.	Gorontalo	1.584	311	281	6	2	22	1.232	27	1	885	320	41	68
30.	Sulawesi Barat	1.689	278	247	14	3	13	1.409	28	1	925	455	2	126
31.	Maluku	2.745	601	346	106	53	97	2.050	54	5	1.261	730	94	87
32.	Maluku Utara	2.022	280	206	59	1	14	1.453	59	27	1.133	234	289	39
33.	Papua Barat	6.740	339	252	1	32	54	3.222	179	1.231	1.323	489	3.180	517
34.	Papua	12.568	1.020	667	58	54	241	3.595	277	487	2.502	328	7.953	503
JUMLAH		275.571	133.179	112.690	1.876	3.159	15.455	113.733	22.178	8.488	38.538	44.529	28.659	22.280

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI MENURUT JENIS PENGELUARAN Tahun 2015, (Rp. Miliar)

No.	Provinsi	BELANJA TIDAK	Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan	Belanja Bagi	Belanja Bantuan	Pengeluaran	BELANJA LANGSU	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	PEMBIAYAAN	JUMLAH
1.	Aceh	6.029	929	0	0	1.167	229	659	3.035	9	6.091	421	3.385	2.285	534	12.653
2.	Sumatera Utara	7.037	1.116	0	0	3.010	0	2.775	135	2	2.439	151	1.268	1.020	1.500	10.977
3.	Sumatera Barat	2.600	686	0	0	1.079	0	698	136	1	1.904	18	895	990	372	4.876
4.	Riau	4.458	1.008	0	0	1.304	7	1.193	945	2	4.274	288	1.951	2.036	1.343	10.075
5.	Jambi	1.649	570	0	0	678	0	400	2	0	1.645	122	577	946	87	3.382
6.	Sumatera Selatan	3.565	655	0	0	2.041	0	239	629	0	1.398	4	786	608	1.665	6.628
7.	Bengkulu	1.094	482	0	0	370	0	240	2	0	935	82	467	386	462	2.492
8.	Lampung	3.337	744	0	0	1.451	3	1.090	46	4	2.140	96	1.038	1.006	214	5.691
9.	Bangka Belitung	1.209	396	0	0	404	1	156	252	1	860	100	531	230	218	2.288
10.	Kepulauan Riau	1.493	305	0	0	419	14	743	13	0	1.289	159	842	288	70	2.853
11.	DKI Jakarta	22.785	17.044	12	904	2.161	2.453	0	210	1	24.344	2.316	13.063	8.965	12.264	59.392
12.	Jawa Barat	21.749	1.835	0	15	9.855	10	6.393	3.640	0	5.873	234	2.780	2.859	3.722	31.344
13.	Jawa Tengah	13.717	2.240	0	0	5.247	37	4.088	2.101	5	5.637	328	2.493	2.816	696	20.050
14.	D I Yogyakarta	1.999	571	0	0	727	2	612	87	0	1.849	137	876	837	422	4.270
15.	Jawa Timur	16.381	2.327	2	0	7.220	9	5.016	1.787	19	7.479	563	4.766	2.151	2.667	26.527
16.	Banten	5.836	594	0	0	2.494	132	2.064	553	0	3.090	134	1.621	1.334	861	9.786
17.	Bali	3.858	754	0	10	1.117	156	1.026	795	0	1.563	97	736	731	503	5.924
18.	Nusa Tenggara Barat	2.273	488	0	0	1.210	95	462	13	4	1.491	96	698	697	384	4.149
19.	Nusa Tenggara Timur	2.393	543	0	0	1.472	11	347	19	1	1.310	102	606	602	338	4.041
20.	Kalimantan Barat	2.728	662	0	0	1.044	0	681	340	0	1.592	109	1.008	475	183	4.504
21.	Kalimantan Tengah	1.633	503	0	1	582	33	510	4	0	1.542	165	594	784	413	3.588
22.	Kalimantan Selatan	2.311	718	0	0	652	0	940	1	0	2.868	109	1.410	1.348	422	5.601
23.	Kalimantan Timur	4.031	874	0	0	845	3	1.446	861	1	3.570	455	1.544	1.572	611	8.212
24.	Kalimantan Utara	997	182	0	12	203	2	189	408	0	1.560	112	650	797	512	3.068
25.	Sulawesi Utara	1.452	546	0	1	502	0	388	14	1	1.349	34	569	746	185	2.986
26.	Sulawesi Tengah	1.546	562	0	0	603	2	365	13	0	1.632	120	1.008	504	75	3.253
27.	Sulawesi Selatan	4.635	941	21	0	1.900	0	1.408	365	0	2.296	199	1.240	857	362	7.293
28.	Sulawesi Tenggara	1.467	531	19	0	579	0	284	53	0	1.197	61	384	752	596	3.260
29.	Gorontalo	767	286	0	0	329	2	127	22	2	829	62	470	297	57	1.653
30.	Sulawesi Barat	826	265	2	0	398	17	116	28	0	940	8	434	499	48	1.814
31.	Maluku	1.219	495	1	0	491	13	201	11	8	1.580	8	740	832	33	2.832
32.	Maluku Utara	776	354	0	5	305	5	103	4	0	1.248	102	554	593	37	2.061
33.	Papua Barat	3.290	227	0	0	897	24	460	1.681	0	3.175	140	1.589	1.447	792	7.257
34.	Papua	6.783	987	0	0	1.078	146	313	4.259	0	5.186	236	2.460	2.490	1.103	13.071
JUMLAH		157.922	41.421	56	948	53.832	3.405	35.734	22.466	62	106.177	7.367	54.033	44.777	33.753	297.851

REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN Tahun 2017, (Rp. miliar)

No.	PROVINSI	PENDAPATAN	1. PAD	1.1. PAJAK	1.2. RETRIBU	1.3. HASIL	1.4. LAIN-LAIN	2. DANA PERIMB	2.1. BAGI	2.2. BAGI	2.3. DANA	2.4. DANA	2.5. PENDAP	B. PENERIM
1.	Aceh	14.351	2.276	1.315	8	181	772	3.803	220	33	2.060	1.489	8.272	463
2.	Sumatera Utara	12.235	5.287	4.824	34	196	234	6.928	446	15	2.629	3.838	19	1.168
3.	Sumatera Barat	6.067	2.134	1.627	23	95	390	3.867	139	13	2.015	1.700	66	297
4.	Riau	7.902	3.360	2.755	13	124	468	4.539	724	750	1.458	1.608	3	1.345
5.	Jambi	4.305	1.581	1.316	20	29	215	2.723	189	202	1.398	935	1	278
6.	Sumatera Selatan	8.196	3.032	2.835	15	56	125	4.061	638	870	1.698	855	1.103	65
7.	Bengkulu	2.805	805	598	5	18	184	1.998	44	18	1.302	635	2	439
8.	Lampung	6.814	2.751	2.451	7	28	264	4.028	148	101	1.852	1.927	35	204
9.	Bangka Belitung	2.251	710	629	5	5	70	1.540	39	82	980	439	1	218
10.	Kepulauan Riau	3.252	1.095	981	3	3	108	2.156	198	329	1.060	570	1	273
11.	DKI Jakarta	64.824	43.901	36.501	624	489	6.287	18.969	16.606	242	0	2.122	1.953	8.712
12.	Jawa Barat	32.164	18.081	16.483	60	345	1.193	13.981	1.504	347	3.011	9.119	101	3.348
13.	Jawa Tengah	23.703	12.548	10.573	107	371	1.496	11.068	834	14	3.653	6.567	88	647
14.	DI Yogyakarta	5.085	1.852	1.584	41	71	155	2.380	98	0	1.314	967	853	194
15.	Jawa Timur	29.864	17.324	14.351	131	374	2.468	12.494	1.237	398	3.803	7.056	46	1.987
16.	Banten	9.706	5.756	5.487	19	50	200	3.930	636	4	1.059	2.230	20	559
17.	Bali	5.992	3.398	2.872	46	188	291	2.536	170	0	1.261	1.106	58	487
18.	Nusa Tenggara Barat	5.083	1.684	1.181	23	164	317	3.269	172	174	1.538	1.385	130	339
19.	Nusa Tenggara Timur	4.700	1.047	814	24	67	142	3.644	85	3	1.784	1.771	9	288
20.	Kalimantan Barat	5.389	1.946	1.660	39	72	174	3.420	125	45	1.721	1.529	23	173
21.	Kalimantan Tengah	4.101	1.342	1.092	12	54	185	2.591	123	249	1.574	644	168	312
22.	Kalimantan Selatan	5.605	2.849	2.232	25	46	546	2.712	155	480	1.107	970	44	397
23.	Kalimantan Timur	8.155	4.589	3.506	17	209	858	3.533	610	1.101	715	1.107	33	611
24.	Kalimantan Utara	2.224	483	306	0	0	176	1.647	47	123	1.185	291	94	362
25.	Sulawesi Utara	3.732	1.147	984	76	31	56	2.508	78	31	1.390	1.008	77	160
26.	Sulawesi Tengah	3.638	958	790	9	18	140	2.647	59	66	1.546	976	33	70
27.	Sulawesi Selatan	9.055	3.679	3.242	82	127	228	5.355	241	38	2.509	2.566	22	165
28.	Sulawesi Tenggara	3.535	806	614	16	39	137	2.676	49	23	1.563	1.041	53	499
29.	Gorontalo	1.773	348	310	6	3	30	1.417	22	4	998	393	8	57
30.	Sulawesi Barat	1.832	297	260	18	5	15	1.532	25	0	1.008	498	3	145
31.	Maluku	2.817	431	329	74	1	27	2.370	61	21	1.556	733	16	29
32.	Maluku Utara	2.276	327	241	66	0	20	1.880	29	32	1.266	553	68	36
33.	Papua Barat	7.055	467	307	1	0	159	3.314	109	1.454	1.412	339	3.274	784
34.	Papua	13.007	1.016	757	78	1	180	3.781	258	155	2.338	1.029	8.210	1.009
JUMLAH		**323.493**	**149.308**	**125.806**	**1.731**	**3.460**	**18.310**	**149.297**	**26.119**	**7.417**	**55.764**	**59.998**	**24.888**	**26.118**

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI MENURUT JENIS PENGELUARAN Tahun 2017, (Rp. Miliar)

No.	PROVINSI	BELANJA TIDAK	Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan	Belanja Bagi	Belanja Bantuan	Pengeluaran	BELANJA LANGSU	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	PEMBIAYAAN	JUMLAH
1.	Aceh	7.165	2.238	0	0	659	250	588	3.431	0	6.667	504	3.995	2.168	981	14.814
2.	Sumatera Utara	8.174	3.140	0	0	2.987	0	2.029	2	15	4.344	112	2.313	1.919	884	13.403
3.	Sumatera Barat	3.666	2.001	0	0	817	0	760	88	1	2.094	113	867	1.114	604	6.364
4.	Riau	4.939	1.979	0	0	1.149	3	1.198	609	0	4.250	374	1.935	1.941	58	9.247
5.	Jambi	2.246	1.075	0	0	496	0	674	2	0	1.887	175	815	896	451	4.583
6.	Sumatera Selatan	3.751	1.455	0	0	1.674	0	514	107	1	2.659	7	1.274	1.377	1.851	8.261
7.	Bengkulu	1.500	959	0	0	278	0	261	2	0	1.367	47	609	711	376	3.243
8.	Lampung	3.993	1.580	0	0	1.289	5	1.018	82	21	2.956	137	1.367	1.451	69	7.018
9.	Bangka Belitung	1.330	621	0	0	254	1	351	103	1	1.029	143	517	368	110	2.469
10.	Kepulauan Riau	1.705	819	0	0	374	3	488	21	0	1.333	221	923	189	487	3.525
11.	DKI Jakarta	23.737	17.625	32	1.406	1.112	3.203	0	344	16	27.329	2.621	13.662	11.046	22.470	73.536
12.	Jawa Barat	25.805	5.153	0	15	9.527	37	6.902	4.172	0	6.902	282	4.308	2.312	2.805	35.512
13.	Jawa Tengah	17.584	5.627	0	0	4.953	238	4.812	1.952	1	5.301	465	3.381	1.455	1.465	24.350
14.	DI Yogyakarta	2.567	1.258	0	0	574	1	647	78	8	2.354	171	1.137	1.047	359	5.280
15.	Jawa Timur	19.419	5.678	1	30	6.425	5	6.073	1.156	52	9.459	594	5.775	3.090	2.973	31.851
16.	Banten	6.364	1.643	0	0	1.947	127	2.135	511	1	3.149	195	1.605	1.350	752	10.265
17.	Bali	4.348	1.494	0	10	1.122	11	1.099	612	0	1.722	13	1.049	660	408	6.479
18.	Nusa Tenggara Barat	2.663	1.283	0	0	808	11	556	5	0	2.592	164	1.274	1.153	167	5.422
19.	Nusa Tenggara Timur	3.090	1.262	0	0	1.348	21	456	3	0	1.544	142	919	483	353	4.988
20.	Kalimantan Barat	2.793	1.116	0	0	970	1	703	2	2	2.466	123	1.388	955	302	5.562
21.	Kalimantan Tengah	2.167	1.115	0	1	445	38	557	7	3	1.520	180	775	565	726	4.413
22.	Kalimantan Selatan	2.934	1.300	0	0	516	0	1.053	2	64	2.931	182	1.361	1.388	137	6.002
23.	Kalimantan Timur	5.186	1.453	0	0	947	4	2.072	709	0	3.053	164	1.950	938	527	8.766
24.	Kalimantan Utara	957	399	0	21	208	2	134	193	0	1.493	149	689	654	136	2.585
25.	Sulawesi Utara	1.989	1.117	0	1	392	0	437	41	1	1.591	45	789	758	311	3.892
26.	Sulawesi Tengah	1.974	1.056	0	0	501	1	410	6	0	1.472	120	887	465	263	3.709
27.	Sulawesi Selatan	5.924	2.781	10	0	1.408	1	1.537	188	0	2.968	201	1.715	1.051	328	9.220
28.	Sulawesi Tenggara	2.092	1.149	12	0	596	0	300	34	1	1.462	90	469	903	479	4.033
29.	Gorontalo	937	552	0	0	233	2	143	7	1	801	72	474	255	92	1.830
30.	Sulawesi Barat	967	475	12	0	280	19	133	48	0	961	18	483	460	50	1.977
31.	Maluku	1.559	942	0	0	437	0	171	5	4	1.275	21	708	546	12	2.846
32.	Maluku Utara	994	559	0	5	306	4	120	1	0	1.264	100	603	562	53	2.312
33.	Papua Barat	4.400	465	2	0	781	45	1.373	1.734	0	2.619	171	1.678	770	820	7.839
34.	Papua	7.614	1.111	0	0	1.025	97	310	5.071	0	5.689	249	3.112	2.328	713	14.016
JUMLAH		**186.536**	**72.477**	**69**	**1.489**	**46.838**	**4.130**	**40.014**	**21.324**	**195**	**120.503**	**8.365**	**64.809**	**47.329**	**42.572**	**349.612**

REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN Tahun 2018, (Rp. miliar)

No.	Provinsi	PENDAPATAN DAERAH	PAD 2018	1.1. PAJAK DAERAH	*1.2. RETRIBUSI DAERAH*	*1.3. HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN*	*1.4. LAIN-LAIN P.A.D. YANG SAH*	*2. DANA PERIMBANGAN*	2.1. BAGI HASIL PAJAK	2.2. BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM	2.3. DANA ALOKASI UMUM	*2.4. DANA ALOKASI KHUSUS*	2.5. PENDAPATAN LAINNYA	*B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN*
1.	Aceh	14.622	2.325	1.372	18	193	742	3.865	209	19	2.060	1.576	8.433	832
2.	Sumatera Utara	13.038	5.732	5.215	38	318	162	7.296	530	54	2.629	4.082	10	830
3.	Sumatera Barat	6.432	2.321	1.716	17	122	466	4.023	162	21	2.015	1.825	88	265
4.	Riau	9.237	3.964	3.204	16	218	527	5.262	1.061	1.038	1.434	1.729	10	1.090
5.	Jambi	4.218	1.495	1.273	21	43	158	2.704	183	137	1.399	984	20	297
6.	Sumatera Selatan	6.866	3.608	2.978	15	70	546	3.169	688	783	1.698	0	88	35
7.	Bengkulu	2.993	994	709	16	24	245	1.494	50	20	1.302	122	505	442
8.	Lampung	7.508	3.180	2.910	7	28	235	4.293	164	76	1.857	2.195	36	640
9.	Bangka Belitung	2.491	776	649	24	9	95	1.684	56	132	1.019	478	30	384
10.	Kepulauan Riau	3.495	1.224	1.063	73	3	84	2.265	267	161	1.257	580	6	100
11.	DKI Jakarta	66.030	44.571	38.125	690	540	5.216	21.402	18.265	0	0	3.137	58	11.087
12.	Jawa Barat	31.961	17.585	16.222	57	359	947	14.345	1.528	192	2.879	9.746	31	2.000
13.	Jawa Tengah	24.414	12.995	10.840	105	449	1.601	11.363	947	7	3.653	6.756	55	650
14.	DI Yogyakarta	5.183	1.734	1.526	37	76	95	2.396	131	5	1.314	946	1.053	383
15.	Jawa Timur	29.024	15.676	12.728	76	380	2.491	13.271	1.611	696	3.813	7.151	78	1.744
16.	Banten	10.366	6.184	5.837	20	55	272	4.176	704	4	1.073	2.396	6	997
17.	Bali	5.981	3.348	2.969	46	139	194	2.586	215	0	1.269	1.102	46	683
18.	Nusa Tenggara Barat	5.231	1.720	1.272	32	126	290	3.281	189	100	1.538	1.454	230	84
19.	Nusa Tenggara Timur	4.882	1.062	823	24	72	142	3.800	85	2	1.827	1.885	21	87
20.	Kalimantan Barat	5.308	1.792	1.520	39	75	158	3.507	158	70	1.724	1.555	9	290
21.	Kalimantan Tengah	4.412	1.401	1.126	12	63	199	2.887	151	382	1.574	779	124	213
22.	Kalimantan Selatan	6.279	3.389	2.820	29	50	489	2.827	180	553	1.118	976	63	190
23.	Kalimantan Timur	8.366	4.281	3.320	26	217	718	4.048	680	1.483	768	1.118	37	200
24.	Kalimantan Utara	2.360	476	333	0	0	143	1.882	88	255	1.185	354	1	853
25.	Sulawesi Utara	3.779	1.168	1.000	100	42	26	2.586	107	38	1.428	1.014	24	452
26.	Sulawesi Tengah	3.579	914	783	5	22	105	2.647	97	86	1.493	970	18	55
27.	Sulawesi Selatan	9.482	3.918	3.449	91	143	235	5.516	265	46	2.509	2.695	49	218
28.	Sulawesi Tenggara	3.522	620	446	17	38	119	2.885	58	37	1.576	1.214	17	105
29.	Gorontalo	1.815	363	331	7	2	22	1.435	30	3	1.007	395	18	3
30.	Sulawesi Barat	1.869	334	283	27	8	17	1.535	23	0	1.025	487	0	57
31.	Maluku	3.464	808	352	96	36	324	2.638	56	39	1.670	872	18	22
32.	Maluku Utara	2.488	263	244	2	1	16	2.103	38	69	1.331	664	122	38
33.	Papua Barat	7.317	424	279	2	37	106	2.884	312	688	1.431	453	4.009	701
34.	Papua	13.549	1.009	761	119	54	75	4.554	322	439	2.570	1.222	7.986	594
JUMLAH		331.559	151.651	128.476	1.906	4.011	17.259	156.609	29.611	7.636	56.448	62.915	23.299	26.622

**) Data APBD*

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI MENURUT JENIS PENGELUARAN Tahun 2018, (Rp. Miliar)

	Provinsi	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bagi Hasil	Belanja Bantuan Keuangan	Pengeluaran Tidak Terduga	BELANJA LANGSUNG	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	PEMBIAYAAN DAERAH	JUMLAH
1.	Aceh	4.137	2.393	0	0	709	237	653	105	40	10.947	764	6.881	3.301	371	15.455
2.	Sumatera Utara	9.288	3.436	0	0	3.621	0	1.577	589	64	4.580	159	2.521	1.900	0	13.868
3.	Sumatera Barat	4.005	2.162	0	0	862	0	811	155	15	2.637	28	1.496	1.113	54	6.697
4.	Riau	5.794	2.351	0	0	1.438	12	1.500	483	11	4.533	4	2.745	1.785	0	10.326
5.	Jambi	2.439	1.205	0	1	505	1	593	131	4	2.076	189	893	994	0	4.515
6.	Sumatera Selatan	3.657	1.790	0	0	1.021	0	721	100	25	2.150	11	1.295	843	1.094	6.901
7.	Bengkulu	1.719	1.089	0	0	343	0	278	5	5	1.705	67	868	770	10	3.435
8.	Lampung	4.849	1.694	26	2	1.564	3	1.457	97	5	3.264	160	1.335	1.769	35	8.148
9.	Bangka Belitung	1.632	680	0	1	327	1	331	288	5	1.242	48	787	408	0	2.875
10.	Kepulauan Riau	1.473	639	0	0	354	4	472	2	2	2.121	266	1.126	729	1	3.595
11.	DKI Jakarta	30.994	20.127	51	4.211	1.802	4.183	0	272	348	40.176	3.145	20.036	16.995	5.948	77.117
12.	Jawa Barat	25.519	5.531	0	20	9.249	296	6.778	3.619	25	8.442	268	4.557	3.618	0	33.961
13.	Jawa Tengah	18.254	6.021	0	0	5.642	48	4.589	1.933	20	6.740	780	4.097	1.863	70	25.064
14.	DI Yogyakarta	2.714	1.335	0	0	642	1	634	83	20	2.830	244	1.400	1.186	22	5.566
15.	Jawa Timur	20.748	6.504	5	87	7.539	5	5.422	1.087	100	10.014	914	6.253	2.847	7	30.769
16.	Banten	6.704	1.758	0	0	2.154	68	2.213	461	51	4.658	273	2.196	2.189	0	11.362
17.	Bali	4.732	1.705	0	10	1.184	13	1.119	671	30	1.932	18	1.232	682	0	6.664
18.	Nusa Tenggara Barat	2.954	1.384	0	0	992	9	558	7	5	2.360	182	1.371	808	0	5.315
19.	Nusa Tenggara Timur	3.308	1.318	0	0	1.576	20	387	1	5	1.661	144	963	554	0	4.969
20.	Kalimantan Barat	2.979	902	0	0	1.332	1	737	2	5	2.453	135	1.533	786	166	5.598
21.	Kalimantan Tengah	2.447	1.295	0	1	469	30	617	25	10	2.178	202	924	1.053	0	4.625
22.	Kalimantan Selatan	3.431	1.429	0	0	598	0	1.396	1	6	3.038	339	1.413	1.287	0	6.469
23.	Kalimantan Timur	5.194	1.673	0	0	1.055	6	1.891	552	18	3.373	215	1.630	1.528	0	8.566
24.	Kalimantan Utara	1.093	547	7	22	166	8	134	205	5	2.062	164	716	1.181	58	3.213
25.	Sulawesi Utara	2.196	1.246	11	2	420	3	460	47	8	1.986	25	815	1.146	50	4.232
26.	Sulawesi Tengah	2.252	1.278	0	0	602	1	363	7	3	1.335	118	738	480	47	3.635
27.	Sulawesi Selatan	6.771	3.178	12	0	2.008	1	1.355	199	20	2.853	14	1.749	1.090	76	9.700
28.	Sulawesi Tenggara	2.227	1.259	7	0	695	0	216	30	20	1.334	99	470	764	67	3.627
29.	Gorontalo	967	577	0	0	198	34	153	1	5	851	72	446	332	0	1.818
30.	Sulawesi Barat	1.001	530	24	0	260	0	142	43	2	936	16	517	402	-11	1.926
31.	Maluku	1.891	971	0	0	707	2	187	17	8	1.593	23	818	752	2	3.486
32.	Maluku Utara	1.183	481	0	3	551	6	133	6	2	1.141	83	738	320	202	2.526
33.	Papua Barat	4.438	926	0	0	743	92	703	1.963	10	3.509	181	1.648	1.680	71	8.018
34.	Papua	9.083	1.673	0	0	2.196	185	387	4.628	14	5.172	216	2.524	2.432	-113	14.142
JUMLAH		202.072	81.086	141	4.359	53.521	5.268	38.969	17.814	915	147.883	9.565	78.729	59.589	8.225	358.180

**) Data APBD*